PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai dasar dan pedoman pembangunan daerah serta penjabaran visi dan misi Bupati dalam satu periode, maka perlu disusun suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Raja Ampat secara terencana, terstruktur dan berkesinambungan;
b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Raja Ampat periode tahun 2011-2015, merupakan penjabaran dan tahapan program/kegiatan pembangunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah periode tahun 2011-2030;
c. bahwa berdasarkan amanat pasal 150 ayat (3) huruf e Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu disusun suatu Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2015;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemerikasaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
30. Peraturan Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006-2011;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Distrik, Kelurahan dan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 60);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 67);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 68);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 69);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor..... tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 Nomor……., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor.....);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor..... tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 Nomor……., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor.....);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DAN
BUPATI RAJA AMPAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011 -2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Unit Satuan Kerja, dan Distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Raja Ampat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2030.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
11. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 1 (satu) Tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya/yang tersedia.
14. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
19. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
(2) RPJMD memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai :
    a. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
    b. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD.

Pasal 3

(1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dengan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dan mendorong partisipasi masyarakat.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD setiap Tahun.

Pasal 4

(1) SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan kedalam Renstra SKPD.
(2) Dalam menyusun Renstra SKPD wajib berpedoman pada Dokumen RPJMD karena merupakan satu kesatuan dokumen Perencanaan Pembangunan yang tidak dapat terpisahkan.
(3) SKPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dalam menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS SERTA KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJMD Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Peraturan Daerah ini akan ditinjau kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijakan dan/atau perubahan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur tentang sistim perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku sejak bulan Januari tahun 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
Pada tanggal, 22 Oktober 2012

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
MARCUS WANMA

Diundangkan di Waisai
Pada Tanggal, 22 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT,
CAP/TTD
Drs. FERDINAND DIMARA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19571212 198303 1 031

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

MOHLIYAT MAYALIBIT, SH
PENATA
NIP. 19791020 200312 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2015

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka memberikan arah, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah sesuai visi, misi Kepala Daerah, dan berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, maka perlu disusun suatu dokumen sistem perencanaan pembangunan daerah yang tersusun secara sistematis, teratur dan berkesinambungan. Dokumen sebagaimana dimaksud diatas adalah dokumen RPJMD dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2015 merupakan dokumen yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati, yang mana dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional dan memperhatikan RPJPD dan RPJP Provinsi Papua Barat, yang memuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2015 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Dokumen RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2015, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan RKPD Kabupaten Raja Ampat pada setiap tahun anggaran, yang mana penjabaran lebih lanjut disusun dalam Renja SKPD untuk tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk suatu perangkat Peraturan Daerah yang mengatur tentang RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

"Yang dimaksud dengan Visi Kabupaten Raja Ampat untuk Tahun 2011-2015 adalah "**Mewujudkan Kabupaten Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari Menuju Masyarakat yang Sehat, Berpendidikan, Sejahtera, dan Berkeadilan".** Visi ini merupakan hasil lanjutan dari semangat Tomolol, yang dideklarasikan oleh penjabat Bupati pada tanggal 13 Desember 2003. Semangat Tomolol merupakan pertemuan para pemangku kepentingan di Raja Ampat dan merupakan itikad baik dari semua pihak untuk berpartisipasi secara terbuka dalam menetapkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan di Kabupaten Raja Ampat sekaligus merancang program pembangunan berwawasan lingkungan. Terdapat lima kata kunci penting yang terkandung dalam rumusan visi Kabupaten Raja Ampat, yang sekaligus merupakan orientasi pembangunan Raja Ampat yakni **Bahari**, **Sehat**, **Berpendidikan**, **Sejahtera** dan **Berkeadilan, yang mana** dijelaskan dalam ruang lingkup sebagai berikut :

a. **Bahari**. Berkembangnya nilai-nilai dasar dalam berbagai dimensi kehidupan pemerintahan dan masyarakat yang menempatkan laut sebagai sumber kehidupan.

b. **Sehat**. Terwujudnya kondisi di mana tingkat kesehatan fisik maupun spiritual masyarakat Raja Ampat semakin membaik yang didorong oleh ketersediaan dan kemudahan akses pelayanan kesehatan.

c. **Berpendidikan**. Kondisi di mana tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Raja Ampat semakin meningkat yang didukung oleh ketersediaan dan kemudahan akses fasilitas pendidikan.

d. **Sejahtera.** Merujuk pada terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat terutama berupa kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peluang berusaha yang ditopang oleh ketersediaan infrastruktur dasar secara memadai.

e. **Berkeadilan.** Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Raja Ampat.

Selanjutnya Visi ini diwujudkan dan dijabarkan lebih lanjut kedalam Misi yakni ditetapkan sebanyak 4 (empat) Misi sebagai berikut :

a. Mengembangkan jaringan infrastruktur dasar yang memadai (M1);
b. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Raja Ampat (M2);
c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan partisipatif (M3);
d. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis potensi bahari dan sumberdaya lainnya (M4)."

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)

"Peraturan Bupati hanya mengatur hal-hal yang bersifat teknis, dan merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan diatasnya".

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 22 Oktober 2011

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2015

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang **1**
1.3. Hubungan Antar Dokumen **9**
1.4. Sistematika Penulisan **10**
1.5. Maksud dan Tujuan **13**

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERA

2.1. Aspek Geografis dan Demografis **16**
2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah 1 6
2.1.2. Topografi 1 8
2.1.3. Geologi 1 9
2.1.4. Tanah 20
2.1.5. Iklim 21
2.2. Demografis **22**
2.2.1. Penduduk 22
2.2.2. Ketenagakerjaan 24
2.3. Perekonomian Daerah **25**
2.3.1. PDRB Kabupaten Raja Ampat dan Perkembangannya 25
2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Raja Ampat 25
2.3.3. Struktur Perekonomian 26
2.3.4. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral 28
2.3.5. PDRB Perkapita 29
2.3.6. Sumbangan Sektoral terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi 31
2.4. Sosial Budaya **34**
2.4.1. Pendidikan 34
2.4.2. Kesehatan 36
2.5. Prasarana dan Sarana Daerah **40**
2.5.1. Jalan dan jembatan 40
2.5.2. Sarana perhubungan 41
2.5.3. Instalasi air bersih 42
2.5.4. Tenaga listrik 42
2.5.5. Telekomunikasi 43
2.5.6. Sarana dan prasarana pemerintahan 44
2.6. Pemerintahan Umum **44**
2.7. Kondisi yang Diharapkan **46**

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu **49**
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu **54**
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 54
3.2.2. Analisis Pembiayaan 57
3.3. Kerangka Pendanaan **59**

BAB IV
ANALISIS ISU STRATEGIS

4.1. Lingkungan Internal: Kekuatan dan Kelemahan **62**
4.2. Lingkungan Eksternal: Peluang dan Ancaman **68**
4.3. Strategi Implementasi Kebijakan **71**
4.3.1. Upaya Menggunakan Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang. 74

4.3.2. Upaya Menanggulangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang. 75
4.3.3. Upaya Menggunakan Kekuatan untuk Mengatasi Ancaman. 76
4.3.4. Upaya Memperkecil Kelemahan dan Mengatasi Ancaman. 77

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi **78**
5.2. Misi **80**
5.3. Tujuan dan Sasaan **80**
5.3.1. Mengembangkan jaringan infrastruktur dasar yang memadai (M1). 80
5.3.2. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Raja Ampat (M2). 82
5.3.3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan partisipatif (M3). 86
5.3.4. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis potensi bahari dan sumberdaya lainnya (M4). 88

BAB VI
ISU-ISU TRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Mengembangkan jaringan infrastruktur dasar yang memadai. 91
6.2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat Raja Ampat. 101
6.3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan partisipatif. 122
6.4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Bahari dan Sumberdaya Lainnya. 135

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS SERTA KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1. Urusan Wajib **219**
8.1.1. Pendidikan 219
8.1.2. Kesehatan 222
8.1.3. Lingkungan Hidup 228
8.1.4. Pekerjaan Umum 230
8.1.5. Penataan Ruang 236
8.1.6. Perencanaan Pembangunan 238
8.1.7. Perumahan 241
8.1.8. Kepemudaan dan Olah Raga 242
8.1.9. Penanaman Modal 244
8.1.10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 245
8.1.11. Kependudukan dan Catatan Sipil 246
8.1.12. Ketenagakerjaan 249
8.1.13. Ketahanan Pangan 251
8.1.14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 252
8.1.15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 253
8.1.16. Perhubungan 254
8.1.17. Komunikasi dan Informatika 262
8.1.18. Pertanahan 263
8.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 264
8.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 268
8.1.21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 282
8.1.22. Sosial 283

8.1.23. Budaya 286
8.1.24. Statistik 288
8.1.25. Kearsipan dan Perpustakaan 289
8.2. Urusan Pilihan **291**
8.2.1. Kelautan dan Perikanan 291
8.2.2. Pertanian 295
8.2.3. Kehutanan 301
8.2.4. Energi dan Sumber Daya Mineral 303
8.2.5. Pariwisata 306
8.2.6. Industri 310
8.2.7. Perdagangan 313
8.2.8. Transmigrasi 315

BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH

PELAKSANAAN **336**
10.1. Pedoman Transisi **336**
10.2. Kaidah Pelaksanaan **33**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penduduk Raja Ampat dan Kepadatannya MenurutDistrik (Bulan Maret Tahun 2011) 22
Tabel 2.3. Proyeksi Penduduk Raja Ampat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2007-2009 23
Tabel 2.4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Raja Ampat 26
Tabel 2.5. Peranan Sektoral terhadap Pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 (%) 27
Tabel 2.6. Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten RajaAmpat Tahun 2009 ADH Konstan Tahun 2000 (%)29
Tabel 2.7. Indeks Perkembangan dan Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Raja Ampat ADH Berlaku (Tanpa Migas) 30
Tabel 2.8. Indeks Perkembangan dan Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Raja Ampat ADH Berlaku (Dengan Migas) 30
Tabel 2.9. Sumbangan Sektoral terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 (Tanpa Migas) 32
Tabel 2.10. Sumbangan Sektoral terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 (Dengan Migas) 33
Tabel 2.11. Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Raja Amp t Tahun 2006 – 2010 36
Tabel 2.12. Jumlah Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan Kabupaten Raja Ampat
Tahun 2006 – 2010 36
Tabel 2.13. Sarana dan Prasarana Kesehatan Termasuk Tenaga Kesehatan 38
Tabel 2.14. Jumlah Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan 39
Tabel 2.15. Kondisi Jalan di Kabupaten Raja Ampat 40
Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006 s/d Tahun 2010 Kabupaten Raja Ampat (Rp dalam jutaan) 52
Tabel 3.2. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tahun 2006 s/d Tahun 2010 Kabupaten Raja Ampat (Rp dalam jutaan) 55
Tabel 3.3. Analisis Proporsi Belanja Modal Kabupaten Raja Ampat (Rp dalam jutaan) 57
Tabel 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Raja Ampat 1 43
Tabel 7.1. Kebijakan Umum Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Program Pembangunan Daerah 1 72
Tabel 7.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik 1 80
Tabel 7.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan dalam Perbaikan Tatakelola pemerintahan (***good governance***) 1 93
Tabel 7.4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan dalam Pembangunan ekonomi berbasis potensi bahari dan sumberdaya 1 99
Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat 219
Tabel 8.2. Indikasi Rencana Program Prioritas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat 222
Tabel 8.3. Indikasi Rencana Program Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat 228
Tabel 8.4. Indikasi Rencana Program Prioritas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat 230
Tabel 8.5. Indikasi Rencana Program Prioritas Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat 236
Tabel 8.6. Indikasi Rencana Program Prioritas Perencanaan Pembangunan Kabupaten Raja Ampat 238
Tabel 8.7. Indikasi Rencana Program Prioritas Perumahan Kabupaten Raja Ampat 241
Tabel 8.8. Indikasi Rencana Program Prioritas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Raja Ampat 242
Tabel 8.9. Indikasi Rencana Program Prioritas Penanaman Modal Kabupaten Raja Ampat 244
Tabel 8.10. Indikasi Rencana Program Prioritas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Raja Ampat 245
Tabel 8.11 . Indikasi Rencana Program Prioritas Kependudukan dan Catatan Spil Kabupaten Raja Ampat 246
Tabel 8.12. Indikasi Rencana Program Prioritas Ketenagakerjaan Kabupaten Raja Ampat 249
Tabel 8.13. Indikasi Rencana Program Prioritas Ketahanan Pangan Kabupaten Raja Ampat 251
Tabel 8.14. Indikasi Rencana Program Prioritas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Raja Ampat 252
Tabel 8.15. Indikasi Rencana Program Prioritas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Raja Ampat 253
Tabel 8.16. Indikasi Rencana Program Prioritas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat 254
Tabel 8.17. Indikasi Rencana Program Prioritas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Raja Ampat 262
Tabel 8.18. Indikasi Rencana Program Prioritas Pertanahan Kabupaten Raja Ampat 263
Tabel 8.19. Indikasi Rencana Program Prioritas Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Raja Ampat 264

Tabel 8.20. Indikasi Rencana Program Prioritas Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kabupaten Raja Ampat 268
Tabel 8.21. Indikasi Rencana Program Prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Raja Ampat 282
Tabel 8.22. Indikasi Rencana Program Prioritas Sosial Kabupaten Raja Ampat 283
Tabel 8.23. Indikasi Rencana Program Prioritas Budaya Kabupaten Raja Ampat 286
Tabel 8.24. Indikasi Rencana Program Prioritas Statistik Kabupaten Raja Ampat 288
Tabel 8.25. Indikasi Rencana Program Prioritas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Raja Ampat 289
Tabel 8.27. Indikasi Rencana Program Prioritas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat 29
Tabel 8.28. Indikasi Rencana Program Prioritas Pertanian Kabupaten Raja Ampat 295
Tabel 8.29. Indikasi Rencana Program Prioritas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat 301
Tabel 8.30. Indikasi Rencana Program Prioritas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Raja Ampat 303
Tabel 8.31. Indikasi Rencana Program Prioritas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat 306
Tabel 8.32. Indikasi Rencana Program Prioritas Industri Kabupaten Raja Ampat 310
Tabel 8.33. Indikasi Rencana Program Prioritas Perdagangan Kabupaten Raja Ampat 313
Tabel 8.34. Indikasi Rencana Program Prioritas Transmigrasi Kabupaten Raja Ampat 315
Tabel 9.1. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Kabupaten Raja Ampat 318

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Raja Ampat 1 7
Gambar 2.2. Piramida Penduduk Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 24
Gambar 5.1. Kerangka Rencana Prioritas Pembangunan Kabupaten Raja Ampat 2011 -2015 90

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Raja Ampat masih berusia sangat muda karena baru dibentuk pada Tahun 2003 dari Kabupaten Sorong Provinsi Irian Jaya Barat. Sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Raja dalam memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya Ampat di satu sisi dihadapkan pada realitas keterbatasan dalam banyak aspek terutama infrastruktur, sumberdaya manusia, dan kelembagaan. Namun pada sisi lainnya, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bagaimanapun juga harus mampu menunjukkan kinerjanya. Menunjukkan kinerja yang tinggi di tengah keterbatasan yang ada merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten aja Ampat. Namun Kabupaten Raja Ampat memiliki potensi yang luar biasa, terutama di sektor kelautan dan pariwisata, dan selama ini belum terkelola dan dimanfaatkan dengan baik. Otonomi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan semakin menguatnya persaingan global juga dapat menjadi peluang bagi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk memajukan daerah dan mensejahterahkan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memerlukan perencanaan yang bersifat strategis, berkelanjutan, dan komprehensif untuk dapat mengelola kelemahan, potensi, dan peluang yang dimilikinya agar dapat memajukan daerah dan mensejarahkan masyarakatnya. Dengan demikian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini merupakan kebutuhan, bukan sekedar menjalankan amanat peraturan perundangan. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga memiliki kebutuhan lain sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mensinergikan agenda pembangunannya dengan agenda pembangunan Nasional dan regional.

RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 –2015 merupakan perencanaan pembangunan Kabupaten Raja Ampat untuk kurun waktu lima tahun yang memuat visi, misi, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan dan program pembangunan daerah serta kaidah pelaksanaannya. Penyusunan Kabupaten Raja Ampat ini didasarkan pada Visi dan Misi Bupati Raja Ampat dengan memperhatikan berbagai perencanaan jangka panjang dan menengah pada level Nasional dan Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat, serta rencana penataan ruang dan wilayah dari daerah sekitar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Raja Ampat. Proses penyusunan RPJMD ini dilakukan melalui serangkaian forum partisipasi yang memfasilitasi actor dan pemangku kepentingan pembangunan, termasuk masyarakat, di Kabupaten Raja Ampat untuk berperan serta.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan hukum yang paling utama dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Raja Ampat. RPJMD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
    Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Distrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 09 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006 – 2011 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Distrik, Kelurahan dan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 60);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 67);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 68);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 69);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 81);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor ……Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 -2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor …..).

1.2. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis mengikuti hierarki pemerintahan dan jangka waktu berlakunya dokumen. Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya. Selain itu, dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek.

Penyusunan rencana pembangunan di level pemerintah daerah dituangkan ke dalam sejumlah dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) yang berlaku 20 tahun, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berlaku 5 tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang berlaku 1 tahun. RPJMD Kabupaten Raja Ampat, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Raja Ampat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) wilayah regional setempat. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Raja Ampat ini juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Raja Ampat, dan RTRW Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Raja Ampat. RPJMD Kabupaten Raja Ampat ini kemudian akan menjadi pedoman dan dijabarkan dalam Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Penyusunan RAPBD didasarkan dan diturunkan dari RKPD dan RKA SKPD. Semua itu dilakukan untuk melakukan sikronisasi program antar sektor dan antar wilayah.

1.3. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Raja Ampat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1- Pendahuluan

Bab ini berisi uraian latarbelakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Raja Ampat.

Bab 2- Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab ini berisi uraian mengenai kondisi nyata dan kondisi yang diharapkan di Kabupaten Raja Ampat dari aspek geografis, perekonomian, sosial budaya, prasarana dan sarana, dan pemerintahan umum. Uraian pada Bab ini ditujukan untuk mengidentifikasi
kondisi Kabupaten Raja Ampat pada berbagai bidang dan aspek kehidupan yang akan diintervensi melalui sejumlah kebijakan dan progam dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Bab 3- Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisi uraian mengenai arah pengelolaan pendapatandaerah, arah pengelolaan belanja daerah, arah pembiayaan daerah, dan kebijakan umum anggaran daerah

Bab 4- Analisis Isu Strategis
Bab ini menguraikan analisis strategis, baik terhadap lingkungan internal dan eksternal. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses perumusan arah kebijakan keuangan daerah serta kebijakan umum dan program pembangunan daerah.

Bab 5 - Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan
Bab ini memaparkan rumusan Visi, Misi, dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan di Kabupaten Raja Ampat.

Bab 6- Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Bab ini berisi rumusan strategi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam mengelola
pembangunan selama lima tahun ke depan.

Bab 7- Kebijakan Umum dan Program PembangunanDaerah
Berisi rumusan kebijakan umum dan program yang disusun secara khusus untuk mendukung setiap misi yang ditetapkan.

Bab 8- Indikasi Rencana Program Prioritas serta Kebutuhan Pendanaan
Memaparkan rencana program prioritas yang ditetapkan di antara program-program pembangunan lainnya beserta kebutuhan pembiayaannya.

Bab 9- Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Berisi rumusan indikator kinerja penyelenggaraan pembangunan berdasarkan arah, sasaran, dan target pencapaian dari setiap kebijakan dan program pembangunan.

Bab 10 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
Berisi uraian pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan dan perencanaan penganggarandalam rangka.

1.4. Maksud dan Tujuan

Pembangunan jangka menengah Kabupaten Raja Ampat 2011 – 2015 bersifat melanjutkan dan memperbarui tahap pembangunan sebelumnya. Keberlanjutan dan pembaruan tahapan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional dengan penyesuaian-penyesuaian menurut kondisi, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat di Daerah. RPJMD Kabupaten Raja Ampat didasarkan pada dan ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan yang bersifat spesifik di Kabupaten Raja Ampat sebagai daerah hasil pemekaran, daerah kepulauan, daerah yang memiliki kesenjangan dengan daerah lain pada umumnya, dan daerah yang memiliki potensi yang besar di bidang pariwisata, dalam porsinya sebagai rencana daerah berjangka menengah (5 tahunan). Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 -2015 dimaksudkan agar menjadi arah dan pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengembangkan Rencana Strategis masing-masing sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Raja Ampat dapat lebih terintegrasi, sinergis, dan terarah. Dengan adanya RPJMD ini diharapkan terjadi koordinasi yang lebih baik di antara aktor dan pemangku kepentingan pemerintahan (termasuk masyarakat dan dunia usaha) di Kabupaten Raja Ampat.

Upaya pencapaian Visi, Misi, dan target pembangunan Kabupaten Raja Ampat juga dapat dijabarkan lebih lanjut. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Raja Ampat dapat terbangun. Dengan adanya arah dan pedoman ini maka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Raja Ampat dalam lima tahun ke depan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan masyarakat madani di Raja Ampat, yaitu masyarakat yang mandiri, sejahtera, berpendidikan, berbudaya, dan bermartabat.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Rencana pembangunanjangka panjang daerah dapat diformulasikan dengan baik apabila informasi mengenai kondisi daerah dapat teridentifikasi dan terdeskripsikan dengan baik. Deskripsikondisi daerah menjadi basis penyusunan rencana pembangunan daerah, yaitumemberikan landasan bagi analisis lingkungan dan perumusan isu-isu strategis. Deskripsimengenai kondisi daerah pada Bab ini terbagi ke dalam empat aspek, yaitu aspekgeografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Tiga aspek yang disebutkan terakhir lebih banyak memaparkan apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan capaian-capaian yang relevan dengan masing-masing aspek.

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

Kepulauan ini berada di bagian paling Barat pulau induk Papua yang membentang di area seluas kurang lebih 46,108 Km2. Secara geografis, Kabupaten Raja Ampat berposisi pada koordinat 00° 30,33” Lintang Utara - 01° Lintang Selatan dan 124° 30,00 - 131° 30 Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Raja Ampat adalah sebagai berikut:

a. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Seram Utara, Provinsi Maluku.
b. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.
c. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, Provinsi Irian Jaya Barat.
d. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan samudra pasifik.

Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Raja Ampat

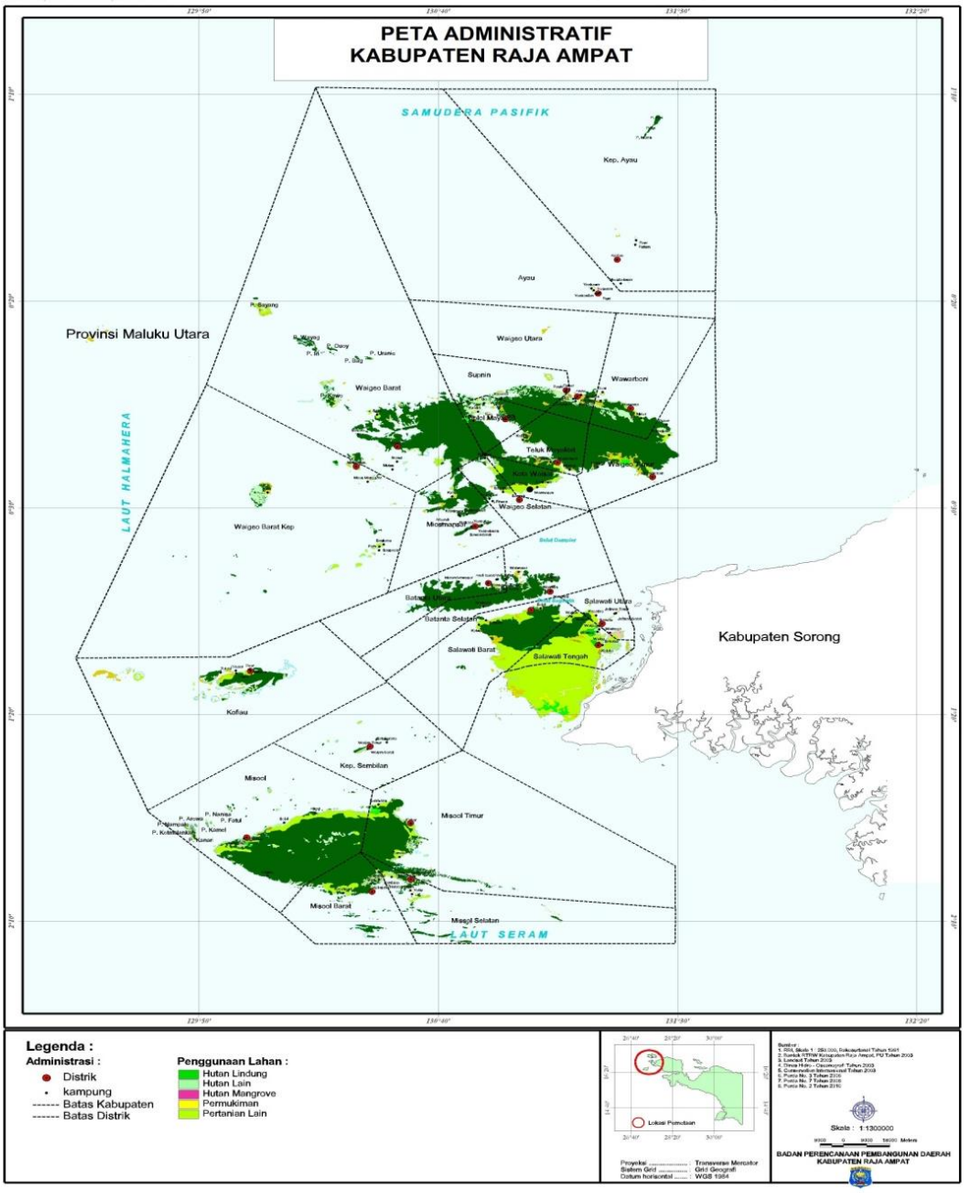

2.1.2. Topografi

Sebagai wilayah kepulauan, daerah ini memiliki sekitar 610 pulau besar dan kecil, atol dan taka dengan panjang garis pantai 753 km. Sementara ini hanya 34 pulau saja yang berpenghuni. Perbandingan wilayah darat dan laut adalah 1:6, dengan wilayah perairan yang lebih dominan. Dilihat dari luasnya, pulau-pulau di Raja Ampat memiliki luas yang sangat bervariasi. Terdapat empat pulau besar, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati dan Pulau Misool. Masing-masing pulau memiliki karakteristik topografi yang berlainan antara lain:

1. Pulau Waigeo merupakan pulau yang sebagian besar topografinya bergunung dan berbukit pada bagian poros tengah sampai ke daerah pesisir. Selain itu juga terdiri dari
   pasir dan karang-karang batu. Selain itu Pulau Waigeo dikelilingi pulau-pulau sedang dan kecil yang sebagian besar telah dihuni oleh penduduk. Bagian Barat dan Selatan Pulau Waigeo lebih banyak dikelilingi oleh pulau-pulau lain apabila dibandingkan dengan bagian Timur dan Utara.
2. Pulau Batanta sebagian besar topografinya terdiri dari pegunungan dan perbukitan yang memanjang dari bagian tengah sampai ke bagian pesisir. Pada bagian pesisir pantai jarang ditemukan pasir putih. Pulau ini hanya dikelilingi oleh 8 (delapan) pulau kecil.
3. Pulau Salawati dikelilingi oleh pulau-pulau kecil terutama pada bagian Selatan dan Timur. Dari bagian tengah sampai dengan pesisir dikelilingi oleh gunung dan perbukitan yang membujur ke semua arah.
4. Pulau Misool memiliki topografi yang hampir sama dengan ketiga pulau besar lainnya. Pada bagian Barat dan Selatan dikelilingi oleh pulau-pulau kecil.

Sedangkan bagian Utara terbentang pulau-pulau kecil yang membujur dari arah Timur ke Barat yang jarak tempuhnya dari Misool lebih dari satu jam. Bagian tengah terdapat pegunungan dan pada bagian pesisir terdapat bukit-bukit berbatuan terutama pada bagian Barat dan Selatan Pulau Misool. Di luar empat pulau besar terdapat pulau-pulau sedang dan kecil yang berjumlah kurang lebih 600 pulau. Pulau-pulau tersebut hanya terdiri dari batu karang sehingga masyarakat yang mendiami pulau-pulau tersebut hanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan tidak bisa bercocok tanam seperti penduduk di pulau-pulau yang menjadi bagian dari Distrik Kepulauan Ayau.

2.1.3. Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Raja Ampat didominasi oleh formasi batuan kapur yang terbentuk pada masa kuarter. Jenis tanah yang ada disusun oleh batuan dabas, neogen dan batu gamping yang membentuk bukit-bukit rendah. Pada umumnya batu gamping tersebut bersifat padat dan mengandung pasir seperti batu gamping facet, daram, atkari, zaag, openta, sagewin, dan bogal. Sumber utama batu gamping berasal dari terumbu gamping yang berasal dari binatang laut. Perbedaan posisi pembentukan batuan ini menimbulkan perbedaan dalam proses sedimentasinya sehingga terbentuk berbagai macam batu gamping tersebut.

Jenis batuan lain di wilayah ini adalah batuan sedimenk onglomerat yang komposisinya terdiri dari bahan yang tahan lapuk berupa konglomerat aneka bahan. Batuan Breksi Yeffman dengan butiran yang lebih besar, fragmen menyudut yang umumnya terdiri dari fragmen batuan hasil rombakan, dalam massa dasar yang lebih halus atau tersemenkan. Golongan batuan sedimen berupa pasir juga terdapat di wilayah ini dengan jenis batu pasir daram. Selain itu juga terdapat batuan sedimen serpih yang mempunyai sifat seperti lempung. Batuan serpih dimana pada bidang-bidang lapisan memperlihatkan belahan yang menyerpih dengan klasifikasi serpih letita juga terdapat di wilayah ini.

Beberapa formasi batuan yang terdapat di wilayah ini adalah Formasi Yaben, Formasi Klasafet, Formasi Waigeo, Formasi Rumai, Formasi Yarefi, Formasi Demu, dan Formasi Fafanlaf. Batu metamorf yang ada adalah batuan malihan ligu sedangkan batuan beku terdapat di batuan Gunung Api Batanta dan batuan Gunung Dore. Wilayah ini juga termasuk daerah rawan gempa karena dilalui sesar Sorong yaitu yang menjulur dari daratan Papua bagian Utara menyeberangi Selat Sele dan menuju bagian Utara Pulau Salawati. Lebarnya 10 km dan arahnya ke Barat dan Barat Daya.

2.1.4. Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Raja Ampat meliputi jenis dystropepts, eutropepts, haplorthox, humitropepts, rendolls, tropaquepts, tropudalfts, dan tropudulfts. Dystropepts merupakan jenis tanah yang paling dominan di Pulau Waigeo, Pulau Batanta, dan Pulau Salawati. Jenis tanah lainnya yang cukup banyak terdapat di wilayah ini adalah jenis tanah rendolls yang tersebar di Pulau Waigeo, Pulau Misool, dan Pulau Batanta. Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Raja Ampat secara umum berkisar 0-100 cm, dengan rincian kedalaman efektif tanah di Distrik Misool dan di Distrik Waigeo Selatan antara 0 – 25 cm sedangkan di Pulau Salawati, Waigeo Utara dan Waigeo Selatan berkisar antara 50-100 cm.

2.1.5. Iklim

Karena posisinya berada di bawah garis katulistiwa, Kabupaten Raja Ampat mempunyai iklim tropis yang lembab dan panas dengan suhu udara terendah 23,60C dan suhu tertinggi 30,70C. Temperatur rata-rata sebesar 27,20C dengan kelembaban udara rata-rata 87%. Curah hujan yang terjadi adalah 4.306 milimeter dan merata sepanjang tahun dengan jumlah hari hujan antara 19 – 29 hari setiap bulannya. Kondisi yang demikian menyebabkan daerah ini memiliki tipe iklim A menurut pembagian tipe iklim yang dikembangkan oleh Oldeman. Angin Musim Tenggara yang bertiup pada Mei hingga November berasal dari Benua Australia, dimana matahari berada di Utara garis khatulistiwa. Hal itu menyebabkan daerah ini memiliki tekanan udara yang rendah dan juga sifat tidak banyak mengandung uap air karena daratan Australia Utara merupakan daerah savana yang tandus. Antara Desember hingga April, bertiup Angin Musim Barat Laut. Berbeda dengan sifat Angin Musim Tenggara, angin ini bertiup dari daratan Asia dan banyak mengandung uap air karena daerah yang dilalui cukup luas dan melewati sebagian samudera dan lautan sehingga banyak mendatangkan hujan terutama untuk daerah pantai di bagian Utara Papua termasuk wilayah Kabupaten Raja Ampat.

2.2. Demografis

2.2.1. Penduduk

Pada 2011 , jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat adalah 60.386 jiwa dengan komposisi 55,4% merupakan laki-laki dan 44,6% perempuan (Tabel 2.1). Dilihat dari struktur usia penduduk, komposisi penduduk Kabupaten Raja Ampat tergolong penduduk muda (Tabel 2.2). Persentase penduduk pada kelompok umur muda lebih besar daripada kelompok umur tua. Pada kelompok umur 0 – 4 tahun tercatat 12,5 persen penduduk sedangkan pada kelompok umur 75 tahun atau lebih tercatat 0,31 persen.

Tabel 2.1. Penduduk Raja Ampat dan Kepadatannya Menurut Distrik (Bulan Maret Tahun 2011)

No	Kecamatan	LUAS DAERAH (Km²)	PENDUDUK			KEPADATAN per Km²
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	MISOOL SELATAN	619, 45	2.785	2.231	5.016	8, 10
2	MISOOL BARAT	268,21	777	706	1.483	5,53
3	MISOOL UTARA	420,85	1.180	990	2.170	5,16
4	KOFIAU	845,07	1.494	1.293	2.787	3,30
5	MISOOL TIMUR	532,34	1.776	1.392	3.168	5,95
6	KEPULAUAN SEMBILAN	163,67	910	793	1.703	10,41
7	SALAWATI UTARA	240,95	1.566	1.340	2.906	12,06
8	SALAWATI TENGAH	160,63	1.195	1.059	2.254	14,03
9	SALAWATI BARAT	133,86	550	478	1.028	7,68
10	BATANTA SELATAN	205,25	1.028	861	1.889	9,20
11	BATANTA UTARA	250,86	968	808	1.776	7,08
12	WAIGEO SELATAN	310,76	1.226	1.107	2.333	7,51
13	KOTA WAISAI	54,84	7.648	5.345	12.993	236,92
14	TELUK MAYALIBIT	106,81	632	562	1.194	11.18
15	TIPLOL MAYALIBIT	167,06	626	534	1.160	6,94
16	MEOSMANSAR	224,08	1.320	1.135	2.455	10,96
17	WAIGEO BARAT	1.669,84	1.325	928	2.253	1,35
18	WAIGEO BARAT KEP.	939,29	1.382	1.167	2.549	2,71
19	WAIGEO UTARA	95,15	1.009	852	1.861	19,56
20	WARWABOMI	61,67	866	737	1.603	25,99
21	SUPNIN	63,43	843	550	1.393	21,96
22	KEPULAUAN AYAU	203,42	792	688	1.480	7,28
23	AYAU	135,61	605	615	1.220	9,00
24	WAIGEO TIMUR	161,35	965	747	1.712	10,61
	JUMLAH TOTAL	**8.034,44**	**33.468**	**26.918**	**60.386**	**7,52**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 2.3. Proyeksi Penduduk Raja Ampat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2007-2009

No	Kelompok Umur	2007		2008		2009	
		L	P	L	P	L	P
1.	0 - 4	2617	2639	2680	2667	2721	2725
2.	5 - 9	2611	2559	2653	2576	2675	2618
3.	10 - 14	2546	2048	2578	2063	2597	2098
4.	15 - 19	2202	1881	2224	1891	2236	1916
5.	20 - 24	1808	1872	1833	1883	1851	1918
6.	25 - 29	1735	1824	1753	1832	1762	1859
7.	30 - 34	1740	1647	1756	1653	1759	1680
8.	35 - 39	1695	1467	1709	1475	1719	1502
9.	40 - 44	1506	1197	1522	1204	1532	1228
10.	45 - 49	1160	853	1177	860	1194	888
11.	50 - 54	792	588	818	597	852	623
12.	55 - 59	461	344	482	353	487	388
13.	60 - 64	225	177	252	189	276	216
14.	65 - 69	98	74	107	78	113	91
15.	70 - 75	64	51	70	55	79	64
16.	75 +	101	72	105	75	112	81
	Jumlah	**21.361**	**19. 293**	**21. 719**	**19. 451**	**21. 965**	**19. 895**
	Total		**40 654**		**41 170**		**860**

Sumber: BPS Raja Ampat

Komposisi usia penduduk Kabupaten Raja Ampat membentuk Piramida Penduduk Muda yang menggambarkan sebagian besar penduduk Kabupaten Raja Ampat berusia antara 10 tahun sampai dengan 44 tahun (Gambar 2). Secara garis besar itu menunjukkan potensi tenaga kerja di Kabupaten Raja Ampat sangat besar sehingga pemerintah perlu bekerja keras untuk menyediakanfasilitas dan lapangan pekerjaan yang dapat menampung penduduk usia produktif.

Gambar 2.2. Piramida Penduduk Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009

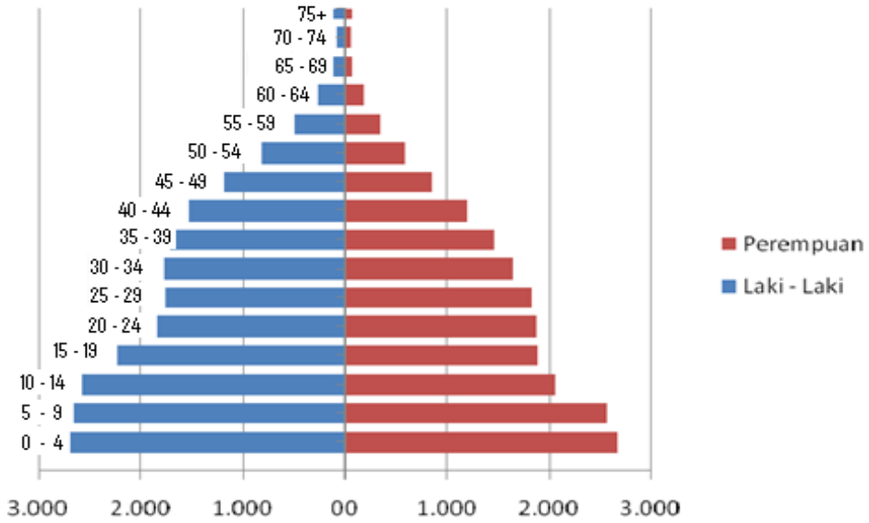

2.2.2. Ketenagakerjaan

Berdasarkan jumlah penduduk usia produktif yang dominan di Kabupaten Raja Ampat menunjukkan tingkat pencari kerja yang relatif tinggi, rata-rata pencari kerja berada pada usia 30 sampai dengan 54 tahun. Menurut Disnakertrans Kabupaten Raja Ampat, rata-rata penyerapan tenaga kerja tiap tahun baru mencapai 27,7% dengan spesifikasi pendidikan strata satu (S1) 89% dan MA 11 %. Penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sector pemerintahan, yaitu mencapai 90%.

2.3. Perekonomian Daerah

2.3.1. PDRB Kabupaten Raja Ampat dan Perkembangannya

Pada Tahun 2009 terjadi pertumbuhan Nilai PDRB nominal (atas dasar harga berlaku) tanpa migas sebesar 11 ,20 persen, yaitu sdari Rp 375,63 milyar pada 2008 menjadi Rp 417,71 milyar pada 2009. Apabila dibandingkan dengan nilai pada Tahun Dasar 2000 berarti mengalami perkembangan 2,55 kali karena nilai PDRB pada Tahun 2000 sebesar Rp 163,72 milyar. Sedangkan nilai PDRB riil mencapai Rp 251,89 milyar dengan indeks perkembangan 153,86 yang berarti nilainya 1,5 kali PDRB riil tahun dasar 2000. PDRB nominal dengan minyak dan gas bumi pada Tahun 2009 mempunyai nilai Rp 916,32 milyar dengan indeks perkembangan 559,69. Sedangkan besarnya PDRB riil yaitu Rp 558,92 milyar dengan indeks perkembangan 333,23.

2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Raja Ampat

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu, dengan demikian indikator ini dapat dipakai juga untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2000 juga dapat mencerminkan pertumbuhan riil produksi barang dan jasa yang terjadi selama periode satu tahun pada suatu wilayah tertentu. Laju pertumbuhan riil produksi barang dan jasa tersebut yang menggambarkan besarnya laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Raja Ampat tanpa subsektor minyak dan gas bumi pada Tahun 2009 mempunyai laju pertumbuhan sebesar 5,73 persen, yang sebelumnya pada Tahun 2008 sebesar 5,71 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan migas pada Tahun 2009 mempunyai laju pertumbuhan sebesar 2,59 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,92 persen. Hal ini disebabkan karena terjadinya penambahan volume produksi untuk subsektor minyak bumi dan gas pada Tahun 2009.

Tabel 2.4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Raja Ampat

Tahun	Laju Pertumbuhan (%)	
	Tanpa Migas	Dengan Migas
2005	0,20	162,66
2006	7,85	0,22
2007	6,54	2,74
2008	5,71	2,92
2009	5,73	2,59

Dari tabel di atas dapat diketahui pada Tahun 2005 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Raja Ampat untuk migas mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan subsektor migas baru muncul mulai tahun itu.

2.3.3. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian daerah ditentukan oleh sektor yang terbesar sumbangannya terhadap pembentukan PDRB daerah tersebut. Sebelum Tahun 2005, struktur ekonomi Kabupaten Raja Ampat didominasi oleh sektor pertanian tetapi setelah munculnya subsektor pertambangan minyak bumi dan gas pada Tahun 2005, yang mempunyai kontribusi terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian. Pada Tahun 2009 sektor pertambangan dan penggalian mempunyai peranan terhadap pembentukan PDRB terbesar 54,62 persen (dengan migas) dan sektor pertanian mempunyai peranan terbesar 68,73 persen jika penghitungan PDRB tanpa migas.

Tabel 2.5. Peranan Sektoral terhadap Pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 (%)

Sektor	Dengan Migas	Tanpa Migas
1. Pertanian	31,31	68,73
2. Pertambangan dan Penggalian	54,62	0,44
3. Industri Pengolahan	0,20	0,43
4. Listrik dan Air Bersih	0,05	0,12
5. Bangunan	3,90	8,56
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	2,43	5,33
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,96	2,12
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0,23	0,50
9. Jasa-Jasa	6,28	13,78
P D R B	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Raja Ampat

Pada umumnya daerah-daerah yang baru dikembangkan sebagian besar masih bergantung pada sektor-sektor primer. Demikian juga dengan Kabupaten Raja Ampat yang mempunyai struktur ekonomi pertanian. Sumbangan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB tanpa migas sebesar 68,73 persen, dimana penyumbang terbesar berasal dari subsektor perikanan yang mempunyai kontribusi sebesar 47,10 persen. Kabupaten Raja Ampat sebagai daerah kepulauan mempunyai potensi perikanan yang sangat besar, baik perikanan tangkap maupun budidaya di bidang perikanan. Mengingat besarnya potensi sumber daya alam di Kabupaten Raja Ampat, hendaknya sektor unggulan seperti sector pertanian dan pertambangan lebih diberikan perhatian yang lebih agar memberikan kontribusi yang lebih besar di tahun-tahun selanjutnya, untuk mengetahui besarnya sumbangan masingmasing sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB, baik tanpa migas atau dengan migas dapat dilihat pada Tabel 2.5.

2.3.4. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Raja Ampat merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan sektor ekonomi yang ada selama kurun waktu satu tahun. Sehingga besarnya laju pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari pengaruh besarnya laju pertumbuhan ekonomi sektor-sektor kegiatan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Pada Tahun 2009 secara sektoral, sektor listrik dan air bersih mempunyai laju pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 23,65 persen, jika dengan migas dan tanpa migas sebesar 23,65 persen kemudian diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 18,78 persen yang menggambarkan besarnya laju pertumbuhan subsektor ini selama Tahun 2009 dan diikuti sektor bangunan sebesar 17,57 persen.

Kabupaten Raja Ampat merupakan daerah yang sedanggiat-giatnya membangun, hal tersebut diindikasikan dengan laju pertumbuhan sektor bangunan/konstruksi mencapai 17,57 persen pada Tahun 2009, sedangkan pada Tahun 2004 tumbuh lebih besar, yaitu 28,80 persen. Untuk mengetahui besarnya laju pertumbuhan riil masing-masing sektor kegiatan ekonomi secara lebih rinci dapatilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 ADH Konstan Tahun 2000 (%)

Sektor	Dengan Migas	Tanpa Migas
1. Pertanian	3,39	3,39
2. Pertambangan dan Penggalian	0,14	1,43
3. Industri Pengolahan	9,27	9,27
4. Listrik dan Air Bersih	23,65	23,65
5. Bangunan	17,57	17,57
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,06	7,06
7. Pengangkutan dan Komunikasi	3,11	3,11
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	18,78	18,78
9. Jasa-Jasa	14,27	14,27
P D R B	**2,59**	**5,73**

Sumber: BPS Raja Ampat

2.3.5. PDRB Perkapita

PDRB nominal tahun berjalan apabila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun maka didapat PDRB perkapita. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lain secara makro. Tetapi masih perlu diingat bahwa tidak semua faktor produksi yang dapat menimbulkan nilai tambah bagi daerah dimiliki oleh penduduk setempat, dan juga masih ada penduduk setempat yang mempunyai faktor produksi di daerah lain. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran.

Tabel 2.7. Indeks Perkembangan dan Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Raja Ampat ADH Berlaku (Tanpa Migas)

Tahun	Nilai (Rupiah)	Indeks Perkembangan (%)	Laju Perkembangan (%)
2005	7.185.097,77	118,81	8,02
2006	7.627.367,16	126,12	6,16
2007	8.236.556,55	136,20	7,99
2008	9.123.270,31	150,86	10,80
2009	9.978.733,18	165,00	9,37

Sumber: BPS Raja Ampat

PDRB perkapita tanpa migas tahun 2009 mempunyai nilai 9,98 juta rupiah, dengan tingkat perkembangan mencapai 1,6 kali PDRB perkapita pada tahun dasar 2000 dan mempunyai laju pertumbuhan sebesar 9,37 persen.

Tabel 2.8. Indeks Perkembangan dan Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Raja Ampat ADH Berlaku (Dengan Migas)

Tahun	Nilai (Rupiah)	Indeks Perkembangan (%)	Laju Perkembangan (%)
2005	19.242.864	371,60	189,30
2006	18.739.674	309,86	-2,61
2007	19.584.627	323,83	4,51
2008	20.841.532	344,62	6,43
2009	21.890.208	362,96	5,03

Sumber: BPS Raja Ampat

PDRB perkapita dengan migas tahun 2009 mempunyai nilai 21,89 juta rupiah lebih besar dibanding dengan tahun 2008 yang mencapai 20,84 juta rupiah dengan tingkat perkembanganmancapai 3.6 kali PDRB perkapita pada tahun dasar 2000 dan mempunyai laju pertumbuhan sebesar 5,03 persen.

2.3.6. Sumbangan Sektoral terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi daerah merupakan akumulasi dari laju pertumbuhan sektoral. Namun demikian sumbangan sektoral terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah bukan saja ditentukan oleh besarnya laju pertumbuhan sektoral tetapi juga dari besarnya share masing-masing sektor.
Besarnya sumbangan masing-masing sektor ekonomi terhadap laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan cara analisis share, yaitu diperoleh dengan cara mengalikan distribusi persentase atas dasar harga konstan tahun sebelumnya (t) dengan laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan masingmasing sektor ekonomi pada tahun yang bersangkutan (t).

Tabel 2.9. Sumbangan Sektoral terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 (Tanpa Migas)

Sektor	Distribusi ADH Konstan Tahun 2007 (%)	Laju Pertumbuhan ADH Konstan Tahun 2008 (%)	Sumbangan Laju Pertum buhan (%)
1. Pertanian	73,37	3,39	2,49
2. Pertambangan dan Penggalian	0,53	1,43	0,01
3. Industri Pengolahan	0,45	9,27	0,04
4. Listrik dan Air Bersih	0,07	23,65	0,02
5. Bangunan	6,46	17,57	1,13
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,89	7,06	0,42
7. Pengangkutan dan Komunikasi	2,51	3,11	0,08
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0,55	18,78	0,10
9. Jasa-Jasa	10,16	14,27	1,45
P D R B	**100,00**	**5,74**	**5,74**

Sumber: BPS Raja Ampat

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada Kabupaten Raja Ampat tanpa sub sector pertambangan migas tahun 2009 sebesar 5,74. Sektor pertanian sebagai penentu struktur ekonomi daerah memberikan sumbangan paling besar yaitu 2,49 persen kemudian diikuti oleh sektor jasa-jasa 1,45 persen dan sektor bangunan 1,13 persen. Untuk sektor-sektor yang lain rata-rata memberikan sumbangan kurang dari 1 persen. Sumbangan masing-masing sektor ekonomi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Raja Ampat tanpa migas dan dengan migas, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.9 dan 2.10.

Tabel 2.10. Sumbangan Sektoral terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Raja Ampat Tahun 2009 (Dengan Migas)

Sektor	Distribusi ADH Konstan Tahun 2007 (%)	Laju Pertumbuhan ADH Konstan Tahun 2008 (%)	Sumbangan Laju Pertum buhan (%)
1. Pertanian	32,21	2,68	0,86
2. Pertambangan dan Penggalian	57,65	0,56	0,32
3. Industri Pengolahan	0,20	14,12	0,03
4. Listrik dan Air Bersih	0,03	2,26	0,001
5. Bangunan	2,68	14,31	0,38
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,97	14,80	0,29
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1,00	11,19	0,11
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0,10	86,17	0,09
9. Jasa-Jasa	4,18	17,11	0,72
P D R B	100,00	2,80	2,80

Sumber: BPS Raja Ampat

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Raja Ampat dengan migas juga mengalami pertumbuhan walaupun tidak sebesar laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas yaitu sebesar 2,59 persen. Sektor pertambangan dan penggalian dengan share terbesar dalam pembentukan PDRB dengan nonmigas (56,51 persen) hanya mampu memberikan sumbangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi kurang dari 1 persen yaitu sebesar 0,08 persen. Sedangkan sektor pertanian mampu memberikan sumbangan terbesar yaitu 1,09 persen dan sektor jasa-jasa memberikan sumbangan sebesar 0,63 persen. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya laju pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi, utamanya sektor yang mempunyai peranan terbesar dalam pembentukan PDRB. Perubahan pertumbuhan dari sektor yang peranannya dominan akan sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah.

2.4. Sosial Budaya

2.4.1. Pendidikan

Pada umumnya kondisi pendidikan di Kabupaten Raja Ampat sama dengan daerah-daerah lainnya di Papua. Keterbatasasan terutama menyangkut sarana dan prasarana serta tenaga pengajar menjadi kendala utama penyelenggaraan pendidikan di Papua. Gedung sekolah untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) telah tersedia hampir di semua distrik, meskipun kondisinya sangat memprihatinkan karena banyak di antaranya yang telah rusak. Namun untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sementara ini hanya terdapat di beberapa distrik. Karena kondisi ini maka banyak anak usia sekolah SMP dan SMA yang bersekolah ke Sorong. Keterbatasan ruang kelas menyebabkan banyak sekolah terpaksa menggunakan ruang kelas untuk dua aktivitas belajar dari tingkat kelas yang berbeda secara bersamaan. Bahkan keterbatasan sarana fisik tersebut juga menyebabkan sejumlah anak usia sekolah tidak dapat bersekolah. (Data Coremap II, diakses melalui http://regional.coremap.or.id/raja_ampat). Selain menghadapi keterbatasan sarana fisik sekolah, Kabupaten Raja Ampat juga menghadapi kendala dalam ketersediaan tenaga pengajar. Terbatasnya ketersediaan tenaga pengajar di Kabupaten Raja Ampat tidak hanya karena jumlah guru yang terbatas, tetapi juga komitmen dari sebagian guru yang ada masih relatif rendah. Banyak tenaga pengajar yang sering meninggalkan tugasnya karena tidak bersedia menetap di tempat tugasnya atau sering pergi ke kota dalam waktu yang cukup lama. Dengan adanya keterbatasan tenaga pengajar, terdapat banyak guru yang mengajar melebihi beban tugas yang sebenarnya, seperti harus mengajar di lebih dari satu kelas pada waktu yang bersamaan atau mengelola siswa yang berjumlah melebihi batas kewajaran.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terus berusaha mengatasi keterbatasan sarana prasarana dan tenaga pengajar tersebut. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui penambahan tenaga pengajar, penambahan gedung sekolah dan pembangunan sekolah baru (Tabel 2.11).

Dari Tahun 2006 – 2010 jumlah anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan mencapai Rp.166.383.902.035,- (Tabel 2.12), dimana alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk pembangunan sekolah danrumah guru, mess pendidikan, pengadaan meubelair sekolah, buku-buku pelajaran, pengembangan SMA unggulan dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga pendidik.

Tabel 2.11. Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2006 – 2010

No.	URAIAN	SATUAN	PERIODE					
			2003	2006	2007	2008	2009	2010
1	T K	Unit		2	2	5	10	10
2	S D	Unit	74	80	80	83	97	97
3	S M P	Unit	16	14	17	20	22	22
4	S M A	Unit	3	3	4	7	11	11
5	S M K	Unit	-	-	-	1	2	2
6	AK/D-III	Unit	-	-	-	-	-	-
7	PT	Unit	-	-	-	-	1	1
8	Guru TK	Org	6	6	6	6	6	8
9	Guru SD	Org	343	343	350	356	392	392
10	Guru SMP	Org	145	145	145	192	192	192
11	Guru SMA	Org	41	41	63	75	75	75
12	Guru SMK	Org		-	-	-	22	22

Sumber: BPS Raja Ampat

Tabel 2.12. Jumlah Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2006 – 2010

No.	Tahun	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2006	23.630.891.000
2	2007	29.018.289.710
3	2008	47.883.848.500
4	2009	48.260.872.825
5	2010	17.890.000.000
	TOTAL	**166.383.902.035**

2.4.2. Kesehatan

Kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Raja Ampat masih tergolong rendah yang ditandai dengan banyaknya warga yang menderita sejumlah penyakit, seperti malaria, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan penyakit kulit, serta campak dan diare pada anak atau bayi. Penyebabnya yaitu kondisi lingkungan permukiman yang kurang sehat (seperti kurangnya sumber air bersih dan buruknya sanitasi lingkungan), cara hidup masyarakat yang jauh dari pola hidup sehat, serta terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan. Kasus kematian ibu dan bayi pada saat dan setelah melahirkan juga masih cukup tinggi (DINKES Raja Ampat dalam Coremap II, diakses melalui http://regional.coremap.or.id/ raja_ampat). Sarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten Raja Ampat berupa Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Poliklinik Desa/Kampung (Polindes), Pos Obat Desa (POD),Posyandu, dan Pos Malaria Desa (Posmaldes). Jumlah Puskesmas mulai bertambah pada Tahun 2008 yaitu dari 5 unit menjadi 10 unit. Penambahan Puskesmas terus dilakukan sehingga pada 2009 menjadi 13 unit dan bertambah lagi menjadi 30 unit pada 2010. Namun dari jumlah itu, hanya 5 Puskesmas saja yang melayani rawat inap. Puskesmas-Puskesmas ini pada umumnya berada di ibukota distrik. Selain Puskesmas, di beberapa kampung juga terdapat Puskesmas Pembantu yang pada 2010 seluruhnya berjumlah 39 unit. Poliklinik Desa (Polindes) belum tersedia di setiap kampung. Sampai dengan 2010 baru terdapat 17 unit Polindes. Sedangkan Posmaldes hanya terdapat di sejumlah kampung yang memiliki kasus malaria yang tergolong tinggi. Dari 2007 hingga 2010 tidak ada penambahan jumlah Posmaldes, yaitu tetap berjumlah 25.

Begitu juga dengan Pos Obat Desa, tidak mengalami pertambahan sejak 2007. Berbeda dengan keduanya, Posyandu menjadi unit pelayanan kesehatan yang pertambahan jumlahnya paling masif, yaitu dari 45 unit (2006) menjadi berturut-turut 95 unit (2007), 105 unit (2009), dan 194 unit (2010). Sedangkan rumah sakit baru ada di Kabupaten Raja Ampat mulai Tahun 2009.

Tabel 2.13. Sarana dan Prasarana Kesehatan Termasuk Tenaga Kesehatan

No.	URAIAN	Satuan	PERIODE				
			2003 /2005	2006	2007	2008	2009
1	Rumah Sakit	Unit	-	-	-	-	1
2	Puskesmas Inap	Unit	-	-	-	4	5
3	Puskesmas	Unit	5	5	5	10	18
4	Pustu	Unit	17	17	17	39	55
5	Polindes	Unit	15	15	17	20	17
6	Pos Obat Desa	Unit	-	25	25	25	25
7	Posyandu	Unit	45	45	95	97	106
8	Posmaldes	Unit	-	-	25	25	25
9	Gudang Farmasi	Unit	-	-	-	-	2
10	Ged.Radiologi	Unit	-	-	-	1	1
11	Rumah Dokter	Unit	-	5	5	7	18
12	Rumah Medis	Unit	-	14	15	15	18
13	Dokter	Org	2	3	6	6	15
14	Bidan	Org	30	45	60	60	57
15	Perawat	Org	35	37	37	44	141
16	Ahli Gizi	Org	-	1	2	6	6

Sumber: BPS Raja Ampat

Anggaran yang dialokasikan pada sektor kesehatan dariTahun 2006 – 2010 adalah sebesar Rp. 208.026.532.801,- (Tabel 2.14). Dana itu ditujukan untuk pembangunan dan pengembangan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap dan beberapa pustu menjadi puskesmas. Dana yang ada juga digunakan untuk membangun tambahan pustu dan polindes pada beberapa kampung, serta pengadaan peralatan-peralatan kesehatan baik di puskesmas, pustu, maupun polindes. Pengalokasian anggaran tersebut juga ditujukan untuk pengadaan obat-obatan, perbaikan gizi masyarakat, pengadaan meubelair puskesmas**,** dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan lainnya.

Tabel 2.14. Jumlah Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan

No.	Tahun	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2006	25.538.523.941
2	2007	33.547.626.735
3	2008	43.626.515.370
4	2009	43.108.196.482
5	2010	62.205.670.273
	TOTAL	**208.026.532.801**

Meskipun terdapat penambahan sarana dan prasarana serta jumlah tenaga medis di Kabupaten Raja Ampat, jumlah dan kualitas yang ada sekarang ini masih jauh dari ideal.

Sebaran dokter dan tenaga medis lainnya belum merata. Idealnya di setiap Puskesmas tersedia dokter dan di setiap kampung tersedia bidan. Masih banyak Puskesmas yang belum memiliki dokter, dan masih terdapat kampung yang belum memiliki bidan. Keterbatasan tenaga medis ini menyebabkan pelayanan kepada masyarakat masih belum dapat dilakukan secara optimal. Karena itu sebagian masyarakat masih memilih cara-cara pengobatan tradisional atau memilih berobat ke Kota Sorong.

2.5. Prasarana dan Sarana Daerah

2.5.1. Jalan dan jembatan

Kondisi jalan di Kabupaten Raja Ampat masih memprihatinkan, yaitu sebagian besar masih berupa tanah, sedikit yang menggunakan semen, dan sangat sedikit yang telah menggunakan campuran pasir dan batu (Tabel 2.15). Sejak tahun 2006-2010, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah dialokasikan anggaran sebesar Rp307.853.869.154,- untuk sektor pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan kualitas jalan dan perintisan jalan baru dalam rangka membuka keterisolasian daerah, seperti pembangunan jalan Waisai- Warsambin, Kalobo-Waijan, jembatan dan peningkatan kualitas jalan di Waisai dan lain-lain.

Tabel 2.15. Kondisi Jalan di Kabupaten Raja Ampat

Jalan (Km)		
Tanah	**Semen**	**Sirtu**
21,00	-	-
5,17	0,57	-
3,50	2,10	-
20,00	-	-
7,00	-	-
10,50	-	-
0,65	0,56	-
31,00	4,00	-
6,50	-	3
2,00	1,00	-
107,32	8,23	3

Sumber: Data Coremap II, diakses melalui http://regional.coremap.or.id/raja_ampat

2.5.2. Sarana perhubungan

Kabupaten Raja Ampat merupakan kabupaten kepulauan yang wilayah lautnya lebih luas dari daratannya. Implikasinya, transportasi laut di Kabupaten ini dapat dikatakan lebih penting dan utama apabila dibandingkan dengan transportasi darat. Warga memerlukan alat transportasi laut untuk memenuhi kebutuhan mobilitas antarkampung, ke ibukota distrik, ataupun ke ibukota kabupaten. Alat transportasi utama masyarakat Raja Ampat adalah perahu atau *boat* yang terdapat di setiap kampung. Hampir semua keluarga memiliki perahu dayung dan sebagian kecil memiliki perahu motor.

Untuk melayani kebutuhan mobilitas ke Sorong dan beberapa daerah lainnya di Raja Ampat, Pemerintah Kabupaten menyediakan beberapa kapal angkut yang beroperasi hanya beberapa kali saja dalam setiap bulan. Di Kabupaten Raja Ampat terdapat empat buah pelabuhan laut yang sederhana, yaitu di Saonek (Distrik Waigeo Selatan), Kabare (Distrik Waigeo Utara), Salafen (Distrik Misool), dan Sakabu (Distrik Samate) dan beberapa dermaga kecil yang ada di setiap distrik. Hanya beberapa pelabuhan atau dermaga yang dibuat dengan menggunakan beton, sedangkan sebagian besar dermaga lainnya dibuat dengan menggunakan bahan kayu. Fasilitas jalan darat di Kabupaten Raja Ampat belum memadai (sebagian besar masih berupa jalan tanah) sehingga jumlah kendaraan roda empat dan roda dua masih sedikit dan hanya terdapat di beberapa distrik, seperti Waigeo Selatan, Waigeo Barat, Samate, Misool, dan Misool Timur Selatan.

2.5.3. Instalasi air bersih

Sumber air bersih yang paling umum digunakan masyarakat Raja Ampat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya adalah sumur gali dan sebagian kecil lainnya dari ledeng. Meskipun demikian, di sejumlah kampung masih ada yang hanya memiliki beberapa sumur gali yang digunakan untuk keperluan bersama penduduk kampung. Sejumlah kampung di Raja Ampat juga menggunakan air dari mata air yang disalurkan ke bak penampungan atau ke rumah-rumah penduduk melalui pipa. Di beberapa kampung seperti Tomolol di Distrik Misool Timur Selatan, Lenmalas di Distrik Misool dan Wawiyai di Distrik Waigeo Selatan, mata air merupakan satu-satunya sumber air bersih. Meskipun demikian, terdapat beberapa kampung yang memiliki air tidak jernih atau berwarna agak kekuning-kuningan (Data Coremap II, diakses melalui http://regional.coremap.or.id/raja_ampat).

2.5.4. Tenaga Listrik

Generator paling umum digunakan di Kabupaten Raja Ampat. Namun persebaran dari penggunaan generator ini masih belum merata. Terdapat kampung yang sebagian besar keluarga memiliki generator, namun ada juga yang beberapa keluarga saja yang memiliki generator, atau bahkan hanya terdapat satu generator untuk sebuah kampung. Menghadapi keterbatasan tersebut, banyak di antara warga yang lebih memilih untuk menggunakan petromaks atau lampu tempel. Pada setiap ibukota distrik sudah terdapat listrik dengan tenaga diesel yang merupakan sumbangan dari pemerintah kabupaten. Listrik yang ada ini hanya mampu melayani masyarakat mulai dari jam enam sore sampai tengah malam. Pengelolaannya sebagian sudah dilakukan oleh PLN, namun sebagian lainnya masih dikelola sendiri oleh pemerintah distrik. Sedangkan penerangan dengan listrik tenaga surya (*solar cell*), yang merupakan bantuan dari perorangan atau lembaga, hanya terdapat di beberapa distrik saja, seperti Samate, Waigeo Selatan, Waigeo Barat dan Teluk Mayalibit. Itupun tidak semua kampung di distrik tersebut dapat mengaksesnya.

2.5.5. Telekomunikasi

Terdapat sejumlah pilihan sarana komunikasi di Kabupaten Raja Ampat, yaitu telepon satelit, radiogram, radio SSB, dan belakangan sudah bisa menggunakan telepon seluler GSM. Fasilitas telepon satelit terdapat di beberapa kampung, namun beberapa di antaranya sudah tidak dapat dipergunakan lagi karena rusak. Alternatif fasilitas komunikasi lainnya adalah radiogram yang memiliki keunggulan dapat menjangkau seluruh wilayah Raja Ampat. Pemerintah atau pihak-pihak lainnya dapat menggunakan fasilitas radiogram yang dikelola oleh RRI Sorong yang berlokasi di Kota Sorong untuk menyebarkan informasi baik untuk perorangan maupun seluruh penduduk Raja Ampat. Alat komunikasi berupa Radio SSB juga banyak digunakan di Kabupaten Raja Ampat, khususnya di kantor-kantor pemerintah. Alat komunikasi ini juga biasanya digunakan oleh perorangan maupun perusahaan. Masyarakat di sejumlah wilayah tertentu, terutama di ibukota kabupaten dan beberapa wilayah sekitarnya, juga sudah dapat menggunakan telepon selular berbasis GSM dari provider tertentu.

2.5.6. Sarana dan prasarana pemerintahan

Karena merupakan daerah hasil pemekaran yang relative masih baru, Kabupaten Raja Ampat masih sangat memerlukan pembangunan berbagai sarana prasarana pemerintah, seperti gedung untuk Kantor Pemerintah Kabupaten, Kantor Distrik dan Balai Kampung. Anggaran yang telah di alokasikan dari Tahun 2006-2010 sebesar Rp 32.278.989.000,-.

2.6. Pemerintahan Umum

Perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2006 – 2010 terus mengalami peningkatan dengan persentase terbesar terjadi pada tahun 2007 sebesar 225,2 %. Perkembangan Anggaran Belanja:

a. Perkembangan Anggaran Belanja Operasional pada penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Raja Ampat selama kurun waktu 2006 – 2009 mengalami peningkatan, tetapi menurun pada tahun 2010.
b. Perkembangan Anggaran Belanja Modal dari tahun 2006 – 2008 mengalami peningkatan, dan menurun pada tahun 2009 - 2010.
c. Perkembangan Anggaran Belanja Tak Terduga meningkat pada tahun 2006 dan 2007, dan kemudian mengalami fluktuasi dari tahun 2008 – 2010.
d. Realisasi APBD sejak tahun 2006 – 2010 mengalami surplus.
e. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat selama tahun 2006 – 2010 terdiri dari 17 Urusan wajib dan 5 urusan pilihan.

f. Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat selama kurun waktu 2006 – 2010 sebanyak 19 program dan 45 kegiatan. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam kurun waktu 2006 - 2010 telah bekerjasama dengan Institusi pendidikan antara lain:

   a. Universitas Samratulangi;
   b. Universitas Hasanuddin;
   c. Universitas Gajah Mada;
   d. Institut Pertanian Bogor;
   e. STIE – ABI;
   f. LAN – Makassar;
   g. Lembaga Sumberdaya Manusia SERCO;
   h. PT. Surya Research International Tangerang;
   i. Sekolah Penerbangan Curug;
   j. Politeknik Kesehatan Jayapura;

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam kurun waktu 2006 - 2010 telah bekerjasama dengan Pihak Ketiga antara lain:

   a. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Papua;
   b. Perusahaan Pelayaran PT. Berkat Abadi Jaya Makmur;
   c. PT. Bahari Papua;
   d. PT. Masirei Trans Papua;
   e. Kabupaten Wakatobi dan Halmahera Utara;
   f. Polres Raja Ampat;
   g. PT. Bank Papua KC. Waisai;

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dilakukan selain kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pihak ketiga antara lain:

   a. Penyelenggaraan pembinaan batas wilayah;
   b. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
   c. Pengelolaan Kawasan khusus
   d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

2.7. Kondisi yang Diharapkan

Berdasarkan kondisi umum di atas maka dalam kurun waktu Slima tahun ke depan diharapkan sejumlah kondisi sebagai berikut:

a. Terdapat peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan untuk semua tingkatan. Terdapat SD di setiap kampung, SLTP di setiap distrik, dan SLTA dalam jumlah yang lebih memadai. Jumlah tenaga pengajar juga mencukupi untuk setiap sekolah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah;
b. Peningkatan jumlah unit pelayanan kesehatan yang disertai dengan perbaikan kualitas layanan, yang dilihat dari jumlah tenaga kesehatan, kualifikasi dan kompetensi
   tenaga kesehatan, maupun kualitas obat dan peralatan medis. Dengan begitu akses warga terhadap layanan kesehatan yang berkualitas meningkat sehingga derajat kesehatan masyarakat juga mengalami perbaikan;
c. Meningkatnya akses warga untuk mendapatkan air bersih baik yang difasilitasi oleh program pemerintah maupun kerjasama pemerintah dengan pihak swasta. 80 persen warga diharapkan sudah memiliki akses terhadap air bersih pada 2015;

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundangundangan (*money follow function*).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah dan sekaligus menjadi dokumen rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam pengelolaan keuangan daerah berusaha menerapkannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaannya, berikut ini disajikan ke dalam subbab kinerja dan kebijakan keuangan masa lalu serta kerangka pendanaannya berdasarkan analisis pengeluaran periodic wajib dan mengikat.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Secara umum penilaian kinerja keuangan merupakan kunci penting menuju perbaikan dan kemajuan baik bagi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Melalui penilaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dapat mengetahui tingkat capaian keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan dan sekaligus untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Secara garis besar, penilaian kinerja keuangan daerah masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan serta analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecendrungan yang terjadi. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah atau kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) tidak hanya dilakukan dalam rangka peningkatan PAD, namun juga harus melihat dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial menentukan untuk ditingkatkan, walaupun kontrbusi PAD terhadap APBD masih rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD yang digunakan untuk mengetahui posisi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata rata total penerimaan. Salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi daerah adalah besarnya pendapatan daerah pada Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya PAD secara umum menunjukkan kemajuan aktifitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target PAD merupakan factor penting dalam menilai laju pembangunan di daerah. Dalam rangka memacu roda perekonomian masyarakat, Kabupaten Raja Ampat menerapkan norma dan prinsip yang berbasis kinerja dimana efiensi dan efektifitas anggaran yakni norma yang mewajibkan anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghasilkan kesejahteraan dan meningkatkan laju pertumbuhan. Selama periode 2006-2010, pertumbuhannya Pendapatan Asli Daerah mengalami pergerakan yang fluktuatif selama beberapa tahun terakhir, pada tahun 2006 nilai nominalnya sebesar Rp3.366 juta meningkat menjadi Rp30.191 juta tahun 2010. Namun proporsinya terhadap total pendapatan relatif masih sangat kecil. Total pendapatan Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2006 sebesar Rp392.064 juta dan tahun 2008 adalah Rp403.855 juta **(lihat table 3.1).** Dilihat proporsinya terhadap total pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2006 baru sebesar 0,9%, namun pada tahun 2010 menunjukkan trend peningkatan sehingga proporsinya sudah mencapai 7,7%. Dilihat dari angka pertumbuhannya selama periode 2006-2010 cukup menjanjikan, dimana persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2007 sebesar 149,2% dan kenaikan terendah 52,9% tahun 2009, sehingga rata-rata pertumbuhan dari tahun 2006-2010 sebesar 77,4% (**lihat table 3.1**). Apabila dicermati lebih lanjut ternyata dalam kurun waktu 2006-2010 kenaikan Pendapatan Asli Daerah terbesar juga terjadi pada Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan kenaikan rata-rata sebesar 102,7% yang bersumber dari penerimaan lain-lain, kemudian diikuti oleh Retribusi Daerah 32,9%.

Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006 s/d Tahun 2010 Kabupaten Raja Ampat

No.	Uraian	2006 (Rp)	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	Rata-rata Pertum-buhan (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah	3.366	8.388	12.132	18.553	30.191	77,4%
1.1.	Pajak daerah	83	133	534	111	1.118	298,3%
1.2.	Retribusi daerah	1.293	1.558	1.652	3.745	2.936	32,9%
1.3.	Lain-lain PAD yang sah	1.990	6.696	9.946	14.697	26.137	102,7%
2.	Dana Perimbangan	314.831	412.553	459.374	457.519	323.444	3,2%
2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	67.287	93.502	101.138	77.421	70.005	3,5%
2.2.	Dana alokasi umum	216.164	264.871	296.124	314.043	228.874	3,3%
2.3.	Dana alokasi khusus	31.380	54.180	62.112	66.055	24.565	7,7%
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	73.868	52.650	155.274	143.427	50.220	23,4%
TOTAL PENDAPATAN		**392.064**	**473.591**	**626.779**	**619.498**	**403.855**	**4,3%**

Peningkatan kapasitas fiskal juga harus mempertimbangkan tata kelola (*governance*) tentang keuangan daerah, karena peningkatan anggaran yang besar jika tidak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan masalah, sehingga arah pengelolaan pendapatan daerah dengan optimalisasi fungsi anggaran yang meliputi fungsi perencanaan, distribusi dan stabilisasi. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dasar publik masih banyak bergantung pada penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Adanya otonomi daerah diharapkan dapat memacu daerah menuju ke tingkat kemampuan keuangan yang lebih baik yang tercermin dengan semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Raja Ampat selama tahun 2006-2010 juga mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2006 berjumlah Rp314.831 juta, kemudian di tahun 2007-2009 bergerak meningkat dengan rata-rata peningkatan mencapai 11 ,9%, namun pada tahun 2010 terjadi penurunan -36,8% menjadi Rp323.444 juta. Proporsi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan juga masih tergolong dominan. Pada tahun 2006 proporsinya mencapai 80,3% dan bergerak naik hingga tahun 2009 yang mencapai 130,5%, sedangkan di tahun 2010 porsi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan mengalami penurunan menjadi 82,5%. Selanjutnya bila dilihat dari persentase kenaikannya, kenaikan rata-rata Dana Perimbangan adalah 4,2% lebih tinggi dari rata-rata kenaikan total pendapatan yang besarnya hanya 3,9%. Kondisi ini mengindikasikan tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi dalam segi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat, yang disebabkan oleh belum optimalnya penerimaan dari pendapatan Asli Daerah Kabupaten Raja Ampat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu meningkatan penerimaan Sumber daya dan penerimaan Kabupaten Raja Ampat dengan meningkatkan penerimaan dari perpajakan dan retribusi daerah, selain pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu mengoptimalkan kinerja dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) agar dapat lebih menyokong PAD.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Arah kebijakan yang dilakukan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 – 2010 disusun dengan mengacu kepada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (KUA) Kabupaten Raja Ampat dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) serta Rencana Strategis (Renstra). Disamping itu penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 -2010 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Prinsip umum yang dijadikan landasan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006-2010 dengan memperhatikan aspek teknis dan aspek material guna menjamin terciptanya akuntabilitas anggaran dan mempermudah proses evaluasi serta pengendalian anggaran yaitu mendorong terciptanya APBD yang semakin sehat; menjamin dipertahankannya keseimbangan anggaran; dan selalu mengupayakan peningkatan kemampuan penyediaan sumber anggaran dari pendapatan asli daerah dalam angka memberikan dukungan anggaran dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan strategis Kabupaten Raja Ampat

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan bidang belanja dalam kerangka APBD merupakan cerminan dari Renstra Kabupaten Raja Ampat Tahun 2006 – 2010, dimana kebijakan yang diambil di prioritaskan dan diharapkan sebagai jawaban dan proses ikhtiar untuk menyelesaikan atau paling tidak meminimalkan permasalahan yang ada dalam wujud program atau proyek pembangunan strategis dan terfokus sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006. Dalam kurun waktu tahun 2006-2010, Kabupaten Raja Ampat menentukan prioritas belanja daerah pada aktivitas umum pemerintahan, peningkatan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur. Prioritas pada aktivitas umum pemerintahan dilakukan mengingat Kabupaten Raja Ampat adalah kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Sorong sehingga konsekuensinya belanja daerah terkonsentrasi untuk belanja aparatur dan infrastruktur.

Tabel 3.2. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tahun 2006 s/d Tahun 2010 Kabupaten Raja Ampat (Rp dalam jutaan)

No.	Uraian	2006 (Rp)	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	Rata-rata Pertum-buhan (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	73.170	81.402	127.335	171.639	175.048	26,1%
1.1.	Belanja Pegawai	52.411	65.599	105.256	127.893	130.790	27,3%
1.2.	Belanja Bunga	-	-	-		-	-
1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	1.834	5.306	189,2%
1.4.	Belanja Hibah	5.000	2.541	2.746	27.642	26.699	215,5%
1.5.	Belanja Bantuan sosial		10.372	16.884	6.625	6.729	1,2%
1.6.	Belanja Bantuan keuangan kepada Prop/Kab/Kota dan Pemdes	9.765	2.458	2.448	5.645	5.425	12,9%
1.7.	Belanja tidak terduga	5.994	433	-	2.000	100	-
2.	Belanja Langsung	282.912	370.174	501.246	**447.171**	473.001	15,3%
2.1.	Belanja Pegawai	-	-	-	27.256	16.939	-37,9%
2.2.	Belanja Barang dan jasa	63.878	120.670	133.326	149.628	158.248	29,3%
2.3.	Belanja Modal	219.033	249.504	367.920	270.287	297.814	11,3%
TOTAL BELANJA		**356.082**	**451.576**	**628.581**	**618.810**	**648.049**	**17,3%**

Secara nominal dalam 4 tahun terakhir belanja pegawai terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan porsi belanja pegawai terhadap realisasi total belanja dalam kurun waktu 2006-2007 rata-rata mencapai 17,3% dengan porsi terbesar terjadi di tahun 2008 yaitu 39,2%. Dibandingkan dengan PAD bahwa besarnya porsi belanja pegawai terhadap PAD rata-rata mencapai 1082,4% atau dengan rasio 1 banding 10,8.

Peningkatan belanja pegawai ini juga tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Pusat di mana dalam kurun waktu tahun 2005-2010 Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan kenaikan belanja pegawai yang cukup signifikan. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi Kenaikan gaji pokok bagi PNS secara berkala; Pemberian gaji bulan ke-13; kenaikan tunjangan fungsional bagi pegawai yang memegang jabatan fungsional dan kenaikan tunjangan struktural bagi para pejabat struktural; serta pemberian uang makan kepada PNS mulai tahun 2007. Hal ini berdampak pada proporsi realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap proporsi realisasi total pengeluaran di Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Pada awal tahun pembentukan Kabupaten Raja Ampat, Pos belanja modal diarahkan pada beberapa aspek yakni; kebutuhan sarana-prasarana aparatur (perlengkapan kantor), pengadaan konstruksi jalan, sektor pariwisata, sektor kelautan, sector pendidikan dan sektor-sektor lainnya.

Tabel 3.3. Analisis Proporsi Belanja Modal Kabupaten Raja Ampat (Rp dalam jutaan)

No	Tahun	Realisasi Belanja Modal	Realisasi Total Belanja	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2006	219.033	356.082	61,5%
2	2007	249.504	451.576	55,3%
3	2008	367.920	628.581	58,5%
4	2009	234.624	618.810	43,7%
5	2010	297.814	648.049	46,0%

Sejak kurun waktu tahun 2006-2008 prosentase belanja modal terhadap total belanja rata-rata mencapai 66,2%. Besarnya belanja modal dikarenakan pada tahun-tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Raja Ampat lebih memprioritaskan pembangunan fisik diantaranya pembangunan gedung kantor, sekolah, fasilitas dermaga.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Sejalan dengan diberlakukannya Permendagri 13 tahun 2006 maka struktur APBD tahun - 2010 mengalami perubahan nomenklatur pembiayaan yang berfungsi untuk menutup selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan belanja daerah. Di d alam komponen pembiayaan ini terdapat pos penerimaan daerah dan pos pengeluaran daerah yang memungkinkan daerah melakukan pinjaman sebagai penutup deficit anggaran ataupun pos sisa lebih anggaran tahun berjalan untuk mengakomodasikan surplus anggaran. Pembiayaan daerah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan menunjukkan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jenis penerimaan pembiayaan diantaranya adalah sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi. Pengeluaran pembiayaan menunjukkan semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jenis pengeluaraan pembiayaan diantaranya adalah Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Pokok Pinjaman, dan Pemberian Pinjaman ke daerah lain.

Tabel 3.4. Realisasi Surplus/Defisit Murni Anggaran Kabupaten Raja Ampat

No	Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Total Belanja	Surplus/Defisit
		(a)	(b)	(a) - (b)
1	2006	392.064	356.082	35.983
2	2007	473.591	451.576	22.014
3	2008	626.779	628.581	(1.802)
4	2009	619.498	618.810	688
5	2010	403.855	648.049	(244.194)

Selama kurun waktu 2006-2010, Surplus terbesar terjadi pada tahun 2006. Berdasarkan hasil realisasi jumlah pendapatan tahun 2006 sebesar Rp392.064 juta dan jumlah belanja selama tahun 2006 sebesar Rp356.082 juta maka Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengalami surplus sebesar Rp35.983 juta (pendapatan lebih besar dari pada belanja). Surplus ini diakibatkan karena masih ada Proyek Pembangunan yang belum direalisasikan. Sedangkan defisit terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 244.194 juta. Keadaan defisit ini tidak dapat ditutupi dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), mengingat tahun anggaran sebelumnya Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga mengalami defisit sehingga SiLPA-nya nol rupiah.

3.3. Kerangka Pendanaan

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat membuat kebijakan pengalokasian sebagai berikut:

a. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan asset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
d. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
e. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil yang didapat.

BAB IV
ANALISIS ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah upaya pemerintah daerah untuk merespon isu-isu strategis yang dihadapinya, baik yang bersumber dari lingkungan internal maupun eksternal. Keberhasilan mengidentifikasi isu strategis yang tepat pada gilirannya akan membuat rencana pembangunan yang disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh masyarakat, operasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan daerah yang tidak diselaraskan dengan isu strategis daerahnya berpotensi mengalami kegagalan, baik secara substantive maupun secara politik. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas(daerah/masyarakat) dimasa datang. Hal-hal yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Aspek lingkungan strategis juga mencakup lingkungan internal dan eksternal. Secara internal, isu strategis merupakan cerminan dari kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh suatu entitas (daerah/masyarakat). Sedangkan dalam aspek lingkungan eksternal, isu strategis biasanya dikaitkan dengan peluang dan ancaman yang tersedia yang dapat membawa pengaruh signifikan bagi entitas tersebut di masa yang akan datang. Berdasarkan elaborasi tentang karakteristik Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dirumuskan di atas, bagian ini merumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Raja Ampat baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal.

4.1. Lingkungan Internal: Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kabupaten Raja Ampat terutama terkait dengan kondisi geografis dan demografis yang dimilikinya. Sebagaimana umumnya kabupaten lain di Tanah Papua, Kabupaten Raja Ampat dihadapkan pada situasi dimana potensi sumberdaya alam tersedia secara berlimpah namun menghadapi persoalan terutama terkait dengan kapasitas sumberdaya manusia.
Karakteristik geografis sebagai daerah kepulauan menciptakan kekuatan dan kelemahan tersendiri bagi Kabupaten Raja Ampat. Dengan 610 buah pulau yang dimiliki serta 87% wilayah merupakan lautan, Kabupaten Raja Ampat memiliki potensi bahari yang luar biasa besar. Potensi bahari tersebut terutama adalah di **sektor perikanan dan pariwisata**.

Di sektor perikanan, Raja Ampat dikenal sebagai daerah penangkapan yang kaya untuk berbagai jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal ini dimungkinkan karena perairan Raja Ampat merupakan pertemuan arus laut dengan kawasan terumbu karang yang tersebar di berbagai lokasi sehingga sangat baik bagi perkembangbiakan berbagai jenis ikan. Di samping itu, keberadaan ratusan pulau kecil serta pemandangan bawah laut yang sangat indah juga merupakan kekuatan tersendiri yang membuat Raja Ampat memiliki potensi wisata sangat besar. Sebagian peneliti bahkan mengatakan bahwa keanekaragaman biota laut di Raja Ampat merupakan salah satu yang paling kaya didunia.

Di samping potensi besar di sektor bahari, bumi Raja Ampat juga dianugerahi dengan berbagai **kandungan mineral berharga** seperti nikel, minyak bumi, batubara, dan emas. Deposit batubara dan minyak terutama berada di Pulau Salawati, sementara Pulau Waigeo dan Pulau Gag dikenal memiliki potensi besar bagi pertambangan nikel, sedangkan tambang emas terutama ditemukan di Pulau Batanta dan Misool. Komoditi pertambangan ini memberi sumbangan sangat signifikan bagi perekonomian Raja Ampat. Sebagai ilustrasi pada tahun 2009 sektor pertambangan menyumbang lebih dari 50% dari total PDRB Kabupaten Raja Ampat. Ketersediaan mineral-mineral berharga tersebut tentu saja merupakan modal besar bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat. Selain menyuguhkan berbagai potensi kekayaan yang sangat besar, letak dan karakteristik geografis Raja Ampat juga memunculkan tantangan serius bagi pemerintah maupun masyarakat yakni terkait dengan **kerawanan bencana**. Sebagai kawasan kepulauan yang berada di mulut samudra Pasifik dan di lempeng kontinental yang dinamik, wilayah Raja Ampat termasuk rentan terhadap bahaya tsunami. Bahkan dalam peta potensi tsunami yang dikeluarkan oleh BNPB, sebagian besar pulau di wilayah Raja Ampat berada pada kawasan merah yang artinya sangat berpotensi terhadap bahaya tsunami. Kenyataan ini tentu saja harus memperoleh perhatian serius pemerintah, terutama dalam menyusun strategi perencanaan pembangunan. Tantangan lain yang juga terkait dengan kondisi geografis dan harus memperoleh perhatian serius pemerintah adalah **kendala transportasi**. Sebagai kabupaten yang terdiri atas pulau-pulau kecil, sarana transportasi laut menjadi moda transportasi utama yang menghubungkan antar pulau di Raja Ampat maupun dengan wilayah-wilayah lain. Sementara, hingga saat ini ketersediaan sarana transportasi laut masih terbatas di samping kendala cuaca pada waktu-waktu tertentu yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan. Kendala ini menyebabkan lalu lintas manusia, barang, dan jasa dari maupun ke Raja Ampat relatif terbatas yang turut berakibat pada tingginya harga berbagai kebutuhan pokok. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk mengembangkan sarana dan prasarana transportasi sehingga dapat lebih membuka keterisolasian yang dialami masyarakat Raja Ampat. Faktor geografis juga membawa kendala bagi **rentang kendali pemerintahan**. Dengan enam ratus lebih pulau dalam radius ratusan kilometer yang menjadi wilayah administratifnya, Kabupaten Raja Ampat menghadapi kendala efektivitas kendali pemerintahan. Daya jangkau pemerintah terhadap masyarakat di pulau-pulau terjauh masih sangat terbatas, akibatnya pembangunan dan pelayanan publik di daerah-daerah terpencil tersebut masih sangat tertinggal. Luasnya kawasan laut yang dimiliki oleh Raja Ampat juga belum diimbangi dengan ketersediaan sarana maupun tenaga yang memadai, sehingga upaya konservasi, dan pemeliharaan kawasan masih sangat terbatas. Di samping dipengaruhi oleh kondisi geografis, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kabupaten Raja Ampat juga sangat dipengaruhi oleh situasi demografis atau kependudukan. Secara kuantitatif, **jumlah penduduk** Kabupaten Raja Ampat masih relatif sedikit dengan tingkat kepadatan hanya 2 orang per km2, sementara rata-rata kepadatan penduduk di Provinsi Papua Barat adalah 6 orang per km2. Sedangkan dari sisi kualitatif, meskipun semakin banyak warga Raja Ampat yang mengenyam pendidikan tinggi, namun **tingkat pendidikan** sebagian besar penduduk masih berada pada level pendidikan dasar. Hal ini terjadi antara lain karena fasilitas pendidikan masih cukup sulit diakses oleh penduduk yang umumnya tinggal di pulau-pulau kecil dan terpencil, sehingga banyak siswa yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dikarenakan jarak yang harus ditempuh dan tingginya biaya operasional pendidikan. Di samping itu terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga pendidik, serta rendahnya kualitas manajemen pendidikan juga masih menandai wajah pendidikan Raja Ampat. Hal lain yang juga perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah belum tersedianya fasilitas pendidikan baik formal maupun non formal yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah yakni terkait dengan potensi besar di bidang kelautan. Rendahnya tingkat pendidikan berbanding lurus dengan **angka kemiskinan**. Berdasarkan data rekam data statistik Provinsi Papua Barat tahun 2006, jumlah keluarga miskin di Raja Ampat sangat tinggi, yakni sekitar 91% dari keseluruhan jumlah rumah tangga yang ada. Sejak awal kondisi ini telah menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas kebijakan pembangunan. Akan tetapi harus diakui hingga saat ini upaya tersebut masih belum menunjukkan capaian yang signifikan. Hal ini terutama disebabkan karena karakteristik kemiskinan di Raja Ampat sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan sarana dan prasarana dasar terutama transportasi yang berakibat pada tingginya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan di daerah ini memerlukan beberapa kebijakan yang harus dilakukan secara terintegrasi seperti upaya-upaya pembukaan lapangan kerja, bantuan modal juga kebijakan dalam pengembangan prasarana infrastruktur dasar.

Problema lain yang juga merupakan cerminan dari rendahnya tingkat pendidikan di Raja Ampat adalah keterbatasan **kualitas aparat birokrasi**. Harus diakui bahwa kompetensi aparat birokrasi Kabupaten Raja Ampat masih sangat terbatas. Berbagai instansi teknis belum didukung oleh pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan formal maupun keahlian yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Akibatnya banyak rencana kerja yang sesungguhnya tidak cukup relevan dengan potensi maupun persoalan yang dihadapi.

Kegagalan birokrasi dalam menangkap isu-isu strategis serta menterjemahkannya ke dalam rencana kerja baik di tingkat satuan kerja maupun lintas satuan kerja tergambar jelas dalam dokumen-dokumen laporan kinerja selama lima tahun terakhir. Secara kelembagaan, struktur kelembagaan yang ada saat ini serta sinergi antar lembaga juga dirasakan masih belum memadai bagi upaya aktualisasi potensi yang dimiliki Raja Ampat. Oleh karena itu ke depan diperlukan struktur kelembagaan yang lebih kontekstual serta pola komunikasi antar lembaga yang lebih mendorong terbangunnya sinergi bagi akselerasi pembangunan. Selain terkait dengan kompetensi birokrasi dan struktur kelembagaan, persoalan lain yang masih menghinggapi tubuh birokrasi Kabupaten Raja Ampat adalah persoalan **kredibilitas dan komitmen birokrasi**. Harus diakui pula bahwa berbagai bentuk patologi birokrasi masih menghambat derap roda pembangunan yang sangat bertumpu pada pemerintah. Patologi tersebut antara lain diindikasikan dengan lemahnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pada saat yang sama ruang partisipasi dan pengawasan dari masyarakat masih belum bias diharapan bekerja secara optimal karena berbagai keterbatasan. Sehingga upaya menekan patologi birokrasi sepenuhnya bertumpu pada instrumen-instrumen pengawasan internal birokrasi serta pengawasan politik (*political oversight*) yang dilakukan oleh DPRD. Upaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*) jelas merupakan agenda strategis pemerintah Kabupaten Raja Ampat karena keberhasilan pembangunan tidak saja ditentukan oleh kekayaan sumberdaya alam melainkan juga sangat ditentukan oleh komitmen dan kredibilitas aparat pemerintah sebagai penggerak roda pembangunan. Oleh karena karena itu upaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kredibilitas aparat birokrasi serta penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan tugas penting dan mendesak yang harus ditangani oleh pemerintah dalam periode selanjutnya.

Kekuatan	Kelemahan
Potensi Perikanan Potensi Pariwisata Potensi Pertambangan	Rawan Bencana Kendala Transportasi Rentang Kendali Pemerintah. Jumlah Penduduk Tingkat pendidikan masyarakat. Kualitas Aparat Birokrasi Kredibilitas dan Komitmen Birokrasi.

4.2. Lingkungan Eksternal: Peluang dan Ancaman

Di samping kekuatan dan kelemahan yang didorong oleh kondisi internal, identifikasi isu strategis juga perlu mempertimbangkan peluang dan ancaman yang tercipta sebagai akibat dari dinamika eksternal. Faktor-faktor eksternal tersebut umumnya berupa faktor yang sifatnya sistemik dan struktural, seperti kerangka regulasi nasional, dinamika politik, ekonomi, dan dan keamanan regional. Dalam konteks regulasi nasional, Kabupaten Raja Ampat dan seluruh daerah otonom di Tanah Papua menikmati keleluasaan yang luar biasa sebagai akibat dari diberlakukannya undang-undang **otonomi khusus**. Keleluasaan tersebut terentang dalam berbagai dimensi mulai dari kewenangan pemerintahan, perumusan kebijakan pembangunan, pendanaan pembangunan, hingga urusanurusan yang terkait dengan sosial budaya. Berbagai keleluasaan tersebut memberi ruang lebar bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengaktualisasikan kreativitasnya dalam mengakselerasi pembangunan. Namun demikian keleluasaan tersebut tidak akan berarti apa-apa tanpa komitmen dan kerja keras pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Raja Ampat. Peluang lain yang tersedia adalah **pertumbuhan ekonomi di kawasan Papua Barat** yang cukup pesat selama beberapa tahun terakhir. Sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat melalui Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu lima tahun sejak dimekarkan, PDRB Papua Barat melonjak dua kali lipat dibandingkan periode awal pemekaran. Kontribusi terbesar dalam PDRB Papua Barat masih didominasi oleh sektor pertanian yakni sebesar 29% pada tahun 2005. Meskipun demikian kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun semakin menurun, sebaliknya kontribusi sector pertambangan dan industri pengolahan, termasuk di dalamnya pengolahan hasil laut, serta sektor jasa dan perdagangan terus menunjukkan kenaikan.

Perkembangan perekonomian kawasan ini tentu saja akan turut berdampak pada pertumbuhan perekonomian wilayah-wilayah di sekitarnya termasuk Raja Ampat yang memiliki potensi besar di bidang perikanan dan pertambangan. Perkembangan lain yang terjadi di kawasan Indonesia Timur dan kemungkinan besar juga turut membawa pengaruh positif bagi Raja Ampat adalah **perkembangan pariwisata di kawasan Indonesia Timur,** khususnya wisata bahari. Jika dahulu para turis mancanegara hanya mengenal keindahan Pulau Bali, maka kini muncul wilayah-wilayah kepulauan lain di Indonesia Timur yang keindahannya bahkan melebihi Pulau Bali, sebut saja misalnya Bunaken, Banda, Wakatobi, dan tentu saja Raja Ampat. Kawasankawasan wisata tersebut belakangan mulai seiring dengan semakin populernya wisata berbasis lingkungan atau *ecotourism* khususnya wisata bahari.

Geliat wisata bahari ini di kawasan timur Indonesia ini semakin dinamis dengan diselenggarakannya berbagai perhelatan kelas dunia seperti *World Ocean Converence* di Manado, Sail Banda, dan Sail Bunaken, beberapa waktu lalu yang sekaligus merupakan ajang promosi wisata bahari Indonesia, khususnya di kawasan Timur. Perkembangan ini tentu saja membuka peluang besar bagi kawasan wisata bahari lainnya di Indonesia Timur, termasuk Raja Ampat. Di samping menyediakan berbagai peluang positif di atas, dinamika faktor eksternal juga berpotensi memberikan ancaman yang harus diperhatikan oleh Kabupaten Raja Ampat. Ancaman tersebut antara lain terkait dengan **instabilitas politik** dan **persoalan keamanan**. Anggapan bahwa Papua merupakan kawasan yang selalu bergejolak yang ditandai dengan masih kerap terjadinya konflik kekerasan secara sporadis, bisa menjadi penghambat bagi upaya membangun iklim investasi dan memajukan perekonomian yang sangat sensitif terhadap isu-isu politik dan keamanan. Demikian pula dengan potensi kerawanan yang disebabkan oleh aktivitas penangkapan ikan secara ilegal, baik yang terkait dengan penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing maupun penangkapan ikan oleh siapapun yang menggunakan peralatan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan. Hal-hal tersebut menjadi ancaman nyata bagi Raja Ampat karena luasnya kawasan laut yang dimiliki, terlebih sebagian kawasan tersebut berbatasan langsung dengan zona maritim internasional.

Peluang	Ancaman
Otonomi khusus Pertumbuhan ekonomi regional. Perkembangan wisata bahari di Indonesia Timur.	Instabilitas Politik Regional. Persoalan Keamanan. Ilegal Fishing.

4.3. Strategi Implementasi Kebijakan

Untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang, serta dalam rangka menanggulangi kendala/kelemahan dan mengatasi tantangan/ancaman, maka secara umum strategi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi. Sesuai tugas dan fungsi pemerintah, maka kegiatan koordinasi merupakan kegiatan inti yang dilaksanakan. Kegiatan koordinasi harus bersifat aktif dan tidak menunggu. Oleh karena itu, untuk terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan, maka koordinasi harus dilakukan. Koordinasi tersebut tidak sebatas antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain atau pemerintah di atasnya, melainkan juga secara internal di antara SKPD atau unit-unit pemerintahan serta koordinasi dengan stakeholder secara luas.

b. Sosialisasi. Agar visi misi serta seluruh program pembangunan dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh instansi dan pejabat terkait serta anggota masyarakat, maka kegiatan sosialisasi perlu diselenggarakan. Kegiatan sosialisasi visi misi dan program pembangunan ini diselenggarakan bukan hanya agar diketahui dan dipahami namun dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaannya dengan sektor lain serta diharapkan dalam pelaksanaannya program masing-masing sektor saling mendukung dan sinergis sehingga dapat terwujud visi Kabupaten Raja Ampat sebagai "Kabupaten Bahari yang Sehat, Berpendidikan, Sejaktera dan Berkedilan."

c. Kemitraan. Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dan mencapai sasarannya maka diperlukan kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah kabupaten lain, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, DPRD, civil society, maupun kalangan bisnis, dan masyarakat pada umumnya.

d. Pengkajian. Kegiatan pengkajian dilakukan dengan menganalisis hasil pelaksanaan kebijakan atau melalui hasil pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebagai bahan masukan dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.

e. Advokasi. Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan dan strategi yang disusun oleh kalangan internal, tanpa mendapat masukan dari pihak eksternal maka pelaksanaan kebijakan dan strategi belum dapat mengantisipasi secara baik berbagai kendala didepannya. Pada prakteknya bahwa pelaku kegiatan dalam era otonomi adalah daerah dan masyarakat, oleh karena itu maka kegiatan advokasi dalam bentuk pemberian masukan, arahan, penyamaan persepsi, kesepakatan atau pembimbingan perlu dilakukan dalam pelaksanaan operasional program-program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Raja Ampat.

f. Monitoring, dan evaluasi. Kegiatan monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah program atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dari kegiatan monitoring akan diperoleh masukan atau informasi yang sebenarnya tentang pelaksanaan program atau kegiatan di tingkat lapangan.

Dengan diketahui hasil pelaksanaan kebijakan melalui monitoring maupun evaluasi, maka akan mempermudah pengendalian dan
pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.

g. Konsolidasi Data dan Informasi. Untuk dapat terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi sehingga pelaksanaan program di tingkat lapangan berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka Pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu melakukan konsolidasi data dan informasi yang berkaitan dengan program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Data dan informasi diperlukan sebagai bahan penyusunan rencana maupun evaluasi kebijakan.

h. Pemberdayaan. Dalam upaya meningkatkan terwujudnya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi maka seluruh jajaran di lingkungan departemen/kementerian perlu didorong untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan dan pengintegrasian program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Upaya mensinergikan kekuatan di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat merupakan bentuk pemberdayaan yang perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan penyelenggaraan program diantara unit-unit pemerintahan. Selain itu pemberdayaan masyarakat perlu terus dilakukan sehingga dapat menjadi partner pemerintah dalam pembangunan. Berdasarkan identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Kabupaten Raja Ampat, dapat disusun strategi dasar pembangunan. Strategi tersebut pada prinsipnya dilakukan agar kekuatan dan peluang dapat dioptimalkan, sementara kelemahan dan ancaman dapat diminimalisir.

4.3.1. Upaya Menggunakan Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang.

Dalam konteks ini, beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat antara lain:

a. Meningkatkan dan melakukan pemerataan membangun infrastruktur untuk mendukung aktualisasi potensi.
b. Memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya alam secara lestari/bersinambungan sebagai sumber pendapatan daerah.
c. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi produk kelautan.
d. Secara aktif melakukan upaya-upaya untuk menarik investor.
e. Menggalang sinergi dengan daerah-daerah di kawasan pertumbuhan untuk menarik investasi.
f. Mempelajari kiat-kiat daerah lain dalam mengelola dan mengembangkan sektor wisata bahari.
g. Membangun jaringan dan sinergi dengan daerah-daerah lain untuk pengembangan wisata bahari.

4.3.2. Upaya Menanggulangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang.

Dengan ketersedian peluang yang ada maka Pemerintah Kabupaten Raja Ampat antara lain dapat menempuh strategi sebagai berikut :

a. Melakukan perencanaan pembangunan yang sensitive bencana.
b. Memanfaatkan dana otsus untuk membangun infrastruktur dasar.
c. Mengembangkan fasilitas pendidikan terkait dengan wisata bahari.
d. Melakukan sinkronasi dan integrasi program-program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
e. Memanfaatkan pertumbuhan ekonomi kawasan guna mendorong investasi.
f. Merancang dan meningkatkan program penguatan kapasitas aparat Pemda berdasarkan kebutuhan spesifik daerah.

4.3.3. Upaya Menggunakan Kekuatan untuk Mengatasi Ancaman.

Berdasarkan identifikasi terhadap kekuatan dan ancaman yang ada, maka beberapa strategi dasar yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat antara lain adalah:

a. Meningkatkan kesejahteraan melalui aktualisasi potensi perikanan, pariwisata, dan pertambangan guna mencegah instabilitas politik dan keamanan.
b. Melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak menggunakan teknik/alat yang merusak dalam menangkap ikan.
c. Menciptakan instrumen hukum serta penegakan hukumbagi pelaku ilegal fishing dan perusak lingkungan.

4.3.4. Upaya Memperkecil Kelemahan dan Mengatasi Ancaman.

Beberapa strategi yang dapat ditempuh berdasarkan konteks kelemahan dan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat antara lain adalah:

a. Meningkat koordinasi antar instansi dalam pengawasan pengelolaan sumberdaya alam secara ilegal.
b. Meningkatkan anggaran pendidikan
c. Memperkuat jumlah dan kapasitas aparat pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap eksploitasi sumber daya alam.
d. Melakukan pengkajian perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan potensi bencana.
e. Menjalin sinergi dan kerjasama antar daerah dalam upaya antisipasi konflik dan mitigasi bencana.

Keempat strategi dasar tersebut dapat menjadi acuan bagi pengembangan strategi secara lebih spesifik oleh masing-masing SKPD sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa apapun strategi dan program yang dijalankan, semuanya harus mengarah pada upaya pencapaian visi dan misi yang telah disepakat bersama.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi merupakan cita-cita atau kondisi yang ingin diwujudkan dalam rentang waktu tertentu. Visi Kabupaten Raja Ampat untuk Tahun 2011 – 2015 adalah "**Mewujudkan Kabupaten Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari Menuju Masyarakat yang Sehat, Berpendidikan, Sejahtera, dan Berkeadilan".** Visi ini merupakan hasil lanjutan dari Semangat Tomolol, yang dideklarasikan oleh pejabat bupati pada 13 Desember 2003. Semangat Tomolol merupakan pertemuan para pemangku kepentingan di Raja Ampat dan merupakan itikad baik dari semua pihak untuk berpartisipasi secara terbuka dalam menetapkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan di Kabupaten Raja Ampat sekaligus merancang program pembangunan berwawasan lingkungan. Terdapat dua kata kunci penting yang terkandung dalam rumusan visi Kabupaten Raja Ampat. Lima kata kunci yang sekaligus merupakan orientasi pembangunan Raja Ampat yakni **Bahari**, **Sehat**, **Berpendidikan**, **Sejahtera** dan **Berkeadilan** dijelaskan dalam ruang lingkup sebagai berikut:

a. Bahari. Berkembangnya nilai-nilai dasar dalam berbagai dimensi kehidupan pemerintahan dan masyarakat yang menempatkan laut sebagai sumber kehidupan.
b. Sehat. Terwujudnya kondisi di mana tingkat kesehatan fisik maupun spiritual masyarakat Raja Ampat semakin membaik yang didorong oleh ketersediaan dan kemudahan akses pelayanan kesehatan.
c. Berpendidikan. Kondisi di mana tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Raja Ampat semakin meningkat yang didukung oleh ketersediaan dan kemudahan akses fasilitas pendidikan.
d. Sejahtera. Merujuk pada terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat terutama berupa kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peluang berusaha yang ditopang oleh ketersediaan infrastruktur dasar secara memadai.
e. Berkeadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluru lapisan masyarakat Raja Ampat.

5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Raja Ampat tersebut kemudian ditetapkan lima misi sebagai berikut:

a. Mengembangkan jaringan infrastruktur dasar yang memadai (M1);
b. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Raja Ampat (M2);
c. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan partisipatif (M3);
d. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis potensi bahari dan sumberdaya lainnya (M4).

5.3. Tujuan dan Sasaran

5.3.1. Mengembangkan jaringan infrastruktur dasar yang memadai (M1).

Ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai merupakan salah satu faktor utama pendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Sebagai daerah otonom yang masih relatif baru,kondisi infrastruktur di Kabupaten Raja Ampat masih dilingkupi berbagai keterbatasan. Karakter geografis sebagai daerah kepulauan memberi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan ketersediaan infrastruktur secara lebih merata. Di samping membutuhkan biaya yang sangat besar, tingkat kesulitan teknis yang dihadapi juga sangat tinggi. Di sisi lain, penyediaan infrastrukturdasar seperti energi, air bersih, pemukiman yang layak, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan mutlak diperlukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Terkait dengan upaya percepatan dan pemerataanpembangunan, setidaknya terdapat lima kelompok infrastruktur dasar yang perlu memperoleh perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat, yakni:

(1) Infrastruktur dasar transportasi, energi, komunikasi, dan air bersih
(2) Infrastruktur dasar pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan
(3) Infrastruktur dasar di bidang pemukiman
(4) Infrastruktur dasar di bidang ekonomi
(5) Infrastruktur dasar di bidang lingkungan
(6) Infrastruktur dasar pemerintahan dan pelayanan umum.

Sebagai penjabaran dari misi mengembangkan jaringan infrastruktur dasar yang memadai (M1), maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing kluster tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Misi 1: **Mengembangkan jaringan infrastruktur dasar yang memadai**	
Tujuan	**Sasaran**
1. Meningkatkanketersediaan jaringan infrastruktur dasar transportasi, energy ,komunikasi, dan air bersih.	1.1. Meningkatnya akses barang dan manusia dari luar daerah maupun antar distrik wilayah di Raja Ampat.
	1.2. Meningkatnya ketersediaan energy listrik dan BBM.
	1.3. Tersedianya jaringan komunikasi yang lebih memadai.
	1.4. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
	1.5. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
2. Meningkatkan ketersediaan infrastrukturpelayanan publik dasar di bidang pendidikan	2.1. Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang semakin terjangkau oleh masyarakat
	2.2. Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan lanjut tingkat atas (SLTA) di kabupaten

Misi 1: **Mengembangkan jaringan infrastruktur dasar yang memadai**	
Tujuan	**Sasaran**
3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik dasar dibidang kesehatan.	3.1. Tersedianya instalasi kesehatan yang semakin terjangkau oleh masyarakat (Polindes, Puskesmas,RS).
4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pemukiman yang sehat dan aman.	4.1. Tersedianya pemukiman sederhana, sehat dan tahan gempa bagi masyarakat
5. Meningkatkan ketersediaan prasarana aparatur pemerintah.	5.1. Tersedianya perkantoran instansi pemerintah yang memadai di tingkat kabupaten.
	5.2. Tersedianya perkantoran instansi pemerintah di tingkat distrik dan kampung.
	5.3. Tersedianya perpustakaan umum
	5.4. Tersedianya rumah dinas bagi pegawai
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar bagi pengembangan ekonomi lokal.	6.1. Tersedianya pasar pedesaan
	6.2. Tersedianya tempat pelelangan ikan
	6.3. Terbangunnya koperasi.
7. Mengendalikan abrasi pantai dan ancaman banjir.	7.1. Menurunkan kerusakan pantai akibat abrasi.
	7.2. Antisipasi ancaman banjir
8. Meningkatkan ketersediaan prasarana umum	8.1. Tersedianya tempat ibadah
	8.2. Tersedianya sarana olahraga
	8.3. Tersedianya areal pemakaman umum.

5.3.2. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Raja Ampat (M2).

Kualitas sumberdaya manusia merupakan factor penting yang menentukan keberlanjutan pembangunan di suatu daerah. Pradigma pembangunan berkelanjutan mendorong perubahan pengeloaan pembangunan dari berbasis sumberdaya alam menuju ilmu pengetahuan. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bertekat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penyediaan fasilitas public yang berkualitas dan terjangku. Konseptual fasilitas public yang dimaksud tidak hanya menyangkut pendidikan dan kesehatan, melainkan konsep lebih luas yang sejalan dengan pendekatan keamanan manusia *(human security).* Pendekatan keamanan manusia juga mencakup aspek pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan social, dan juga pengarusutamaan gender dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan yang holistic ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Raja Ampat secara berkelanjutan. Sebagai penjabaran dari misi meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Raja Ampat (M2), maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

Misi 2: **Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Raja Ampat**	
Tujuan	**Sasaran**
1. Meningkatkan akses warga terhadap pelayanan kesehatan	1.1. Tersedianya sarana dan prasarana layanan kesehatan secara lebih memadai
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan	2.1. Tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang cukup memadai untuk berbagai jenisnya (dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan)
	2.2. Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan.
3. Meningkatkan daya tanggap terhadap kejadian wabah penyakit	3.1. Meningkatnya daya tanggap tenaga kesehatan dan masyarakat dalam penanganan kejadian wabah penyakit

Misi 2: **Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Raja Ampat**	
Tujuan	**Sasaran**
4. Menurunkan angka kematian ibu dan balita	4.1. Menurutnya angka kematian ibu melahirkan.
	4.2. Menurutnya angka kematian balita.
	4.3. Meningkatnya jangkauan dan intensitas pelayanan KB.
5. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan	5.1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola Pos Obat Kampung dan Poskesdes
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menyelenggarakan upaya kesejahteraan sosial	6.1. Tersedianya data based perencanaan kebijakan kesejahteraan sosial
	6.2. Tersedianya sumberdaya manusia yang kompeten untuk pelayanan kesejahteraan sosial
	6.3. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
	6.4. Terbentuknya mekanisme koordinasi penanganan masalah kesejahteraan sosial .
7. Meningkatkan kualitas kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil	7.1. Meningkatnya kualitas kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan KAT melalui bantuan sosial
	7.2. Meningkatnya keberdayaan ekonomi PMKS dan KAT
	7.3. Meningkatnya akses komunikasi KAT
8. Meningkatkan kesetiakawanan sosial	8.1. Meningkatnya kepeduliandan tanggung jawab social masyarakat terhadap masalahkesejahteraan so sial melalui penguatan jaringan sosial
	8.2. Adanya penghargaan kepadakeluarga pahlawan, perintiskemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan

Misi 2: Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Raja Ampat	
Tujuan	**Sasaran**
9. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan	9.1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan pra sekolah
	9.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas
	9.3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan menengah yang berkualitas
	9.4. Meningkatnya kualitas substansi dan metode pembelajaran di semua jenjang pendidikan
	9.5 Meningkatnya mutu lulusan SMP, dan SMA/SMK
10. Meningkatkan pembinaan pendidikan non-formal	10.1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan non-formal
	10.2. Meningkatkan pelayanan pendidikan non formal
11. Meningkatkan jumlah, kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	11.1. Meningkatnya jumlah guru dan tenaga kependidikan
	11.2. Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
	11.3. Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
12. Meningkatkan kualitas kelembagaan pelayanan kepada perempuan dan anak	12.1. Tersedianya data based perencanaan pemberdayaan perempuan dan anak
	12.2. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kepada perempuan dan anak
13. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peran serta dalam pemberdayaan perempuan dan anak	13.1. Terciptanya lingkungan yang mendukung program pemberdayaan perempuan dan anak

Misi 2: Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Raja Ampat	
Tujuan	**Sasaran**
14. Meningkatkan keberdayaan masyarakat Kampung	14.1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kampung
	14.2. Tersedianya sumberdaya pendampingan program pemberdayaan masyarakat
	14.3. Tersedianya sumberdaya manusia yang kompeten untuk pendampingan masyarakat kampung
15. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	15.1. Meningkatnya kualitas generasi muda yang sehat jasmani rohani dan berdaya saing
	15.2. Meningkatnya prestasi olah raga generasi muda

5.3.3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan partisipatif (M3).

Tata kelola pemerintahan Kabupaten Raja Ampat menjadi salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan Kabupaten Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari menuju masyarakat yang sehat, berpendidikan, berbudaya, dan sejahtera. Terdapat tiga aspek mendasar yang ditekankan dalam pembenahan tatakelola pemerintahan di Raja Ampat, yaitu profesionalitas, akuntabilitas serta daya dukung masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pencapaian visi tersebut sangat dimungkinkan ketika penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Raja Ampat dilakukan secara profesional dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan dinilai profesional dan akuntabel ketika mampu mengelola sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan keunggulan daerah. Daya dukung lingkungan sosial juga menjadi kunci penting sehingga penyelenggaraan pemerintahan diarahkan juga untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, partisipatif dan berkesadaran hukum. Sebagai penjabaran dari misi mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan partisipatif (M3), maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

Misi 3: **Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan partisipatif**	
Tujuan	**Sasaran**
1. Meningkatkan kapasitaspemerintahan daerah dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan dan keuangan daerah	1.1. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur
	1.2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
	1.3. Meningkatnya kapasitas kelembagan
	1.4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	1.5. Meningkatnya kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan
2. Mewujudkan tatananpolitik lokal yang harmonis	2.1. Terwujudnya masyarakat dan lingkungan sosial yang ramah, peduli dan inklusif
	2.2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam praktik demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan
	2.3. Meningkatnya kepatuhan terhadap Hukum

5.3.4. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis potensi bahari dan sumberdaya lainnya (M4).

Mayoritas masyarakat Raja Ampat menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam, terutama sumberdaya kelautan. Pesona alam Raja Ampat terutama pesona lautnya yang didukung oleh keberagaman potensi seni dan budaya masyarakat merupakan keunggulan yang dimiliki Raja Ampat yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata bahari. Jadi terwujudnya Raja Ampat sebagai kabupaten bahari terlihat dari berperannya tiga sektor penting di Raja Ampat, yaitu sektor pariwisata, perikanan, dan kelautan, sebagai penopang utama perekonomian lokal dan memberikan kontribusi yang paling berarti pada struktur PAD. Konsekuensi logisnya adalah Raja Ampat sebagai kabupaten bahari menempatkan ketiga sektor tersebut sebagai *leading sector*. SKPD yang mengelola urusan pariwisata, perikanan dan kelautan dengan demikian menjadi penggerak utama yang didukung oleh SKPD lainnya yang terkait dengan pengembangan ketiga potensi utama Raja Ampat tersebut.Termasuk di antaranya adalah SKPD yang mengelola urusan industri, perdagangan, koperasi, tenaga kerja, kebudayaan dan lingkungan hidup. Pembangunan Kabupaten Raja Ampat pada berbagai bidang dalam kurun waktu lima tahun mendatang tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, memperkuat kelembagaan dan menambah kawasan konservasi laut daerah, serta menjadikan Raja Ampat sebagai daerah pertama di Indonesia maupun dunia yang menggagas dan mengembangkan kawasan konservasi laut. Sebagai penjabaran dari misi meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis potensi bahari dan sumberdaya lainnya (M4), maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

Misi 4: Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis potensi bahari dan sumberdaya lainnya Tujuan Sasaran	
Tujuan	**Sasaran**
1. Pengembangan usaha produksi barang dan jasa berbasis potensi bahari dan sumberdaya lainnya secara optimal dan berkelanjutan	1.1. Meningkatnya produktivitas hasil berbasis potensi sumberdaya kelautan dengan tetap menjaga kelestarian nilai-nilai dasar masyarakat yang menempatkan laut sebagai sumber kehidupan
	1.2. Meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama dan keragaman pangan lokal
	1.3. Meningkatnya produktivitas hasil produksi peternakan, dan perkebunan
	1.4. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
	1.5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata bahari yang berdampak pada peningkatan kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB
2. Mengembangkan industry usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang berbasis sumberdaya ekonomi lokal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	2.1. Berkembangnya ekonomi masyarakat
	2.2. Meningkatnya kontribusi industry masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat
	2.3. Meningkatnya nilai dan jumlah perdagangan produk lokal masyarakat
3. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan keselarasan sosial budaya, dan kelestarian lingkungan.	3.1. Terkelolanya keragaman dan kekayaan budaya Raja Ampat
	3.2. Terjaganya kelestarian sumberdaya ekonomi dan lingkungan

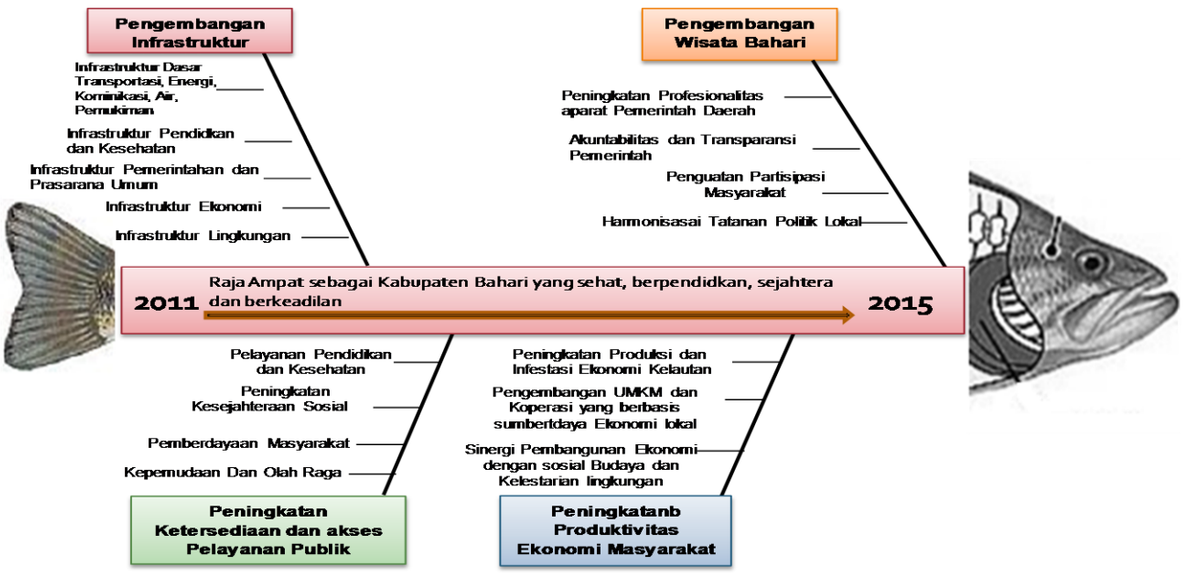

Gambar 5.1. Kerangka Rencana Prioritas Pembangunan Kabupaten Raja Ampat 2011-2015

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk dapat mewujudkan Visi **Kabupaten Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari Menuju Masyarakat yang Sehat, Berpendidikan, Sejahtera, dan Berkeadilan** sangat dibutuhkan *political will*, baik oleh Pemerintah dengan kebijakan otonomi daerah, maupun oleh masyarakat dan seluruh *stakeholders*. Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 -2015 dirumuskan sebagai berikut:

6.1. Mengembangkan jaringan infrastruktur dasar yang memadai.

Strategi dan arah kebijakan mengembangkan jaringan infrastruktur dasar yang memadai meliputi:

a. Peningkatan prasarana dan sarana transportasi laut, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Peningkatan ketersediaan dermaga di Disitrik-distrik kepulauan.
   2) Penyusunan masterplan pengembangan pelabuhan.
   3) Penyediaan sarana pendukung keselamatan perhubungan laut
   4) Penyediaan sarana pendukung keselamatan perhubungan laut
b. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Pembangunan jalan dan jembatan
   2) Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan darat.
c. Peningkatan dan pemeliharaan lapangan terbang perintis, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Perencanaan pembangunan bandara perintis.
   2) peningkatan prasarana dan fasilitas pendukung keselamatan perhubungan udara.
d. Pemeliharaan dan peningkatan sumber tenaga listrik yang ada dan jaringannya, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)
   2) Peningkatan Jaringan listrik
   3) Pengoperasian PLTD
   4) Penyediaan tangki penyimpanan BBM bahan minyak
   5) Pemeliharaan Jaringan Listrik
   6) Penyediaan perangkat Kwh elektronik Digital Prabayar
   7) Pengembangan PLTS (Surya)
e. Pengembangan sumber energi listrik alernatif, dengan kebijakan diarahkan pada Pengembangan PLTMH (mikro hidro)
f. Meningkatkan kapasitas dan sebaran stasiun pompa bensin umum, dengan kebijakan diarahkan pada penyuluhan masyarakat tentang perawatan PLTS dan PLTMH
g. Pemeliharaan dan peningkatan prasarana telekomunikasi, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Identifikasi kebutuhan dan perencanaan pengembangan prasarana telekomunikasi.
   2) Pembangunan tower seluler
h. Meningkatkan ketersediaan sentra-sentra layanan telekomunikasi satelit, dengan kebijakan diarahkan pada pembangunan warung informasi masyarakat (WIM)
i. Mengembangkan akses telekomunikasi seluler, dengan kebijakan diarahkan pada penyelenggaraan Stasiun Radio Daerah
j. Mengembangkan fasilitas internet, dengan kebijakan diarahkan pada pengembangan website pemda
k. Pengembangan jaringan distribusi air bersih, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
   2) Perencanaan pembangunan reservoir
   3) Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
   4) Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
   5) Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
   6) Pembangunan sumur-sumur air tanah
l. Pemeliharaan jaringan air bersih, dengan kebijakan diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air m. Pembuatan sarana penampungan air bersih di ibukota distrik., dengan kebijakan diarahkan pada peningkatan distribusi penyediaan air baku
n. Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sumber air bersih, dengan kebijakan diarahkan pada monitoring, evaluasi dan pelaporan
o. Perencanaan dan pembangunan jaringan irigasi, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Perencanaan dan pembangunan jaringan irigasi
   2) Perencanaan dan pembangunan reservoir
   3) Perencanaan dan pembangunan pintu air
   4) perencanaan dan normalisasi saluran sungai
   5) rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

p. Pembangunan gedung sekolah dan perpustakaan dan infrastruktur penunjang lainnya, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Identifikasi kebutuhan
   2) Penyiapan lahan bagi sekolah, rumah dinas dan asrama, serta fasilitas pendukung lainnya.
   3) Pembangunan sekolah, rumah dinas, dan asrama siswa serta fasilitas pendukung lainnya
q. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas, polindes, dan posyandu, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Identifikasi kebutuhan.
   2) Perencanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur kesehatan.
   3) Pembangunan puskesmas, poskesdes dan posyandu
   4) Pembangunan dan perbaikan fasilitas perumahan bagi tenaga medis.
   5) Penyediaan kendaraan untuk fasilitas puskesmas keliling
r. Pengembangan desain rumah sederhana, sehat, dan tahan gempa, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Identifikasi kebutuhan
   2) Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
   3) Penyusunan konsep dan detail desain rumah sederhana, sehat dan tahan gempa
   4) Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
   5) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mamp
   6) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
   7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
s. Pembangunan dan pemeliharaan gedung dan perkantoran, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Identifikasi kebutuhan
   2) Penyiapan lahan bagi perkantoran pemerintah di tingkat kabupaten
   3) Pembangunan perkantoran pemerintahan di tingkat kabupaten
   4) Rehabilitasi perkantoran yang sudah ada.
   5) Monitoring dan evaluasi.
t. Pembangunan dan pemeliharaan kantor distrik dan kampung, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Identifikasi kebutuhan
   2) Penyiapan lahan bagi perkantoran pemerintah di tingkat kabupaten
   3) Pembangunan perkantoran pemerintahan di tingkat kabupaten
   4) Rehabilitasi perkantoran yang sudah ada.
   5) Monitoring dan evaluasi.
u. Pembangunan gedung perspustakaan, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Perencanaan pembangunan gedung perpustakaan.
   2) penyediaan areal lahan lokasi gedung perpustakaan.
   3) Pembangunan gedung perpustakaan.
   4) Pengadaan kendaraan untuk perpustakaan keliling.
v. Penyediaan areal lahan bagi rumah dinas pegawai
   1) Identifikasi kebutuhan dan perencanaan
   2) Penyiapan lahan bagi rumah dinas dan rumah jabatan
   3) Pembangunan rumah dinas dan rumah jabatan.
   4) Pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan
   5) Monitoring dan evaluasi.
w. Pembangunan dan rehabilitasi pasar desa, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Identifikasi kebutuhan dan perencanaan pengembangan pasar desa.
   2) Penyiapan lahan pasar desa
   3) Pembangunan pasar desa.
   4) Monitoring dan evaluasi.
x. Pembangunan tempat pelelangan ikan, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Identifikasi kebutuhan dan perencanaan pengembangan TPI.
   2) Penyiapan lahan TPI
   3) Pembangunan TPI
   4) Monitoring dan evaluasi.
y. Pembangunan prasana dan sarana koperasi di tiap-tiap distrik. , dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Identifikasi kebutuhan dan perencanaan pengembangan koperasi.
   2) Koordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi terkait.
   3) Penyiapan lahan bagi koperasi
   4) Pembangunan gedung koperasi
   5) Monitoring dan evaluasi.
z. Pembangunan dan rehabilitasi talud penahan abrasi pantai, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Perencanaan talud/brojong/breakwater
   2) Survei teknis talud/bronjong/ breakwater

3) Pembangunan talud/bronjong/ breakwater
4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

å. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Perencanaan Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong/turap
2) Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong dan kemiringan turap
3) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/turap
4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

ä. Pembangunan fasilitas peribadatan, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Perencanaan pembangunan fasilitas peribadatan
2) Mendorong partisipasi masyarakat setempat
3) Koordinasi dengan instansi terkait.
4) Penyediaan areal lahan lokasi fasilitas peribadatan.
5) Pembangunan fasilitas peribadatan

ö. Penyediaan areal olahraga, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Perencanaan pembangunan gelanggang olahraga
2) Penyiapan dan pematangan lahan
3) Pembangunan gelanggang olahraga
4) Monitoring dan evaluasi.
5) Monitoring dan evaluasi.

aa. Penyediaan areal TPU, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Perencanaan penyediaan TPU
2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pematangan lahan
3) Monitoring dan evaluasi.

6.2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat Raja Ampat.

Strategi dan arah kebijakan meningkatkan pelayanan public yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Raja Ampat meliputi:

a. Pengembangan pelayanan kesehatan “jemput bola”melalui pelayanan keliling darat maupun laut, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Identifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar.
2) Penyusunan titik-titik strategis pengembangan puskesmas.
3) Penyusunan jalur pelayanan kesehatan ”jemput bola” melalui puskesmas keliling.
4) Pengadaan peralatan kesehatan menetap maupunbergerak.
5) Evaluasi efektivitas pelayanan kesehatan bergerak.

b. Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa (poskesdes), dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Pemetaan pelayanan kesehatan di tingkat desa.
2) Pengembangan pos pelayanan kesehatan desa.
3) Pengadaan peralatan pendukung poskesdes.
4) Pelatihan kader poskesdes.
5) Evalasi unit pelayanan kesehatan poskesdes.

c. Pengembangan pelayanan RSUD dengan didukung sarana dan prasarana yang lebih memadai, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Identifikasi kebutuhan pengembangan pelayana kesehatan lanjut (rujukan).
2) Pengadaan peralatan kesehatan tingkat lanjut.
3) Pengadaan peralatan pendukung kesehatan tingkat rujukan.

d. Rekrutmen CPNS dan kontrak Pemetaan kebutuhan tenaga medis, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Pemetaan kebutuhan tenaga pendukung kesehatan.
2) Pemantauan beban kerja PNS di bidang kesehatan.
3) Sosialisasi dan penjaringan sumberdaya potensial dimasyarakat lokal.
4) Pengusulan formasi PNS.
5) Pengusulan formasi rekruitmen tenaga kontrak.

e. Penggalangan dukungan tenaga melalui kerjasama dengan perguruan tinggi mitra pemda, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Identifikasi institusi potensial pengembangan kemitraan di bidang kesehatan
2) Membangun kesepakatan kerjasama multiyears
3) Penempatan tenaga medis dari mitra
4) Evaluasi program kemitraan

f. Pengiriman tugas belajar bergelar dan non gelar tenaga kesehatan, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Identifikasi kebutuhan tenaga kesehatan.

2) Penyusunan rencana pengembangan sumberdaya manusia kesehatan.
3) Penentuan kriteria seleksi penerimaan beasiswa pendidikan bergelar maupun non gelar.
4) Sosialisasi beasiswa pendidikan bergelar dan non gelar.
5) Rekruitment beasiswa bergelar dan non gelar.
6) Monitoring proses pendidikan bergelar maupun non gelar.
7) Evaluasi akhir masa pendidikan bergelar maupun non gelar.

g. Penyediaan data, dengan kebijakan diarahkan pada penyusunan data wilayah rawan wabah penyakit.
h. Kerjasama antar stakeholders, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Koordinasi peran masing-masing stakeholders untuk deteksi dini wabah penyakit.
2) Mengembangkan kemitraan bersama masyarakat.
i. Memperkuat kapasitas penyedia pelayanan kesehatan, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas dalam penanganan wabah penyakit.
2) Meningkatkan kapasitas tenaga puskesmas untuk penanganan wabah penyakit.
3) Memperkuat kapasitas masyarakat dalam penanganan wabah penyakit.
4) Pengadaan alat komunikasi yang mendukung kecepatan deteksi wabah penyakit.
j. Membangun sistem deteksi dini, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Modifikasi SOP penanganan wabah sesuai konteks Raja Ampat.
2) Meningkatkan kualitas pelaporan status kesehatan masyarakat.
k. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan ibu hamil, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Pendataan ibu hamil berbasis wilayah cakupan poskesdes.
2) Sosialisasi pentingnya pemeriksaan masa kehamilan.
3) Penyediaan buku monitoring kunjungan pada masa kehamilan.
l. Peningkatan kualitas tenaga bidan dalam menangani kasus-kasus komplikasi kelahiran, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Penyusunan standar kompetensi penanganan komplikasi kelahiran.
2) Identifikasi ketrampilan yang dimiliki bidan.
3) Penyusunan roadmap pengembangan kompetensi bidan.
4) Pelatihan ketrampilan penanganan komplikasi kelahiran.
5) Evaluasi pengembangan ketrampilan penganganan komplikasi kelahiran.
m. Membangun sistem deteksi dini, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Modifikasi SOP penanganan wabah sesuai konteks Raja Ampat
2) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bayi pasca kelahiran Pendataan kelahiranbayi wilayah cakupan poskesdes
3) Sosialisasi pentingnya pemeriksaan pasca kelahiran
4) Penyediaan buku monitoring pelayanan kesehatan bayi pasca kelahiran
5) Penyediaan pelayanan imunisasi yang terjangkau Masyarakat
6) Penyediaan pelayanan imunisasi yang terjangkau masyarakat
n. Peningkatan cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak terutama dari keluarga miskin, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Pendataan anak dari keluarga miskin.
2) Sosialisasi pentingnya gizi pada mas pertumbuhan anak dan strategi pemenuhannya.
3) Penyediaan buku monitoring pemantauan status gizi anak.
4) Pengadaan makanan pendamping melalui skema kerjasama dengan aktor lain.
o. Peningkatan aseptor KB Pendataan pasangan usia subur, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Sosialisasi Pentingnya KB bagi pasangan suami-istri.
2) Penyediaan alat KB yang vareatif dan terjangkau.
3) Penyediaan akses konsultasi KB.
p. Peningkatan pemahaman remaja, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Penyusunan model sosialisasi untuk remaja.
2) Sosialisasi KB kepada remaja.
3) Penyediaan akses konsultasi kesehatan reproduksi remaja.
q. Rekrutmen dan kaderisasi masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan Pos Obat Kampung, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Pemetaan kebutuhan SDM pengelolaan pos obat kampung.
2) Penyusunan standar kompetensi kader pos obat kampung.
3) Sosialisasi dan penjaringan kader potensial di masyarakat lokal.
4) Pelatihan pemenuhan kompetensi kader pos obat kampung.
r. Rekrutmen dan pembinaan Kader Posyandu/ Poskesdes,dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Pemetaan kebutuhan SDM pengelolaan poskesdes.
2) Penyusunan standar kompetensi kader poskesdes.
3) Sosialisasi dan penjaringan kader potensial di masyarakat lokal.
4) Pelatihan pemenuhan kompetensi kader poskesdes.

s. Pengembangan data based penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Modifikasi indikator penyandang masalah kesejahteraan sosial.
   2) Diseminasi definisi operasional penyandang masalah kesejahteraan sosial.
   3) Pengumpulan data PMKS di tingkat distrik.
   4) Peta PMKS di Kabupaten Raja Ampat.
t. Rekruitmen tenaga pekerja sosial, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Pemetaan kebutuhan tenaga pekerja sosial.
   2) Sosialisasi dan penjaringan sumberdaya potensial di masyarakat lokal.
   3) Pengusulan formasi PNS.
   4) Pengusulan formasi rekruitmen tenaga kontrak.
u. Penyediaan sarana perkantoran dinas kesejahteraan sosial, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Pembangunan gedung Kantor Dinas KesejahteraanSosial.
   2) Pengadaan sarana transportasi laut untuk menunjang pelayanan kesejahteraan sosial.
   3) Pengadaan sarana komunikasi SSB.
v. Penyediaan sarana pelayanan dan rehabilitasi masalah kesejahteraan sosial, dengan kebijakandiarahkan pada:
   1) Pengadaan ruang women crisis center untuk korban KDRT.
   2) Pembangunan panti jompo.
   3) Pembangunan sarana rehabilitasi pengguna napza.
   4) Pembangunan panti asuhan.
w. Koordinasi triwulan dengan instansi dan lembagalembagayang menjadi mitra Dinas Kesejahteraan Sosial, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Indentifikasi lembaga yang menjadi mitra penanganan masalah kesejahteraan sosial.
2) Membangun kesepakatan peran dan fungsi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
3) Membangun kesepakatan mekanisme koordinasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
x. Pemberian bantuan/santunan tunai (cash transfer) bagi lansia, difable, anak yatim/piyatu, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Perumusan indikator penerima manfaat.
   2) Identifikasi kelompok sasaran.
   3) Perumusan mekanisme delivery bantuan sosial.
   4) Penyaluran bantuan (cash transfer) kepada kelompok sasaran.
   5) Evaluasi pemanfaatan bantuan sosial.
y. Pemberian santunan renovasi rumah bagi masyarakat tidak mampu, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Perumusan indikator penerima manfaat.
   2) Identifikasi kelompok sasaran.
   3) Perumusan mekanisme delivery bantuan renovasi.
   4) penyaluran bantuan renovasi kepada kelompok sasaran.
   5) Monitoring renovasi rumah.
z. Pemberian pelatihan ketrampilan produksi, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Identifikasi ketrampilan yang dimiliki kelompok sasaran.
   2) Identifikasi peluang pengembangan ekonomi produksi.
   3) Penentuan kelompok sasaran pelatihan.
   4) Pelatihan pengembangan ketrampilan produksi oleh ahli di bidangnya.
   5) Monitoring proses pelatihan.
   6) Evaluasi pre dan post test.
å. Pemberian bantuan modal produksi, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Identifikasi kelompok sasaran.
   2) Perumusan mekanisme delivery bantuan modal.
   3) penyaluran bantuan modal kepada kelompok sasaran.
   4) Monitoring penggunaan dana modal.
ä. Pendampingan kegiatan ekonomi produktif, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Pembagian tugas wilayah dampingan masing-masing pendamping.
   2) Perumusan mekanisme pendampingan.
   3) Perumusan standar pelaporan pendampingan.
   4) Evaluasi kinerja produksi kelompok dampingan.
ö. Pengadaan sarana komunikasi radio SSB di kawasan pemukiman adat terpencil, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Identifikasi kelompok sasaran.
   2) Perumusan mekanisme delivery SSB.
   3) Perumusan kesepakatan pengelolaan Radio SSB.
   4) Pelatihan pemanfaatan dan perawatan radio SSB.

aa. Memperkuat kelembagaan sosial untuk partisipasi aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Identifikasi kelembagaan sosial potensial.
2) Assessement kapasitas kelembagaan dalam pelayanan sosial
3) Pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan sosial
4) Pelibatan dalam program-program penanganan masalah kesejahteraan social
5) Memfasilitasi tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendorong kegiatan nyata dalam penanganan masalah kesejaheraan sosial

bb. Penyediaan data keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan, dengan kebijakan diarahkan pada up date data
kepahlawanan, perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan

cc. Pemberian santunan biaya hidup bagi janda/duda/keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Perumusan indikator penerima manfaat.
2) Identifikasi kelompok sasaran.
3) Perumusan mekanisme delivery bantuan sosial.
4) Penyaluran bantuan (cash transfer) kepada kelompok sasaran.
5) Evaluasi kebermanfaatan bantuan sosial.

dd. Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraanpendidikan anak usia dini dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini bagi orang tua
2) Merekrut tenaga pendidik dari masyarakat local yang mempunyai kapasitas memadai
3) Mendorong masyarakat di setiap kampong untuk menyelenggarakan PAUD

ee. Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Fasilitasi Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD
2) Pengembangan metode pembelajaran PAUD
3) Pembentukan forum tenaga pendidik PAUD

ff. Meningkatkan sarana pendidikan sekolah dasar sesuai dengan kebutuhan di semua distrik dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan di setiap distrik sesuai dengan kebutuhan
2) Mendorong dan memfasilitasi anak usia sekolah untuk dapat mengenyam pendidikan formal

gg. Meningkatkan APK/APM sekolah dasar di semua distrik dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Penyediaan Bantuan Operasional sekolah jenjang SD
2) Sosialisasi pentingnya pendidikan bagi anak usia sekolah

hh. Menurunkan angka putus sekolah jenjang sekolah dasar di semua distrik dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Penyelenggaraan Kejar Paket A setara SD
2) Penyediaan bea siswa bagi keluarga kurang mampu

ii. Meningkatkan sarana pendidikan untuk jenjang pendidikan SMP, SMA/SMK
1) Pengadaan perpustakaan sekolah
2) Pengadaan buku-buku ajar
3) Pengadaan/peremajaan peralatan laboratorium

jj. Mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Pengembangan kurikulum, bahan ajar sesuai dengan kompetensi output
2) Menyelaraskan dan melengkapi kurikulum dengan aspek-aspek ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kondisi daerah

kk. Mengembangkan metode pembelajaran inovatif, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Pengembangan design metode pembelajaran
2) Penyelenggaraan diklat metode pembelajaran

ll. Meningkatkan kualitas lulusan sekolah dasar dan menengah, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Mengembangkan keterpaduan system pendidikan ketenagakerjaan potensi wilayah sebagai model pengembangann wilayah berbasis potensi lokalitas dan sumberdaya manusia.
2) Meningkatkan nilai dan angka kelulusan jenjang pendidikan dasar dan menengah

mm. Menyediakan fasilitas perpustakaan di setiap sekolah SD, SMP, SMA/SMK dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan di setiap sekolah
2) Pengadaan, penambahan koleksi buku perpustakaan

nn. Meningkatkan fungsi dan peran aktif swasta dalam menyediakan pelayanan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan non formal
2) Fasilitasi perijinan dan persyaratan adminitrasi dalam pendirian pendidikan non formal

3) Mendorong komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan pendidikan non formal; Ekstensifikasi dan intensifikasi kegiatan pendidikan luar sekolah
4) Fasilitasi aktivitas pendidikan luar sekolah yang berbasis kepada kegiatan pembelajaran mandiri masyarakat

oo. Mengembangkan sarana dan sumberdaya manusia untuk mengembangkan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Pembinaan lembaga pendidikan kursus
2) Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal

pp. Meningkatnya kualitas pendidikan non formal, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal
2) Mengembangkan kurikulum dan bahan ajar dan model pembelajaran non formal

qq. Meningkatkan jumlah dan kecukupan tenaga pendidik di semua jenjang dan jalur pendidikan yang sesuai dengan standar kualifikasi, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Identifikasi jumlah dan kecukupan tenaga pendidik di semua jenjang dan jalur pendidikan
2) Penambahan tenaga guru sesuai dengan kebutuhan di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK

rr. Meningkatkan mutu tenaga pendidik SD, SMP, SMA/SMK dan pengelola sekolah yang memiliki sertifikat profesi, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Penyelenggaraan Diklat manajemen Guru kelas,SD,SMP,SMA/SMK
2) Pembinaan KKG/MKG, KKKS/MKKS, KKPS/MKPS dan MGMP
3) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
4) Pelatihan bagi guru-guru di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

ss. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Pelatihan teknis manajemen sekolah
2) Penyelenggaraan Diklat kemampuan mengelola/ menggunakan Perpustakaan dan Laboratorium
3) Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)

tt. Menyusun dan mengimplementasikan skema jaminan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan sebagai skema insentif optimalisasi aktualisasi potensi
dan pengabdian, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Pemberian Honorarium Guru Honor /Pegawai 2010
2) Pemberian insentif kelebihan jam mengajar bagi guru SMP, SMA/SMK
3) Pemberian bantuan bagi guru yang mengalami musibah

uu. Menyediakan fasilitas perumahan dan atau tranportasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan di daerah terpencil, dengan kebijakan diarahkan pada
1) Pengadaan, rehabilitasi rumah dinas guru, kepala sekolah dan penjaga
2) Pengadaan sarana transportasi bagi guru di daerah terpencil

vv. Pengembangan data based peta ketrampilan dan kebutuhan pemberdayaan perempuan, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Penyusunan indikator pemetaan kebutuhan
2) Rektruitmen kader pemetaan kebutuhan pemberdayaan perempuan
3) Sosialisasi indikator pemetaan
4) Pengumpulan data pemetaan sosial

ww. Pengembangan data based peta pelayanan kebutuhan anak (perlindungan, promosi, partisipasi) , dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Penyusunan data kelompok sasaran (anak)
2) Rektruitmen kader ”kelompok ramah anak”
3) Pengumpulan data pemetaan sosial

xx . Penyediaan sarana perkantoran, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Pembangunan gedung perkantoran
2) Pembangunan sangar PKK
3) Bantuan operasional pelayanan posyandu
4) insentif kader posyandu

yy. Promosi kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Lomba 10 program pokok PKK
2) Jambore posyandu

zz. Pemembangan ”kader posyandu yang handal”, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Pemetaan kebutuhan SDM kader posyandu
2) Penyusunan standar kompetensi kader posyandu

åå. Pengembangan sistem pemberdayaan masyarakat kampung kontekstual dan responsif, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Identifikasi kebutuhan program

2) Penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat
3) Membangun kesepakatan mekanisme partisipasi
4) Monitoring proses pemberdayaan
5) Evaluasi pasca program pemberdayaan

ää. Pemberian bantuan dana pendamping program pemberdayaan, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Update data based kampung
2) Membangun kesepakatan pencairan, bukti penggunaan anggaaran dan pelaporan

öö. Rekruitmen tenaga community organizer (CO) , dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Pemetaan kebutuhan SDM Community Organizer
2) Penyusunan standar kompetensi Community Organizer
3) Sosialisasi dan penjaringan kader potensial di masyarakat lokal
4) Pelatihan pemenuhan kompetensi Community Organizer
5) Pelatihan pemenuhan kompetensi kader Community Organizer

aaa. Meningkatkan kualitas generasi muda agar dapat mandiri, unggul, kuat dan mempunyai jati diri, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Peningkatan kapasitas generasi muda dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
2) Pengembangan kepribadian dan jati diri pemudaberdasarkan nilai-nilai budaya dan bangsa

bbb. Menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan dan kepemimpinan generasi muda, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Mengembangkan kapasitas entrepreneurship generasi muda berdasarkan potensi local
2) Mengembangkan jiwa kepemimpinan generasi muda sebagai calon generasi penerus bangsa

ccc. Menciptakan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan potensi diri melalui organisasi kemasyarakatan, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Mengembangkan aktivitas sosial, budaya, seni dan keagamaan melalui organisasi kemaysrakat di tingkat kampong
2) Melibatkan generasi muda dalam even-even budaya daerah, dan nasional

ddd. Meningkatkan kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam proses perencanaan pembangunan
2) Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam menjaga asset, budaya dan lingkungan daerah

eee. Meningkatkan kapasitas organisasi keolahragaan dalam meningkatkan prestasi olah raga, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi keolahragaan
2) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola organisasi keolahragaan dan tenaga palatih

fff. Meningkatnya prestasi olah raga generasi muda di tingkat regional maupun nasional, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Pengembangan bakat dan potensi pelajar di bidang olah raga
2) Pembinaan cabang olah raga berprestasi di daerah

ggg. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olah raga, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana olah raga
2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olah raga di

6.3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan partisipatif.

Strategi dan arah kebijakan mewujudkan tatakelolapemerintahan yang profesional,akuntabel, dan partisipatif meliputi:

a. Pengiriman dan pemberian dukungan bagi PNS untuk tugas belajar di perguruan tinggi baik untuk pendidikan diploma, sarjana, maupun pascasarjana, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Identifikasi kebutuhan pembentukan dan pengembangan kompetensi SDM di instansi-instansi yang memiliki tugas dan fungsi strategis.
2) Identifikasi jumlah dan sebaran PNS yang akan diberi tugas belajar di perguruan tinggi setiap tahunnya dengan mempertimbangkan ketersediaan dan komposisi pegawai di setiap instansi.
3) Penguatan motivasi dan komitmen PNS dalam menjalani tugas belajar.
4) Identifikasi perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan tugas belajar.
5) Pengiriman PNS untuk tugas belajar.
6) Monitoring perkembangan studi PNS yang sedang tugas belajar.

b. Penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis untuk pegawai yang memiliki tugas dan fungsi strategis, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Identifikasi kebutuhan diklat dan bimbingan teknis khususnya untuk institusi-institusi yang memiliki tugas dan fungsi strategis di Raja Ampat.
2) Identifikasi jumlah dan sebaran PNS yang akan menjadi peserta diklat atau bimbingan teknis.

3) Pengembangan kurikulum dan metode penyelenggaraan diklat menyesuaikan dengan tujuan dan komposisi peserta pelatihan.
4) Penyelenggaraan diklat.
5) Monitoring penyelenggaraan dan evaluasi hasil pelatihan.

c. Fasilitasi penyusunan rancangan anggaran dan perubahan anggaran, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Penyusunan KUA/PPAS.
2) Penyusunan RKA-SKPD.
3) Penyusunan RAPBD.
4) Penyusunan DPA-SKPD.
5) Penyusunan APBD Perubahan.

d. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Penyusunan laporan realisasi semesteran.
2) Penyusunan laporan realisasi penerimaan daerah.
3) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

e. Pembenahan sistem pengelolaan keuangan, dengan kebijakan diarahkan pada;
1) Pemeliharaan aplikasi pengelolaan keuangan.
2) Konsultasi dan koordinasi keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi.
3) Penyelenggaraan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan daerah.
4) Penyelenggaraan workshop pengelolaan keuangan daerah.
5) Penyusunan dan sosialisasi SOP pengelolaan keuangan daerah.
6) Pendampingan pengelolaan keuangan tingkat SKPD
7) Penyusunan sistem dan prosedur pengeloaan keuangan desa.
8) Sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa.
9) Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

f. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Perencanaan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
2) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
3) Koordinasi dan konsultasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
4) Intensifikasi pelaksanaan penyuluhan untuk wajib pajak dan retribusi daerah.

g. Pembenahan sistem pengelolaan aset daerah, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Inventarisasi (registrasi dan penomoran) barang milik daerah.
2) Penaksiran nilai terhadap semua barang milik daerah.
3) Penyelenggaraan workshop pengembangan database dan sistem informasi pengelolaan barang milik daerah.
4) Penyusunan SOP pengelolaan barang milik daerah.

h. Penataan SOTK, tupoksi SKPD, serta tupoksi dan standar kompertensi jabatan, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Mereview urgensi dan relevansi tupoksi SKPD.
2) Penataan ulang kelembagaan dan penyesuaian tupoksi SKPD.
3) Analisis jabatan dan beban kerja.
4) Pembenahan struktur internal SKPD dengan memperhatikan hasil review tupoksi, hasil analisis jabatan dan beban kerja
5) Penyusunan tupoksi jabatan struktural dan nonstruktural
6) Penyusunan dan sosialisasi perda dan perangkat hukum pendukungnya tentang tupoksi SKPD
7) Penyusunan dan sosialisasi perangkat hukum tentang standar kompetensi dan tupoksi jabatan

i. Penyusunan SOP SKPD, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Identifikasi mandat dan tupoksi institusi dan sejumlah standar yang berlaku.
2) Penyusunan rancangan awal SOP sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
3) Uji coba dan perbaikan SOP.
4) Penerapan SOP.
5) Pengembangan reward and punishment untuk mendukung penerapan SOP.
6) Monitoring dan evaluasi penerapan SOP.

j. Penguatan kapasitas sekretariat daerah dan jajarannnya sebagai institusi pengembangan kebijakan strategis, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Penguatan sistem formulasi kebijakan strategis termasuk di dalamnya adalah pembagian peran dan tata cara koordinasi yang lebih jelas antar institusi dalam pembuatan kebijakan strategis
2) Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan capaian dari kebijakan strategis.
3) Pengembangan sistem kehumasan yang lebih efektif termasuk perannya dalam mengelola dan menyalurkan keluhan warga (complaint management).

k. Penguatan kapasitas lembaga pemerintah di tingkat distrik dan kampung, dengan kebijakan diarahkan pada:

1) Sosialisasi peran, tugas dan fungsi institusi pemerintah di tingkat distrik dan kampung.
2) Penyelenggaraan diklat dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan rencana strategis, pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan untuk pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.

l. Penataan administrasi kewilayahan, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Penentuan batas wilayah administratif distrik dan kampung.
2) Penentuan batas wilayah administratif kabupaten.
3) Peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi di tingkat distrik dan kampung.

m. Perbaikan penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Penyelenggaraan pelatihan untuk mengembangkan sistem pelayanan yang berwawasan good governance.
2) Penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan secara mobile dan kolektif.
3) Intensifikasi sosialisasi layanan administrasi kependudukan.
4) Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
5) Penyediaan dan operasionalisasi sarana dan teknologi pendukung layanan.
6) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan

n. Peningkatan jaminan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Peningkatan kapasitas satuan polisi pamong praja.
2) Pengendalian kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan.
3) Peningkatan pengawasan dan pengamanan wilayah perbatasan.
4) Peningkatan jaminan keamanan penyelenggaraan kegiatan pemilu dan pemerintahan.
5) Pengembangan kerjasama dengan aparat kepolisian dan TNI dalam menjaga keamanan lingkungan.

o. Peningkatan kapasitas pengurangan risiko dan penanggulangan bencana, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Peningkatan kapasitas institusi penanggulangan bencana.
2) Pengembangan instrumen untuk mengurangi risiko bencana seperti peta rawan bencana, alat deteksi dini bencana, serta sistem evakuasi dan penyelamatan massal.
3) Penyediaan tempat penampungan korban bencana beserta sarana dan perlengkapan pendukungnya.

p. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Penyediaan sarana dan perlengkapan perpustakaan dan taman baca.
2) Penyediaan koleksi materi perpustakaan (buku, majalah, buletin, video, dll) yang relevan dengan masyarakat Raja Ampat dan juga keberadaan Raja Ampat sebagai daerah wisata unggulan.

q. Penguatan kapasitas penyusunan rencana pembangunan, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Penguatan kapasitas institusi perencanaan pembangunan daerah termasuk di dalam pengelolaan program kerjasama pembangunan.
2) Penyediaan data dan informasi pendukung dalam penyusunan rencana pembangunan.
3) Fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.
4) Fasilitasi penyusunan rencana strategis di tingkat SKPD
5) Fasilitasi penyusunan rencana strategis di tingkat kampung.
6) Fasilitasi penyusunan rencana pembangunan sektoral untuk sektor ekonomi dan sosial budaya.
7) Fasilitasi penyusunan rencana pengembangan kawasan khusus yang terdiri dari kawasan perkotaan, kawasan strategis, kawasan rawan bencana, dan
wilayah perbatasan.
8) Fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan rencana yang terkait lainnya.
9) Penyusunan kebijakan kependudukan untuk merespon dan mengantisipasi permasalahan kependudukan di Raja Ampat.

r. Penguatan kapasitas DPRD sebagai lembaga legislasi, pengawasan dan perwakilan rakyat, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM anggota DPRD agar dapat menjalankan peran dan fungsi yang dimilikinya.
2) Fasilitasi penyelenggaraan public hearing dengan lembaga eksekutif dan masyarakat.
3) Penyelenggaraan kegiatan benchmarking dan observasi yang relevan dengan penyusunan regulasi dan kebijakan publik.
4) Fasilitasi penyelenggaraaan rapat untuk penyusunan regulasi dan kebijakan publik.
5) Fasilitasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

s. Penguatan kapasitas penyelenggaraan monitoring dan evaluasi, dengan kebijakan diarahkan pada:
1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (Reguler), Khusus, dan Evaluasi Proyek
2) Peningkatan komitmen penindaklanjutan temuan pengawasan
3) Konsolidasi dan pembinaan terhadap aparat pengawan internal

t. Peningkatan komitmen kepala dan wakil kepala daerah dalam mendorong perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Fasilitasi kepala daerah/ wakil kepala daerah dalam intensifikasi penyelenggaraan dialog dengan kelompok-kelompok masyarakat
   2) Fasilitasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam intensifikasi monitoring ke institusi pemerintahan daerah.
   3) Fasilitasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam intensifikasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan.
   4) Fasilitasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam koordinasi dan pengembangan kerjasama dengan pihak luar daerah.

u. Penguatan kapasitas penyusunan laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat SKPD.
   2) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
   3) Fasilitasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

v. Peningkatan toleransi, kebersamaan dan kerukunan antarkelompok masyarakat yang berbeda agama, suku, dan daerah asal, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Intensifikasi sosialisasi tentang urgensi dan keunggulan masyarakat yang inklusif dan antidiskriminasi dalam pembangunan daerah.
   2) Intensifikasi kegiatan sosial bersama antar kelompok masyarakat yang berbeda agama, suku, dan daerah asal.
   3) Menumbuhkembangkan wawasan dan kesadaran kebangsaan di kalangan masyarakat melalui pembentukan dan penyelenggaraan forum komunikasi lintas agama, suku, dan daerah asal.

w. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam praktik demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Sosialisasi tentang agenda dan tata cara penyelenggaraan pemilu (legislatif, presiden, dan kepala daerah).
   2) Peningkatan partisipasi masyarakat sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu.
   3) Fasilitasi penyelenggaraan pemilu.
   4) Penyelenggaraan pendidikan pemilih.
   5) Penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat.
   6) Fasilitasi pengembangan kelembagaan politik daerah
   7) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan keamanan lingkungan.

x. Penegakan hukum secara tegas dan konsisten, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Intensifikasi pencegahan dan penertiban penggunaan miras dan narkoba.
   2) Intensifikasi pencegahan dan penertiban premanisme.
   3) Peningkatan kepatuhan terhadap perijinan.
   4) Penertiban administrasi pertanahan
   5) Penyelesaian konflik pertanahan

6.4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Bahari dan Sumberdaya Lainnya.

Strategi dan arah kebijakan meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis potensi bahari dan sumberdaya

a. Pengembangan dan pengelolaan produktifitas perikanan dan kelautan, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Identifikasi Lahan dan potensi pengembangan budidaya perikanan.
   2) Pengendalian penangkapan dan pengembangan budi daya ikan.
   3) Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR).

b. Fasilitasi peningkatan produktifitas perikanan dan kelautan, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan Budidaya Air Tawar dan Laut.
   2) Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir.
   3) Peningkatan kapasitas SDM kelompok nelayan.

c. Peningkatan ketersediaan bahan pangan utama, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Peningkatan jumlah areal produksi pertanian.
   2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pangan dan hortikultura.
   3) Pemberian insentif kepada petani.
   4) Penyuluhan dan Pendampingan.
   5) Pengembangan desa mandiri pangan.

d. Diversifikasi sumber pangan lokal, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Pengembangan jenis/varietas bibit pangan lokal.
   2) Penyuluhan dan Pendampingan.
   3) Peningkatan kapasitas SDM Petani dan penyuluh.

e. Pengembangan dan pemberdayaan di bidang peternakan, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Peningkatan kapasitas SDM peternak.
   2) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.
f. Pengembangan dan pemberdayaan di bidang perkebunan, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Pembukaan lahan Kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT).
   2) Peningkatan kapasitas SDM pekebun.
   3) Peningkatan sarana dan prasarana teknologi tepat guna perkebunan.
   4) Pembangunan pusat pengolahan hasil kebun.
g. Pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya hutan, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan.
   2) Peningkatan kapasitas SDM kehutanan.
h. Perlindungan dan Pengamanan Hutan, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Pengembangan hutan tanaman.
   2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
   3) Sosialisasi manfaat dan kegunaan hutan
   4) Reboisasi dan Rehabilitasi Kawasan Hutan
i. Peningkatan pemasaran pariwisata, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.
   2) Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata.
   3) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
j. Pengembangan tempat tujuan Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan.
   2) Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha.
   3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata.
   4) Pengembangan daerah tujuan wisata.
k. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata serta fasilitas pendukungnya, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Pengembangan kualitas obyek dan event-event pariwisata.
   2) Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata.
l. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan kebijakan diarahkan pada bantuan permodalan bagi pelaku UMKM.
m. Peningkatan kapasitas koperasi masyarakat Pelatihan manajemen pengelolaan UMKM, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah
   2) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
   3) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
   4) Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi.
n. Peningkatan jumlah dan volume usaha industry masyarakat, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta.
   2) Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah.
   3) Pengembangan sentra-sentra industri potensial.
o. Pemberdayaan kelompok industri masyarakat, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Pendampingan para pengrajin.
   2) Pemberian bantuan modal usaha.
p. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Penyusunan dokumen Data Base Tenaga Kerja
   2) Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja mandiri
   3) Penyediaan sarana penunjang latihan kerja
   4) Monitoring & Evaluasi Penggunaan Tenaga Kerja
q. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
   2) Sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
   3) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
r. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Pembinaan usaha mandiri
   2) Peningkatan program padat karya
   3) Penyediaan teknologi tepat guna penunjang produksi
   4) Penyediaan data penyerapan tenaga kerja
   5) Penyediaan data lowongan pekerjaan
   6) Monitoring dan evaluasi

s. Peningkatan promosi dan jumlah investor dalam dan luar negeri, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah.
   2) Pengembangan System Informasi Penanaman Modal.
   3) Penyelenggaraan pameran investasi.

t. Peningkatan dan pengembangan ekspor, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri.
   2) Pengembangan data base informasi potensi unggulan.
   3) Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan.
   4) Peningkatan standardisasi mutu produk.
   5) Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen.

u. Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Inventarisasi dokumen seni dan budaya Raja Ampat
   2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
   3) Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah.

v. Pengelolaan kekayaan Budaya, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
   2) Pembinaan Kelompok Seni dan Tari Masyarakat Kampung Wisata.
   3) Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.

w. Pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, dengan kebijakan diarahkan pada:
   1) Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan.
   2) Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut.
   3) Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut.

Tabel 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Raja Ampat

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
1. MENGEMBANGKAN JARINGAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG MEMADAI (M1)			
1.1. Meningkatkan ketersediaan jaringan infrastruktur dasar transportasi, energi, komunikasi, dan air bersih.	1.1.1. Meningkatnya akses barang dan manusia dari luar daerah maupun antar distrik wilayah di Raja Ampat.	1.1.1.1. Peningkatan prasarana dan sarana transportasi laut.	1.1.1.1.1. Peningkatan ketersediaan dermaga di disitrik-distrik kepulauan.
			1.1.1.1.2. Penyusunan masterplan pengembangan pelabuhan.
			1.1.1.1.3. Penyediaan sarana pendukung keselamatan perhubungan laut
			1.1.1.1.4. Penyediaan sarana pendukung keselamatan perhubungan laut
		1.1.1.2. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan	1.1.1.2.1. Pembangunan jalan dan jembatan
			1.1.1.2.2. Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan darat.
		1.1.1.3. Peningkatan dan pemeliharaan lapangan terbang perintis.	1.1.1.3.1. Perencanaan pembangunan bandara perintis.
			1.1.1.3.2. Peningkatan prasarana dan fasilitas pendukung keselamatan perhubungan udara.
	1.1.2. Meningkatnya ketersediaan energy listrik dan BBM.	1.1.2.1. Pemeliharaan dan peningkatan sumber tenaga listrik yang ada dan jaringannya.	1.1.2.1.1. Pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)
			1.1.2.1.2. Peningkatan Jaringan listrik
			1.1.2.1.3. Pengoperasian PLTD
			1.1.2.1.4. Penyediaan tangki penyimpanan BBM bahan minyak
			1.1.2.1.5. Pemeliharaan Jaringan Listrik
			1.1.2.1.6. Penyediaan perangkat Kwh elektronik Digital Prabayar
			1.1.2.1.7. Pengembangan PLTS (Surya)
			1.1.2.1.8. Pengembangan PLTMH (mikro hidro)
			1.1.2.1.9. Penyuluhan masyarakat tentang perawatan PLTS dan PLTMH
	1.1.3. Tersedianya jaringan komunikasi yang lebih memadai.	1.1.3.1. Pemeliharaan dan peningkatan prasarana telekomunikasi	1.1.3.1.1. Identifikasi kebutuhan dan perencanaan pengembangan prasarana telekomunikasi.
			1.1.3.1.2. Pembangunan tower seluler
		1.1.3.2. Meningkatkan ketersediaan sentra-sentra layanan telekomunikasi satelit.	1.1.3.2.1. Pembangunan warung informasi masyarakat (WIM)

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
		1.1.3.3. Mengembangkan akses telekomunikasi seluler.	1.1.3.3.1. Penyelenggaraan Stasiun Radio Daerah
		1.1.3.4. Mengembangkan fasilitas internet.	1.1.3.4.1. Pengembangan website pemda
	1.1.4. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.	1.1.4.1. Pengembangan jaringan distribusi air bersih.	1.1.4.1.1. Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
			1.1.4.1.2. Perencanaan pembangunan reservoir
			1.1.4.1.3. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
			1.1.4.1.4. Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
			1.1.4.1.5. Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
			1.1.4.1.6. Pembangunan sumur-sumur air tanah
			1.1.4.1.7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
			1.1.4.1.8. Peningkatan distribusi penyediaan air baku
			1.1.4.1.9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	1.1.5. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	1.1.5.1. Perencanaan dan pembangunan jaringan irigasi	1.1.5.1.1. Perencanaan dan pembangunan jaringan irigasi
			1.1.5.1.2. Perencanaan dan pembangunan reservoir
			1.1.5.1.3. Perencanaan dan pembangunan pintu air
			1.1.5.1.4. Perencanaan dan normalisasi saluran sungai
			1.1.5.1.5. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1.2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan public dasar di bidang pendidikan	1.2.1. Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang semakin terjangkau oleh masyarakat	1.2.1.1. Pembangunan gedung sekolah dan perpustakaan dan infrastruktur penunjang lainnya.	1.2.1.1.1. Identifikasi kebutuhan
			1.2.1.1.2. Penyiapan lahan bagi sekolah, rumah dinas dan asrama, serta fasilitas pendukung lainnya.
			1.2.1.1.3. Pembangunan sekolah, rumah dinas, dan asrama siswa serta fasilitas pendukung lainnya
	1.2.2. Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan lanjut tingkat atas (SLTA) di kabupaten	1.2.2.1. Pembangunan gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan infrastruktur penunjang lainnya.	1.2.2.1.1. Identifikasi kebutuhan
			1.2.2.1.2. Penyiapan lahan bagi sekolah, rumah dinas dan asrama, serta fasilitas pendukung lainnya.
			1.2.2.1.3. Pembangunan sekolah, rumah dinas, dan asrama siswa serta fasilitas pendukung lainnya

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
1.3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan public dasar di bidang kesehatan.	1.3.1. Tersedianya instalasi kesehatan yang semakin terjangkau oleh masyarakat (Polindes, Puskesmas, RS).	1.3.1.1. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas, polindes, dan posyandu	1.3.1.1.1. Identifikasi kebutuhan.
			1.3.1.1.2. Perencanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur kesehatan.
			1.3.1.1.3. Pembangunan puskesmas, poskesdes dan posyandu
			1.3.1.1.4. Pembangunan dan perbaikan fasilitas perumahan bagi tenaga medis.
			1.3.1.1.5. Penyediaan kendaraan untuk fasilitas puskesmas keliling
1.4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pemukiman yang sehat dan aman.	1.4.1. Tersedianya pemukiman sederhana, sehat dan tahan gempa bagi masyarakat	1.4.1.1. Pengembangan desain rumah sederhana, sehat, dan tahan gempa	1.4.1.1.1. Identifikasi kebutuhan
			1.4.1.1.2. Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
			1.4.1.1.3. Penyusunan konsep dan detail desain rumah sederhana, sehat dan tahan gempa
			1.4.1.1.4. Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
			1.4.1.1.5. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
			1.4.1.1.6. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
			1.4.1.1.7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.5. Meningkatkan ketersediaan prasarana aparatur pemerintah.	1.5.1. Tersedianya perkantoran instansi pemerintah yang memadai di tingkat kabupaten.	1.5.1.1. Pembangunan dan pemeliharaan gedung dan perkantoran	1.5.1.1.1. Identifikasi kebutuhan
			1.5.1.1.2. Penyiapan lahan bagi perkantoran pemerintah di tingkat kabupaten
			1.5.1.1.3. Pembangunan perkantoran pemerintahan di tingkat kabupaten
			1.5.1.1.4. Rehabilitasi perkantoran yang sudah ada.
			1.5.1.1.5. Monitoring dan evaluasi.
	1.5.2. Tersedianya perkantoran instansi pemerintah di tingkat distrik dan kampung.	1.5.2.1. Pembangunan dan pemeliharaan kantor distrik dan kampung	1.5.2.1.1. Identifikasi kebutuhan
			1.5.2.1.2. Penyiapan lahan bagi perkantoran pemerintah di tingkat kabupaten
			1.5.2.1.3. Pembangunan perkantoran pemerintahan di tingkat kabupaten
			1.5.2.1.4. Rehabilitasi perkantoran yang sudah ada.
			1.5.2.1.5. Monitoring dan evaluasi.
	1.5.3. Tersedianya perpustakaan umum	1.5.3.1. Pembangunan gedung perspustakaan dan Penyelenggaraan perspustakaan keliling	1.5.3.1.1. Perencanaan pembangunan gedung perpustakaan.
			1.5.3.1.2. Penyediaan areal lahan lokasi gedung perpustakaan.
			1.5.3.1.3. Pembangunan gedung perpustakaan.
			1.5.3.1.4. Pengadaan kendaraan untuk perpustakaan keliling.

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	1.5.4. Tersedianya rumah dinas bagi pegawai.	1.5.4.1. Penyediaan areal lahan bagi rumah dinas pegawai	1.5.4.1.1. Identifikasi kebutuhan dan perencanaan
			1.5.4.1.2. Penyiapan lahan bagi rumah dinas dan rumah jabatan
			1.5.4.1.3. Pembangunan rumah dinas dan rumah jabatan.
			1.5.4.1.4. Pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan
			1.5.4.1.5. Monitoring dan evaluasi.
1.6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar bagi pengembangan ekonomi lokal.	1.6.1. Tersedianya pasar pedesaan	1.6.1.1. Pembangunan dan rehabilitasi pasar desa	1.6.1.1.1. Identifikasi kebutuhan dan perencanaan pengembangan pasar desa.
			1.6.1.1.2. Penyiapan lahan pasar desa
			1.6.1.1.3. Pembangunan pasar desa.
			1.6.1.1.4. Monitoring dan evaluasi.
	1.6.2. Tersedianya tempat pelelangan ikan	1.6.2.1. Pembangunan tempat pelelangan ikan	1.6.2.1.1. Identifikasi kebutuhan dan perencanaan pengembangan TPI.
			1.6.2.1.2. Penyiapan lahan TPI
			1.6.2.1.3. Pembangunan TPI
			1.6.2.1.4. Monitoring dan evaluasi.
	1.6.3. Terbangunnya koperasi.	1.6.3.1. Pembangunan prasana dan sarana koperasi di tiap-tiap distrik.	1.6.3.1.1. Identifikasi kebutuhan dan perencanaan pengembangan koperasi.
			1.6.3.1.2. Koordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi terkait.
			1.6.3.1.3. Penyiapan lahan bagi koperasi
			1.6.3.1.4. Pembangunan gedung koperasi
			1.6.3.1.5. Monitoring dan evaluasi.
1.7. Mengendalikan abrasi pantai dan ancaman banjir.	1.7.1. Menurunkan kerusakan pantai akibat abrasi.	1.7.1.1. Pembangunan dan rehabilitasi talud penahan abrasi pantai.	1.7.1.1.1. Perencanaan talud/brojong/breakwater
			1.7.1.1.2. Survei teknis talud/bronjong/ breakwater
			1.7.1.1.3. Pembangunan talud/bronjong/ breakwater
			1.7.1.1.4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	1.7.2. Antisipasi ancaman banjir	1.7.2.1. Pembangunan dan pemeliharaan	1.7.2.1.1. Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/turap
			1.7.2.1.2. Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong dan kemiringan turap
			1.7.2.1.3. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/turap
			1.7.2.1.4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.8. Meningkatkan ketersediaan prasarana umum	1.8.1. Tersedianya tempat ibadah	1.8.1.1. Pembangunan fasilitas peribadatan	1.8.1.1.1. Perencanaan pembangunan fasilitas peribadatan
			1.8.1.1.2. Mendorong partisipasi masyarakat setempat
			1.8.1.1.3. Koordinasi dengan instansi terkait.

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
			1.8.1.1.4. Penyediaan areal lahan lokasi fasilitas peribadatan.
			1.8.1.1.5. Pembangunan fasilitas peribadatan
	1.8.2. Tersedianya sarana olahraga	1.8.2.1. Penyediaan areal olahraga dan	1.8.2.1.1. Perencanaan pembangunan gelanggang olahraga
			1.8.2.1.2. Penyiapan dan pematangan lahan
			1.8.2.1.3. Pembangunan gelanggang olahraga
			1.8.2.1.4. Monitoring dan evaluasi.
		1.8.2.2. Pembangunan tempat olehraga	1.8.2.2.1. Perencanaan pembangunan gedung olahraga
			1.8.2.2.2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pematangan lahan
			1.8.2.2.3. Monitoring dan evaluasi.
	1.8.3. Tersedianya areal pemakaman umum.	1.8.3.1. Penyediaan areal TPU	1.8.3.1.1. Perencanaan penyediaan TPU
			1.8.3.1.2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pematangan lahan
			1.8.3.1.3. Monitoring dan evaluasi.
2. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU BAGI SELURUH MASYARAKAT RAJA AMPAT (M2)			
2.1. Meningkatkan akses warga terhadap pelayanan kesehatan	2.1.1. Tersedianya sarana dan prasarana layanan kesehatan secara lebih memadai	2.1.1.1. Pengembangan pelayanan kesehatan "jemput bola" melalui pelayanan keliling darat maupun laut	2.1.1.1.1. Identifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar
			2.1.1.1.2. Penyusunan titik-titik strategis pengembangan puskesmas
			2.1.1.1.3. Penyusunan jalur pelayanan kesehatan "jemput bola" melalui puskesmas keliling
			2.1.1.1.4. Pengadaan peralatan kesehatan menetap maupun bergerak
			2.1.1.1.5. Evaluasi efektivitas pelayanan kesehatan bergerak
		2.1.1.2. Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa (poskesdes)	2.1.1.2.1. Pemetaan pelayanan kesehatan di tingkat desa
			2.1.1.2.2. Pengembangan pospelayanan kesehatan desa
			2.1.1.2.3. Pengadaan peralatan pendukung poskesdes
			2.1.1.2.4. Pelatihan kader poskesdes
			2.1.1.2.5. Evalasi unit pelayanan kesehatan poskesdes
		2.1.1.3. Pengembangan pelayanan RSUD dengan didukung sarana dan prasarana yang lebih memadai	2.1.1.3.1. Identifikasi kebutuhan pengembangan pelayanan kesehatan lanjut (rujukan)
			2.1.1.3.2. Pengadaan peralatan kesehatan tingkat lanjut
			2.1.1.3.3. Pengadaan peralatan pendukung kesehatan tingkat rujukan

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
2.2. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan	2.2.1. Tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang cukup memadai untuk berbagai jenisnya (dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan)	2.2.1.1. Rekrutmen CPNS dan kontrak	2.2.1.1.1. Pemetaan kebutuhan tenaga medis
			2.2.1.1.2. Pemetaan kebutuhan tenaga pendukung kesehatan
			2.2.1.1.3. Pemantauan beban kerja PNS di bidang kesehatan
			2.2.1.1.4. Sosialisasi dan penjaringan sumberdaya potensial di masyarakat lokal
			2.2.1.1.5. Pengusulan formasi PNS
			2.2.1.1.6. Pengusulan formasi rekruitmen tenaga kontrak
		2.2.1.2. Penggalangan dukungan tenaga melalui kerjasama dengan perguruan tinggi mitra pemda	2.2.1.2.1. Identifikasi institusi potensial pengembangan kemitraan di bidang kesehatan
			2.2.1.2.2. Membangun kesepakatan kerjasama multiyears
			2.2.1.2.3. Penempatan tenaga medis dari mitra
			2.2.1.2.4. Evaluasi program kemitraan
	2.2.2. Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan	2.2.2.1. Pengiriman tugas belajar bergelar dan non gelar tenaga kesehatan	2.2.2.1.1. Identifikasi kebutuhan tenaga kesehatan
			2.2.2.1.2. Penyusunan rencana pengembangan sumberdaya manusia kesehatan
			2.2.2.1.3. Penentuan kriteria seleksi penerimaan beasiswa pendidikan bergelar maupun non gelar
			2.2.2.1.4. Sosialisasi beasiswa pendidikan bergelar dan non gelar
			2.2.2.1.5. Rekruitment beasiswa bergelar dan non gelar
			2.2.2.1.6. Monitoring proses pendidikan bergelar maupun non gelar
			2.2.2.1.7. Evaluasi akhir masa pendidikan bergelar maupun non gelar
2.3. Meningkatkan daya tanggap terhadap kejadian wabah penyakit	2.3.1. Meningkatnya daya tanggap tenaga kesehatan dan masyarakat dalam penanganan kejadian wabah penyakit	2.3.1.1. Penyediaan data	2.3.1.1.1. Penyusunan data wilayah rawan wabah penyakit
		2.3.1.2. Kerjasama antar stakeholders	2.3.1.2.1. Koordinasi peran masing-masing stakeholders untuk deteksi dini wabah penyakit
			2.3.1.2.2. Mengembangkan kemitraan bersama masyarakat
		2.3.1.3. Memperkuat kapasitas penyedia pelayanan kesehatan	2.3.1.3.1. Meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas dalam penanganan wabah penyakit
			2.3.1.3.2. Meningkatkan kapasitas tenaga puskesmas untuk penanganan wabah penyakit
			2.3.1.3.3. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam penanganan wabah penyakit
			2.3.1.3.4. Pengadaan alat komunikasi yang mendukung kecepatan deteksi wabah penyakit
		2.3.1.4. Membangun system deteksi dini	2.3.1.4.1. Modifikasi SOP penanganan wabah sesuai konteks Raja Ampat
			2.3.1.4.2. Meningkatkan kualitas pelaporan status kesehatan masyarakat

Visi: “MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
2.4. Menurunkan angka kematian ibu dan balita	2.4.1. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan	2.4.1.1 Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan ibu hamil	2.4.1.1.1. Pendataan ibu hamil berbasis wilayah cakupan poskesdes
			2.4.1.1.2. Sosialisasi pentingnya pemeriksaan masa kehamilan
			2.4.1.1.3. Penyediaan buku monitoring kunjungan pada masa kehamilan
		2.4.1.2. Peningkatan kualitas tenaga bidan dalam menangani kasuskasus komplikasi kelahiran	2.4.1.2.1. Penyusunan standar kompetensi penanganan komplikasi kelahiran
			2.4.1.2.2. Identifikasi ketrampilan yang dimiliki bidan
			2.4.1.2.3. Penyusunan roadmap pengembangan kompetensi bidan
			2.4.1.2.4. Pelatihan ketrampilan penanganan komplikasi kelahiran
			2.4.1.2.5. Evaluasi pengembangan ketrampilan penganganan komplikasi kelahiran
	2.4.2. Menurunnya angka kematian balita	2.4.2.1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bayi pasca kelahiran	2.4.2.1.1. Pendataan kelahiran bayi wilayah cakupan poskesdes
			2.4.2.1.2. Sosialisasi pentingnya pemeriksaan pasca kelahiran
			2.4.2.1.3. Penyediaan buku monitoring pelayanan kesehatan bayi pasca kelahiran
			2.4.2.1.4. Penyediaan pelayanan imunisasi yang terjangkau masyarakat
			2.4.2.1.5. Penyediaan pelayanan imunisasi yang terjangkau masyarakat
		2.4.2.2. Peningkatan cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak terutama dari keluarga miskin	2.4.2.2.1. Pendataan anak dari keluarga miskin
			2.4.2.2.2 Sosialisasi pentingnya gizi pada mas pertumbuhan anak dan strategi pemenuhannya
			2.4.2.2.3. Penyediaan buku monitoring pemantauan status gizi anak
			2.4.2.2.4. Pengadaan makanan pendamping melalui skema kerjasama dengan aktor lain
	2.4.3. Meningkatnya jangkauan dan intensitas pelayanan KB	2.4.3.1. Peningkatan aseptor KB	2.4.3.1.1. Pendataan pasangan usia subur
			2.4.3.1.2. Sosialisasi Pentingnya KB bagi pasangan suami-istri
			2.4.3.1.3. Penyediaan alat KB yang vareatif dan terjangkau
			2.4.3.1.4. Penyediaan akses konsultasi KB
		2.4.3.2. Peningkatan pemahaman remaja	2.4.3.2.1. Penyusunan model sosialisasi untuk remaja
			2.4.3.2.2. Sosialisasi KB kepada remaja
			2.4.3.2.3. Penyediaan akses konsultasi kesehatan reproduksi remaja

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
2.5. Meningkatkan keberdayaandan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan	2.5.1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola Pos Obat Kampung dan Poskesdes	2.5.1.1. Rekrutmen dan kaderisasi masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan Pos Obat Kampung	2.5.1.1.1. Pemetaan kebutuhan SDM pengelolaan pos obat kampung
			2.5.1.1.2. Penyusunan standar kompetensi kader pos obat kampung
			2.5.1.1.3. Sosialisasi dan penjaringan kader potensial di masyarakat lokal
			2.5.1.1.4. Pelatihan pemenuhan kompetensi kader pos obat kampung
		2.5.1.2. Rekrutmen dan pembinaan Kader Posyandu/Poskesdes	2.5.1.2.1. Pemetaan kebutuhan SDM pengelolaan poskesdes
			2.5.1.2.2. Penyusunan standar kompetensi kader poskesdes
			2.5.1.2.3. Sosialisasi dan penjaringan kader potensial di masyarakat lokal
			2.5.1.2.4. Pelatihan pemenuhan kompetensi kader poskesdes
2.6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menyelenggarakan upaya kesejahteraan sosial	2.6.1. Tersedianya data based perencanaan kebijakan kesejahteraan sosial	2.6.1.1. Pengembangan data based penyandang masalah kesejahteraan sosial	2.6.1.1.1. Modifikasi indikator penyandang masalah kesejahteraan sosial
			2.6.1.1.2. Diseminasi definisi operasional penyandang masalah kesejahteraan sosial
			2.6.1.1.3. Pengumpulan data PMKS di tingkat distrik
			2.6.1.1.4. Peta PMKS di Kabupaten Raja Ampat
	2.6.2. Tersedianya sumberdaya manusia yang kompeten untuk pelayanan kesejahteraan sosial	2.6.2.1. Rekruitmen tenaga pekerja sosial	2.6.2.1.1. Pemetaan kebutuhan tenaga pekerja sosial
			2.6.2.1.2. Sosialisasi dan penjaringan sumberdaya potensial di masyarakat lokal
			2.6.2.1.3. Pengusulan formasi PNS
			2.6.2.1.4. Pengusulan formasi rekruitmen tenaga kontrak
		2.6.2.2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan bergelar	2.6.2.2.1. Identifikasi kebutuhan tenaga pekerja sosial
			2.6.2.2.2. Penyusunan rencana pengembangan sumberdaya kesejahteraan sosial
			2.6.2.2.3. Penentuan kriteria seleksi penerimaan beasiswa pendidikan bergelar
			2.6.2.2.4. Sosialisasi beasiswa pendidikan bergelar
			2.6.2.2.5. Rekruitment beasiswa bergelar
			2.6.2.2.6. Monitoring proses pendidikan bergelar
			2.6.2.2.7. Evaluasi akhir masa pendidikan bergelar
		2.6.2.3. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan non gelar	2.6.2.3.1. Penyusunan standar kompetensi pekerja sosial
			2.6.2.3.2. Identifikasi ketrampilan yang dimiliki pekerja sosial
			2.6.2.3.3. Penyusunan roadmap pengembangan kompetensi pekerja sosial
			2.6.2.3.4. Pelatihan ketrampilan pelayanan pekerja sosial
			2.6.2.3.5. Evaluasi pengembangan ketrampilan pelayanan pekerja sosial

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2.6.3. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan social	2.6.3.1. Penyediaan sarana perkantoran dinas kesejahteraan sosial	2.6.3.1.1. Pembangunan gedung Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial
			2.6.3.1.2. Pengadaan sarana transportasi laut untuk menunjang pelayanan kesejahteraan sosial
			2.6.3.1.3. Pengadaan sarana komunikasi SSB
		2.6.3.2. Penyediaan sarana pelayanan dan rehabilitasi masalah kesejahteraan sosial	2.6.3.2.1. Pengadaan ruang women crisis center untuk korban KDRT
			2.6.3.2.2. Pembangunan panti jompo
			2.6.3.2.3. Pembangunan sarana rehabilitasi pengguna napza
			2.6.3.2.4. Pembangunan panti asuhan
	2.6.4. Terbentuknya mekanisme koordinasi penanganan masalah kesejahteraan sosial	2.6.4.1. Koordinasi triwulan dengan instansi dan lembaga-lembaga yang menjadi mitra Dinas Kessos	2.6.4.1.1. Indentifikasi lembaga yang menjadi mitra penanganan masalah kesejahteraan sosial
			2.6.4.1.2. Membangun kesepakatan peran dan fungsi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
			2.6.4.1.3. Membangun kesepakatan mekanisme koordinasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
2.7. Meningkatkan kualitas kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil	2.7.1. Meningkatnya kualitas kehidupan penyandang masalah kesejahteraan social dan KAT melalui bantuan sosial	2.7.1.1. Pemberian bantuan/santunan tunai (cash transfer) bagi lansia, difable, anak yatim/piyatu	2.7.1.1.1. Perumusan indikator penerima manfaat
			2.7.1.1.2. Identifikasi kelompok sasaran
			2.7.1.1.3. Perumusan mekanisme delivery bantuan sosial
			2.7.1.1.4. penyaluran bantuan (cash transfer) kepada kelompok sasaran
			2.7.1.1.5. Evaluasi pemanfaatan bantuan sosial
		2.7.1.2. Pemberian santunan renovasi rumah bagi masyarakat tidak mampu	2.7.1.2.1. Perumusan indikator penerima manfaat
			2.7.1.2.2. Identifikasi kelompok sasaran
			2.7.1.2.3. Perumusan mekanisme delivery bantuan renovasi
			2.7.1.2.4. Penyaluran bantuan renovasi kepada kelompok sasaran
			2.7.1.2.5. Monitoring renovasi rumah
	2.7.2. Meningkatnya keberdayaan ekonomi PMKS dan KAT	2.7.2.1. Pemberian pelatihan ketrampilan produksi	2.7.2.1.1. Identifikasi ketrampilan yang dimiliki kelompok sasaran
			2.7.2.1.2. Identifikasi peluang pengembangan ekonomi produksi
			2.7.2.1.3. Penentuan kelompok sasaran pelatihan
			2.7.2.1.4. Pelatihan pengembangan ketrampilan produksi oleh ahli di bidangnya
			2.7.2.1.5. Monitoring proses pelatihan
			2.7.2.1.6. Evaluasi pre dan post test
		2.7.2.2. Pemberian bantuan modal produksi	2.7.2.2.1. Identifikasi kelompok sasaran
			2.7.2.2.2. Perumusan mekanisme delivery bantuan modal
			2.7.2.2.3. Penyaluran bantuan modal kepada kelompok sasaran
			2.7.2.2.4. Monitoring penggunaan dana modal

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
		2.7.2.3. Pendampingan kegiatan ekonomi produktif	2.7.2.3.1. Pembagian tugas wilayah dampingan masing-masing pendamping
			2.7.2.3.2. Perumusan mekanisme pendampingan
			2.7.2.3.3. Perumusan standar pelaporan pendampingan
			2.7.2.3.4. Evaluasi kinerja produksi kelompok dampingan
	2.7.3. Meningkatnya akses komunikasi KAT	2.7.3.1. Pengadaan sarana komunikasi radio SSB di kawasan pemukiman adat terpencil	2.7.3.1.1. Identifikasi kelompok sasaran
			2.7.3.1.2. Perumusan mekanisme delivery SSB
			2.7.3.1.3. Perumusan kesepakatan pengelolaan Radio SSB
			2.7.3.1.4. Pelatihan pemanfaatan dan perawatan radio SSB
2.8. Meningkatkan kesetiakawanan sosial	2.8.1. Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap masalah kesejahteraan social melalui penguatan jaringan sosial	2.8.1.1. Memperkuat kelembagaan sosial untuk partisipasi aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	2.8.1.1.1. Identifikasi kelembagaan sosial potensial
			2.8.1.1.2. Assessement kapasitas kelembagaan dalam pelayanan sosial
			2.8.1.1.3. Pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan social
			2.8.1.1.4. Pelibatan dalam program-program penanganan masalah kesejahteraan sosial
			2.8.1.1.5. Memfasilitasi tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendorong kegiatan nyata dalam penanganan masalah kesejaheraan sosial
	2.8.2. Adanya penghargaan kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan	2.8.2.1. Penyediaan data keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan	2.8.2.1.1. up date data kepahlawanan, perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan
		2.8.2.2. Pemberian santunan biaya hidup bagi janda/ duda/ keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan	2.8.2.2.1. Perumusan indikator penerima manfaat
			2.8.2.2.2. Identifikasi kelompok sasaran
			2.8.2.2.3. Perumusan mekanisme delivery bantuan sosial
			2.8.2.2.4. penyaluran bantuan (cash transfer) kepada kelompok sasaran
			2.8.2.2.5. Evaluasi kebermanfaatan bantuan sosial
2.9. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan	2.9.1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan pra sekolah	2.9.1.1. Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	2.9.1.1.1. Sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini bagi orang tua
			2.9.1.1.2. Merekrut tenaga pendidik dari masyarakat local yang mempunyain kapasitas memadai
			2.9.1.1.3. Mendorong masyarakat di setiap kampong untuk menyelenggarakan PAUD

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
		2.9.1.2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini	2.9.1.2.1. Pelatihan kapasitas kelembagaan PAUD
			2.9.1.2.2. Pengadaan sarana dan prasarana PAUD
			2.9.1.2.3. Pengadaan alat-alat permainan edukatif
		2.9.1.3. Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini	2.9.1.3.1. Fasilitasi Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD
			2.9.1.3.2. Pengembangan metode pembelajaran PAUD
			2.9.1.3.3. Pembentukan forum tenaga pendidik PAUD
	2.9.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas	2.9.2.1 Meningkatkan sarana pendidikan sekolah dasar sesuai dengan kebutuhan di semua distrik	2.9.2.1.1. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan di setiap distrik sesuai dengan kebutuhan
			2.9.2.1.2. Mendorong dan memfasilitasi anak usia sekolah untuk dapat mengenyam pendidikan formal
		2.9.2.2. Meningkatkan APK/ APM sekolah dasar di semua distrik	2.9.2.2.1. Penyediaan Bantuan Operasional sekolah jenjang SD
			2.9.2.2.2. Sosialisasi pentingnya pendidikan bagi anak usia sekolah
		2.9.2.3. Menurunkan angka putus sekolah jenjang sekolah dasar di semua distrik	2.9.2.3.1. Penyelenggaraan Kejar Paket A setara SD
			2.9.2.3.2. Penyediaan bea siswa bagi keluarga kurang mampu
	2.9.3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan menengah yang berkualitas	2.9.3.1. Meningkatkan sarana pendidikan untuk jenjang pendidikan SMP, SMA/SMK	2.9.3.1.1. Pengadaan perpustakaan sekolah
			2.9.3.1.2. Pengadaan buku-buku ajar
			2.9.3.1.3. Pengadaan/peremajaan peralatan laboratorium
		2.9.3.2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dasar dan menengah menuju wajib belajar 12 tahun	2.9.3.2.1. Meningkatkan APK/AAPM jenjang pendidikan SMP, SMA/SMK di semua distrik
			2.9.3.2.2. Menurunkan angka putus sekolah jenjang pendidikan menengah pertama
			2.9.3.2.3. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	2.9.4. Meningkatnya kualitas substansi dan metode pembelajaran di semua jenjang pendidikan	2.9.4.1. Mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi	2.9.4.1.1. Pengembangan kurikulum, bahan ajar sesuai dengan kompetensi output
			2.9.4.1.2. Menyelaraskan dan melengkapi kurikulum dengan aspek-aspek ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kondisi daerah
		2.9.4.2. Mengembangkan metode pembelajaran inovatif	2.9.4.2.1. Pengembangan design metode pembelajaran
			2.9.4.2.2. Penyelenggaraan diklat metode pembelajaran
	2.9.5. Meningkatnya mutu lulusan SD, SMP, dan SMA/SMK	2.9.5.1. Meningkatkan kualitas lulusan sekolah dasar dan menengah	2.9.5.1.1. Mengembangkan keterpaduan system pendidikan ketenagakerjaan potensi wilayah sebagai model pengembangann wilayah berbasis potensi lokalitas dan sumberdaya manusia.
			2.9.5.1.2. Meningkatkan nilai dan angka kelulusan jenjang pendidikan dasar dan menengah
		2.9.5.2. Menyediakan fasilitas perpustakaan di setiap sekolah SD, SMP, SMA/SMK	2.9.5.2.1. Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan di setiap sekolah
			2.9.5.2.2. Pengadaan, penambahan koleksi buku perpustakaan
2.10. Meningkatkan pembinaan pendidikan nonformal	2.10.1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan non-formal	2.10.1.1. Meningkatkan fungsi dan peran aktif swasta dalam menyediakan pelayanan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kebutuhan masyarakat	2.10.1.1.1. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan non formal
			2.10.1.1.2. Fasilitasi perijinan dan persyaratan adminitrasi dalam pendirian pendidikan non formal
		2.10.1.2. Mendorong komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan pendidikan non formal	2.10.1.2.1. Ekstensifikasi dan intensifikasi kegiatan pendidikan luar sekolah
			2.10.1.2.2. Fasilitasi aktivitas pendidikan luar sekolah yang berbasis kepada kegiatan pembelajaran mandiri masyarakat

Visi: “MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	2.10.2. Meningkatkan pelayanan pendidikan non formal	2.10.2.1. Mengembangkan sarana dan sumberdaya manusia untuk mengembangkan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan daerah	2.10.2.1.1. Pembinaan lembaga pendidikan kursus
			2.10.2.1.2. Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
		2.10.2.2. Meningkatnya kualitas pendidikan non formal	2.10.2.2.1. Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal
			2.10.2.2.2. Mengembangkan kurikulum dan bahan ajar dan model pembelajaran non formal
2.11. Meningkatkan jumlah, kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	2.11.1. Meningkatnya jumlah guru dan tenaga kependidikan	2.11.1.1. Meningkatkan jumlah dan kecukupan tenaga pendidik di semua jenjang dan jalur pendidikan yang sesuai dengan standar kualifikasi	2.11 .1.1.1. Identifikasi jumlah dan kecukupan tenaga pendidik di semua jenjang dan jalur pendidikan
			2.11 .1.1.2. Penambahan tenaga guru sesuai dengan kebutuhan di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK
		2.11.1.2. Memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan di setiap sekolah di semua jenjang pendidikan	2.11.1.2.1. Penambahan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing sekolah SD, SMP, SMA/SMK
			2.11 .1.2.2. Pengangkatan tenaga kependidikan honorer
	2.11.2. Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan	2.11.2.1. Meningkatkan mutu tenaga pendidik SD, SMP, SMA/SMK dan pengelola sekolah yang memiliki sertifikat profesi	2.11 .2.1.1. Penyelenggaraan Diklat manajemen Guru kelas,SD,SMP,SMA/SMK
			2.11 .2.1.2. Pembinaan KKG/MKG, KKKS/MKKS, KKPS/MKPS dan MGMP
			2.11 .2.1.3. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
			2.11 .2.1.4. Pelatihan bagi guru-guru di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
		2.11.2.2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis	2.11 .2.2.1. Pelatihan teknis manajemen sekolah
			2.11.2.2.2. Penyelenggaraan Diklat kemampuan mengelola/menggunakan Perpustakaan dan Laboratorium
			2.11.2.2.3. Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
	2.11.3. Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan	2.11.3.1. Menyusun dan mengimplementasikan skema jaminan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan sebagai skema insentif optimalisasi aktualisasi potensi dan pengabdian	2.11.3.1.1. Pemberian Honorarium Guru Honor /Pegawai 2010
			2.11.3.1.2. Pemberian insentif kelebihan jam mengajar bagi guru SMP, SMA/SMK
			2.11.3.1.3. Pemberian bantuan bagi guru yang mengalami musibah
		2.11.3.2. Menyediakan fasilitas perumahan dan atau tranportasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan di daerah terpencil	2.11.3.2.1. Pengadaan, rehabilitasi rumah dinas guru, kepala sekolah dan penjaga
			2.11.3.2.2. Pengadaan sarana transportasi bagi guru di daerah terpencil
2.12. Meningkatkan kualitas kelembagaan pelayanan kepada perempuan dan anak	2.12.1. Tersedianya data based perencanaan pemberdayaan perempuan dan anak	2.12.1.1. Pengembangan data based peta ketrampilan dan kebutuhan pemberdayaan perempuan	2.12.1.1.1. Penyusunan indikator pemetaan kebutuhan
			2.12.1.1.2. Rektruitmen kader pemetaan kebutuhan pemberdayaan perempuan
			2.12.1.1.3. Sosialisasi indikator pemetaan
			2.12.1.1.4. Pengumpulan data pemetaan sosial

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
		2.12.1.2. Pengembangan data based peta pelayanan kebutuhan anak (perlindungan, promosi, partisipasi)	2.12.1.2.1. Penyusunan data kelompok sasaran (anak)
			2.12.1.2.2. Rektruitmen kader "kelompok ramah anak"
			2.12.1.2.3. Pengumpulan data pemetaan sosial
	2.12.2. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kepada perempuan dan anak	2.12.2.1. Penyediaan sarana perkantoran	2.12.2.1.1. Pembangunan gedung perkantoran
			2.12.2.1.2. Pembangunan sangar PKK
			2.12.2.1.3. Bantuan operasional pelayanan posyandu
			2.12.2.1.4. insentif kader posyandu
2.13. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peran serta dalam pemberdayaan perempuan dan anak	2.13.1. Terciptanya lingkungan yang mendukung program pemberdayaan perempuan dan anak	2.13.1.1. Promosi kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak	2.13.1.1.1. Lomba 10 program pokok PKK
			2.13.1.1.2. Jambore posyandu
		2.13.1.2. Pemembangan "kader posyandu yang handal"	2.13.1.2.1. Pemetaan kebutuhan SDM kader posyandu
			2.13.1.2.2. Penyusunan standar kompetensi kader posyandu
			2.13.1.2.3. Sosialisasi dan penjaringan kader potensial di masyarakat lokal
			2.13.1.2.4. Pelatihan pemenuhan kompetensi kader posyandu 2.13.1.2.5.
2.14. Meningkatkan keberdayaan masyarakat Kampung	2.14.1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kampung	2.14.1.1. Pengembangan system pemberdayaan masyarakat kampong kontekstual dan responsif	2.14.1.1.1. Identifikasi kebutuhan program
			2.14.1.1.2. Penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat
			2.14.1.1.3. Membangun kesepakatan mekanisme partisipasi
			2.14.1.1.4. Monitoring proses pemberdayaan
			2.14.1.1.5. Evaluasi pasca program pemberdayaan
	2.14.2. Tersedianya sumberdaya pendampingan program pemberdayaan masyarakat	2.14.2.1. Pemberian bantuan dana pendamping program pemberdayaan	2.14.2.1.1. Update data based kampung
			2.14.2.1.2. Membangun kesepakatan pencairan, bukti penggunaan anggaaran dan pelaporan

Visi: “MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	2.14.3. Tersedianya sumberdaya manusia yang kompeten untuk pendampingan masyarakat kampung	2.14.3.1. Rekruitmen tenaga community organizer (CO)	2.14.3.1.1. Pemetaan kebutuhan SDM Community Organizer
			2.14.3.1.2. Penyusunan standar kompetensi Community Organizer
			2.14.3.1.3. Sosialisasi dan penjaringan kader potensial di masyarakat lokal
			2.14.3.1.4. Pelatihan pemenuhan kompetensi Community Organizer
			2.14.3.1.5. Pelatihan pemenuhan kompetensi kader Community Organizer
2.15. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	2.15.1. Meningkatnya kualitas generasi muda yang sehat jasmani rohani dan berdaya saing	2.15.1.1. Meningkatkan kualitas generasi muda agar dapat mandiri, unggul, kuat dan mempunyai jati diri	2.15.1.1.1. Peningkatan kapasitas generasi muda dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
			2.15.1.1.2. Pengembangan kepribadian dan jati diri pemuda berdasarkan nilainilai budaya dan bangsa
		2.15.1.2. Menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan dan kepemimpinan generasi muda	2.15.1.2.1. Mengembangkan kapasitas entrepreneurship generasi muda berdasarkan potensi local
			2.15.1.2.2.
			2.15.1.2.3. Mengembangkan jiwa kepemimpinan generasi muda sebagai calon generasi penerus bangsa
			2.15.1.2.4.
		2.15.1.3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan potensi diri melalui organisasi kemasyarakatan	2.15.1.3.1. Mengembangkan aktivitas sosial, budaya, seni dan keagamaan melalui organisasi kemaysrakat di tingkat kampong
			2.15.1.3.2. Melibatkan generasi muda dalam even-even budaya daerah, dan nasional
		2.15.1.4. Meningkatkan kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah	2.15.1.4.1. Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam proses perencanaan pembangunan
			2.15.1.4.2. Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam menjaga asset, budaya dan lingkungan daerah

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	2.15.2. Meningkatnya prestasi olah raga generasi muda	2.15.2.1. Meningkatkan kapasitas organisasi keolahragaan dalam meningkatkan prestasi olah raga	2.15.2.1.1. Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi keolahragaan
			2.15.2.1.2.
			2.15.2.1.3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola organisasi keolahragaan dan tenaga palatih
			2.15.2.1.4.
		2.15.2.2. Meningkatnya prestasi olah raga generasi muda di tingkat regional maupun nasional	2.15.2.2.1. Pengembangan bakat dan potensi pelajar di bidang olah raga
			2.15.2.2.2. Pembinaan cabang olah raga berprestasi di daerah
			2.15.2.2.3.
		2.15.2.3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olah raga	2.15.2.3.1. Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana olah raga
			2.15.2.3.2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olah raga di tingkat kampong
3. MEWUJUDKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL, DAN PARTISIPATIF (M3)			
3.1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan dan keuangan daerah	3.1.1. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur	3.1.1.1. Pengiriman dan pemberian dukungan bagi PNS untuk tugas belajar di perguruan tinggi baik untuk pendidikan diploma, sarjana, maupun pascasarjana	3.1.1.1.1. Identifikasi kebutuhan pembentukan dan pengembangan kompetensi SDM di instansi instansi yang memiliki tugas dan fungsi strategis
			3.1.1.1.2. Identifikasi jumlah dan sebaran PNS yang akan diberi tugas belajar di perguruan tinggi setiap tahunnya dengan mempertimbangkan ketersediaan dan komposisi pegawai di setiap instansi
			3.1.1.1.3. Penguatan motivasi dan komitmen PNS dalam menjalani tugas belajar
			3.1.1.1.4. Identifikasi perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan tugas belajar
			3.1.1.1.5. Pengiriman PNS untuk tugas belajar
			3.1.1.1.6. Monitoring perkembangan studi PNS yang sedang tugas belajar
		3.1.1.2. Penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis untuk pegawai yang memiliki tugas dan fungsi strategis	3.1.1.2.1. Identifikasi kebutuhan diklat dan bimbingan teknis khususnya untuk institusi-institusi yang memiliki tugas dan fungsi strategis di Raja Ampat
			3.1.1.2.2. Identifikasi jumlah dan sebaran PNS yang akan menjadi peserta diklat atau bimbingan teknis
			3.1.1.2.3. Pengembangan kurikulum dan metode penyelenggaraan diklat menyesuaikan dengan tujuan dan komposisi peserta pelatihan
			3.1.1.2.4. Penyelenggaraan diklat
			3.1.1.2.5. Monitoring penyelenggaraan dan evaluasi hasil pelatihan

Visi: “MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	3.1.2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	3.1.2.1. Fasilitasi penyusunan rancangan anggaran dan perubahan anggaran	3.1.2.1.1. Penyusunan KUA/PPAS
			3.1.2.1.2. Penyusunan RKA-SKPD
			3.1.2.1.3. Penyusunan RAPBD
			3.1.2.1.4. Penyusunan DPA-SKPD
			3.1.2.1.5. Penyusunan APBD Perubahan
		3.1.2.2. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan	3.1.2.2.1. Penyusunan laporan realisasi semesteran
			3.1.2.2.2. Penyusunan laporan realisasi penerimaan daerah
			3.1.2.2.3. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
		3.1.2.3. Pembenahan sistem pengelolaan keuangan	3.1.2.3.1. Pemeliharaan aplikasi pengelolaan keuangan
			3.1.2.3.2. Konsultasi dan koordinasi keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi
			3.1.2.3.3. Penyelenggaraan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan daerah
			3.1.2.3.4. Penyelenggaraan workshop pengelolaan keuangan daerah
			3.1.2.3.5. Penyusunan dan sosialisasi SOP pengelolaan keuangan daerah
			3.1.2.3.6. Pendampingan pengelolaan keuangan tingkat SKPD
			3.1.2.3.7. Penyusunan sistem dan prosedur pengeloaan keuangan desa
			3.1.2.3.8. Sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa
			3.1.2.3.9. Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
		3.1.2.4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	3.1.2.4.1. Perencanaan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
			3.1.2.4.2. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
			3.1.2.4.3. Koordinasi dan konsultasi penerimaan pajak dan retribusi daerah
			3.1.2.4.4. Intensifikasi pelaksanaan penyuluhan untuk wajib pajak dan retribusi daerah
		3.1.2.5. Pembenahan system pengelolaan asset daerah	3.1.2.5.1. Inventarisasi (registrasi dan penomoran) barang milik daerah
			3.1.2.5.2. Penaksiran nilai terhadap semua barang milik daerah
			3.1.2.5.3. Penyelenggaraan workshop pengembangan database dan system informasi pengelolaan barang milik daerah
			3.1.2.5.4. Penyusunan SOP pengelolaan barang milik daerah
	3.1.3. Meningkatnya kapasitas kelembagan	3.1.3.1. Penataan SOTK, tupoksi SKPD, serta tupoksi dan standar kompertensi jabatan	3.1.3.1.1. Mereview urgensi dan relevansi tupoksi SKPD
			3.1.3.1.2. Penataan ulang kelembagaan dan penyesuaian tupoksi SKPD
			3.1.3.1.3. Analisis jabatan dan beban kerja
			3.1.3.1.4. Pembenahan struktur internal SKPD dengan memperhatikan hasil review tupoksi, hasil analisis jabatan dan beban kerja
			3.1.3.1.5. Penyusunan tupoksi jabatan struktural dan non-struktural

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
			3.1.3.1.6. Penyusunan dan sosialisasi perda dan perangkat hukum pendukungnya tentang tupoksi SKPD
			3.1.3.1.7. Penyusunan dan sosialisasi perangkat hukum tentang standar kompetensi dan tupoksi jabatan
		3.1.3.2. Penyusunan SOP SKPD	3.1.3.2.1. Identifikasi mandat dan tupoksi institusi dan sejumlah standar yang berlaku
			3.1.3.2.2. Penyusunan rancangan awal SOP sesuai tugas dan fungsi masingmasing SKPD
			3.1.3.2.3. Uji coba dan perbaikan SOP
			3.1.3.2.4. Penerapan SOP
			3.1.3.2.5. Pengembangan reward and punishment untuk mendukung penerapan SOP
			3.1.3.2.6. Monitoring dan evaluasi penerapan SOP
		3.1.3.3. Penguatan kapasitas sekretariat daerah dan jajarannnya sebagai institusi pengembangan kebijakan strategis	3.1.3.3.1. Penguatan sistem formulasi kebijakan strategis termasuk di dalamnya adalah pembagian peran dan tata cara koordinasi yang lebih jelas antar institusi dalam pembuatan kebijakan strategis
			3.1.3.3.2. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan capaian dari kebijakan strategis
			3.1.3.3.3. Pengembangan sistem kehumasan yang lebih efektif termasuk perannya dalam mengelola dan menyalurkan keluhan warga (complaint management)
		3.1.3.4. Penguatan kapasitas lembaga pemerintah di tingkat distrik dan kampung	3.1.3.4.1. Sosialisasi peran, tugas dan fungsi institusi pemerintah di tingkat distrik dan kampung
			3.1.3.4.2. Penyelenggaraan diklat dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan rencana strategis, pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan untuk pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat
	3.1.4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3.1.3.5. Penataan administrasi kewilayahan	3.1.3.5.1. Penentuan batas wilayah administratif distrik dan kampung
			3.1.3.5.2. Penentuan batas wilayah administratif kabupaten
			3.1.3.5.3. Peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi di tingkat distrik dan kampung
		3.1.4.1. Perbaikan penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan	3.1.4.1.1. Penyelenggaraan pelatihan untuk mengembangkan sistem pelayanan yang berwawasan good governance
			3.1.4.1.2. Penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan secara mobile dan kolektif

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
			3.1.4.1.3. Intensifikasi sosialisasi layanan administrasi kependudukan
			3.1.4.1.4. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
			3.1.4.1.5. Penyediaan dan operasionalisasi sarana dan teknologi pendukung layanan
			3.1.4.1.6. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan
		3.1.4.2 Peningkatan jaminan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan	3.1.4.2.1. Peningkatan kapasitas satuan polisi pamong praja
			3.1.4.2.2. Pengendalian kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan
			3.1.4.2.3. Peningkatan pengawasan dan pengamanan wilayah perbatasan
			3.1.4.2.4. Peningkatan jaminan keamanan penyelenggaraan kegiatan pemilu dan pemerintahan
			3.1.4.2.5. Pengembangan kerjasama dengan aparat kepolisian dan TNI dalam menjaga keamanan lingkungan
		3.1.4.3. Peningkatan kapasitas pengurangan risiko dan penanggulangan bencana	3.1.4.3.1. Peningkatan kapasitas institusi penanggulangan bencana serta sistem evakuasi dan penyelamatan missal
			3.1.4.3.2. Pengembangan instrumen untuk mengurangi risiko bencana seperti peta rawan bencana, alat deteksi dini bencana,
			3.1.4.3.3. Penyediaan tempat penampungan korban bencana beserta sarana dan perlengkapan pendukungnya
		3.1.4.4. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan	3.1.4.4.1. Penyediaan sarana dan perlengkapan perpustakaan dan taman baca
			3.1.4.4.2. Penyediaan koleksi materi perpustakaan (buku, majalah, buletin, video, dll) yang relevan dengan masyarakat Raja Ampat dan juga keberadaan Raja Ampat sebagai daerah wisata unggulan
	3.1.5. Meningkatnya kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan	3.1.5.1 Penguatan kapasitas penyusunan rencana pembangunan	3.1.5.1.1. Penguatan kapasitas institusi perencanaan pembangunan daerah termasuk di dalam pengelolaan program kerjasama pembangunan
			3.1.5.1.2. Penyediaan data dan informasi pendukung dalam penyusunan rencana pembangunan
			3.1.5.1.3. Fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan
			3.1.5.1.4. Fasilitasi penyusunan rencana strategis di tingkat SKPD
			3.1.5.1.5. Fasilitasi penyusunan rencana strategis di tingkat kampung
			3.1.5.1.6. Fasilitasi penyusunan rencana pembangunan sektoral untuk sector ekonomi dan sosial budaya

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
			3.1.5.1.7. Fasilitasi penyusunan rencana pengembangan kawasan khusus yang terdiri dari kawasan perkotaan, kawasan strategis, kawasan rawan bencana, dan wilayah perbatasan
			3.1.5.1.8. Fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan rencana yang terkait lainnya
			3.1.5.1.9. Penyusunan kebijakan kependudukan untuk merespon dan mengantisipasi permasalahan kependudukan di Raja Ampat
		3.1.5.2. Penguatan kapasitas DPRD sebagai lembaga legislasi, pengawasan dan sperwakilan rakyat	3.1.5.2.1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM anggota DPRD agar dapat menjalankan peran dan fungsi yang dimilikinya
			3.1.5.2.2. Fasilitasi penyelenggaraan public hearing dengan lembaga eksekutif dan masyarakat
			3.1.5.2.3. Penyelenggaraan kegiatan benchmarking dan observasi yang relevan dengan penyusunan regulasi dan kebijakan publik
			3.1.5.2.4. Fasilitasi penyelenggaraaan rapat untuk penyusunan regulasi dan kebijakan publik
			3.1.5.2.5. Fasilitasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
		3.1.5.3. Penguatan kapasitas penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	3.1.5.3.1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (Reguler), Khusus, dan Evaluasi Proyek
			3.1.5.3.2. Peningkatan komitmen penindaklanjutan temuan pengawasan
			3.1.5.3.3. Konsolidasi dan pembinaan terhadap aparat pengawan internal
		3.1.5.4. Peningkatan komitmen kepala dan wakil kepala daerah dalam mendorong perbaikan penyelenggaraan pemerintahan	3.1.5.4.1. Fasilitasi kepala daerah/ wakil kepala daerah dalam intensifikasi penyelenggaraan dialog dengan kelompok-kelompok masyarakat
			3.1.5.4.2. Fasilitasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam intensifikasi monitoring ke institusi pemerintahan daerah
			3.1.5.4.3. Fasilitasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam intensifikasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
			3.1.5.4.4. Fasilitasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam koordinasi dan pengembangan kerjasama dengan pihak luar daerah
		3.1.5.5. Penguatan kapasitas penyusunan laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	3.1.5.5.1. Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat SKPD
			3.1.5.5.2. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
			3.1.5.5.3. Fasilitasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
			3.1.5.5.4.

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"				
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**	
			3.1.5.1.7.	Fasilitasi penyusunan rencana pengembangan kawasan khusus yang terdiri dari kawasan perkotaan, kawasan strategis, kawasan rawan bencana, dan wilayah perbatasan
			3.1.5.1.8.	Fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan rencana yang terkait lainnya
			3.1.5.1.9.	Penyusunan kebijakan kependudukan untuk merespon dan mengantisipasi permasalahan kependudukan di Raja Ampat
		3.1.5.2. Penguatan kapasitas DPRD sebagai lembaga legislasi, pengawasan dan sperwakilan rakyat	3.1.5.2.1.	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM anggota DPRD agar dapat menjalankan peran dan fungsi yang dimilikinya
			3.1.5.2.2.	Fasilitasi penyelenggaraan public hearing dengan lembaga eksekutif dan masyarakat
			3.1.5.2.3.	Penyelenggaraan kegiatan benchmarking dan observasi yang relevan dengan penyusunan regulasi dan kebijakan publik
			3.1.5.2.4.	Fasilitasi penyelenggaraaan rapat untuk penyusunan regulasi dan kebijakan publik
			3.1.5.2.5.	Fasilitasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
		3.1.5.3. Penguatan kapasitas penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	3.1.5.3.1.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (Reguler), Khusus, dan Evaluasi Proyek
			3.1.5.3.2.	Peningkatan komitmen penindaklanjutan temuan pengawasan
			3.1.5.3.3.	Konsolidasi dan pembinaan terhadap aparat pengawan internal
		3.1.5.4. Peningkatan komitmen kepala dan wakil kepala daerah dalam mendorong perbaikan penyelenggaraan pemerintahan	3.1.5.4.1.	Fasilitasi kepala daerah/ wakil kepala daerah dalam intensifikasi penyelenggaraan dialog dengan kelompok-kelompok masyarakat
			3.1.5.4.2.	Fasilitasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam intensifikasi monitoring ke institusi pemerintahan daerah
			3.1.5.4.3.	Fasilitasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam intensifikasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
			3.1.5.4.4.	Fasilitasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam koordinasi dan pengembangan kerjasama dengan pihak luar daerah
		3.1.5.5. Penguatan kapasitas penyusunan laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	3.1.5.5.1.	Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat SKPD
			3.1.5.5.2.	Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
			3.1.5.5.3.	Fasilitasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
			3.1.5.5.4.	

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
3.2. Mewujudkan tatanan politik lokal yang harmonis	3.2.1. Terwujudnya masyarakat dan lingkungan social yang ramah, peduli dan inklusif	3.2.1.1. Peningkatan toleransi, kebersamaan dan kerukunan antar kelompok masyarakat yang berbeda agama, suku, dan daerah asal	3.2.1.1.1. Intensifikasi sosialisasi tentang urgensi dan keunggulan masyarakat yang inklusif dan anti-diskriminasi dalam pembangunan daerah
			3.2.1.1.2. Intensifikasi kegiatan sosial bersama antarkelompok masyarakat yang berbeda agama, suku, dan daerah asal
			3.2.1.1.3. Menumbuhkembangkan wawasan dan kesadaran kebangsaan di kalangan masyarakat melalui pembentukan dan penyelenggaraan forum komunikasi lintas agama, suku, dan daerah asal
	3.2.2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam praktik demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan	3.2.2.1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam praktikdemokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan	3.2.2.1.1. Sosialisasi tentang agenda dan tata cara penyelenggaraan pemilu (legislatif, presiden, dan kepala daerah)
			3.2.2.1.2. Peningkatan partisipasi masyarakat sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu
			3.2.2.1.3. Fasilitasi penyelenggaraan pemilu
			3.2.2.1.4. Penyelenggaraan pendidikan pemilih
			3.2.2.1.5. Penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat
			3.2.2.1.6. Fasilitasi pengembangan kelembagaan politik daerah
			3.2.2.1.7. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan keamanan lingkungan
	3.2.3. Meningkatnya kepatuhan terhadap hukum.	3.2.3.1. Penegakan hukum secara tegas dan konsiste	3.2.3.1.1. Intensifikasi pencegahan dan penertiban penggunaan miras dan narkoba
			3.2.3.1.2. Intensifikasi pencegahan dan penertiban premanisme
			3.2.3.1.3. Peningkatan kepatuhan terhadap perijinan
			3.2.3.1.4. Penertiban administrasi pertanahan
			3.2.3.1.5. Penyelesaian konflik pertanahan
4. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS POTENSI BAHARI DAN SUMBERDAYA LAINNYA (M4)			
4.1. Pengembangan usaha produksi barang dan jasa berbasis potensi bahari dan sumberdaya lainnya secara optimal dan berkelanjutan	4.1.1. Meningkatnya produktivitas hasil berbasis potensi sumberdaya kelautan dengan tetap menjaga kelestarian nilai-nilai dasar masyarakat yang menempatkan laut sebagai sumber kehidupan	4.1.1.1. Pengembangan dan pengelolaan produktifitas perikanan dan kelautan	4.1.1.1.1. Identifikasi Lahan dan potensi pengembangan budidaya perikanan
			4.1.1.1.2. Pengendalian penangkapan dan pengembangan budi daya ikan
			4.1.1.1.3. Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
		4.1.1.2. Fasilitasi peningkatan produktifitas perikanan dan kelautan	4.1.1.2.1. Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan Budidaya Air Tawar dan Laut
			4.1.1.2.2. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
			4.1.1.2.3. Peningkatan kapasitas SDM kelompok nelayan

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	4.1.2. Meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama dan keragaman pangan lokal	4.1.2.1. Peningkatan ketersediaan bahan pangan utama	4.1.2.1.1. Peningkatan jumlah areal produksi pertanian
			4.1.2.1.2. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pangan dan hortikultura
			4.1.2.1.3. Pemberian insentif kepada petani
			4.1.2.1.4. Penyuluhan dan Pendampingan
			4.1.2.1.5. Pengembangan desa mandiri pangan
		4.1.2.2. Diversifikasi sumber pangan lokal	4.1.2.2.1. Pengembangan jenis/varietas bibit pangan lokal
			4.1.2.2.2. Penyuluhan dan Pendampingan
			4.1.2.2.3. Peningkatan kapasitas SDM Petani dan penyuluh
	4.1.3. Meningkatnya produktivitas hasil produksi peternakan, dan perkebunan	4.1.3.1. Pengembangan dan pemberdayaan di bidang peternakan 1.1.1.1.	4.1.3.1.1. Peningkatan kapasitas SDM peternak
			4.1.3.1.2. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
		4.1.3.2. Pengembangan dan pemberdayaan di bidang perkebunan	4.1.3.2.1. Pembukaan lahan Kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT)
			4.1.3.2.2. Peningkatan kapasitas SDM pekebun Perkebunan
			4.1.3.2.3. Peningkatan sarana dan prasarana teknologi tepat guna
			4.1.3.2.4. Pembangunan pusat pengolahan hasil kebun
	4.1.4. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup	4.1.4.1. Pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya hutan 1.1.1.1.	4.1.4.1.1. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
			4.1.4.1.2. Peningkatan kapasitas SDM kehutanan
		4.1.4.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	4.1.4.2.1. Pengembangan hutan tanaman
			4.1.4.2.2. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
			4.1.4.2.3. Sosialisasi manfaat dan kegunaan hutan
			4.1.4.2.4. Reboisasi dan Rehabilitasi Kawasan Hutan
	4.1.5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata bahari yang berdampak pada peningkatan kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	4.1.5.1. Peningkatan pemasaran pariwisata	4.1.5.1.1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
			4.1.5.1.2. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
			4.1.5.1.3. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
		4.1.5.2. Pengembangan tempat tujuan Pariwisata	4.1.5.2.1. Pengembangan objek pariwisata unggulan
			4.1.5.2.2. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
			4.1.5.2.3. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
			4.1.5.2.4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
			4.1.5.2.5. Pengembangan daerah tujuan wisata
		4.1.5.3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata serta fasilitas pendukungnya	4.1.5.3.1. Pengembangan kualitas obyek dan event-event pariwisata
			4.1.5.3.2. Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
4.2. Mengembangkan industri usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang berbasis sumberdaya ekonomi local dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	4.2.1. Berkembangnya ekonomi masyarakat	4.2.1.1. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	4.2.1.1.1. Bantuan permodalan bagi pelaku UMKM
		4.2.1.2. Peningkatan kapasitas koperasi masyarakat 1.1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.	4.2.1.2.1. Pelatihan manajemen pengelolaan UMKM
			4.2.1.2.2. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah
			4.2.1.2.3. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
			4.2.1.2.4. Pelatihan manajemen pengelolaan koperas 4.2.1.2.5. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
	4.2.2. Meningkatnya kontribusi industry masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat	4.2.2.1. Peningkatan jumlah dan volume usaha industri masyarakat	4.2.2.1.1. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
			4.2.2.1.2. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
			4.2.2.1.3. Pengembangan sentra-sentra industri potensial
		4.2.2.2. Pemberdayaan kelompok industry masyarakat	4.2.2.2.1. Pendampingan para pengrajin
			4.2.2.2.2. Pemberian bantuan modal usaha

Visi: "MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
		4.2.2.3. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.2.2.3.1. Penyusunan dokumen Data Base Tenaga Kerja
			4.2.2.3.2. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja mandiri
			4.2.2.3.3. Penyediaan sarana penunjang latihan kerja
			4.2.2.3.4. Monitoring & Evaluasi Penggunaan Tenaga Kerja
		4.2.2.4. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.	4.2.2.4.1. Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 4.2.2.4.2. Sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
			4.2.2.4.3. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
		4.2.2.5. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	4.2.2.5.1. Pembinaan usaha mandiri
			4.2.2.5.2. Peningkatan program padat karya
			4.2.2.5.3. Penyediaan teknologi tepat guna penunjang produksi
			4.2.2.5.4. Penyediaan data penyerapan tenaga kerja
			4.2.2.5.5. Penyediaan data lowongan pekerjaan
			4.2.2.5.6. Monitoring dan evaluasi
	4.2.3. Meningkatnya nilai dan jumlah perdagangan produk lokal masyarakat	4.2.3.1. Peningkatan promosi dan jumlah investor dalam dan luar negeri	4.2.3.1.1. Fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
			4.2.3.1.2. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
			4.2.3.1.3. Penyelenggaraan pameran investasi
		4.2.3.2. Peningkatan dan pengembangan ekspor	4.2.3.2.1. Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
			4.2.3.2.2. Pengembangan data base informasi potensi unggulan
			4.2.3.2.3. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
			4.2.3.2.4. Peningkatan standardisasi mutu produk
			4.2.3.2.5. Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
4.3. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan keselarasan sosial budaya, dan kelestarian lingkungan.	4.3.1. Terkelolanya keragaman dan kekayaan budaya Raja Ampat	4.3.1.1. Pengelolaan Keragaman Budaya	4.3.1.1.1. Inventarisasi dokumen seni dan buday Raja Ampat
			4.3.1.1.2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
			4.3.1.1.3. Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
		4.3.1.2. Pengelolaankekayaan Budaya	4.3.1.2.1. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Visi: “MEWUJUDKAN KABUPATEN RAJA AMPAT SEBAGAI KABUPATEN BAHARI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, BERPENDIDIKAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
			4.3.1.2.2. Pembinaan Kelompok Seni dan Tari Masyarakat Kampung Wisata
			4.3.1.2.3. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
	4.3.2. Terjaganya kelestarian sumberdaya ekonomi dan lingkungan	4.3.2.1. Pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	4.3.2.1.1. Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
			4.3.2.1.2. Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
			4.3.2.1.3. Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan kebijakan umum dan program pembangunan Kabupaten Raja Ampat periode 2011 - 2015. Kebijakan Umum pembangunan Kabupaten Raja Ampat terbagi dalam lima kluster besar yang sekaligus menjadi prioritas pembangunan tahunan. Kebijakan umum tersebut terdiri dari:

a. Pengembangan infrastruktur, yang diprioritaskan pada program pembangunan daerah dengan fokus:
1) Infrastruktur Dasar (Transportasi, Energi, Komunikasi, Air, Pemukiman)
2) Infrastruktur Pendidikan & Kesehatan
3) Infrastruktur Pemerintahan dan Prasarana Umum
4) Infrastruktur Ekonomi
5) Infrastruktur Lingkungan

b. Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pelayanan Publik, yang diprioritaskan pada program pembangunan daerah dengan fokus:
1) Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
2) Peningkatan Kesejahteraan Sosial
3) Pemberdayaan Masyarakat
4) Kepemudaan dan Olahraga

c. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan, yang diprioritaskan pada program pembangunan daerah dengan fokus:
1) Peningkatan Profesionalitas Aparatur Pemerintahan Daerah
2) Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Daerah.
3) Penguatan Partisipasi Masyarakat.
4) Harmonisasi Tatanan politik lokal.

d. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Masyarakat, yang diprioritaskan pada program pembangunan daerah dengan fokus:
1) Peningkatan Produksi dan Investasi Ekonomi Kelautan
2) Pengembangan UMKM dan koperasi yang berbasis sumberdaya ekonomi lokal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
3) Sinergi pembangunan ekonomi dengan sosial budaya dan kelestarian lingkungan. Meskipun dikelompokkan dalam kluster namun Kebijakan Umum tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga pencapaian target dalam masing-masing Kebijakan Umum akan sangat tergantung pada pencapaian Kebijakan Umum yang lain. Demikian pula dalam hal pelaksanaan, penekanan pada sector tertentu pada suatu periode bukan berarti tidak mengerjakan sektor tersebut pada periode lainnya. Uraian ke dalam program dan kegiatan pembangunan serta indikator capaian dan indikasi anggaran yang diperlukan diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1. Kebijakan Umum Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Program Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
1.1	Meningkatkan ketersediaan jaringan infrastruktur dasar transportasi, energi, komunikasi, dan air bersih.	1.1.1. Meningkatnya akses barang dan manusia dari luar daerah maupun antar distrik wilayah di Raja Ampat.	a) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis.	10 unit	1 unit	1unit	1 unit	1 unit	1 unit	15unit	Program pembangunan prasarana perhubungan Program pembangunan jalan dan jembatan Program pemeliharaan prasarana dan sarana perhubungan Program pemeliharaan prasarana dan sarana perhubungan Program pembangunan system informasi jalan dan jembatan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. Perhubungan DISHUB	Perhubungan	DISHUB
			b) Jumlah arus penumpang angkutan umum	na	36.818	21.504	21.504	21.504	21.504	21.504 orang		Perhubungan	DISHUB
			c) Jumlah orang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun.	72.000 orang	81.000	86.400	93.600	99.000	108.000	180.000 orang		Perhubungan	DISHUB
			d) Jumlah orang yang terangkut angkutan umum.	12.750 orang	40.800	55.200	63.720	75.240	86.760	86.760		Perhubungan	DISHUB
			e) Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		Pekerjaan Umum	Dinas PU
			f) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	188.9 km	209.9 km	246.9 km	289.9 km	332.9 km	383.9 km	383.9 km		Pekerjaan Umum	Dinas PU
			g) Panjang jalan dilalui roda 4	13 km	23 km	38 km	58 km	83 km	113 km	113 km		Pekerjaan Umum	Dinas PU
			h) Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	75 km	90 km	115 km	145 km	180 km	220 km	220 km			
			i) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	13 km	23 km	38 km	58 km	83 km	113 km	113 km		Pekerjaan Umum	Dinas PU

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
		1.1.2. Meningkatnya ketersediaan energi listrik dan BBM.	a) Rasio ketersediaan daya listrik	31,0%	40,0%	50,0%	60,0%	75,0%	90,0%	90,0%	Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	ESDM	DISTAMBEN
			b) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	26,0%	35,0%	45,0%	60,0%	75,0%	90,0%	90,0%	Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	ESDM	DISTAMBEN
			c) Tersedianya BBM Di Masyarakat Dengan Harga Terjangkau (ton/tahun)	4.800,0	4.800,0	5.009,0	5.020,0	5.031,0	5.050,0	5.050,0	Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrika	ESDM	DISPERINDA KOP- &UKM
			d) Bertambahnya jumlah stasiun pompa bensin umum (unit)	1	1	1	1	1	1	6	Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	ESDM	DISPERINDA KOP &UKM
		1.1.3. Tersedianya jaringan komunikasi yang lebih memadai.	a) Jumlah jaringan komunikasi	50,0%	50,0%	75,0%	75,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Program Pembangunan Sarana Prasarana Informasi dan Telekomunikasi	Kominfo	DISHUB
			b) Jumlah BTS seluler	6	6	16	20	20	30	98		Kominfo	DISHUB
			c) Prosentase penduduk yang memiliki HP dan telepon (%)	17,2%	19,0%	22,0%	25,0%	28,0%	33,0%	33,0%		Kominfo	DISHUB
			d) Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,007	0,9%	1,4%	2,1%	2,5%	3,5%	3,5%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kominfo	DISHUB
			f) Jumlah penyiaran radio dan TV lokal.	1	-	1	-	-	-	2		Kominfo	DISHUB
			g) Website milik pemda (ada/tidak)	-	-	ada	ada	ada	ada	ada		Kominfo	SETDA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
		1.1.4. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.	a) Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih.	55%	60%	70%	75%	85%	95%	95%	Program penyediaan dan pengolahan air baku Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum	DINAS PU
			b) Daya tamping reservoir air bersih (m3)	74	219	32	56	84	112	577		Pekerjaan Umum	DINAS PU
		1.1.5. Terpenuhinya kebutuhan air untuk irigasi pertanian.	a) Rasio jaringan irigasi (panjang saluran irigasi/ luas lahan pertanian)	675,5	1500	1000	600	600	500	4875,5	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar	Pekerjaan Umum	DINAS PU
			b) Prosentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik.	354,5	274,5	1000	600	600	500	3329		Pekerjaan Umum	DINAS PU
1.2	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik dasar di bidang pendidikan	1.2.1 Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang semakin terjangkau oleh masyarakat	a) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar (%)	1,6%	1,6%	1,7%	1,7%	1,8%	1,8%	1,8%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			b) Prosentase sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	90,0%	92,0%	95,0%	96,0%	97,0%	98,0%	98,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			c) Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ Paket A (%)	98,2%	98,5%	99,0%	99,5%	100,0%	100,0%	100,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			d) Angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/Paket B (%)	49,9%	52,5%	55,5%	60,0%	65,0%	70,0%	70,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
		1.2.2. Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan lanjut tingkat atas (SLTA) di kabupaten	a) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah jenjang pendidikan menengah (%)	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,3%	1,3%	1,3%	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			b) Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/ SMK/MA kondisi bangunan baik (%)	90,0%	92,0%	95,0%	96,0%	97,0%	98,0%	98,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			c) Angka partisipasi murni (APM) SMA/ SMK/MA/Paket C (%)	30%	45%	65%	75%	90%	100%	100%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
1.3	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik dasar di bidang kesehatan.	1.3.1. Tersedianya instalasi kesehatan yang semakin terjangkau oleh masyarakat (Polindes, Puskesmas)	a) Rasio posyandu per seratus balita.	17,8	20	22	23	24	25	25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan dan jaringannya Program Obat dan Perbekalan	Kesehatan	DINKES
			b) Rasio puskesmas per satuan penduduk	62,0	75,0	79,0	83,0	91,0	100,0	100,0		Kesehatan	DINKES
			c) Rasio pustu persatuan penduduk	64,0	64,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0		Kesehatan	DINKES
												Kesehatan	DINKES
		1.3.2. Meningkatnya prasarana kesehatan rujukan berupa RSUD.	a) Rasio Rumah Sakit per sepuluh ribu penduduk (jumlah RS/jumlah penduduk x 10000)	0,19	0,19	0,19	0,65	0,67	0,67	0,67		Kesehatan	DINKES
		1.3.3 Tersedianya layanan puskesmas keliling	a) Cakupan layanan Puskesmas keliling (kampung) (%)	25%	30%	50%	60%	75%	100%	100%		Kesehatan	DINKES

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
1.4	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pemukiman yang sehat dan aman.	1.4.1. Tertatanya pemukiman tradisional	a) Tersedianya desain penataan pemukiman tradisional (unit)	719,0	25,0	24,0	36,0	40,0	48,0	892,0	Program pengembangan perumahan	Perumahan	DINAS PU
			b) Prosentase luas areal pemukiman tradisional yang tertata.	6,41%	0,22%	0,21%	0,32%	0,36%	0,43%	7,95%		Perumahan	DINAS PU
		1.4.2. Tersedianya pemukiman sederhana dan aman bagi masyarakat.	a) Rasio pemukiman layak huni (%)	91,7%	92,0%	93,0%	94,0%	95,0%	96,0%	96,0%		Perumahan	DINAS PU
			b) Rasio rumah layak huni (%)	65,0%	72,0%	79,0%	85,0%	93,0%	98,0%	98,0%		Perumahan	DINAS PU
		1.4.3. Tersedianya pemukiman yang sehat.	a) Prosentase rumah tinggal bersanitasi (%)	67,5%	72,5%	78,5%	85,5%	95,5%	98,0%	98,0%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan	DINAS PU
			b) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk.	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	2,5		Perumahan	DINAS PU

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
1.5	Meningkatkan ketersediaan prasarana aparatur pemerintah.	1.5.1. Tersedianya perkantoran instansi pemerintah yang memadai di tingkat kabupaten.	a) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kabupaten yang memadai (unit)	13	1	2	2	2	2	22	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	DINAS PU
		1.5.2. Tersedianya perkantoran instansi pemerintah di tingkat distrik dan kampung	b) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kecamatan yang memadai (unit)	6	1	2	2	2	2	15			
			c) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kampung yang memadai (unit)	43	4	3	4	4	5	63			
		1.5.3. Tersedianya perpustakaan umum	a) Gedung perpustakaan	3	--	4	6	6	7	26			
		1.5.4. Tersedianya rumah dinas bagi pegawai.	a) Jumlah rumah dinas bagi pegawai (unit)	300	20	30	50	100	150	650			
1.6	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar bagi pengembangan ekonomi lokal.	1.6.1. Tersedianya pasar pedesaan	a) Jumlah pasar pedesaan	1	1	1	2	2	2	9	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Kelautan dan Perikanan DKP	Perdagangan	DISPERINDAKOP-&UKM
		1.6.2. Tersedianya tempat pelelangan ikan	a) Jumlah TPI	1	-	-	-	1	-	2		Perdagangan	DISPERINDAKOP-&UKM

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
											Program pengembangan perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan	DKP
		1.6.3. Terbangunnya prasarana koperasi dan pengembangan UMKM	a) Persentase koperasi aktif	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	Program pembangunan prasarana koperasi Program pembangunan sarana pemasaran produk UMKM	Koperasi dan UKM	DISPERINDAKOP-&UKM
1.7	Mengendalikan abrasi pantai dan ancaman banjir.	1.7.1 Menurunkan kerusakan pantai akibat abrasi.	a) Cakupan ketersediaan talud penahan abrasi pantai.	10.783,5	784,5	739,0	725,0	750,0	810,0	14.592,0	Program peningkatan sarana dan prasarana umum Program Pembangunan turap/talud/ brojong Program rehabilitasi/ pemeliharaan talud/bronjong	Pekerjaan Umum	DINAS PU
			b) Cakupan volume break water yang terbangun	15.500,0	-	-	12.000,0	10.000,0	11.000,0	48.500,0		Pekerjaan Umum	DINAS PU
			c) Cakupan panjang talud yang di rehabilitasi	-	-	600,0	600,0	700,0	700,0	2.600,0		Pekerjaan Umum	DINAS PU

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
		1.7.2 Berkurangnya ancaman banjir.	a) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	3,1 km	5 km	10 km	15 km	25 km	35 km	93,1 Km	Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Program Pembangunan turap/talud/ brojong	Pekerjaan Umum	DINAS PU
			b) Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	354,5 m	na	1000 m	600 m	600m	500 m	3054,5 m		Pekerjaan Umum	DINAS PU
			c) Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	500 meter	na	600 m	700 m	800 m	1000 m	1000 meter		Pekerjaan Umum	DINAS PU
		1.7.3. Meningkatnya kesehatan sanitasi lingkungan.	a) Tempat pembuangan sampah perseribu penduduk	0,01%	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	0,06%	0,06%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
1.8	Meningkatkan ketersediaan prasarana umum	1.8.1 Tersedianya tempat ibadah	a) Rasio tempat ibadah perseribu penduduk	3,34	3,34	3,35	3,40	3,45	3,52	3,52	Program peningkatan sarana dan prasarana umum	Sosial	DINSOS
		1.8.2 Tersedianya sarana olahraga	a) Rasio gelanggang olahraga per seribu penduduk (selain milik swasta).	0,02	0,02	0,04	0,07	0,09	0,09	0,11	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.	Pekerjaan Umum	DINAS PU
			b) Rasio lapangan olahraga per seribu penduduk.	3,45	3,52	3,64	3,76	3,88	3,99	3,99		Pekerjaan Umum	DINAS PU
		1.8.4 Tersedianya areal pemakaman umum.	a) Rasio tempat pemakaman umum perseribu penduduk	11 ,8	11 ,8	12,3	12,5	12,7	13,1	13,1	Program pengelolaan areal pemakaman umum Perumahan	Pekerjaan Umum	DINAS PU

Tabel 7.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
2.1	Meningkatkan akses warga terhadap pelayanan kesehatan	2.1.1 Tersedianya sarana dan prasarana layanan kesehatan secara lebih memadai	a) Cakupan pelayanan puskesmas (%)	79,0%	87,5%	100%	100%	100%	100%	100%	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas beserta dan jaringannya Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana posyandu	Kesehatan	DINKES
			b) Rasio puskesmas dan pustu per satuan penduduk	9,75	9,80	9,91	10,20	10,80	10,90	10,90		Kesehatan	DINKES
			c) Cakupan Pelayanan Puskesmas Pembantu (%)	25,0%	29,0%	37,09%	85%	90%	100%	100%		Kesehatan	DINKES
			d) Rasio posyandu per satuan balita 17,81		20	22	23	24	25	25		Kesehatan	DINKES
			e) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	80,0%	85,0%	90,0%	95,0%	98,0%	100,0%	100,0%		Kesehatan	DINKES
2.2	Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan	2.2.1 Tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang cukup memadai untuk berbagai jenisnya (dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan)	a) Rasio dokter per satuan penduduk Rekruitmen tenaga kesehatan	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,1	0,1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kepegawaian	BKD
			b) Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,74	0,86	0,97	1,09	1,21	1,33	1,33		Kepegawaian	BKD
			c) Jumlah tenaga medis yang didukung oleh perguruan tinggi mitra	10	10	10	10	10	10	60		Kesehatan	DINKES
		2.2.2 Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan.	b) Jumlah Tenaga medis yang mendapatkan beasiswa pendidikan non gelar	20	80	20	40	50	60	270		Kesehatan	DINKES

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
2.3	Meningkatkan daya tanggap terhadap kejadian wabah penyakit	2.3.1 Meningkatnya daya tanggap tenaga kesehatan dan masyarakat dalam penanganan kejadian wabah penyakit	a) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	90%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Kesehatan	DINKES
			b) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit malaria (%)	30%	40%	50%	60%	70%	80%	80%		Kesehatan	DINKES
			c) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit ISPA (%)	60%	65%	75%	85%	85%	100%	100%		Kesehatan	DINKES
			d) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB Paru (%)	1,83%	19,19%	24,67%	30,16%	31,70%	31,70%	31,70%		Kesehatan	DINKES
			e) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Kusta	30%	40%	55%	62%	77%	80%	80%		Kesehatan	DINKES
			f) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	60%	80%	85%	90%	95%	100%	100%		Kesehatan	DINKES
2.4	Menurunkan angka kematian ibu dan balita	2.4.1 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan	a) Angka kematian ibu melahirkan	17,64	15,7	14,2	9,9	4,5	2,0	2,0	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program peningkatan kapasitas bidan	Kesehatan	DINKES
			b) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	65%	72%	78%	82%	82%	85%	85%		Kesehatan	DINKES
			c) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	65%	65%	70%	75%	79%	85%	85%		Kesehatan	DINKES
			d) Jumlah Bidan yang memenuhi stanadar kompetensi penanganan kasus komplikasi kelahiran	6	20	40	50	60	71	71		Kesehatan	DINKES
		2.4.2 Menurunnya angka kematian balita	a) Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (rasionalisasi capaian) (%)	14,4%	27%	30%	65%	80%	100%	100%	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Kesehatan	DINKES
			b) Cakupan kunjungan bayi (%)	6%	20%	50%	65%	75%	80%	80%		Kesehatan	DINKES
			c) Persentase balita gizi buruk	51%	67%	70%	88%	90%	100%	100%		Kesehatan	DINKES

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
		2.4.3 Meningkatnya jangkauan dan intensitas pelayanan KB	a) Rasio akseptor KB	94,00%	95,0%	96,0%	97,0%	98,0%	99,0%	99,0%	Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri	KB dan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Perempuan
			b) Cakupan peserta KB aktif (%)	94,0%	95,0%	96,0%	97,0%	98,0%	99,0%	99,0%		Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
			c) Rata-rata jumlah anak per keluarga (revisi capaian)	0,34	0,37	0,40	0,44	0,48	0,52	0,52		Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
			d) Jumlah sosialisasi kesehatan reporoduksi dan kontrasepsi	2	1	1	2	2	2	10		KB dan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Perempuan
2.5	Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan	2.5.1 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola Pos Obat Kampung dan Poskesdes	a) Jumlah Kader pos obat kampung	0	30	40	50	70	80	80	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	DINKES
			b) Jumlah Kader pos obat kampung yang telah mengikuti pelatihan	0	30	40	50	70	80	80		Kesehatan	DINKES

2.6	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menyelenggarakan upaya kesejahteraan sosial	2.6.1 Tersedianya data based perencanaan kebijakan kesejahteraan sosial	a) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	49,27%	43,20 %	38,11 %	37,35 %	33,26 %	29,74 %	29,74%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Sosial	DINSOS
		2.6.2 Tersedianya sumberdaya manusia yang kompeten untuk pelayanan kesejahteraan sosial	a) Rasion Tenaga Pekerja Sosial terhadap penduduk	0,08%	0,16%	0,24%	0,41%	0,49%	0,66%	0,66%	Rekruitmen tenaga pekerja social Program Pendidikan Kedinasan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kepegawaian	BKD
			b) Jumlah SDM yang mendapatkan beasiswa bergelar	150	100	100	150	200	250	950		Kepegawaian	BKD
			c) Jumlah Sumberdaya manusia yang mengikuti pendidikan non gelar	0	0	0	10	5	5	20		Sosial	DINSOS
		2.6.3 Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	a) Terbangunya sarana perkantoran dinas kesehateraan social	1	0	0	1	1	1	3	Program peningkatansarana dan sarana perkantoran Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	DINSOS
			b) Jumlah Sarana social seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	2	--	--	1	1	1	5		Sosial	DINSOS

		2.6.4 Terbentuknya mekanisme koordinasi penanganan masalah kesejahteraan social Jumlah koordinasi dengan lembaga/dinas terkait		23	3	3	4	5	7	45	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	DINSOS
2.7	Meningkatkan kualitas kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil	2.7.1 Meningkatnya kualitas kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan KAT melalui bantuan sosial	a) PMKS yg memperoleh bantuan social	230	40	40	45	50	55	230	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Sosial	DINSOS
			b) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social (%)	40	50	70	80	90	100	100		Sosial	DINSOS
			c) Jumlah rumah miskin yang mendapat bantuan renovasi rumah	30	30	30	40	40	50	220		Perumahan	DINSOS

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
		2.7.2 Meningkatnya keberdayaan ekonomi PMKS dan KAT	a) Jumlah PMKS dan KAT yang mengikuti pelatihan ketrampilan	150	20	25	30	35	40	150	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	DINSOS
			b) Jumlah PMKS dan KAT yang mendapat bantuan modal produksi	250	40	45	50	55	60	250		Sosial	DINSOS
			c) Jumlah unit ekonomi produksi yang didampingi	150	10	20	30	40	50	150		Sosial	DINSOS
		2.7.3 Meningkatnya akses komunikasi KAT	a) Jumlah SSB yang didistribusikan ke pemukiman adat terpencil	24	0	0	4	6	14	48	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	DINSOS
2.8	Meningkatkan kesetiakawanan sosial	2.8.1 Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab social masyarakat terhadap masalah kesejahteraan sosial melalui penguatan jaringan sosial	a) Jumlah kelembagaan sosial yang mendapatkan pelatihan	--	--	5	10	15	20	50	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping social pemberdayaan Fakir Miskin, KATdan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	DINSOS
		2.8.2 Adanya penghargaan kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan janda/ duda perintis kemerdekaan	a) Jumlah pahlawan yang mendapatkan bantuan social	5	5	10	30	50	50	150	Pemberian santunan biaya hidup bagi janda/ duda/ keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan	Sosial	DINSOS

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
2.9	Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan	2.9.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan pra sekolah	a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	50%	56%	62%	75%	82%	95%	95%	Program Pendidikan Anak Usia Dini Program manajemen pelayanan pendidikan PAUD Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			b) Jumlah tenaga pendidik PAUD yang terlatih	10	21	30	40	50	42	193		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			c) Jumlah sekolah PAUD yang berjalan dengan baik	11	37	53	70	100	124	124		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			d) Jumlah sekolah PAUD yang dibina	2	2	10	20	30	40	40		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			e) Jumlah anak usia Pra sekolah yang mengikuti PAUD	132	290	372	395	450	500	500		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			f) Jumlah tenaga pendidik PAUD yang bersertifikat	5	5	20	50	100	150	150		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		2.9.2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas	a) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	0,016%	0,016 %	0,017%	0,017 %	0,018 %	0,018 %	0,018%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Program manajemen pelayanan pendidikan Dasar Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Dasar Program pemberian bea siswa bagi anak berprestasi dari keluarga kurang mampu	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			b) Sekolah pendidikan SD/ MI kondisi bangunan baik	90,0%	92,0%	95,0%	96,0%	97,0%	98,0%	98,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			c) Angka partisipasi sekolah	94,34%	95,0%	96,0%	97,0%	98,0%	99,5%	99,5%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			d) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	0,016%	0,016 %	0,017%	0,017 %	0,018 %	0,018 %	0,018%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			f) Rasio guru terhadap murid	0,040%	0,043 %	0,046%	0,049 %	0,052 %	0,055 %	0,055%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			g) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	5,66%	5%	4%	3%	2%	0,5%	0,5%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			h) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	0,016%	0,016 %	0,017%	0,017 %	0,018 %	0,018 %	0,018%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			i) Rasio guru terhadap murid	0,040%	0,043 %	0,046%	0,049 %	0,052 %	0,055 %	0,055%		Pendidikan	Dinas Pendidikan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
		2.9.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan menengah yang berkualitas	a) Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/ SMK/MA kondisi bangunan baik (%)	90,0%	92,0%	95,0%	96,0%	97,0%	98,0%	98,0%	Program Pendidikan Menengah Program manajemen Pelayanan Pendidikan Menengah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Program wajib 12 tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			b) Rasio jumlah buku ajar dengan murid	1/6	1/6	1/5	1/4	1/3	1/2	1/1		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			c) Jumlah dan jenis peralatan laboratorium	0,012	0,012	0,012	0,014	0,015	0,017	0,018		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		2.9.4 Meningkatnya kualitas substansi dan metode pembelajaran di semua jenjang pendidikan	a) Dokumen kurikulum setiap mata pelajaran	1	1	1	1	1	1	1		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			b) Angka batas Nilai tuntas	32,5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			c) Variasi metode pembelajaran	50,9%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			d) Jumlah guru yang mengikuti diklat metode pembelajaran	33,5%	34,6%	38,9%	41,2%	44,6%	47,8%	49,2%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		2.9.5 Meningkatnya mutu lulusan SMP, dan SMA/ SMK	a) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100,0%	100,0 %	100,0%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			b) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	100,0%	100,0 %	100,0%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			c) Rasio jumlah sekolah dengan ruang perpustakaan	9,2%	9,3%	10,9%	12,6%	15,4%	17,9%	20,8%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			d) Judul dan jumlah buku	252	380	550	780	960	1250	4172		Pendidikan	Dinas Pendidikan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
2.10	Meningkatkan pembinaan pendidikan non-formal	2.10.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan non-formal	a) Jumlah lembaga pendidikan non formal yang ada di daerah	11	11	37	53	70	100	100	Program Pendidikan Non Formal Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			b) Jenis lembaga pendidikan non formal di daerah	1	1	1	2	2	2	9		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			c) Jumlah regulasi untuk mendorong perkembangan pendidikan non formal	5	5	10	10	15	15	60		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			d) Jumlah anggaran untuk pengembangan pendidikan non formal	50,0%	53,0%	53,0%	56,0%	60,0%	65,0%	70,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			e) Jumlah lembaga pendidikan yang menjadi binaan	50,0%	50,0%	65,0%	75,0%	85,0%	95,0%	95,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			f) jumlah kegiatan yang difasilitasi dalam SKB	50,0%	55,0%	70,0%	70,0%	85,0%	95,0%	95,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		2.10.2 Meningkatkan pelayanan pendidikan non formal	a) Jumlah sarana bangunan lembaga pendidikan non formal	10,0%	25,0%	30,00%	55,0%	70,0%	90,0%	90,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			b) Jumlah tenaga pendidik bersertifikat	50,0%	50,0%	65,0%	75,0%	85,0%	95,0%	95,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			c) Jumlah siswa didik yang terserap di pasar kerja	60,0%	25,0%	0.35	55,0%	75,0%	95,0%	98,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			d) Dokumen perencanaan pengembangan pendidikan non formal	70,0%	52,0%	70,0%	85,0%	90,0%	90,0%	90,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			e) Dokumen kurikulum dan bahan ajar berdasarkan kompetensi	10,0%	25,0%	30,0%	30,0%	70,0%	95,0%	95,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.11	Meningkatkan jumlah, kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	2.11.1 Meningkatnya jumlah guru dan tenaga kependidikan	a) Rasio guru terhadap murid sekolah menengah	0,092%	0,098 %	0,10%	0,10%	0,11 %	0,11 %	0,11 %	Program rekruitmen tenaga pendidik di semua jenjang dan jalur pendidikan	Kepegawaian	BKD
			b) Rasio guru terhadap murid per kelas ratarata sekolah menengah	10,90%	10,25 %	9,80%	9,50%	9,20%	9,00%	9,00%		Kepegawaian	BKD
			c) Jumlah tenaga kependidikan untuk setiap sekolah	338	500	775	875	975	1075	1075		Kepegawaian	BKD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
		2.11.2 Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan	a) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	39,6%	45,0%	55,0%	60,0%	65,0%	75,0%	75,0%	Program Peningkatan Mutu pendidikan dan tenaga pendidik Program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan Program pengembangan manajemen sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			b) Jumlah guru yang mengikuti pendidikan lanjut	40,3%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			c) Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti diklat	2,1%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			d) Jumlah tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikat administratif	2,1%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		2.11.3 Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan	a) Jumlah guru yang memperoleh insentif	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Program pemberian insentif bagi guru Peningkatan sarana dan prasarana guru Pendidikan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			b) Jumlah unit rumah bagi guru	8,7%	0,0%	0,0%	11 ,0%	13,0%	17,0%	19,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			c) Jumlah unit transportasi bagi guru	3,1%	0,0%	0,0%	5,2%	6,7%	7,1%	8,2%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.12	Meningkatkan kualitas kelembagaan pelayanan kepada perempuan dan anak	2.12.1 Tersedianya data based perencanaan pemberdayaan perempuan dan anak	a) Dokumen pemetaan ketrampilan dan kebutuhan	--	--	--	1	1	1	3	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan
			b) Dokumen data based peta pelayanan kebutuhan anak	--	--	--	1	1	1	3	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan
		2.12.2 Tersedianya sarana dan prasarana pelayanankepada perempuan dan anak Luas bangunan perkantoran Badan Pemberdayaan Perempuan (M2)		322,5	376,5	426,5	526,5	526,5	526,5	526,5	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
		2.11.2 Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan	a) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	39,6%	45,0%	55,0%	60,0%	65,0%	75,0%	75,0%	Program Peningkatan Mutu pendidikan dan tenaga pendidik Program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan Program pengembangan manajemen sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			b) Jumlah guru yang mengikuti pendidikan lanjut	40,3%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			c) Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti diklat	2,1%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			d) Jumlah tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikat administratif	2,1%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		2.11.3 Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan	a) Jumlah guru yang memperoleh insentif	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Program pemberian insentif bagi guru Peningkatan sarana dan prasarana guru Pendidikan Dinas Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			b) Jumlah unit rumah bagi guru	8,7%	0,0%	0,0%	11 ,0%	13,0%	17,0%	19,0%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
			c) Jumlah unit transportasi bagi guru	3,1%	0,0%	0,0%	5,2%	6,7%	7,1%	8,2%		Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.12	Meningkatkan kualitas kelembagaan pelayanan kepada perempuan dan anak	2.12.1 Tersedianya data based perencanaan pemberdayaan perempuan dan anak	a) Dokumen pemetaan ketrampilan dan kebutuhan	--	--	--	1	1	1	3	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan
			b) Dokumen data based peta pelayanan kebutuhan anak	--	--	--	1	1	1	3	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan
		2.12.2 Tersedianya sarana dan prasarana pelayanankepada perempuan dan anak Luas bangunan perkantoran Badan Pemberdayaan Perempuan (M2)		322,5	376,5	426,5	526,5	526,5	526,5	526,5	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
2.13	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peran serta dalam pemberdayaan perempuan dan anak	2.13.1 Terciptanya lingkungan yang mendukung program pemberdayaan perempuan dan anak	a) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (rasionalisasi capaian)	0,7	0,7	0,8	0,9	0,10	0,10	0,10	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan
			b) Persentase partisipasi perempuan di lembaga	0,2063	22,75%	23,80%	25,90%	28,35%	30,15%	30,15%		Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
			c) Partisipasi perempuan di lembaga swasta	33,33%	33,88%	34,00%	34,30%	34,50%	35,00%	35,00%		Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan
			d) Rasio KDRT (rasionalisasi data)	0,0001%	--	--	--	--	--	--		Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan
			e) Partisipasi angkatan kerja perempuan	30,27%	30,80%	31,50%	32,00%	32,50%	33,00%	33,00%		Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan
			f) Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	--	--	--	--	--	--	--		Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan
			g) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	1	--	--	--	--	--	--		Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan
			h) PKK aktif	95,0%	98,0%	99,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan
			i) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	95,0%	96,0%	97,0%	98,0%	99,0%	99,0%	99,0%		Pemberday	Badan

												aan Perempuan dan Anak	Pemberdayaan Perempuan
			j) PKK aktif	95,0%	98,0%	99,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan
			k) Posyandu aktif	99,0%	99,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan
			l) Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	80,0%	84,0%	88,0%	94,0%	98,0%	99,0%	99,0%		Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan
			m) LPM Berprestasi	70,0%	70,0%	75,0%	85,0%	90,0%	95,0%	95,0%		Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan
			n) Posyandu aktif (%)	99,0%	99,0%	100%	100%	100%	100%	100%		Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
2.14	Meningkatkan keberdayaan masyarakat Kampung	2.14.1 Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kampung	a) Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	60,0%	65,0%	70,0%	75,0%	80,0%	90,0%	90,0%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
			b) Jumlah LSM	3	3	4	5	6	7	7		Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
			c) Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	80,0%	84,0%	88,0%	94,0%	98,0%	99,0%	99,0%		Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
		2.14.2 Tersedianya sumberdaya pendampingan program pemberdayaan masyarakat	a) Jumlah kelompokmasyarakat yang mendapatkan bantuan dana	97	-	9	9	9	124	124	Program pengembangan lembaga ekonomi spedesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
		2.14.3 Tersedianya sumberdaya manusia yang kompeten untuk pendampingan masyarakat kampung	a) Jumlah Community Organizer (CO) yang ditugaskan mendampingi masyarakat (unit)	23	-	11	12	12	58	58		Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
2.15	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	2.15.1 Meningkatnya kualitas generasi muda yang sehat jasmani rohani dan berdaya saing	a) Prestasi pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	25	-	-	30	30	35	120		Pemuda dan Olahraga	DISPORA
			b) Menurunnya jumlah konflik laten maupun manifest antar kelompok pemuda	-	-	-	25	50	60	135		Pemuda dan Olahraga	DISPORA
			c) Jumlah wira usaha di kalangan pemuda	20	-	-	40	45	50	155		Pemuda dan Olahraga	DISPORA
			d) Jumlah kelompok usaha yang dikelola generasi muda	5	10	16	20	40	11	6		Pemuda dan Olahraga	DISPORA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
			e) Jumlah pelatihan kepemimpinan	-	-	-	20	20	20	60		Pemuda dan Olahraga	DISPORA
			f) Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan	25	-	-	25	25	25	100		Pemuda dan Olahraga	DISPORA
			g) Jumlah aktivitas sosial, budaya, seni dan keagamaan yang diselenggarakan oleh organisasi pemuda	-	-	-	2	3	3	8		Pemuda dan Olahraga	DISPORA
			h) Jumlah even budaya daerah dan nasional yang diikuti oleh pemuda dan organisasi pemuda	-	-	-	1	1	1	3		Pemuda dan Olahraga	DISPORA
			i) Organisasi pemuda yang terlibat dalam proses perencanaan mulai dari tingkat kampong sampai daerah	10	8	-	3	3	3	27		Pemuda dan Olahraga	DISPORA
			j) Jumlah organisasi pemuda yang focus pada pengelolaan asset, budaya dan lingkungan	-	-	-	2	1	2	5		Pemuda dan Olahraga	DISPORA
		2.15.2 Meningkatnya prestasi olah raga Generasi Muda	a) Jumlah organisasi olah raga yang dibina	19	1	2	2	2	2	28		Pemuda dan Olahraga	DISPORA
			b) Jumlah staf yang mengikuti diklat	3	1	3	4	4	2	17		Pemuda dan Olahraga	DISPORA
			c) Jumlah pelatih yang mengikuti diklat	24	2	44	48	48	48	214		Pemuda dan Olahraga	DISPORA
			d) Data tentang bakat dan potensi cabang-cabang olah raga	35	50	-	50	50	50	235		Pemuda dan Olahraga	DISPORA
			e) Jumlah cabang olah raga yang dibina oleh koni	19	-	-	3	3	3	28		Pemuda dan Olahraga	DISPORA
			f) Jumlah cabang olah raga yang berprestasi	2	2	1	3	3	3	14		Pemuda dan Olahraga	DISPORA
			g) Jumlah MOU kerjasama antara swasta dan pemerintah dalam pengadaan sarana olah raga	1	-	-	-	-	-	1		Pemuda dan Olahraga	DISPORA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
			h) Jumlah sarana olah raga yang dibangun dan dikelola oleh swasta	-	-	-	-	-	-	-		Pemuda dan Olahraga	DISPORA
			i) Jumlah gedung olahraga yang dibangun pemerintah	1	-	-	1	-	1	3		Pemuda dan Olahraga	DISPORA
			j) Jumlah sarana olah raga yang disediakan oleh masyarakat di setiap kampong	8	-	-	1	-	-	9		Pemuda dan Olahraga	DISPORA
			k) Jenis sarana dan prasarana yang disediakan oleh masyarakat	148	-	2	3	3	3	159		Pemuda dan Olahraga	DISPORA

Tabel 7.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan dalam Perbaikan Tatakelola pemerintahan (*good governance*)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
3.1	Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan dan keuangan daerah	3.1.1 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur	a) Persentase jumlah pegawai yang tugas belajar pada tingkat diploma	1,6%	1,8%	2,0%	2,4%	3,0%	3,2%	3,2%	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,	Kepegawaian, dan Persandian	BKD
			b) Persentase jumlah pegawai yang tugas belajar pada tingkat S1	3,6%	3,8%	4,0%	4,2%	4,5%	5,0%	5,0%			BKD
			c) Persentase jumlah pegawai yang tugas belajar pada tingkat S2	0,8	1,2%	1,5%	1,8%	2,0%	2,5%	2,5%			Inspektorat
			d) Persentase jumlah pegawai yang tugas belajar pada tingkat S3	0%	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	0,9%			BKD
			e) Persentase pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai dengan jabatan yang diemban	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%			BKD

			f) Persentase peserta untuk setiap jenis diklat/ bimtek terhadap jumlah pegawai yang memiliki tupoksi yang relevan dengan materi diklat	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	Perangkat Daerah,		BKD
		3.1.2 Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	a) Ketepatan waktu penyediaan dokumen APBD	Tidak tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa OtonomiDaerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah,	Kepegawaian, dan Persandian	BPKAD dan Dispenda
			b) Ketepatan waktu penyediaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tidak tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu			BPKAD
			c) Status hasil pemeriksaan BPK	WDP	-	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP			BPKAD
			d) Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	100%	93%	100%	100%	100%	100%	100%			DISPENDA
			e) Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	8	9	10	10	11	12	12			DISPENDA
		3.1.3 Meningkatnya kapasitas kelembagaan	a) Persentase jabatan yang diduduki oleh orang yang memiliki latarbelakang pendidikan yang relevan	90%	95%	98%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Program PenataanDaerah Otonomi Baru Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian Bagian Ortala, Bagian Pemerintahan, BagianPenyusunan Program,		Bagian Humas (SETDA) dan BKD
			b) Jumlah SOP yang berlaku efektif	10	15	23	31	37	45	45			Bagian Pemerintahan (SETDA)
			c) Jumlah kebijakan strategis yang dihasilkan (yang tingkat relevansinya tinggi terhadap pencapaian visi daerah)	0	0	4	5	5	5	5			Bagian Pemerintahan (SETDA)
			d) Persentase jumlah keluhan masyarakat yang terselesaikan	25%	45%	60%	75%	80%	95%	95%			Bagian Pemerintahan (SETDA)
			e) Persentase distrik yang memiliki renstra	0%	0%	0%	40%	70%	100%	100%			Bagian Pemerintahan (SETDA)
			f) Persentase kampong yang memiliki renstra	0%	0%	0%	20%	60%	100%	100%			Bagian Pemerintahan (SETDA)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
		3.1.4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	a) Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,76	0,80	0,82	0,85	0,88	0,90	0,90	Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Program Sosialisasi Pelayanan Administrasi Program Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan sistem dan data) Program Peningkatan Sarana Prasarana Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Kependudukan dan Catatan Sipil
			b) Rasio bayi berakte kelahiran	70,0%	73,0%	75,0%	78,0%	80,0%	84,0%	84,0%		Dukcapil	Dukcapil
			c) Kepemilikan KTP	44,7%	48,0%	55,0%	60,0%	65,0%	80,0%	80,0%		Dukcapil	Dukcapil
			d) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	5203	100	125	150	175	200	5953		Dukcapil	Dukcapil
			e) Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	--	--	ada	ada	ada	ada	ada		Dukcapil	Dukcapil
			f) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah		Dukcapil	Dukcapil
			g) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	--	--	ada	ada	ada	ada	ada		Kesbangpol Dalam Negeri	Kesbangpolinmas dan Satpol PP
			h) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	14,11	29,17	30,34	31,52	32,59	33,87	33,87		Kesbangpol Dalam Negeri	Kesbangpolinmas dan Satpol PP
			i) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	80,0%	87,5%	88,8%	90,0%	91,6%	94,5%	94,5%		Kesbangpol Dalam Negeri	Kesbangpolinmas dan Satpol PP
			j) Cakupan patroli petugas Satpol PP	730	730	730	730	730	730	730		Kesbangpol Dalam Negeri	Kesbangpolinmas dan Satpol PP
			k) Cakupan rumah tangga yang telah mendapatkan sosialisasi tentang pengurangan risiko dan penanggulangan bencana (%)	0%	0%	0,5%	0,6%	0,9%	1,2%	1,2%		Kesbangpol Dalam Negeri	BPBD
			l) Cakupan kampong yang siap menghadapi bencana alam (%)	0%	0%	6,45%	16,13%	2,42%	32,25%	32,25 %		Kesbangpol Dalam Negeri	BPBD
			m) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0%	5%	10%	20%	30%	50%	50%		Kesbangpol Dalam Negeri	BPBD

											Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Dukcapil Dukcapil		
			n) Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	30%	40%	50%	60%	70%	80%	80%		Kesbangpol Dalam Negeri	BPBD
			o) Jumlah perpustakaan (unit)	3	--	4	6	6	7	26		Arsip dan Perpustakaan	KPAD
			p) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,19	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23			
			q) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,93	0,94	0,96	0,97	0,98	0,99	0,99		Arsip dan Perpustakaan	KPAD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
		3.1.5 Meningkatnya kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan	a) Ketersediaan Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Program Pengembangan Data Informasi Program Statistik Program Penyediaan Informasi Kependudukan Program perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial budaya Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			b) Ketersediaan Buku ”PDRB kabupaten”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			c) Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan perda	--	1	--	--	--	--	1		Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			d) Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda	1	1	--	--	--	--	1		Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			e) Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan perkada	1	1	1	1	1	1	6		Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			f) Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	70,0%	80,0%	85,0%	90,0%	95,0%	100,0%	100,0 %		Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			g) Penjabaran program RPJMD ke dalam renstra SKPD	70,0%	80,0%	90,0%	100%	100%	100%	100%		Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			h) Persentase kampong yang memiliki renstra	0%	10%	20%	50%	75%	100%	100%		Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			i) Ketaatan terhadap RTRW (%)	--	95,0%	99,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0 %		Penataan Ruang	Bappeda

			j) Luas wilayah produktif	99,0%	99,0%	99,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0 %	menengah dan besar Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Penyusunan Kebijakan Kependudukan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/	Penataan Ruang	Bappeda
			k) Luas wilayah industri	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	14,13 %		Penataan Ruang	Bappeda
			l) Luas wilayah kebanjiran	22,79%	22,79%	22,79%	22,79%	22,79%	22,79%	22,79 %		Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			m) Luas wilayah kekeringan	35,55%	35,55%	35,55%	35,55%	35,55%	35,55%	35,55 %		Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			n) Luas wilayah perkotaan	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	10,23 %		Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			o) Jumlah perda yang disahkan setiap tahunnya	60	14	10	15	17	20	136		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Setwan	Setwan
			p) Persentase jumlah perda iniasi DPRD terhadap jumlah perda keseluruhan yang disahkan di setiap tahunnya (%)	80%	63,6%	66,7%	75,0%	85,0%	100,0%	100,0 %			Setwan
			q) Frekuensi public hearing dengan kelompok masyarakat	77	125	130	135	145	150	150			Setwan
			r) Cakupan pengawasan terhadap SKPD (%)	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%			Inspektorat
			s) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek (%)	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%			Inspektorat
			t) Persentase temuan yang ditindaklanjuti (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Inspektorat
			u) Frekuensi dialog antara kepala daerah/ wakil kepala daerah dan kelompok masyarakat	36	36	36	48	48	56	56		Bagian Umum	(SETDA)
			v) Cakupan inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah di SKPD (%)	2	2	2	4	4	4	4		Bagian Umum	(SETDA)
			w) Nilai kualitas LAKIP dari Kemenpan dan RB	655	70%	80%	85%	95%	100%	100%		Bagian Pemerinta	(SETDA)

											wakil kepala daerah Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	han	
			x) Nilai kualitas LPPD	0	45%	65%	75%	85%	95%	95%		Bagian Pemerintahan	(SETDA)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
3.2`	Mewujudkan tatanan politik lokal yang harmonis	3.2.1 Terwujudnya masyarakat dan lingkungan sosial yang ramah, peduli dan inklusif	a) Frekuensi konflik horizontal	1	0	1	0	0	0	0	Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Kesbangpol Dalam Negeri	Kesbangpolinmas
		3.2.2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam praktik demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan	a) Persentase masyarakat yang menjadi pemilih pada Pilpres	75%	-	-	-	-	100,0%	100,0%	Program pendidikan politik masyarakat Program hubungan antar lembaga	Kesbangpol Dalam Negeri	Kesbangpolinmas
			b) Persentase masyarakat yang menjadi pemilih pada pemilihan anggota DPR dan DPD	87,9%	-	-	-	100,0%	-	100,0%		Kesbangpol Dalam Negeri	Kesbangpolinmas
			c) Persentase masyarakat yang menjadi pemilih pada pemilihan anggota DPRD	87,9%	-	-	-	100,0%	-	100,0%		Kesbangpol Dalam Negeri	Kesbangpolinmas
			d) Persentase masyarakat yang menjadi pemilih pada pemilihan kepala daerah	100,0%	-	-	-	-	100,0%	100,0%		Kesbangpol Dalam Negeri	Kesbangpolinmas

			e) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	--	--	1	1	1	1	4		Kesbangpol Dalam Negeri	Kesbangp olinmas
			f) Kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	1	1	1	1	6		Kesbangpol Dalam Negeri	Kesbangp olinmas
			g) Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	124,68	127,03	131,73	138,79	145,85	155,26	155,26		Kesbangpol Dalam Negeri	Kesbangp olinmas
			h) Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	0,32		Kesbangpol Dalam Negeri	Kesbangp olinmas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
		3.2.3 Meningkatnya kepatuhan terhadap hukum	a) Jumlah kasus hukum terkait penggunaan miras dan narkoba	5	4	4	3	2	1	1	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program pembangunan system pendaftaran tanah Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kesbangpol Dalam Negeri	Satpol PP
			b) Angka kriminalitas	0,19%	0,17%	0,16%	0,14%	0,12%	0,09%	0,09%		Kesbangpol Dalam Negeri	Satpol PP
			c) Angka kriminalitas yang tertangani	95,0%	96,0%	97,5%	98,0%	98,5%	98,7%	98,7%		Kesbangpol Dalam Negeri	Satpol PP
			d) Jumlah kasus pelanggaran ijin	12	8	7	4	3	1	1		Kesbangpol Dalam Negeri	Satpol PP
			e) Persentase luas lahan bersertifikat	--	--	1,49	1,83	2,16	2,49	2,49		Pertanahan Pemerintahan	(Setda)
			f) Persentase jumlah kasus konflik terkait dengan pertanahan yang terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-		Pertanahan Bagian Pemerintahan	(Setda)

Tabel 7.4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan dalam Pembangunan ekonomi berbasis potensi bahari dan sumberdaya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
4.1	Pengembangan usaha produksi barang dan jasa berbasis potensi bahari dan sumberdaya lainnya secara optimal dan berkelanjutan	4.1.1 Meningkatnya produktivitas hasil berbasis potensi sumberdaya kelautan dengan tetap menjaga kelestarian nilai-nilai dasar masyarakat yang menempatkan laut sebagai sumber kehidupan	a) Jumlah produksi perikanan (ton)	222,354	245	269	296	326	358	358	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan Program Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Program pengembangan perikanan Peningkatan sarana dan prasarana tangkap Program Pengembangan Agribisnis	Kelautan dan Perikanan	DKP
			b) Jumlah konsumsi ikan (ton)	186,068	205	224	248	272	300	300		Kelautan dan Perikanan	DKP
			c) Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	62	68	74	81	89	97	97		Kelautan dan Perikanan	DKP
			d) Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	185,175	204	224	246	271	298	298		Kelautan dan Perikanan	DKP
		4.1.2 Meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama dan keragaman pangan lokal	a) Jumlah ketersediaan pangan utama (%)	70,5%	75,8%	80,9%	84,5%	89,5%	94,5%	94,5%		Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
			b) Produktivitas bahan pangan utama local lainnya per hektar (ton)	3,40	3,70	4,00	4,25	4,70	4,70	4,50		Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
			c) Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	3,01	4,49	5,16	5,84	6,51	7,18	7,18	Perluasan Areal Tanam Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program peningkatan produksi pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
			d) Adanya regulasi ketahanan pangan	--	--	--	--	Ada	Ada	Ada		Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
			e) Jumlah variasi/jenis sumber pangan local (%)	30	38	46	54	62	70	70	Peningkatan Ketahanan Pangan Pembuatan peta ketahanan & kerawanan Pangan Peningkatan Hasil Produksi Peternakan Peningkatan produktivitas perkebunan Program penataan pengelolaan hasil perkebunan Program Pengembangan Kelembagaan,SDM san IPTEK kehutanan Program Peningkatan dan Efektifitas Pemanfaatan Hutan Produksi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan Program Reboisasi dan Rehabilitasi Kawasan Hutan	Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan
		4.1.3 Meningkatnya produktivitas hasil produksi peternakan, dan perkebunan	a) Kontribusi sector peternakan terhadap PDRB (%)	7,08	8,33	9,58	10,82	12,07	13,32	13,32		Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
			b) Kontribusi sector perkebunan terhadap PDRB (%)	0,0120	0,0125	0,0125	0,0135	0,0140	0,0145	0,0145		Perkebunan	Dinas Perkebunan
		4.1.4 Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup	a) Kontribusi sector kehutanan terhadap PDRB (%)	0,06390	0,06390	0,06390	0,06390	0,06390	0,06390	0,06390		Kehutanan	DISHUT
			b) Tingkat kerusakan kawasan Hutan (%)	10,40	9,61	8,82	8,03	7,24	6,45	6,45		Kehutanan	DISHUT
			c) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	64	64	64	64	64	64	64		Kehutanan	DISHUT

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
		4.1.5 Meningkatnya jumlah kunjungan wisata bahari yang berdampak pada peningkatan kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	a) Tingkat kunjungan wisata (orang)	4507	6853	7000	7000	8000	9000	42360	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	DISBUDPAR
			b) Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB (%)	0,18	0,20	0,20	0,21	0,21	0,30	0,30		Pariwisata	DISBUDPAR
4.2	Mengembangkan industri usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang berbasis sumberdaya ekonomi local dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	4.2.1 Berkembangnya ekonomi masyarakat	a) Jumlah Usaha Mikro dan Menengah (%)	98,0%	99,0%	99,0%	99,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan UKM	DISPERINDAKOP&UKM
			b) Jumlah UKM non BPR/ LKM UKM	40	58	65	75	90	100	428		Koperasi dan UKM	DISPERINDAKOP&UKM
			c) Jumlah BPR/LKM	--	--	--	1	--	1	2		Koperasi dan UKM	DISPERINDAKOP&UKM
			d) Persentase koperasi aktif (%)	90,0%	94,0%	95,0%	96,0%	98,0%	99,0%	99,0%		Koperasi dan UKM	DISPERINDAKOP &UKM

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
		4.2.2 Meningkatnya kontribusi industry masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat	a) Kontribusi industry rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	1,00	0,98	0,98	0,96	0,95	0,95	0,95	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi ProgramPeningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Industri	DISPERINDAKOP &UKM
			b) Kontribusi sector Industri terhadap PDRB (%)	0,00240	0,00240	0,00250	0,25000	0,00270	0,00280	0,00280		Industri	DISPERINDAKOP &UKM
			c) Pertumbuhan Industri (%)	0,150	0,200	0,250	0,250	0,300	0,350	0,350		Industri	DISPERINDAKOP &UKM
			d) Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	0,160	0,133	0,143	0,150	0,156	0,160	0,160		Industri	DISPERINDAKOP &UKM
			e) Rasio penduduk yang bekerja (%)	0,062	0,068	0,074	0,079	0,083	0,088	0,088		Ketenagakerjaan	DISNAKERTRANS

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
		4.2.3 Meningkatnya nilai dan jumlah perdagangan produk local masyarakat	a) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	--	--	1	3	4	4	12	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Penanaman Modal	DISPERINDAKOP- &UKM
			b) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar rupaih)	--	--	3	10	15	15	43		Penanaman Modal	DISPERINDAKOP- &UKM
			c) Rasio daya serap tenaga kerja (orang)	--	--	150	167	188	200	200		Penanaman Modal	DISPERINDAKOP- &UKM
			d) Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (persen)	--	--	50	65	75	85	85		Penanaman Modal	DISPERINDAKOP- &UKM
			a) Kontribusi sector Perdagangan terhadap PDRB (%)	2,61	3	3	3	3	3	3		Perdagangan	DISPERINDAKOP- &UKM
			c) Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	--	--	20	30	35	50	135		Perdagangan	DISPERINDAKOP- &UKM
4.3	Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan keselarasan sosial budaya, dan kelestarian lingkungan	4.3.1 Terkelolanya keragaman dan kekayaan budaya Raja Ampat	a) Jumlah grup kesenian	12	2	2	2	2	2	12	Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	DISBUDPAR
			b) Adanya kebijakan tentang budaya local daerah	6	1	1	1	1	1	11		Kebudayaan	DISBUDPAR
			c) Jumlah Kelompok Seni dan Tari Masyarakat Kampung Wisata yang dibina	10	2	2	2	2	2	20		Kebudayaan	DISBUDPAR
			d) Tersedianya Inventarisasi dokumen seni dan buday Raja Ampat	3	1	1	1	1	1	8		Kebudayaan	DISBUDPAR
			e) Jumlah gedung kesenian	0	0	0	0	0	1	1		Kebudayaan	DISBUDPAR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Capaian Kinerja							Prioritas Program Pembangunan	Bidang Usaha	SKPD
				Kondisi Awal	2011	2012	2013	2014	2015	Kondisi Akhir			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-14	-15
		4.3.2 Terjaganya kelestarian sumberdaya ekonomi dan lingkungan	a) Jumlah kelompok swakarsa pengamanan kelautan	45	--	10	10	10	10	85%	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Kelautan dan Perikanan	DKP
			b) Ketersediaan data mitigasi bencana	--	--	1	1	1	1	4		Sosial	BPBD

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PRO GRAM PRIORITAS SERTA KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indicator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Berikut adalah rencana program berdasarkan jenis urusan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat pada periode 2011 -2015:

A. Urusan Wajib

1. Pendidikan

a. Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun
b. Program pendidikan non formal
c. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
d. Program manajemen pelayanan pendidikan
e. Program Pendidikan Tinggi
f. Program Peningkatan Mutu Pendidikan
g. Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Staf Dinas
h. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
i. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2. Kesehatan

a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
c. Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat
d. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana beserta dan jaringannya
e. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
f. Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
g. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
h. Program peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu melahirkan
i. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
j. Program Peningkatan Kualitas dan Kedisplinan Tenaga Kesehatan
k. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
l. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3. Lingkungan Hidup

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
d. Peningkatan Sarana-prasarana

4. Pekerjaan Umum :

a. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya
b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.
c. Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong.
d. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
f. Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan
g. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
h. Program Penyusunan Database Jalan dan Jembatan
i. Program peningkatan sarana dan prasarana umum
j. Program peningkatan sarana prasarana aparatur pemerintah
k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

l. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
m. Program Pengembangan Taman Kota

5. Penataan Ruang :
a. Program Penataan Ruang
b. Program Pemanfaatan Ruang
c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

6. Perencanaan Pembangunan
a. Program Pengembangan Data Informasi
b. Program Kerjasama Pembangunan
c. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
e. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
f. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
g. Program perencanaan pembangunan daerah
h. Program perencanaan pembangunan ekonomi
i. Program perencanaan sosial budaya
j. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

7. Perumahan
a. Program pengembangan konsep rumah sederhana, sehat dan tahan gempa
b. Program pengelolaan areal pemakaman umum
c. Program penanganan bencana kebakaran

8. Kepemudaan dan Olah Raga
a. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga .
b. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga bahari.
c. Program peningkatan peran serta kepemudaan
d. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
e. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

9. Penanaman Modal.
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

10.Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

11 . Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik
b. Program Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
c. Program Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan
pemeliharaan)
d. Program Penyediaan Informasi Kependudukan
e. Program Penyusunan Kebijakan Kependudukan
f. Peningkatan Sarana Prasarana

12. Ketenagakerjaan
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.
c. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

13. Ketahanan Pangan
a. Peningkatan Ketahanan Pangan
b. Pembuatan peta ketahanan dan kerawanan Pangan

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
b. Program pengarusutamaan gender dan anak

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a. Program pelayanan kontrasepsi
b. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

16. Perhubungan
a. Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Laut.
b. Program Pengadaan Fasilitas Pendukung Perhubungan Laut
c. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan Laut
d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Laut.
e. Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan Darat.
f. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
g. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Darat.
h. Program Pembangunan Prasarana Perhubungan Udara.
i. Program Pembangunan /Pengadaan dan Peningkatan Fasilitas Pendukung Perhubungan
Udara.
j. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan Udara.
k. Program Peningkatan Kapasitas Aparat Dinas Perhubungan.

17. Komunikasi dan Informatika Program Pembangunan Sarana Prasarana Informasi dan Telekomunikasi

18. Pertanahan
a. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
b. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
c. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
c. Program pengembangan wawasan kebangsaan
d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
e. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
f. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
g. Program pendidikan politik masyarakat
h. Program hubungan antar lembaga
i. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
a. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
b. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah
c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
d. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
e. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
f. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
g. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/ kota
h. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
i. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
j. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

k. Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
l. Program Penataan Peraturan Perundangundangan
m. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
n. Program Peningkatan Sarana-prasarana

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

22. Sosial

a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
c. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

23. Budaya

a. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

24. Statistik

Program Statistik

25. Kearsipan dan Perpustakaan

a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
b. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

B. URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

a. Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan
b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
c. Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
d. Program pengembangan perikanan tangkap

2. Pertanian

a. Perluasan Areal Tanam
b. Program peningkatan produksi pertanian dan peternakan
c. Peningkatan produktivitas perkebunan
d. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
e. Peningkatan Hasil Produksi Peternakan
f. Program Pengembangan Agribisnis
g. Peningkatan sarana dan prasarana
h. Program penataan pengelolaan hasil perkebunan

3. Kehutanan

a. Program Peningkatan dan Efektifitas Pemanfaatan Hutan Produksi
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
c. Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan
d. Program Reboisasi dan Rehabilitasi Kawasan Hutan /Hutan
e. Program Pengembangan Kelembagaan,SDM dan IPTEK kehutanan

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
b. Program pembinaan dan pengawasan Bidang Pertambangan
c. Program Peningkatan sarana dan prasarana
d. Program Penyediaan alat-alat Pertambangan dan alat-alat Laboratorium

5. Pariwisata

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
c. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

6. Industri

a. Program peningkatan Kapasitas Iptek SistemProduksi
b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
d. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensia
l

7. Perdagangan

a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
d. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

8. Transmigrasi

Program pengembangan wilayah transmigrasi Penyajian indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, sekurang-kurangnya disajikan dalam tabel berikut

8.1. Urusan Wajib

8.1.1. Pendidikan

Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Pendidikan Kabubapten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	1	Jumlah Guru Eksakta dan Non Eksata SD yang mengikuti pelatihan	-	1 paket	300	-	-	-	-	1 paket	300	-	-	2 paket	600	Dinas P dan P
		2	Jumlah murid yang mendapatkan Bantuan Biaya Pengelolaan, Makan & Minum SD Pola Asrama	-	3 paket	1.200	3 paket	1.050	3 paket	1.103	3 paket	1.158	3 paket	1.216	15 paket	5.726	Dinas P dan P
		3	Jumlah SD Pola Asrama yang disubsidi pemerintah	-	3 paket	2.000	3 paket	1.500	3 paket	1.575	3 paket	1.654	3 paket	1.736	15 paket	8.465	Dinas P dan P
		4	Terfasilitasinya penyelenggaraan UAN/UAS Sekolah Dasar	-	1 paket	600	1 paket	630	1 paket	662	1 paket	695	1 paket	729	5 paket	3.315	Dinas P dan P
		5	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD	-	1 paket	500	1 paket	525	1 paket	551	1 paket	579	1 paket	608	5 paket	2.763	Dinas P dan P
		6	Bantuan Biaya Siswa KPG Khas Papua	-	1 paket	480	1 paket	504	1 paket	529	1 paket	556	1 paket	583	5 paket	2.652	Dinas P dan P
		7	Tersedianya Data Base Pendidikan	-	-	-	1 paket	200	-	-	-	-	-	-	1 paket	200	Dinas P dan P
		8	Jumlah penyelenggaraan Paket A, B dan C	-	3 paket	450	1 paket	473	1 paket	496	1 paket	521	1 paket	547	5 paket	2.487	Dinas P dan P
02.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	Persentase kampung yang menyelenggarakan PAUD	-	1 paket	400	1 paket	420	1 paket	441	1 paket	463	1 paket	486	5 paket	2.210	Dinas P dan P
		2	Jumlah Tenaga Tutor PBAF, Kejar Paket ABC dan PAUD yang terlatih	-	-	-	50 Orang	600	-	-	-	-	50 Orang	600	100 orang	1.200	Dinas P dan P
03.	Program pendidikan non formal	1	Jumlah kelompok belajar mayarakat	-	1 paket	100	1 paket	105	1 paket	110	1 paket	116	1 paket	122	5 paket	553	Dinas P dan P
		2	Terselenggaranya kegiatan Raimuna	-	-	-	-	-	1 paket	250	-	-	-	-	1 paket	250	Dinas P dan P
04.	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	1	Jumlah guru yang mengikuti diklat manajemen di masing-masing jenjang (TK,SD,SMP,SMA/SMK)	-	-	-	1 paket	200	-	-	1 paket	200	-	-	2 paket	400	Dinas P dan P

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		2	Jumlah KKG/MKG, KKKS/MKKS, KKPS/MKPS dan MGMP yang dibina.	-	2 paket	1.912	2 paket	1.912	2 paket	1.912	2 paket	1.912	2 paket	1.912	10 paket	9.560	Dinas P dan P
		3	Jumlah pustakawan dan laboran yang mengikuti diklat pengelolaan Perpustakaan dan Laboratorium	-	-	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	-	-	2 paket	400	Dinas P dan P
		4	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan kompetensi.	-	1 paket	250	-	-	-	-	1 paket	250	-	-	2 paket	500	Dinas P dan P
		5	Jumlah guru yang mengikuti pelatiihan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	1 paket	100	-	-	-	-	1 paket	200	-	-	2 paket	300	Dinas P dan P
05.	Program Pendidikan Tinggi	1	Tersedianya anggaran untuk Listrik dan Biaya Lain Asrama Mahasiswa Raja Ampat	-	1 paket	100	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	50	4 paket	300	Dinas P dan P
		2	Tersedianya Bantuan Biaya Studi akhir Mahasiswa S1	-	1 paket	1.500	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	4 paket	5.500	Dinas P dan P
06.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	1	Tersedianya dokumen KTSP,Silabus dan RPP dalam materi pembelajaran yang esensial dan bermuatan lokal sesuai potensi daerah	-	-	-	1 paket	200	-	-	-	-	1 paket	200	2 paket	400	Dinas P dan P
		2	Terselenggaranya UAN/UAS SMP dan SMA	-	1 paket	300	1 paket	315	1 paket	331	1 paket	347	1 paket	365	5 paket	1.658	Dinas P dan P
		3	Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi sekolah	-	1 paket	150	1 paket	158	1 paket	165	1 paket	174	1 paket	182	5 paket	829	Dinas P dan P
08.	Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Staf Dinas	1	Jumlah Guru/pegawai Honorer yang mendapatkan honorarium	-	200 orang	800	200 orang	800	200 orang	800	200 orang	800	200 orang	800	200 orang	4.000	Dinas P dan P
		2	Jumlah guru SMP, SMA/SMK yang menerima insentif kelebihan jam mengajar	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	4 paket	800	Dinas P dan P
		3	Jumlah guru yang memperoleh bantuan	-	-	-	1 paket	30	1 paket	30	1 paket	30	1 paket	30	4 paket	120	Dinas P dan P
09.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan	1	Jumlah Gedung SD yang dibangun	-	1 paket	12.328	1 paket	10.000	1 paket	10.000	1 paket	10.000	1 paket	10.000	5 paket	52.328	Dinas P dan P
		2	Jumlah Gedung SMP yang dibangun	-	1 paket	6.460	1 paket	5.000	1 paket	5.000	1 paket	5.000	1 paket	5.000	5 paket	26.460	Dinas P dan P
		3	Jumlah Gedung SMA yang dibangun	-	1 paket	3.870	1 paket	4.000	-	-	1 paket	4.000	-	-	2 paket	11.870	Dinas P dan P

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		4	Jumlah Gedung SMK yang dibangun	-	-	-	1 paket	4.000	-	-	1 paket	4.000	-	-	2 paket	8.000	Dinas P dan P
		5	Jumlah SD yang mendapatkan mebelair	-	-	-	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	4 paket	12.000	Dinas P dan P
		6	Jumlah SMP yang mendapatkan mebelair	-	-	-	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	4 paket	6.000	Dinas P dan P
		7	Jumlah SMA yang mendapatkan mebelair	-	-	-	1 paket	1.500	1 paket	1.500	-	-	1 paket	1.500	3 paket	4.500	Dinas P dan P
		8	Jumlah SMK yang mendapatkan mebelair	-	-	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	4 paket	2.000	Dinas P dan P
		9	Jumlah SD yang mendapatkan buku pelajaran	-	1 paket	300	1 paket	315	1 paket	331	1 paket	347	1 paket	365	5 paket	1.658	Dinas P dan P
		10	Jumlah SMP yang mendapatkan buku pelajaran	-	1 paket	350	1 paket	368	1 paket	386	1 paket	405	1 paket	425	5 paket	1.934	Dinas P dan P
		11	Jumlah SMA yang mendapatkan buku pelajaran	-	1 paket	350	1 paket	200	1 paket	210	1 paket	221	1 paket	232	5 paket	1.212	Dinas P dan P
		12	Jumlah SMK yang mendapatkan buku pelajaran	-	1 paket	350	1 paket	368	1 paket	386	1 paket	405	1 paket	425	5 paket	1.934	Dinas P dan P
		13	Jumlah SMP yang mendapatkan peralatan laboratorium	-	-	-	1 paket	300	-	-	1 paket	300	-	-	2 paket	600	Dinas P dan P
		14	Jumlah SMA yang mendapatkan peralatan laboratorium	-	1 paket	300	-	-	1 paket	300	-	-	-	-	2 paket	600	Dinas P dan P
		15	Jumlah SMK yang mendapatkan peralatan laboratorium	-	-	-	1 paket	300	-	-	1 paket	300	-	-	2 paket	600	Dinas P dan P
		16	Jumlah Rumah Penjaga asrama yang dibangun	-	-	-	-	-	1 paket	500	-	-	-	-	1 paket	500	Dinas P dan P
		17	jumlah Rumah Juru Masak SD Asrama yang dibangun	-	-	-	-	-	1 paket	300	-	-	-	-	1 paket	300	Dinas P dan P
		18	Jumlah paket Perlengkapan Informasi, Komunikasi dan Teknologi	-	1 paket	200	1 paket	210	1 paket	221	1 paket	232	1 paket	243	5 paket	1.105	Dinas P dan P
10.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	Jumlah rumah dinas Guru dan Kepsek serta pengawas sekolah yang Rehabilitasi	-	-	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	5 paket	2.000	Dinas P dan P
		2	Jumlah motor tempel dan perahu bagi guru dan pengawas	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	4 paket	1.200	Dinas P dan P
				JUMLAH		35.650	-	43.231	-	35.338	-	42.413	-	35.356	Jumlah	191.988	

8.1.2. Kesehatan

Tabel 8.2. Indikasi Rencana Program Prioritas Kesehatan Kabubapten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1	Adanya pengobatan massal penyakit menular (Kusta, Frambusia, Filariasis, dll.)	1 paket	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	6 paket	2.500	DINKES
		2	Adanya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS) bagi masyarakat	1 paket	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	6 paket	750	DINKES
		3	Terselenggara kegiatan pemberian imunisasi rutin	1 paket	-	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	4 paket	1.200	DINKES
		4	Terselenggara kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	1 paket	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	6 paket	5.000	DINKES
		5	Terselenggara kegiatan Sweeping Imunisasi	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	4 paket	800	DINKES
		6	Tersedia sarana penyimpanan vaksin bertenaga surya dan genset di puskesmas	-	-	-	1 paket	500	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	DINKES
		7	Terselenggara kegiatan penyemprotan rumah penduduk (IRS) untuk mengantisipasi malaria	-	-	-	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	4 paket	600	DINKES
		8	Terlaksana kegiatan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (Wabah)	1 paket	1 paket	600	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	4 paket	1.000	RSUD
02.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Terselenggara layanan pemberian makan dan minum untuk pasien	-	1 paket	500	1 paket	250	1 paket	263	1 paket	276	1 paket	289	5 paket	1.578	RSUD
		2	adanya Pelayanan rujukan	-	1 paket	1.834	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	5 paket	3.834	DINKES
		3	adanya dana operasional puskesmas keliling	-	-	-	1 paket	500	1 paket	550	1 paket	605	1 paket	660	4 paket	2.315	DINKES
		4	Tersalurkannya tunjangan bagi dokter dan apoteker yang tidak membuka praktik	-	1 paket	700	1 paket	735	1 paket	772	1 paket	810	1 paket	852	5 paket	3.869	DINKES
		5	Terselenggara layanan pengobatan di RSUD khusus bagi warga tidak mampu/ miskin	-	1 paket	200	1 paket	220	1 paket	242	1 paket	266	1 paket	293	5 paket	1.221	RSUD

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		6	Terselenggara jaminan kesehatan di puskesmas bagi masyarakat miskin	-	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	5 paket	5.000	DINKES
03.	Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat	1	Tersedianya SOP pelayanan RSUD melalui kegiatan workshop	-	-	-	-	-	1 paket	200	-	-	-	-	1 paket	200	RSUD
		2	Terselenggaranya workshop pengembangan Sistem Manajemen Rekam Medik dan Keuangan RSUD	-	-	-	-	-	1 paket	200	-	-	-	-	1 paket	200	RSUD
04.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana beserta dan jaringannya	1	Terbangun dan beroperasinya unit puskesmas baru (rawat jalan dan rawat inap).	-	2 paket	1.358	2 paket	1.500	2 paket	1.500	2 paket	1.500	-	-	8 paket	5.858	DINKES
		2	Tersedia rumah dinas kepala puskesmas	-	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	5 paket	1.250	DINKES
		3	Tersedia rumah dokter (Tipe 45)	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	4 paket	1.200	DINKES
		4	Tersedia barak untuk paramedis puskesmas	-	1 paket	1.200	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	5 paket	2.200	DINKES
		5	Tersedia Rumah untuk Dokter RSUD	-	-	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	5 paket	2.000	RSUD
		6	Tersedia barak untuk perawat RSUD	-	-	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	5 paket	2.000	RSUD
		7	Tersedia meubelair rumah dokter dan paramedic	-	-	-	2 paket	300	2 paket	330	2 paket	363	2 paket	399	8 paket	1.392	DINKES
		8	Terlaksana kegiatan rehabilitasi rumah paramedis	-	-	-	1 paket	800	-	-	-	-	1 paket	800		1.600	DINKES
		9	Tersedia alat pemusnah sampah biologis (insenerator) di puskesmas rawat inap	-	-	-	5 paket	250	-	-	-	-	-	-	5 paket	250	DINKES
		10	Terlaksana kegiatan rehabilitasi gedung puskesmas	-	1 paket	750	2 paket	1.500	-	-	-	-	-	-		2.250	DINKES
		11	Tersedianya Puskesmas Pembantu (Pustu) baru	-	1 paket	7.844	3 paket	1.200	3 paket	1.200	3 paket	1.200	3 paket	1.200	12 paket	12.644	DINKES
		12	Tersedia gedung baru Poskesdes	-	-	-	4 paket	1.600	4 paket	1.600	-	-	-	-	8 paket	3.200	DINKES
		13	Tersedia meubelair puskesmas/pustu/poskesdes	-	3 paket	500	3 paket	550	3 paket	605	3 paket	666	3 paket	732	15 paket	3.053	DINKES

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		14	Tersedia Long Boat untuk puskesmas keliling/ perairan	-	-	-	5 unit	275	5 unit	303	-	-	5 unit	366	15 paket	944	DINKES
		15	Tersedia motor tempel 40 PK untuk puskesmas keliling/ perairan	-	-	-	5 unit	275	5 unit	303	-	-	5 unit	366	15 paket	944	DINKES
		16	Tersedia alat kesehatan di Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes	-	3 paket	1.200	3 paket	1.320	3 paket	1.452	3 paket	1.597	3 paket	1.757	15 paket	7.326	DINKES
		17	Tersedia dan beroperasinya mobil sebagai Puskesmas keliling baru di wilayah yang masih memerlukan	-	-	-	1 unit	300	1 unit	330	1 unit	363	1 unit	399	4 unit	1.392	DINKES
		18	Tersedianya laboratorium	-	-	-	-	-	1 paket	500	-	-	-	-	1 paket	500	DINKES
		19	Tersedianya alat laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.000	-	-	1 paket	1.000	DINKES
		20	Tersedianya sarana air bersih di puskesmas yang masih memerlukan	-	-	-	3 paket	300	3 paket	300	-	-	-	-	6 paket	600	DINKES
05.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1	Tersedia obat dan bahan habis pakai untuk puskesmas dan jaringannya	-	1 paket	4.003	1 paket	2.000	1 paket	2.100	1 paket	2.205	1 paket	2.315	5 paket	12.623	DINKES
		2	Terlaksana kegiatan pengambilan obat dari gudang farmasi dan pendistribusian ke puskesmas	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	5 paket	1.500	DINKES
		3	Tersedia gudang farmasi di gugus pulau strategis	-	-	-	2 paket	600	2 paket	600	1 paket	300	-	-	5 Paket	1.500	DINKES
		4	Tersedianya meubelair untuk gudang farmasi	-	1 paket	100	2 paket	200	2 paket	200	1 paket	100	-	-	6 paket	600	DINKES
		5	Tersedia obat0obatan, bahan radiologi, bahan laboratorium, alat kesehatan dan BHP kesehatan	-	-	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	4 paket	2.000	RSUD
06.	Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	1	Terlaksana kegiatan lanjutan pembangunan Gedung RSUD Raja Ampat	-	1 paket	750	1 paket	2.000	1 paket	1.000	-	-	-	-	3 paket	3.750	DINKES
		2	Tersedia meubelair RSUD	-	-	-	-	-	1 paket	1.000	1 paket	1.500	-	-	2 paket	2.500	RSUD
		3	Tersedia peralatan medis	-	1 paket	1.500	-	-	1 paket	500	-	-	1 paket	500	3 paket	2.500	RSUD

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		4	Terlaksananya pengisian tabung Oksigen untuk pasien	-	1 paket	125	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	5 paket	925	RSUD
		5	Tersedianya perlengkapan ruangan pasien	-	1 paket	75	1 paket	80	-	-	-	-	-	-	1 paket	155	RSUD
		6	Tersedianya sarana ambulan darat dan laut	-	-	-	1 paket	2.000	-	-	-	-	-	-	1 paket	2.000	RSUD
		7	Tersedia sumberdaya listrik cadangan (genset)	-	-	-	1 paket	300	-	-	-	-	-	-	1 paket	300	RSUD
07.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1	Tersedia dan terdistribusikannya makanan tambahan dan vitamin	-	1 paket	350	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	6 paket	2.350	DINKES
		2	Tersedia dan terdistribusikannya garam dan kapsul Yodium	-	-	-	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	4 paket	1.000	DINKES
08.	Program peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu melahirkan	1	Tersedia data ibu hamil beresiko tinggi, cakupan K4, dan ibu hamil nifas dengan bayi BBLR	-	1 paket	150	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	150	DINKES
		2	Terselenggara layanan pemeriksaan rutin bagi ibu hamil	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	4 paket	800	DINKES
		3	Terselenggara kegiatan pelatihan/magang bagi bidan untuk penanganan persalinan (normal dan komplikasi)	-	1 paket	250	-	-	-	-	1 paket	250	-	-	2 paket	500	DINKES
		4	Tersedia dan terdistribusikannya makanan tambahan dan susu bagi Ibu Hamil	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	5 paket	1.000	DINKES
09.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1	Tersedia dan terdistribusikannya susu formula dan makanan tambahan pendamping ASI	-	1 paket	350	1 paket	350	1 paket	350	1 paket	350	1 paket	350	5 paket	1.750	DINKES
		2	Terselenggara layanan pemeriksaan rutin balita	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	4 paket	1.200	DINKES
10.	Program Peningkatan Kualitas dan Kedisplinan Tenaga Kesehatan	1	Terselenggara pelatihan ketrampilan khusus bagi tenaga kesehatan dan nonkesehatan di puskesmas	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	5 paket	1.500	DINKES
		2	Terselenggara pelatihan ketrampilan khusus bagi tenaga kesehatan dan nonkesehatan di RSUD	-	-	-	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	1.000	RSUD

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		3	Terselenggara Pelatihan Manajemen Puskesmas	-	1 paket	150	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	150	DINKES
		4	Tersalurkannya bantuan biaya studi D3 (keperawatan, kebidanan, dan gizi) bagi petugas kesehatan	-	1 paket	3.668	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	3.668	DINKES
		5	Terselenggara pelatihan pengelolaan penangan penyakit menular (Kusta, Frambusia, dan Filariasis) bagi petugas puskesmas	-	1 paket	150	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	150	DINKES
		6	Adanya bintek tenaga RSUD	-	1 paket	100	-	-	1 paket	100	-	-	1 paket	100	3 paket	300	RSUD
		7	Tersalurkannya biaya tindakan otopsi dan visum mayat	-	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	5 paket	500	RSUD
11.	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	1	Tersedianya tenaga Dokter Spesialis/ Residen Senior PPDS dari Universitas Mitra	-	-	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	4 paket	2.000	RSUD
		2	Tersedianya tenaga Mitra Dokter Spesialis (Penata Anestesi, Perawat Bedah)	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	4 paket	1.200	RSUD
12.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Tersalurkannya insentif untuk dukun bersalin	-	1 paket	180	1 paket	180	1 paket	180	1 paket	180	1 paket	180	5 paket	900	DINKES
		2	Jumlah Kader Pos Obat Kampung yang terlatih	-	1 paket	150	-	-	-	-	1 paket	150	-	-	2 paket	300	DINKES
		3	Jumlah Kader Posyandu dan kesehatan yang terlatih	-	-	-	1 paket	300	-	-	1 paket	300	-	-	2 paket	600	DINKES
		4	Terselenggaranya penyuluhan mengenai pola hidup sehat	-	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	5 paket	750	DINKES
				JUMLAH		**32.687**	-	**30.135**	-	**26.430**	-	**23.731**	-	**21.308**	**Jumlah**	**134.291**	

8.1.3. Lingkungan Hidup

Table 8.3. Indikasi Rencana Program Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan dampak pencemaran dan eksploitasi sumber daya alam	-	1 paket	250	-	-	1 paket	250	-	-	-	-	1 paket	500	DINAS LH
		2	Jumlah dokumen AMDAL	-	-	-	1 dokumen	500	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	DINAS LH
		3	Tersedianya data monitoring AMDAL	-	-	-	1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 dokumen	100	4 Dokumen	400	DINAS LH
		4	Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	-	-	-	-	-	1 dokumen	400	-	-	-	-	1 Dokumen	400	DINAS LH
		5	Tersedianya Biaya operasional Komisi AMDAL	-	1 paket	285	1 paket	299	1 paket	314	1 paket	330	1 paket	346	5 paket	1.575	DINAS LH
		6	Tingkat kerusakan lingkungan hidup		1 paket	2.202	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	5 paket	3.002	DINAS LH
		7	Pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-	-	-	-	-	3,5 Ha	350	3,5 Ha	350	3 Ha	300	50 Ha	1.000	DINAS LH
		8	Penanaman Hutan Mangrove	-	-	-	-	-	20 Ha	400	15 Ha	300	15 Ha	300	50 Ha	1.000	DINAS LH
		9	Penanaman Turus Jalan	-	-	-	-	-	20 Ha	320	15 Ha	240	15 Ha	240	50 Ha	800	DINAS LH
02.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1	Tersedianya data dan informasi status lingkungan hidup daerah (SHLD)		1 paket	82,5	1 paket	86,6	1 paket	91,0	1 paket	95,5	1 paket	100,3	5 paket	455,9	DINAS LH
03.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1	Cakupan kawasan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan World Heritage Laut		-	-	1 paket	500	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	DINAS LH
		2	Luas wilayah Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air		-	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	3 paket	600	DINAS LH

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		3	Jumlah kelompok masyarakat yang berkontribusi dalam perlindungan dan konservasi SDA				1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	4 paket	400	DINAS LH
04.	Peningkatan Sarana-prasarana	1	Tersedianya Kantor Lingkungan Hidup beserta perlengkapannya		-	-	1 paket	1.500	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.500	DINAS LH
		2	Tersedianya museum hayati dan perlengkapannya		-	-	-	-	1 paket	3.000	-	-	-	-	1 paket	1.500	DINAS LH
		3	Jumlah Kendaraan operasional KLH		-	-	1 mobil	350	2 motor	50			2 motor	50	1 mobil dan 4 motor	1.500	DINAS LH
				JUMLAH		2.820	-	3.636	-	5.775	-	1.915	-	1.937	Jumlah	15.633	

8.1.4. Pekerjaan Umum

Table 8.4. Indikasi Rencana Program Prioritas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	ondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya	1	Tersedianya dokumen dan detail rancangan pembangunan bendung/cek dam	-	-	-	1 dokumen	500	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	500	DINAS PU
		2	Tersedianya bendungan kali	-	-	-	1 paket	1.500	1 paket	3.500	-	-	-	-	2 paket	5.000	DINAS PU
		3	Tersedianya bangunan cek dam	-	-	-	-	-	1 Paket	3.500	1 Paket	3.500	-	-	2 paket	7.000	DINAS PU
		4	Terpeliharanya bendungan dan cek dam.	-	-	-	-	-	1 Paket	350	1 paket	350	1 paket	400	3 paket	1.100	DINAS PU
		5	Tersedianya dokumen dan detail rancangan normalisasi saluran sungai	-	-	-	1 Paket dokumen	200	1 Paket dokumen	200	1 Paket dokumen	200	1 Paket dokumen	200	4 paket	800	DINAS PU
		6	Panjang normalisasi aliran sungai	Saluran sungai yang telah di normalisasi sepanjang +2.200 m	-	-	250 m	1.000	250 m	1.000	250 m	1.000	250 m	1.000	3450 m	4.000	DINAS PU
		7	Tersedianya dokumen detail rancangan talud sungai.	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	5 paket	800	DINAS PU
		8	Panjang talud Rumah Dinas Bupati	-	1 paket	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	3.000	DINAS PU
		9	Panjang talud sungai yang terbangun	Talud sungai yang telah terbangun sepanjang + 10,7 Km'	-	-	500 m'	2.000	230 m'	1.700	230 m'	1.700	-	-	Talud sungai yang d bangun sepanjang + 11,7 km'	5.400	DINAS PU
		10	Panjang talud sungai yang di rehabilitasi ± 2 Km'	-	-	-	-	-	750 m'	2.500	750 m'	2.500	500 m'	2.500		7.500	DINAS PU
02.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.	1	Tersedianya dokumen dan detail rancangan jaringan irigasi yang tepat sasaran.	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	-	-	3 paket	900	DINAS PU

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	ondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		2	Panjang jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik	-	-	-	1 paket	2.000	1 paket	1.200	1 paket	1.200	1 paket	1.200	4 paket	5.600	DINAS PU
		3	Adanya Bendung dan Penambahan Saluran irigasi	10,30 Km'	1 paket	5.487	1 paket	12.000	1 paket	17.000	1 paket	12.000	1 paket	16.000	5 paket	62.487	DINAS PU
03.	Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong.	1	Panjang saluran drainase yang terbangun	1,2 Km'	-	-	2,1 Km	4.000	2,1 Km	4.000	2,1 Km	4.000	2,1 Km	4.000	8,4 km	16.000	DINAS PU
		2	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	-	-	-	535 m	200	250 m	200	250 m	200	250 m	200	1,2 km	800	DINAS PU
04.	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	1	Panjang talud penahan abrasi pantai.	10,8 km	1 paket	3.000	1 paket	7.000	1 paket	8.000	1 paket	8.250	1 paket	8.500	19,8 km	34.750	DINAS PU
		2	Volume break water yang di bangun	5100 m^3	1600 m^3	2.000	8000 m^3	10.000	8000 m^3	10.000	8000 m^3	10.000	8000 m^3	10.000	35.600 m^3	42.000	DINAS PU
		3	Panjang talud yang di rehabilitasi	1,2 Km'	-	-	500 m'	1.500	500 m'	1.500	500 m'	1.500	500 m'	1.500	3,2 km	6.000	DINAS PU
05.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1	Teridentifikasinya sumber-sumber air minum yang layak.	-			-	-	1 paket	500	-	-	-	-	1 paket	500	DINAS PU
		2	Tersedianya Air Bersih Perumahan 200 Waisai.	-	1 paket	660	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	660	DINAS PU
		3	Adanya pembangunan sarana air bersih di Abidon	-	1 paket	758	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	758	DINAS PU
		4	Jumlah MCK dan Hidran Umum.	-	1 paket	1.234	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.234	DINAS PU
		5	Terbangunnya sumur air tanah di kampung-kampung.	27 kampung	5 kampung	2.250	5 kampung	2.500	5 kampung	2.750	5 kampung	2.800	5 kampung	2.950	52 kampung	13.250	DINAS PU
		6	Tersedianya instalasi penyaluran air minum di kampung-kampung.	6 kampung	1 kampung (Abidon)	759	2 kampung	2.500	2 kampung	2.500	3 kampung	3.250	4 kampung	4.000	18 kampung	13.009	DINAS PU
		7	Tersedianya depot air minum.	-	-	-	1 kampung	2.000			1 kampung	2.000			2 kampung	4.000	DINAS PU
		8	Tersedia sarana air bersih di wilayah Pemukiman Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	-	-	-	2 paket	400	-	-	-	-	2 paket	400	DINAS PU
		9	Terpeliharanya sarana air baku.	-	-	-	4 paket	400					4 paket	450	8 paket	850	DINAS PU

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	ondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
06.	Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Adanya dokumen dan detail perencanaan pembangunan jalan dan jembatan	-	4 dokumen	1.000	4 dokumen	1.000	4 dokumen	1.000	4 dokumen	1.000	4 dokumen	1.000	20dokumen perencanaan	5.000	DINAS PU
		2	Panjang jalan terbangun	167,68 km	2 paket	5.000	16 Km'	30.000	18 km	30.000	18 km	30.000	18 Km	30.000	243 km	125.000	DINAS PU
		3	Panjang jalan yang ditingkatkan	-	5 paket	17.713	20 km	48.750	25 km	53.750	25 km	53.750	33 km	69.250	118 km	243.213	DINAS PU
		4	jumlah jembatan terbangun	Jembatan terbangun sebanyak 3 buah	1 unit jembatan +30m	2.200	3 unit jembatan +100m' (2 baru, 1 lanjutan)	8.500	3 unit jembatan +100m' (lanjutan)	8.500	3 unit jembatan +100m' (lanjutan)	8.500	3 unit jembatan +100m' (lanjutan)	6.000	3 unit jembatan +total panjang 100m	33.700	DINAS PU
07.	ProgramRehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1	adanya Dokumen dan detail perencanaan	-	4 dokumen	1.000	4 dokumen	1.000	4 dokumen	1.000	4 dokumen	1.000	4 dokumen	1.000	20 dokumen	5.000	DINAS PU
		2	Panjang jalan terpelihara	-	500 m'	500	1 km	1.000	1 km	1.000	1 km	1.000	1,5 km	1.500	5 km	5.000	DINAS PU
08.	Program Penyusunan Database Jalan dan Jembatan	1	Data jalan dan jembatan	-	-	-	1 paket	500	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	DINAS PU
		2	Data kondisi jalan dan jembatan	-	-	-	1 paket	500	-	-	1 paket	500	-	-	1 paket	1.000	DINAS PU
		3	Data pemeliharaan jalan dan jembatan	-	-	-	1 paket	500	-	-	1 paket	500	-	-	2 paket	1.000	DINAS PU
		4	Data kebutuhan jalan dan jembatan	-	-	-	-	-	1 paket	500	-	-	-	-	1 paket	500	DINAS PU
		5	Perangkat komputer	-	-	-	2 unit	50	-	-	-	-	-	-	2 unit	50	DINAS PU
		6	Tenaga pengelola database	-	-	-	2 orang	100	-	-	-	-	-	-	2 orang	100	DINAS PU
09.	Program peningkatan sarana dan prasarana umum	1	Tersedianya data Identifikasi dan penetapan prioritas kebutuhan menggunakan analisis cost and benefit.	Data identifikasi	-	-	1 paket	50	-	-	-	-	-	-	1 paket	50	DINAS PU
		2	Tersedianya alat berat.	Alat berat	1 unit excafator PC0200	-	-	-	-	-	1 unit motor grader	2.500	1unit compactor	1.000	tersedianya 3 unit alat berat	3.500	DINAS PU
		3	Terbangunnya 1 unit gedung workshop dan laboratorium bahan	-	-	-	1 paket	3.000	-	-	-	-	-	-	1 paket	3.000	DINAS PU
		4	Tersedianya alat-alat laboratorium.	-	-	-	-	-	1 paket	1.000	-	-	-	-	1 paket	1.000	DINAS PU

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	ondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		5	Pembangunan stadion olahraga	-	1 paket	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	5.000	DINAS PU
		6	Pembangunan Koridor balai Pertemuan Pemda	-	1 paket	1.400	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.400	DINAS PU
		7	Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Pemda (Lanjutan)	-	1 paket	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	5.000	DINAS PU
		8	Pematangan Tanah Pantai WTC	-	1 paket	500	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	DINAS PU
		9	Reklamasi Pantai WTC	-	1 paket	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	2.000	DINAS PU
		10	Pembangunan Drainase Pantai WTC	-	1 paket	1.612	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.612	DINAS PU
		11	Pembangunan Gorong-Gorong Pantai WTC	-	1 paket	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.500	DINAS PU
		12	Pembangunan Bangunan Penunjang WTC	-	1 paket	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	2.000	DINAS PU
		13	Pembangunan Pagar Keliling Pantai WTC	-	1 paket	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.000	DINAS PU
		14	Pembangunan Pos Polisi Lalulintas dan Ruang Kontrol LED	-	1 paket	600	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	600	DINAS PU
		15	Pembangunan Pagar Kantor Bupati (Lanjutan)	-	1 paket	825	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	825	DINAS PU
		16	Pematangan Tanah Kantor Dinas Otonom (Lanjutan)	-	1 paket	1.565	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.565	DINAS PU
		17	Pematangan Tanah Kampung Warsambin (Lanjutan)	-	1 paket	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	2.000	DINAS PU
		18	Semenisasi dan Paving Block Halaman Kantor Bupati (Lanjutan)	-	1 paket	750	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	750	DINAS PU
		19	Pematangan Tanah di Kampung Kaliam (Lanjutan)	-	1 paket	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	300	DINAS PU
		20	Pematangan Tanah di Kampung Beo (Lanjutan)	-	1 paket	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	300	DINAS PU
		21	Peningkatan Jalan Kompleks Kantor Bupati	-	1 paket	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	2.000	DINAS PU
		22	Pembangunan Talud Kediaman Bupati (Lanjutan)	-	1 paket	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	3.000	DINAS PU
		23	Penataan Kediaman Bupati	-	1 paket	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.500	DINAS PU
		24	Pematangan Tanah Lokasi SD Berpola Asrama di Yenanas	-	1 paket	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	5.500	DINAS PU

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	ondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		25	Pengadaan dan Pasang Fasilitas Pendukung Gedung Pari	-	1 paket	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	2.500	DINAS PU
		26	Pematangan Tanah Yenkawir	-	1 paket	650	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	650	DINAS PU
		27	Pembangunan Kantor Kelurahan	-	1 paket	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	2.400	DINAS PU
10.	Program peningkatan sarana prasarana aparatur pemerintah	1	Dokumen dan detail desain rumah dinas dan rumah jabatan	-	2 dokomen	400	2 dokomen	400	2 dokomen	400	2 dokomen	400	2 dokomen	400	10 dokumen	2.000	DINAS PU
		2	Lokasi dan luas lahan yang di bebaskan	-	-	-	2 paket	500	2 paket	500	2 paket	500	2 paket	500	8 paket	2.000	DINAS PU
		3	Jumlah penbangunan rumah dinas dan rumah jabatan	-	-	-	20 unit rumah dinas dan 5 unit rumah jabatan	2.250	20 unit rumah dinas	1.850	20 unit rumah dinas	1.900	20 unit rumah rakyat dan 5 unit rumah jabatan	2.500	80 unit rumah dinas dan 10 unit rumah jabatan	8.500	DINAS PU
11.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	1	Jumlah pembinaan dan peserta binaan pembangunan gedung di daerah rawan bencana.	-	-	-	-	-	10 anggota masyarakat dan 2 kontraktor lokal	100	-	-	10 anggota masyarakat dan 2 kontraktor lokal	100	20 anggota masyarakat terampil dan 4 kontraktor lokal yang profesional	200	DINAS PU
		2	Tersediamya dokumen dan detail perencanaan pembangunan yang memenuhi standard keselamatan.	-	-	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	4 paket	2.000	DINAS PU
		3	Terbangunnya gedung perkantoran yang memenuhi standard keselamatan.	67 unit kantor peme-rintahan	8 unit gedung	10.540	12 unit gedung	15.000	14 unit gedung	16.500	8 unit gedung	9.550	6 unit gedung	7.500	115 unit gedung kantor peme-rintahan.	59.090	DINAS PU
12.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1	Tersediamya tempat pembuangan sampah sementara	3 unit TPS	-	-	6 TPS	750	3 TPS	425	3 TPS	425	3 TPS	425	16 TSP	2.025	DINAS PU
		2	Tersediamya sarana pengangkut sampah	1 unit truk sampah	-	-	2 unit	1.000	1 unit	500	1 unit	500	1 unit	500	6 truk sampah	2.500	DINAS PU
		3	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	-	-	-	1 paket	1.500	-	-	1 paket	1.500	-	-	2 paket	3.000	DINAS PU

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	ondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		4	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	-	-	-	1 dokumen	300	-	-	-	-	-	-	1Dokumen	300	DINAS PU
		5	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	-	-	-	-	-	1 paket	150	-	-	-	-	1 paket	150	DINAS PU
		6	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	-	-	-	1 paket	250	1 paket	263	1 paket	276	1 paket	289	4 paket	1.078	DINAS PU
		7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan persampahan	-	-	-	1 paket	50	1 paket	53	1 paket	55	1 paket	58	4 paket	216	DINAS PU
14.	Program Pengembangan Taman Kota	1	Terbangunnya tugu pari	-	-	-	1 paket	1.500	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.500	DINAS PU
		2	kegiatan penataan taman kota	-	-	-	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	2.000	2 paket	6.500	DINAS PU
		3	fasilitas pertamanan kota	-	-	-	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	4 paket	6.000	DINAS PU
		4	sarana pendukung pertamanan kota	-	-	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	4 paket	2.000	DINAS PU
				JUMLAH		101.403	-	172.250	-	182.790	-	172.806	-	179.622	Jumlah	808.871	

8.1.5. Penata Ruang

Table 8.5. Indikasi Rencana Program Prioritas Penata Ruang Kabupaten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program Penataan Ruang	1	Tersedianya Draft rancangan peraturan daerah tentang RTRW	-	1 Dokumen	500	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	500	BAPPEDA
		2	Tersedianya Dokumen RTRW	-	-	-	1 Dokumen	1.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1.000	BAPPEDA
		3	Tersedianya Dokumen RDTR Ibu Kota Distrik	4 Dokumen	5 Dokumen	2.500	3 Dokumen	1.500	4 Dokumen	2.000	4 Dokumen	2.200	4 Dokumen	2.400	24 Dokumen	10.600	BAPPEDA
		4	Tersedianya Dokumen RDTR Distrik	6 Dokumen	1 Dokumen	500	3 Dokumen	1.500	5 Dokumen	2.750	4 Dokumen	2.200	5 Dokumen	3.000	24 Dokumen	9.950	BAPPEDA
		5	Terselenggaranya Sosialiasi Peraturan Perundang0undangan Tata Ruang	1 paket	-	-	-	-	1 paket	400	-	-	1 paket	400	1 paket	800	BAPPEDA
		6	Tersedianya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1.000	-	-	-	-	1 Dokumen	1.000	BAPPEDA
		7	Tersedianya Dokumen Survey dan Pemetaan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	750	-	-	1 Dokumen	750	1 Dokumen	1.500	BAPPEDA
		8	Tersedianya dokumen tentang RUTRK	1 Draft Dokumen	-	-	1 Dokumen	400	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	400	BAPPEDA
		9	Tersedianya dokumen tentang RDTRK	1 Draft Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	400	-	-	-	-	1 Dokumen	400	BAPPEDA
		10	Tersedianya dokumen tentang RTRK	1 Draft Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	400	-	-	1 Dokumen	400	BAPPEDA
		11	Tersedianya dokumen tentang RTBL (rencana tata bangunan dan lingkungan)	1 Draft Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	400	1 Dokumen	400	BAPPEDA
		12	Revisi Rencana Tata Ruang	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	400	-	-	1 Dokumen	500	2 Dokumen	900	BAPPEDA
		13	Terlaksananya Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang	1 paket	1 paket	700	-	-	1 paket	700	-	-	1 paket	700	3 paket	2.100	BAPPEDA

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		14	Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten / kota	1 paket	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	-	-	1 paket	500	BAPPEDA
02.	Program Pemanfaatan Ruang	1	Tersedianya Dokumen kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	400	-	-	1 dokumen	400	BAPPEDA
		2	Tersedianya dokumen norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	300	1 dokumen	300	BAPPEDA
		3	Terselenggaranya Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	-	-	-	1 paket	400	-	-	-	-	1 paket	400	BAPPEDA
03.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1	Tersedianya dokumen tentang kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	-	1 paket	400	-	-	-	-	-	-	1 paket	400	BAPPEDA
		2	Tersedianya dokumen tentang prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	-	1 paket	400	-	-	-	-	-	-	1 paket	400	BAPPEDA
		3	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	-	-	-	-	-	1 paket	400	1 paket	500	1 paket	600	3 paket	1.500	BAPPEDA
		4	Tersedianya Data Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang	5 dokumen	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	400	1 dokumen	500	1 dokumen	500	10 dokumen	2.000	BAPPEDA
				JUMLAH		4.500	-	5.500	-	9.600	-	6.700	-	9.550	Jumlah	35.850	

8.1.6. Perencanaan Pembangunan

Table 8.6. Indikasi Rencana Program Prioritas Perencanaan Pembangunan Kabupaten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program Pengem-bangan Data Informasi	1	Tersedianya Dokumen profile Kab. Raja Ampat	1 Dokumen	1 Dokumen	350	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	500	2 Dokumen	850	BAPPEDA
		2	Tersedianya data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	500	1 Dokumen	500	BAPPEDA
02.	Program Kerjasama Pembangunan	1	Terlaksananya Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan	-	-	-	-	-	1 paket	400	-	-	-	-	1 paket	400	BAPPEDA
		2	Terlaksananya Koordinasi kerjasama perencanaan pembangunan	1 paket	1 paket	600	1 paket	600	1 paket	700	1 paket	700	1 paket	700	6 paket	3.300	BAPPEDA
03.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	1	Terlaksananya Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	-	-	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	-	-	3 paket	1.500	BAPPEDA
		2	Terlaksananya Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	-	-	-	-	-	1 paket	500	-	-	1 paket	500	2 paket	1.000	BAPPEDA
04.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	1	Terlaksananya Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	-	-	-	1 paket	500	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	BAPPEDA
		2	Tersedianya dokumen perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	-	-	-	-	-	1 paket	500	-	-	-	-	1 paket	500	BAPPEDA

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
05.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	1	Terlaksananya Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	-	-	-	-	-	1 paket	500	-	-	-	-	1 paket	500	BAPPEDA
		2	Terlaksananya Koordinasi perencanaan penanganan pusat0pusat pertumbuhan ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	-	-	1 paket	500	BAPPEDA
		3	Terlaksananya Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	1 paket	500	BAPPEDA
		4	Terlaksananya Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	-	-	-	1 paket	500	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	BAPPEDA
06.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1	Terlaksananya program pendampingan terpadu (UNICEF, PNPM Mandiri, UNDP)	1 paket	1 paket	450	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	5 paket	1.650	BAPPEDA
		2	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	1 paket	-	-	1 paket	300	-	-	1 paket	400	-	-	3 paket	700	BAPPEDA
07.	Program perencanaan pembangunan daerah	1	Tersedianya Dokumen RPJPD	1 Dokumen	50%	500	50%	500	-	-	-	-	-	-	100%	1.000	BAPPEDA
		2	Tersedianya Dokumen RPJMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1.000	1 dokumen	1.000	BAPPEDA
		3	Tersedianya Dokumen RENSTRA Kampung,	-	1 Dokumen	700	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	700	BAPPEDA
		4	Penyusunan Renstra SKPD	30 dokumen Renstra SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.300	30 dokumen Renstra SKPD	1.300	BAPPEDA
		5	Tersedianya rancangan RKPD, KUA, dan PPAS.	3 Dokumen	3 Dokumen	500	3 Dokumen	800	3 Dokumen	1.000	3 Dokumen	1.000	3 Dokumen	1.000	3 Dokumen	4.300	BAPPEDA
		6	Terselenggaranya Musrenbang RKPD	1 paket	1 Dokumen	1.000	1 Dokumen	1.000	1 Dokumen	1.000	1 Dokumen	1.000	1 Dokumen	1.000	1 Dokumen	5.000	BAPPEDA

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		7	Tersedianya dokumen RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500	1 Dokumen	500	1 Dokumen	500	1 Dokumen	500	1 Dokumen	500	1 Dokumen	2.500	BAPPEDA
		8	Terselenggaranya koordinasi penyusunan LPPD dan LKPJ	-	-	-	1 Dokumen	300	1 Dokumen	300	1 Dokumen	300	1 Dokumen	300	1 Dokumen	1.200	BAPPEDA
		9	Tersedianya Dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan	5 Dokumen	1 Dokumen	300	1 Dokumen	700	1 Dokumen	800	1 Dokumen	900	1 Dokumen	900	5 Dokumen	3.600	BAPPEDA
08.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1	Tersedianya dokumen masterplan pembangunan daerah	-	-	-	1 Dokumen	750	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	750	BAPPEDA
		2	Tersedianya dokumen indikator dan pemetaan daerah rawan pangan	-	-	-	1 Dokumen	500	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	500	BAPPEDA
09.	Program perencanaan sosial budaya	1	Terlaksananya Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan	-	-	-	1 Dokumen	500	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	500	BAPPEDA
		2	Terlaksananya Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan	-	-	-	1 Dokumen	500	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	500	BAPPEDA
		3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	-	-	-	1 Dokumen	500	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	500	BAPPEDA
10.	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	1	Terlaksananya Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	300	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	300	BAPPEDA
		2	Terlaksananya Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	300	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	300	BAPPEDA
				JUMLAH		4.900	1	9.850	-	7.000	-	6.100	-	9.000	Jumlah	36.850	

8.1.7. Perumahan

Table 8.7. Indikasi Rencana Program Prioritas Perumahan Kabupaten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program pengem-bangan konsep rumah sederhana, sehat dan tahan gempa	1	Tersedianya konsep dan detail desain rumah sederhana, sehat dan tahan gempa	-	-	-	2 paket	500	-	-	-	-	-	-	2 paket	500	DINAS PU
		2	Tersedianya rumah sederhana, sehat dan tahan gempa.	670 unit	-	-	35 unit di 7 kampung	4.375	20 unit di 4 kampung	2.500	20 unit di 4 kampung	2.700	20 unit di 4 kampung	2.900	765 rumah	12.475	DINAS PU
		3	Terbangunnya sarana dan pendukung MCK umum dan saluran sanitasi	2 MCK dan 1 saluran sanitasi	-	-	2 paket	500	2 paket	250	2 paket	250	2 paket	250	10 pa	1.250	DINAS PU
02.	Program pengelolaan areal pemakaman umum	1	Tersedianya dokumen hasil studi kelayakan dan penentuan lokasi areal pemakaman umum.	-	-	-	2 lokasi	500	-	-	2 lokasi	500	-	-	2 paket	1.000	DINAS PU
		2	Tersedianya areal pemakaman umum.	-	-	-	-	-	2 lokasi	500	-	-	2 lokasi	500	4 lokasi	1.000	DINAS PU
03.	Program penanganan bencana kebakaran	1	Jumlah sosialisasi penanganan bencana.	-	-	-	-	-	2 kali sosialisasi	100	-	-	2 kali sosialisasi	100	4 kali sosialisasi	200	DINAS PU
		2	Tersedianya dokumen standar (SOP) penanganan kebakaran dan petunjuk penanganan.	-	-	-	1 paket	250	-	-	-	-	-	-	1 paket	250	DINAS PU
		3	Tersedianya tenaga penanganan kebakaran	-	-	-	4 orang	100	-	-	4 orang	100	-	-	8 orang	200	DINAS PU
		4	Tersedianya mobil pemadam kebakaran.	-	-	-	1 unit	1.500	-	-	-	-	-	-	1 unit	1.500	DINAS PU
				JUMLAH		-	-	7.725	-	3.350	-	3.550	-	3.750	Jumlah	18.375	-

8.1.8. Kepemudaan dan Olah Raga

Table 8.8. Indikasi Rencana Program Prioritas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.	1	tersedianya stadion Olahraga di Waisai	Belum tersedia	-	-	Tahap 1	10.000	Tahap 2	5.000	Tahap 3	5.000	Tahap 4	5.000	Terbangun stadion	25.000	DISPORA
		2	Tersedianya fasilitas olah raga sepakbola di setiap distrik.	Belum tersedia	-	-	10 distrik	5.000	10 distrik	5.000	-	-	-	-	20 unit di 20 distrik	10.000	DISPORA
		3	Tersedianya fasilitas olah raga voli di setiap distrik.	Belum tersedia	-	-	10 distrik	2.000	10 distrik	2.000	-	-	-	-	20 unit di 20 distrik	4.000	DISPORA
		4	Tersedianya fasilitas olah raga badminton di setiap distrik.	Belum tersedia	-	-	10 distrik	2.000	10 distrik	2.000	-	-	-	-	20 unit di 20 distrik	4.000	DISPORA
		5	Tersedianya gedung-olahraga (GOR) di Waisai.	1 GOR	-	-	1 paket	5.000	-	-	-	-	-	-	1 unit GOR	5.000	DISPORA
		6	Tersedianya sarana olahraga Atletik.	Belum tersedia	-	-	-	-	1 paket	250	-	-	1 paket	250	2 paket	500	DISPORA
		7	Tersedianya lapangan futsal	Belum tersedia	-	-	-	-	1 paket	4.000	-	-	-	-	2 paket	4.000	DISPORA
		8	Tersedianya fasilitas olah raga dayung (kayak, kano, rowing)	Belum ada	-	-	1 paket	500	-	-	1 paket	500	-	-	2 paket	1.000	DISPORA
02.	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga bahari.	1	Jumlah cabang olah raga air yang dikembangkan	Belum ada	-	-	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	4 paket	600	DISPORA
		2	Tersedianya data potensi atlet olah raga air	Belum ada	-	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	4 paket	1.200	DISPORA
		3	Terlaksananya perlombaan olahraga air dalam Festival Bahari Raja Ampat.	Belum ada	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	4 paket	800	DISPORA

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
03.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1	Terselenggaranya Pelatihan dan Pembinaan Paskibra.	Belum ada	1 paket	170	1 paket	200	1 paket	230	1 paket	260	1 paket	290	5 paket	1.150	DISPORA
		2	Terselenggaranya Peringatan Hari Nasional Sumpah Pemuda	Belum ada	1 paket	50	1 paket	75	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	5 paket	425	DISPORA
		3	Tersedianya Sarana Kwarcab/Sanggar Pemuda	-	1 paket	50	-	-	1 paket	50	-	-	1 paket	50	3 paket	150	DISPORA
		4	Terselenggaranya kegiatan pengembangan Kepramukaan	-	1 paket	990	1 paket	990	1 paket	990	1 paket	990	1 paket	990	5 Paket	4.950	DISPORA
		5	Terselenggaranya kegiatan pengembangan karang taruna	-	-	-	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	4 paket	4.000	DISPORA
04.	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	1	Tersedianya kelompok pemuda pemandu wisata.	-	-	-	1 Paket	250	1 Paket	250	1 Paket	250	1 Paket	250	4 Paket	1.000	DISPORA
		2	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.	-	-	-	1 Paket	250	1 Paket	250	1 Paket	250	1 Paket	250	4 Paket	1.000	DISPORA
		3	Terselenggaranya pelatihan keterampilan bagi pemuda.	-	-	-	1 Paket	250	1 Paket	250	1 Paket	250	1 Paket	250	4 Paket	1.000	DISPORA
05.	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	1	Tersosialisasikannya bahaya narkoba bagi pemuda.	-	-	-	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	4 Paket	400	DISPORA
				JUMLAH		1.260	-	28.265	-	22.120	-	9.350	-	9.180	Jumlah	70.175	

8.1.9. Penanaman Modal

Table 8.9. Indikasi Rencana Program Prioritas Penanaman Modal Kabupaten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	Tersedianya media informasi dan contoh0contoh produk unggulan daerah.	-	-	-	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	700	DINAS PERINDAGKOP
		2	Keikut serta dalam Expo Pembangunan dan investasi	1 paket	1 paket	200	1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	400	1 paket	400	1 Paket	1.600	DINAS PERINDAGKOP
02.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1	Tersedianya dokumen kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	-	-	-	1 Dokumen	300	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	300	DINAS PERINDAGKOP
				JUMLAH		200	-	750	-	450	-	600	-	600	Jumlah	2.600	

8.1.10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Table 8.10. Indikasi Rencana Program Prioritas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1	Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan	-	-	-	1 paket	400	1 paket	450	1 paket	500	1 paket	500	4 paket	1.850	DINAS PERINDAGKOP
		2	Tersedianya bantuan permodalan bagi pelaku UMKM/ Koperasi.	1 paket	1 paket	750	1 paket	750	1 paket	750	1 paket	850	1 paket	1.000	1 paket	4.100	DINAS PERINDAGKOP
		3	Terlaksananya kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	-	-	-	1 paket	300	1 paket	400	-	-	-	-	2 paket	700	DINAS PERINDAGKOP
02.	Program Pengem-bangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1	Terbangunnya Koperasi Art shop	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	-	-	1 paket	500	DINAS PERINDAGKOP
		2	Terlaksananya kegiatan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	-	-	-	-	-	1 paket	300	-	-	1 paket	300	1 paket	600	DINAS PERINDAGKOP
03.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1	Terlaksananya Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	-	-	-	1 paket	300	-	-	1 paket	300	-	-	2 paket	600	DINAS PERINDAGKOP
		2	Tersedianya Kelem-bagaan Koperasi di setiap ibukota distrik.	1 unit	-	-	-	-	10 unit	1.500			10 unit	1.500	21 unit	3.000	DINAS PERINDAGKOP
		3	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan perkoperasian	-	-	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	3 paket	900	DINAS PERINDAGKOP
		4	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 21 unit koperasi.	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	350	1 paket	350	2 paket	700	DINAS PERINDAGKOP
				JUMLAH		750	-	1.750	-	3.700	-	2.800	-	3.950	Jumlah	12.950	

8.1.11. Kependudukan dan Catatan Sipil

Table 8.11. Indikasi Rencana Program Prioritas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	1	Pelayanan penerbitan kartu identitas diri	-	1 paket	500	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	5 paket	1.700	DUKCAPIL
		2	Terselenggara Pelatihan Pengembangan Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil yang Berwawasan Good Governance	-	-	-	-	-	1 paket	150	-	-	-	-	1 paket	150	DUKCAPIL
		3	Terselenggara layanan keliling administrasi kependudukan	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	4 paket	1.200	DUKCAPIL
		4	Terselenggara pelayanan administrasi kependudukan secara kolektif yang dikoordinasi oleh aparatur kampung dan tokoh masyarakat.	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	4 paket	800	DUKCAPIL
		5	Terselenggara kegiatan monev yang mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pengembangan sistem pelayanan dan efektivitas dari berbagai upaya pembenahan sistem pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	300	-	-	1 paket	300	DUKCAPIL
02.	Program Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Terselenggara sosialiasi melalui media (papan reklame dan radio)	-	-	-	1 paket	150	-	-	-	-	-	-	1 paket	150	DUKCAPIL
		2	Terselenggara sosialisasi langsung (tatap muka) di setiap distrik	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	4 paket	1.200	DUKCAPIL

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
03.	Program Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	1	Tersedia dan terbaruinya data base kependudukan melalui kegiatan kegiatan pendataan secara pasif maupun aktif (termasuk pengadaan blangko pendataan)	-	1 paket	300	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	5 paket	1.100	DUKCAPIL
		2	Terselenggara kegiatan perawatan server SIAK	-	-	-	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	4 paket	400	DUKCAPIL
		3	Tersedia piranti cadangan server SIAK	-	1 paket	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	100	DUKCAPIL
		4	Terselenggara Pelatihan Operasionalisasi Program SIAK	-	1 paket	100	1 paket	100	-	-	-	-	-	-	2 paket	200	DUKCAPIL
04.	Program Penyediaan Informasi Kependudukan	1	Terselenggara workshop sinkronisasi dan pengolahan data untuk keperluan penyusunan laporan informasi kependudukan setiap tahunnya	-	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	50	5 paket	250	DUKCAPIL
		2	Tersedianya informasi kependudukan yang berkualitas dari sisi isi maupun pengemasannya dalam bentuk brosur atau leaflet.	-	-	-	1 paket	50	-	-	1 paket	50	-	-	2 paket	100	DUKCAPIL
05.	Program Penyusunan Kebijakan Kependudukan	1	Tersusunnya kebijakan kependudukan yang dapat diharapkan untuk merespon atau mengantisipasi permasalahan kependudukan di Raja Ampat melalui kegiatan workshop lintas sektoral	-	-	-	1 paket	250	-	-	-	-	1 paket	250	2 paket	250	DUKCAPIL
06.	Peningkatan Sarana Prasarana	1	Terbangun dan beroperasinya 1 unit gedung khusus DUKCAPIL	-	-	-	1 paket	1.000	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.000	DUKCAPIL

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		2	Tersedianya peralatan teknologi pendukung layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	-	-	-	1 paket	50	1 paket	50	-	-	-	-	2 paket	100	DUKCAPIL
		3	Tersedianya speedboat sebagai sarana untuk menyelenggarakan layanan keliling	-	-	-	1 paket	500	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	DUKCAPIL
				JUMLAH		1.050	-	3.550	-	1.650	-	1.800	-	1.700	Jumlah	9.500	

8.1.12. Ketenagakerjaan

Table 8.12. Indikasi Rencana Program Prioritas Ketenagakerjaan Kabupaten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	Adanya dokumen Data Base Transmigras dan Tenaga Kerja	Belum ada	1 dokumen	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	200	DISNAKERTRANS
		2	Terselenggaranya pelatihan tenaga kerja mandiri	-	1 paket	300	4 paket	1.075	4 paket	1.075	4 paket	1.075	4 paket	1.075	17 paket	4.600	DISNAKERTRANS
		3	Terselenggaranya pelatihan pengembangan usaha mandiri	-	-	-	3 paket	750	3 paket	750	3 paket	750	3 paket	750	12 paket	3.000	DISNAKERTRANS
		4	Terbangunnya sarana penunjang latihan kerja	-	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	17.000	1 paket	1.000	-	-	3 paket	21.000	DISNAKERTRANS
		5	Monitoring & Evaluasi Penggunaan Tenaga Kerja	Belum ada dokumen	1 Dokumen	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	200	DISNAKERTRANS
02.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.	1	Adanya fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	-	-	-	1 paket	3.750	1 paket	3.750	1 paket	3.750	1 paket	3.750	4 paket	15.000	DISNAKERTRANS
		2	Adanya sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenaga0kerjaan	-	-	-	1 Paket	350	1 Paket	350	1 Paket	350	1 Paket	450	4 paket	1.500	DISNAKERTRANS
		3	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja	-	-	-	1 paket	925	1 paket	1.225	1 paket	925	1 paket	925	1 paket	4.000	DISNAKERTRANS
03.	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	1	Pembinaan usaha mandiri	-	-	-	1 Paket	250	1 Paket	250	1 Paket	250	1 Paket	250	4 Paket	1.000	ISNAKERTRANS
		2	Terselenggaranya program padat karya	-	-	-	1 Paket	350	1 Paket	350	1 Paket	350	1 Paket	200	4 Paket	1.250	ISNAKERTRANS

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		3	Tersedianya teknologi tepat guna penunjang produksi	-	-	-	1 Paket	350	1 Paket	350	1 Paket	350	1 Paket	200	4 Paket	1.250	KSNAKERTRANS
		4	Tersedianya data penyerapan tenaga kerja	-	-	-	1 Paket	350	1 Paket	350	1 Paket	350	1 Paket	200	4 Paket	1.250	KSNAKERTRANS
		5	Tersedianya data lowongan pekerjaan	-	-	-	1 Paket	250	1 Paket	250	1 Paket	250	1 Paket	250	4 Paket	1.000	DISNAKERRANS
		6	Terlaksananya kegiatan Monitoring dan evaluasi	-	-	-	1 Paket	350	1 Paket	350	1 Paket	350	1 Paket	450	4 paket	1.500	KSNAKERTRANS
				JUMLAH		2.200	-	10.250	-	26.050	-	9.750	-	8.500	Jumlah	56.750	

8.1.13. Ketahanan Pangan

Table 8.13. Indikasi Rencana Program Prioritas Ketahanan Pangan Kabupaten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Peningkatan Ketahanan Pangan	1	Penanganan daerah rawan pangan	-	-	-	1 paket	750	1 paket	750	1 paket	750	1 paket	750	4 paket	3.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
		2	Pengembangan desa mandiri pangan	-	-	-	2 paket	400	2 paket	400	2 paket	400	2 paket	400	1 paket	1.600	Dinas Pertanian dan Peternakan
		3	Pengembangan cadangan pangan daerah	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	4 paket	800	Dinas Pertanian dan Peternakan
02.	Pembuatan peta ketahanan & kerawanan Pangan	1	Penyusunan data base potensi produk pangan	-	-	-	1 paket	500	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	Dinas Pertanian dan Peternakan
		2	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	-	-	-	1 paket	200	-	-	-	-	-	-	1 paket	200	Dinas Pertanian dan Peternakan
				JUMLAH		-	-	2.050	-	1.350	-	1.350	-	1.350	Jumlah	6.100	

8.1.14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Table 8.14. Indikasi Rencana Program Prioritas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1	Tersedianya databased pemberdayaan perempuan	Belum ada dokumen	1 dokumen	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	200	Kantor Pemberd. Perempuan dan KB
		2	Tersedianya seragam PKK	Kader PKK belum memiliki seragam	1 paket	500	1 paket	550	1 paket	605	1 paket	666	1 paket	732	5 paket	3.053	Kantor Pemberd. Perempuan dan KB
		3	Jumlah mesin jahit	Belum ada	1 paket	485	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	485	Kantor Pemberd. Perempuan dan KB
02.	Program pengarusutamaan gender dan anak	1	Jumlah sanggar Pkk yang terbangun	Belum ada sanggar PKK	1 paket	2.000	1 paket	2.200	1 paket	2.420	1 paket	2.662	1 paket	2.928	5 paket	12.210	Kantor Pemberd. Perempuan dan KB
		2	Jumlah Posyandu yang mendapatkan Bantuan Dana Stimulan	-	1 paket	300	1 paket	330	1 paket	363	1 paket	399	1 paket	439	5 paket	1.832	Kantor Pemberd. Perempuan dan KB
		3	Terselenggaranya Lomba 10 Program Pokok PKK	1 paket	1 paket	500	-	-	1 paket	500	-	-	-	-	1 paket	1.000	Kantor Pemberd. Perempuan dan KB
				JUMLAH		3.985	-	3.080	-	3.888	-	3.727	-	4.099	Jumlah	18.779	

8.1.15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Table 8.15. Indikasi Rencana Program Prioritas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program pelayanan kontrasepsi	1	Jumlah aseptor KB yang terlayani	Jumlah akseptor KB di 24 distrik....	1 paket	1.033	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	5 paket	2.233	Kantor Pemberd. Perempuan dan KB
		2	Adannya Dokumen Pelaporan Klinik KB	Belum ada	1 dokumen	150	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	500	1 dokumen	500	5 dokumen	1.750	Kantor Pemberd. Perempuan dan KB
02.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri	1	Terselenggaranya penyuluhan mekanisme penggunaan Alat kontrasepsi	Belum ada	1 paket	200	-	-		-	-	-	-	-	1 paket	200	Kantor Pemberd. Perempuan dan KB
		2	Jumlah kader Posyandu yang mendapatkan honor	650 kader	1 paket	300	1 paket	650	1 paket	650	1 paket	800	1 paket	800	5 paket	3.200	Kantor Pemberd. Perempuan dan KB
		3	Adanya dokumen Pendataan Pra-KB dan KB	-	1 paket	300	-	-	1 paket	300	-	-	1 paket	300	3 paket	900	Kantor Pemberd. Perempuan dan KB
		4	Jumlah kunjungan kerja kader posyandu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.000	1 paket	500	Kantor Pemberd. Perempuan dan KB
		5	Terselenggarakanya Jambore Posyandu	Belum pernah ada	1 paket	200	-	-	1 paket	200	-	-	-	-	2 paket	400	Kantor Pemberd. Perempuan dan KB
		6	Terlaksananya Monitoring Ketua PKK ke distik-distrik	-	1 paket	100	-	-	-	-	-	-	1 paket	200	2 paket	300	Kantor Pemberd. Perempuan dan KB
				JUMLAH		2.283	-	1.250	-	1.750	-	1.600	-	3.100	Jumlah	9.483	

8.1.16. Perhubungan

Table 8.16. Indikasi Rencana Program Prioritas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Laut.	1	Tersedianya hasil SID	6 kajian	1 paket	350	1 paket	450	1 paket	450	1 paket	450	1 paket	450	11 kajian	2.150	DISHUB
		2	Tersedianya Master Plan Pengembangan Pelabuhan Waisai, Wailebet, Folley, Kabare, Kofiau, Abidon.	1 master plan	-	-	2 paket	900	1 paket	450	1 paket	450	1 paket	450	6 master plan	2.700	DISHUB
		3	Tersedianya dermaga kecil / tambatan perahu.	42 unit	1 unit (lanjutan)	70	10 unit	2.750	10 unit	2.750	10 unit	2.750	10 unit	2.750	85 unit	11.070	DISHUB
		4	Tersedianya dermaga apung	Belum ada	-	-	2 unit	1.500	2 unit	1.500	2 unit	1.500	2 unit	1.500	8 unit	7.500	DISHUB
		5	Tersedianya dermaga bunker air di Wailebet.	Belum ada	-	-	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 unit	12.000	DISHUB
		6	Tersedianya dermaga beton di: Kabare.	Belum ada	-	-	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 unit	13.500	DISHUB
		7	Tersedianya dermaga beton di: Folley.	Belum ada	-	-	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 unit	12.000	DISHUB
		8	Tersedianya dermaga beton di: Lilinta.	Belum ada	-	-	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 unit	12.000	DISHUB
		9	Tersedianya dermaga beton di: Warsabin.	Belum ada	-	-	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 unit	12.000	DISHUB
		10	Tersedianya dermaga beton di: Kopiau/Balal.	Belum ada	-	-	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 unit	12.000	DISHUB
		11	Tersedianya dermaga beton di: Kalobo.	Belum ada	-	-	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 unit	12.000	DISHUB
		12	Tersedianya dermaga beton di: Sakabu.	Belum ada	-	-	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 unit	12.000	DISHUB
		13	Tersedianya dermaga beton di: Yensawai.	Belum ada	-	-	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 unit	12.000	DISHUB
		14	Tersedianya dermaga beton di: Wayom.	Belum ada	-	-	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 unit	12.000	DISHUB
		15	Tersedianya dermaga beton di: Waisilit.	Belum ada	-	-	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 unit	12.000	DISHUB

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		16	Tersedianya dermaga beton di: Dabatan.	Belum ada	-	-	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 unit	12.000	DISHUB
		17	Tersedianya dermaga beton di: Sufnin.	Belum ada	-	-	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 unit	12.000	DISHUB
		18	Tersedianya dermaga kayu di Boni.	-	-	-	1 paket	1.000	-	-	-	-	-	-	1 unit	1.000	DISHUB
		19	Tersedianya fasilitas pendukung di pelabuhan laut Waisai (Pengembangan Dermaga, Pemb. Terminal, Lapangan Penumpukan, Gudang, Tangki Minyak, taman pelabuhan, pagar batas kerja wilayah pelabuhan dan fasilitas pendukung).	Dermaga, lapangan penumpukan dan terminal penumpang.	-	-	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	Terlaksana secara keseluruhan	12.000	DISHUB
		20	Tersedianya tambatan perahu di Yenkafan.	-	-	-	1 paket	350	-	-	-	-	-	-	1 unit	350	DISHUB
		21	Tersedianya tambatan perahu di Yenbuba.	-	-	-	1 paket	500	-	-	-	-	-	-	1 unit	500	DISHUB
		22	Tersedianya database armada angkutan laut.	-	-	-	-	-	1 paket	175	-	-	-	-	1 paket	175	DISHUB
		23	Tersedianya standard tarif angkutan laut.	-	-	-	-	-	1 paket	150	-	-	-	-	1 paket	150	DISHUB
		24	Tersedianya Kapal Penumpang Kapasitas 500 orang.	belum ada	-	-	-	-	1 unit	70.000	-	-	1 unit	70.000	2 unit	140.000	DISHUB
		25	Tersedianya Kapal Penumpang kapasitas 300 orang.	belum ada	-	-	-	-	-	-	1 unit	30.000	-	-	1 unit	30.000	DISHUB
		26	Tersedianya Kapal Kayu <10 Ton	4 unit	-	-	5 unit	700	5 unit	700	5 unit	700	5 unit	700	24 unit	2.800	DISHUB
		27	Tersedianya kapal cepat kapasitas 30 orang.	belum ada	-	-	-	-	1 unit	3.500	-	-	1 unit	3.500	2 unit	7.000	DISHUB
		28	Tersedianya bantuan operasional bagi kapal LCT dan kapal penumpang.	-	-	-	4 paket	1.200	4 paket	1.200	4 paket	1.200	4 paket	1.200	16 paket	5.700	DISHUB

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
02.	Program Pengadaan Fasilitas Pendukung Perhubungan Laut	1	Tersedianya mobil Tanki Air	Belum ada	-	-	-	-	1 unit	600	-	-	-	-	1 unit	600	DISHUB
		2	Tersedianya Genset 10 KVA	Belum ada	-	-	1 unit	120	2 unit	240	1 unit	120	1 unit	120	5 unit	600	DISHUB
		3	Tersedianya Solar Cell	Belum ada	-	-	7 unit	150	9 unit	150	7 unit	150	7 unit	150	30 unit	600	DISHUB
		4	Tersedianya speed boat untuk operasional dinas perhubungan.	1 unit	-	-	-	-	1 unit	2.000	-	-	-	-	2 unit	2.000	DISHUB
		5	Tersedianya Kendaraan Roda Empat operasional pelabuhan	Belum ada	-	-	1 unit	450	-	-	-	-	-	-	1 unit	450	DISHUB
03.	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan Laut	1	Terpeliharanya fasilitas seluruh unit dermaga di kawasan Raja Ampat.	-	-	-	1 paket	400	1 paket	400	1 paket	400	1 paket	400	4 paket	1.600	DISHUB
		2	Tersedianya lahan bagi pembangunan dermaga baru.	-	-	-	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	4 paket	1.000	DISHUB
		3	Beroperasinya KM Raja Ampat 2	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	5 paket	3.450	DISHUB
		4	Beroperasinya KM Raja Ampat 3	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	5 paket	3.450	DISHUB
		5	Beroperasinya LCT Fajar Nock	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	5 paket	3.450	DISHUB
		6	Terpeliharanya fasilitas Rambu Suar di seluruh kawasan Raja Ampat.	-	-	-	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	4 paket	400	DISHUB
		7	Terselenggaranya perawatan (Docking) LCT Fajar Nock	-	1 paket	450	1 paket	450	1 paket	450	1 paket	450	1 paket	450	5 paket	3.450	DISHUB
		8	Terselenggaranya perawatan (Docking) KMP Raja Ampat 1	-	-	-	1 paket	650	1 paket	650	1 paket	650	1 paket	650	5 paket	4.000	DISHUB
		9	Terselenggaranya perawatan (Docking) KMP Raja Ampat 2	-	1 paket	650	1 paket	650	1 paket	650	1 paket	650	1 paket	650	5 paket	4.650	DISHUB
		10	Terselenggaranya perawatan (Docking) KMP Raja Ampat 3	-	1 paket	650	1 paket	650	1 paket	650	1 paket	650	1 paket	650	5 paket	4.650	DISHUB

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
04.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Laut.	1	Tersedianya Kapal Patroli	Belum ada	-	-	-	-	-	-	1 unit	10.000	-	-	1 unit	10.000	DISHUB
		2	Tersedianya Kapal Tim Sar	Belum ada	-	-	-	-	-	-	1 unit	10.000	-	-	1 unit	10.000	DISHUB
		3	bangunnya TerPos Satker	Belum ada	-	-	5 unit	800	5 unit	800	5 unit	800	5 unit	800	20 unit	3.200	DISHUB
		4	Terbangunnya Menara Suar	4 unit	-	-	4 unit	2.000	4 unit	2.000	4 unit	2.000	3 unit	1.500	19 unit	7.500	DISHUB
		5	Tersedianya Sound System	-	-	-	-	-	1 paket	175	-	-	-	-	1 paket	175	DISHUB
		6	Tersedianya SSB dan HT	10 set	-	-	20 set	300	-	-	-	-	-	-	30 set	300	DISHUB
		7	Tersedianya Buih Laut (Mooring Buoy)	10 unit	-	-	10 unit	3.000	5 unit	1.500	5 unit	1.500	5 unit	1.500	35 unit	7.500	DISHUB
		8	Tersedianya kendaraan Roda Dua untuk partroli pelabuhan dan pengawasan pantai.	Belum ada	-	-	2 unit	60	2 unit	60	2 unit	60	2 unit	60	8 unit	240	DISHUB
05.	Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan Darat.	1	Tersedianya terminal penumpang Waisai.	-	-	-	1 paket	350	-	-	-	-	-	-	1 paket	850	DISHUB
		2	Tersedianya terminal penumpang Warsibin	-	-	-	1 paket	350	-	-	-	-	-	-	1 paket	850	DISHUB
		3	Tersedianya gedung pengujian kendaraan.	Belum ada	-	-	1 paket	400	1 paket	400	1 paket	400	1 paket	400	4 paket	1.600	DISHUB
		4	Tersedia kendaraan angkutan perdesaan.	10 unit	-	-	2 unit	1.000	2 unit	1.000	1 unit	500	-	-	15 unit	2.500	DISHUB
		5	Beroperasinya angkutan pedesaan.	4 paket	-	-	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	4 paket	600	DISHUB
		6	Adanya subsidi operasional bus dishub.	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	4 paket	800	DISHUB
		7	Tersedianya shelter bus di beberapa titik.	Belum ada	-	-	5 unit	250	5 unit	250	5 unit	250	-	-	15 unit	750	DISHUB
		8	Adanya subsidi angkutan darat.	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	4 paket	1.200	DISHUB
		9	Tersedianya kendaraan roda empat untuk operasional perhubungan darat.	-	-	-	1 unit	200	-	-	-	-	-	-	1 unit	200	DISHUB

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
06.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.	1	Prosentase rambu lalulintas dan pagar pengaman dalam kondisi baik.	-	-	-	1 paket	40	1 paket	40	1 paket	40	1 paket	40	4 paket	160	DISHUB
		2	Cakupan pemeliharaan lampu lalu lintas (traffic light)	-	-	-	-	-	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	50	3 paket	150	DISHUB
		3	Adanya gedung pengujian yang berfungsi dengan baik	-	-	-	-	-	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	3 paket	450	DISHUB
		4	Terpeliharanya terminal Waisai dan Warsambin.	-	-	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	3 paket	600	DISHUB
		5	Jumlah shelter bus yang dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	50	3 paket	150	DISHUB
07.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Darat.	1	Cakupan ketersediaan rambu lalu lintas.	Belum ada	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	4 paket	800	DISHUB
		2	Tersedianya Marka jalan.	Belum ada	-	-	-	-	-	-	1 paket	200	-	-	1 paket	200	DISHUB
		3	Tersedianya alat timbang (matrix)	Belum ada	-	-	-	-	5 unit	150	-	-	-	-	5 unit	150	DISHUB
		4	Tersedianya alat uji kelayakan kendaraan	-	-	-	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	4 paket	4.000	DISHUB
		5	Tersedianya buku keer dan pening.	-	-	-	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	50	4 paket	200	DISHUB
		6	Tersedianya pagar pengaman jalan	-	-	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	4 paket	2.000	DISHUB
		7	Tersedianya Traffic Light	-	-	-	-	-	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	3 paket	750	DISHUB
		8	Tersedianya Deliniator	-	-	-	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	4 paket	1.000	DISHUB
		9	Tersedianya cermin tikungan	-	-	-	1 paket	100	-	-	-	-	-	-	1 paket	100	DISHUB
		10	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.	-	-	-	1 paket	75	1 paket	75	1 paket	75	1 paket	75	4 paket	300	DISHUB
08.	Program Pembangunan Prasarana Perhubungan Udara.	1	Tersedianya bandara Waisai	-	1 paket (lanjutan	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	10.000	DISHUB
		2	Tersedianya bandara di Limalas	-	-	-	1 paket	1.300	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.300	DISHUB
		3	Tersedianya Rencana Teknik Terinci (RTT) Bandara Dorekhar.	-	-	-	-	-	1 paket	750	-	-	-	-	1 paket	750	DISHUB

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		4	Tersedianya Runaway, Apron, dan Taxi way Bandara Waisai	-	-	-	1 paket	16.000	1 paket	16.000	1 paket	16.000	1 paket	16.000	4 paket	64.000	DISHUB
		5	Tersedianya Runaway, Apron, dan Taxi way Bandara Limalas.	-	-	-	1 paket	10.000	1 paket	10.000	1 paket	10.000	1 paket	10.000	4 paket	40.000	DISHUB
		6	Tersedianya Runaway, Bandara Kabare.	-	-	-	1 paket	6.000	1 paket	6.000	1 paket	6.000	1 paket	6.000	4 paket	24.000	DISHUB
		7	Tersedianya Runaway, Apron, dan Taxi way Bandara Dorekhar.	-	-	-	1 paket	10.000	1 paket	10.000	1 paket	10.000	1 paket	10.000	4 paket	40.000	DISHUB
		8	Tersedianya Runaway, Apron, dan Taxi way Bandara Reni.	-	-	-	1 paket	8.000	1 paket	8.000	1 paket	8.000	1 paket	8.000	4 paket	32.000	DISHUB
		9	Tersedianya fasilitas darat Bandara Waisai	-	-	-	1 paket	800	-	-	1 paket	800	-	-	2 paket	1.600	DISHUB
		10	Tersedianya fasilitas darat Bandara Limalas	-	-	-	-	-	1 paket	800	1 paket	800	1 paket	800	3 paket	2.400	DISHUB
		11	Tersedianya fasilitas darat Bandara Kabare	-	-	-	1 paket	800	-	-	1 paket	800	-	-	2 paket	1.600	DISHUB
		12	Tersedianya fasilitas darat Bandara Dorekhar	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	800	-	-	1 paket	800	DISHUB
		13	Tersedianya fasilitas darat Bandara Reni.	-	-	-	-	-	1 paket	800	-	-	-	-	1 paket	800	DISHUB
09.	Program Pembangunan /Pengadaan dan Peningkatan Fasilitas Pendukung Perhubungan Udara.	1	Tersedianya Fasilitas Komunikasi dan Navigasi Bandar Udara Waisai	-	-	-	1 paket	120	1 paket	120	1 paket	120	-	-	3 paket	360	DISHUB
		2	Tersedianya Fasilitas Komunikasi dan Navigasi Bandar Udara Missol (Limalas)	-	-	-	1 paket	120	1 paket	120	1 paket	120	-	-	3 paket	360	DISHUB
		3	Tersedianya Fasilitas Komunikasi dan Navigasi Bandar Udara Kabare	-	-	-	1 paket	120	1 paket	120	1 paket	120	-	-	3 paket	360	DISHUB
		4	Tersedianya Fasilitas Komunikasi dan Navigasi Bandar Udara Dorekhar.	-	-	-	1 paket	120	1 paket	120	1 paket	120	-	-	3 paket	360	DISHUB

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		5	Tersedianya Fasilitas Komunikasi dan Navigasi Bandar Udara Reni	-	-	-	1 paket	120	1 paket	120	1 paket	120	-	-	3 paket	360	DISHUB
		6	Tersedianya Genset 5 KVA Bandara Waisai	-	-	-	1 paket	120	-	-	-	-	-	-	1 paket	120	DISHUB
		7	Tersedianya Genset 5 KVA Bandara Missol	-	-	-	-	-	1 paket	120	-	-	-	-	1 paket	120	DISHUB
		8	Tersedianya Genset 5 KVA Bandara Kabare	-	-	-	1 paket	120	-	-	-	-	-	-	1 paket	120	DISHUB
		9	Tersedianya Genset 5 KVA Bandara Dorekhar	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	120	-	-	1 paket	120	DISHUB
		10	Tersedianya Genset 5 KVA Bandara Reni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	120	1 paket	120	DISHUB
		11	Tersedianya 20 unit HT dan Antena	-	-	-	1 paket	150	-	-	1 paket	150	-	-	2 paket	300	DISHUB
		12	Tersedianya 20 unit mesin babat	-	-	-	1 paket	30	-	-	1 paket	30	-	-	2 paket	60	DISHUB
		13	Tersedianya 5 unit kendaraan roda empat untuk operasional bandara.	Belum ada	-	-	1 unit	500	1 unit	500	1 unit	500	2 unit	1.000	5 unit	2.500	DISHUB
		14	Tersedianya 5 unit kendaraan roda dua untuk operasional bandara.	Belum ada	-	-	2 unit	60	2 unit	60	1 unit	30	-	-	5 unit	150	DISHUB
10.	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan Udara.	1	Terpeliharanya bandara Waisai	Belum ada	-	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	3 paket	600	DISHUB
		2	Terpeliharanya bandara Misool	Belum ada	-	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	3 paket	600	DISHUB
		3	Terpeliharanya bandara Kabare	Belum ada	-	-	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	4 paket	400	DISHUB
		4	Terpeliharanya bandara Dorekhar	Belum ada	-	-	-	-	-	-	1 paket	100	1 paket	100	2 paket	200	DISHUB
		5	Terpeliharanya bandara Reni.	Belum ada	-	-	-	-	-	-	1 paket	100	1 paket	100	2 paket	200	DISHUB

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
11.	Program Peningkatan Kapasitas Aparat Dinas Perhubungan.	1	Tersedianya SDM yang memiliki kompetesi teknis pengujian kendaraan bermotor.	1 orang	-	-	1 paket	60	-	-	1 paket	60	-	-	5 orang	120	DISHUB
		2	Tersedianya SDM yang memiliki kompetesi pengelolaan terminal.	Belum ada	-	-	-	-	1 paket	60	-	-	1 paket	60	2 orang	120	DISHUB
		3	Tersedianya SDM yang memiliki kompetesi teknis kepelautan.	5 orang	-	-	1 paket	60	-	-	1 paket	60	-	-	15 orang	120	DISHUB
		4	Tersedianya SDM yang memiliki kompetesi teknis kepelabuhan.	belum ada	-	-	1 paket	75	-	-	1 paket	75	-	-	5 orang	150	DISHUB
		5	Tersedianya SDM yang memiliki kompetesi teknis pengukuran kapal.	belum ada	-	-	-	-	1 paket	60	-	-	1 paket	60	5 orang	120	DISHUB
		6	Tersedianya SDM yang memiliki kompetesi teknis komunikasi kelautan.	belum ada	-	-	1 paket	60	-	-	1 paket	60	-	-	5 orang	120	DISHUB
		7	Tersedianya SDM yang memiliki kompetesi teknis inspector.	belum ada	-	-	-	-	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	3 orang	450	DISHUB
		8	Tersedianya SDM yang memiliki kompetesi teknis SAR.	belum ada	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	10 orang	800	DISHUB
				JUMLAH		13.070	-	122.730	-	194.315	-	168.480	-	187.685	Jumlah	702.880	

8.1.17. Komunikasi dan Informatika

Table 8.17. Indikasi Rencana Program Prioritas Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program Pembangunan Sarana Prasarana Informasi dan Telekomunikasi	1	Tersedianya tower Telkomsel di Rauki dan Ayau	Belum ada	2 unit	800	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	800	DISHUB
		2	Terbangunnya Tower Celluler di 10 kampung	Belum ada	-	-	1 paket	2.500	1 paket	2.500	1 paket	2.500	1 paket	2.500	14 unit	10.000	DISHUB
		3	Tower Celluler Warsambin	Belum selesai dibangun	-	-	1 paket	700	-	-	-	-	-	-	1 unit	700	DISHUB
		4	Beroperasinya Warung Informasi Masyarakat (WIM)	Belum ada	-	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	4 unit	2.000	DISHUB
		5	Beroperasinya Stasiun Radio Daerah	Belum ada	-	-	-	-	1 paket	600	-	-	-	-	1 unit	600	DISHUB
				JUMLAH		800	-	3.700	-	3.600	-	3.000	-	3.000	Jumlah	14.100	

8.1.18. Pertanahan

Table 8.18. Indikasi Rencana Program Prioritas Pertanahan Kabupaten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	1	Adanya sistem pendaftaran tanah	-	-	-	1 paket	350	-	-	-	-	-	-	1 paket	350	Bagian Pemerintahan-SETDA
		2	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	-	-	-	-	-	1 paket	250	-	-	1 paket	250	2 paket	500	Bagian Pemerintahan-SETDA
02.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	-	-	-	1 paket	300	-	-	-	-	-	-	1 paket	300	Bagian Pemerintahan-SETDA
		2	Penyuluhan hukum pertanahan	-	-	-	-	-	1 paket	250	1 paket	250	-	-	2 paket	500	Bagian Pemerintahan-SETDA
03.	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1	Fasilitasi penyelesaian konflik 0 konflik pertanahan	-	-	-	1 paket	250	-	-	1 paket	250	-	-	2 paket	500	Bagian Pemerintahan-SETDA
		2	Ganti rugi tanaman tumbuh	1 kasus	1 paket	380	-	-	1 paket	400	-	-	1 paket	500	3 paket	1.280	Bagian Pemerintahan-SETDA
				JUMLAH		380	-	900	-	900	-	500	-	750	Jumlah	3.430	

8.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Table 8.19. Indikasi Rencana Program Prioritas Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	Meningkatnya Keamanan Lingkungan Masyarakat	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	5 paket	1.200	Kesbang-polinmas
		2	Adanya pos jaga perbatasan	-	-	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	-	-	3 paket	1.500	Kesbang-polinmas
		3	Adanya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-	-	1 paket	500	-	-	1 paket	800	-	-	2 paket	1.300	Kesbang-polinmas
		4	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	-	-	-	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	4 paket	600	SATPOL PP
		5	Tersedianya biaya pengamanan operasional dalam rangka pesta demokrasi lokal dan nasional	-	1 paket	960	-	-	-	-	2 paket	1.000	1 paket	750	4 paket	2.710	Kesbang-polinmas
02.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1	Adanya pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	4 paket	800	SATPOL PP
		2	Adanya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	4 paket	1.200	Kesbang-polinmas

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		3	Adanya kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan	-	-	-	1 paket	150	-	-	1 paket	150	-	-	2 paket	300	SATPOL PP
		4	Adanya pendataan terhadap gangguan trantib	-	-	-	1 paket	80	-	-	-	-	1 paket	80	2 paket	160	SATPOL PP
		5	Adanya peningkatan kapasitas aparat Satpol PP	-	2 paket	400	-	-	1 paket	200	-	-	1 paket	200	4 paket	800	SATPOL PP
03.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1	Adanya Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	4 paket	1.200	Kesbang-polinmas
		2	Adanya sosialisasi Pemantapan wawasan kebangsaan di Tingkat Distrik	-	-	-	24 distrik	400	24 distrik	400	24 distrik	400	24 distrik	400	24 distrik	1.600	Kesbang-polinmas
04.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1	Adanya fasilitasi forum organisasi masyarakat dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan	-	-	-	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	4 paket	600	Kesbang-polinmas
05.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1	Tersedianya anggaran pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	-	1 paket	500	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	5 paket	4.500	Kesbang-polinmas
06.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	1	Adanya Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	4 paket	800	SATPOL PP
		2	Adanya penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	2 paket	400	SATPOL PP

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
07.	Program pendidikan politik masyarakat	1	Tersosialisasikannya /penyuluhan Pilkada Gubernur kepada masyarakat	-	1 paket	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	300	Kesbang-polinmas
		2	Tersosialisasikannya /penyuluhan Pemilihan Legislatif kepada masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	700	-	-	1 paket	700	Kesbang-polinmas
		3	Tersosialisasikannya /penyuluhan Pilkada Bupati/Wabup kepada masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.300	1 paket	1.300	Kesbang-polinmas
		4	Tersosialisasikannya /penyuluhan Pemilihan Presiden kepada masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	-	-	1 paket	500	Kesbang-polinmas
		5	Adanya koordinasi forum Bakominda	-	-	-	4 kali	325	4 kali	325	4 kali	325	4 kali	325	16 kali	1.300	Kesbang-polinmas
		6	Tersedianya data base partai politik yang mutakhir	-	-	-	1 paket	200	-	-	1 paket	200	1 paket	200	3 paket	600	Kesbang-polinmas
08.	Program hubungan antar lembaga	1	Tersedianya bantuan dana pembinaan bagi partai politik	-	20 kursi	1.200	20 kursi	1.200	20 kursi	1.200	20 kursi	1.200	20 kursi	1.200	20 kursi	6.000	Kesbang-polinmas
		2	Tersedianya bantuan penyelenggaraan Pilkada/Pilpres/Pileg bagi Panwaslu	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	5.000	1 paket	5.000	2 paket	10.000	Kesbang-polinmas
		3	Tersedianya dana operasional keamanan	-	-	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	4 paket	2.000	Kesbang-polinmas
		4	Adanya koordinasi antar lembaga (Parpol0Ormas)	-	-	-	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	4 paket	1.000	Kesbang-polinmas
09.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	5 paket	2.500	BPBD
		2	Adanya peta rawan bencana	-	-	-	1 paket	500	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	BPBD

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		3	Tersedianya alat deteksi bencana	-	-	-	1 paket	500	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	BPBD
		4	terbentuknya forum kewaspadaan dini	-	-	-	1 paket	100	-	-	-	-	-	-	1 paket	100	BPBD
		5	Adanya dukungan biaya operasional forum kewaspadaan dini	-	-	-	-	-	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	50	3 paket	150	BPBD
		6	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	-	-	-	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	4 paket	6.000	BPBD
		7	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	-	-	-	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	4 paket	6.000	BPBD
		8	Pengadaan logistik dan obat0obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	-	-	-	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	4 paket	6.000	BPBD
		9	Tersedianya Sarana dan prasarana sistem peringatan dini	-	-	-	-	-	1 paket	5.000	-	-	-	-	1 paket	5.000	BPBD
		10	Tersedianya Dokumen prosedur standar operasi sistem peringatan dini	-	-	-	-	-	1 paket	100	-	-	-	-	1 paket	100	BPBD
		11	Jumlah sosialisasi penanganan bencana.	-	-	-	-	-	-	-	4 paket	1.000	-	-	4 paket	1.000	BPBD
		12	Jumlah peserta yang lulus pelatihan penanganan dan operasional sistem peringatan dini berdasarkan standar nilai.	-	-	-	-	-	1 paket	100	-	-	-	-	1 paket	100	BPBD
				JUMLAH		3.860	-	12.805	-	16.225	-	20.375	-	18.055	Jumlah	71.320	

8.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tabel 8.20. Indikasi Rencana Program Prioritas *Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian* Kabubapten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1	Penataan SOTK dan Tupoksi SKPD	-	1 paket	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	200	Bagian Ortala-SETDA
		2	Monitoring dan evaluasi kelembagaan daerah	-	-	-	1 paket	500	-	-	-	-	1 paket	500	1 paket	1.000	Bagian Ortala-SETDA
		3	Adanya uraian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan non struktural	-	250 buku	130	-	-	-	-	-	-	-	-	250 buku	130	Bagian Ortala-SETDA
		4	Sosialisasi Perda Tupoksi	-	-	-	-	-	1 paket	135	-	-	-	-	1 paket	135	Bagian Ortala-SETDA
		5	Adanya standar operasional prosedur kerja perangat daerah	-	1 paket	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	100	Bagian Ortala-SETDA
		6	Penguatan kapasitas lembaga pemerintahan kampung dan distrik	-	-	-	1 paket	1.000	-	-	1 paket	1.000	-	-	2 paket	2.000	Bagian Pemerintahan-SETDA
		7	Pengendalian usulan data program kerja pada Sekretarian Daerah	-	1 paket	100	1 paket	110	1 paket	121	1 paket	133	1 paket	146	5 paket	611	Bagian Penyusunan Program-Setda
		8	Penyusunan dan Evaluasi Program-program kerja SETDA	-	1 paket	100	1 paket	110	1 paket	121	1 paket	133	1 paket	146	5 paket	611	Bagian Penyusunan Program-Setda
		9	Pengembangan Informasi dan Komunikasi	-		830	1 paket	830	1 paket	830	1 paket	830	1 paket	830	5 paket	4.150	Bagian Humas-SETDA

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		10	Pengembangan SIMPEG dengan visualisasi laporan komprehensif dan penataan perangkat keras dan perawatan sistem	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	-	-	-	-	3 paket	900	BKD
		11	Adanya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	-	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	5 paket	500	Bagian Ortala-SETDA
		12	Dukungan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	-	-	-	1 paket	75	1 paket	75	1 paket	75	1 paket	75	5 paket	300	BKD
		13	Adanya Standar Kompetensi Jabatan	-	1 paket	300	-	-	-	-	-	-	1 Paket	500	2 paket	800	BKD
02.	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	1	Tersedianya bantuan dana bagi tugas belajar bagi Diploma untuk PNS	-	40 paket	2.000	40 paket	2.000	40 paket	2.000	40 paket	2.000	40 paket	2.000	200 paket	10.000	Dinas P dan P
		2	Tersedianya bantuan dana bagi tugas belajar S1 untuk PNS	-	40 paket	1.000	40 paket	1.000	40 paket	1.000	40 paket	1.000	40 paket	1.000	200 paket	5.000	Dinas P dan P
		3	Bantuan Pendidikan Diploma Bagi Tenaga PNS Kesehatan	-	5 paket	3.667	5 paket	3.667	5 paket	3.667	5 paket	3.667	5 paket	3.667	25 paket	18.335	DINKES
		4	Bantuan Pendidikan bagi S1 Kesehatan untuk PNS	-	-	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	4 paket	2.000	DINKES
		5	Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Bappeda	1 paket	-	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	5 paket	2.000	BAPPEDA
		6	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dan Rakornas Bappeda	1 paket	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	400	1 paket	500	1 paket	500	6 paket	2.000	BAPPEDA
		7	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan pada Bappeda	-	-	-	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	4 paket	1.000	BAPPEDA

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		8	pelatihan bagi aparat PNS lingkungan hidup						1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	3 paket	1.500	DINAS LH
		9	Tersedianya dana Pendidikan bagi S2 untuk PNS	10 paket	10 paket	500	10 paket	500	10 paket	500	10 paket	500	10 paket	500	60 paket	2.500	BAPPEDA
		10	Tersedianya dana Pendidikan bagi S3 untuk PNS	-	10 paket	500	10 paket	500	10 paket	500	10 paket	500	10 paket	500	50 paket	2.500	BAPPEDA
		11	Pendidikan D3 dan S1 Akutansi untuk PNS	-	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	5 paket	7.500	BPKAD
		12	Pendidikan dan pelatihan struktural (Diklatpim II, III, IV) bagi PNS Daerah	-	35 orang	700	155 orang	3.800	155 orang	3.800	155 orang	3.800	155 orang	3.800	655 orang	15.900	BKD
		13	Diklat pemahaman tupoksi SKPD	-	-	-	1 paket	500	-	-	1 paket	500	-	-	2 paket	1.000	Bagian Ortala-SETDA
		14	Bintek Penyusunan Legal Drafting	-	1 paket	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	100	Bagian Hukum-SETDA
		15	Bimbingan Teknis Bantuan Hukum	-	1 paket	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	100	Bagian Hukum-SETDA
		16	Adanya monitoring dan evaluasi kepegawaian	-	-	-	1 paket	1.250	-	-	-	-	1 paket	1.250	2 paket	2.500	BKD
		17	Bintek Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Setda dan Distrik	-	-	-	-	-	-	-	60 orang	200	-	-	1 paket	200	Bagian Perlengkapan-SETDA
		17	Bintek Penyusunan dan evaluasi program	-	-	-	1 paket	200	-	-	1 paket	200	-	-	2 paket	400	Bagian Penyusunan Program-SETDA
		18	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	-	-	-	4 paket	1.200	4 paket	1.200	4 paket	1.200	4 paket	1.200	16 paket	4.800	BKD
		19	Pendidikan dan pelatihan prajabatan (Gol II dan III) bagi calon PNS Daerah	-	250 org	800	250 org	800	250 org	800	250 org	800	250 org	800	1.250 paket	4.000	BKD

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		20	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan	-	-	-	1 Paket	70	1 Paket	70	1 Paket	70	1 Paket	70	4 paket	280	DISPENDA
		21	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional	-	-	-	1 Paket	100	1 Paket	100	1 Paket	100	1 Paket	100	4 paket	400	DISPENDA
		22	Terlaksananya Bimbingan teknis / kursus bagi PNS di Setwan	-	-	-	2 paket	83	2 paket	91	2 paket	100	2 paket	110	8 paket	383	SETWAN
		23	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan untuk PNS di Setwan	-	-	-	2 paket	55	2 paket	61	2 paket	67	2 paket	73	6 paket	255	SETWAN
		24	Terlaksananya Pendidikan khusus dan pendampingan teknik penyusunan perundang-undangan (legal drafting)	-	-	-	1 paket	55	1 paket	61	1 paket	67	1 paket	73	3 paket	255	SETWAN
		25	Adanya Bantuan Pendidikan formal bagi PNS di Setwan	-	-	-	3 paket	440	3 paket	484	3 paket	532	3 paket	586	12 paket	2.042	SETWAN
		26	Terlaksananya Bintek Bantuan Hukum	-	1 paket	100	-	-	1 paket	100	-	-	-	-	2 paket	200	Bagian Hukum-Setda
		27	Terlaksananya Bintek Penyusunan Legal Drafting	-	1 paket	100	-	-	1 paket	100	-	-	-	-	2 paket	200	Bagian Hukum-Setda
		28	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peraturan Penataan Struktur Kelembagaan	-	1 paket	100	-	-	-	-	1 paket	100	-	-	1 paket	200	Bagian Ortala-SETDA
		29	Terlaksananya Diklat Kehumasan	-	-	-	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	4 paket	1.000	Dinas P dan P
		30	Terlaksananya Pelatihan pengelolaan administrasi kantor dan keuangan bagi staf dinas pendidikan	-	-	-	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	4 paket	1.000	Dinas P dan P

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		31	Terlaksananya Studi Banding tentang pengelolaan pendapatan daerah	-	1 paket	300	-	-	-	-	1 paket	300	-	-	2 paket	600	DISPENDA
		32	Terlaksananya Bintek tentang Penyusunan laporan keuangan daerah	-	-	-	1 Paket	250	1Paket	250	1 Paket	300	1 Paket	300	4 paket	1.100	DISPENDA
		33	Terlaksananya Bintek Pajak Bumi Bangunan Pedesaan & Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bagunan (BPHTB)	-	-	-	1 Paket	350	1 Paket	350	1 Paket	350	1 Paket	350	4 paket	1.400	DISPENDA
		34	Terlaksananya Bintek Pendapatan Lain-Lain	-	-	-	1 Paket	100	1 Paket	100	1 Paket	100	1 Paket	100	4 paket	400	DISPENDA
		35	Terlaksananya Pelatihan di Bidang Perpajakan dan Regulasi Perpajakan	-	-	-	1 Paket	150	1 Paket	150	1 Paket	150	1 Paket	150	4 paket	600	DISPENDA
		36	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur terkait dengan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)	-	-	-	2 Orang	100	2 Orang	100	2 Orang	100	2 Orang	100	8 orang	400	DKP
		37	Terlaksananya Penguatan kapasitas bagi aparat kampung	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.000	1 paket	1.000	2 paket	2.000	Bagian Pemerintahan-SETDA
		38	Terlaksananya Penguatan kapasitas bagi aparat distrik	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	350	1 paket	350	2 paket	700	Bagian Pemerintahan-SETDA
		39	Terlaksananya kegiatan pelatihan GIS	1 paket	1 paket	400	-	-	-	-	1 paket	500	-	-	3 paket	900	BAPPEDA
		40	Meningkatnya kapasitas aparat dalam penanganan bencana	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	4 paket	800	BPBD
		41	Terselenggaranya pelatihan/kursus/studi banding		-	-	6 orang	120	6 orang	120	6 orang	120	6 orang	120	30 orang	480	Dinas Perkebunan
		42	Terselenggarakannya magang petugas perkebunan		-	-	5 orang	100	-	-	5 orang	100	-	-	14 orang	200	Dinas Perkebunan
		43	Terlaksananya Diklat teknis Geologi		-	-	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	50	4 paket	200	DISTAMBEN

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		44	Terlaksananya Diklat teknis ketenaga listrikan dan energi terbarukan		-	-	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	4 paket	400	DISTAMBEN
		45	Terlaksananya Kursus Amdal		-	-	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	4 paket	400	DISTAMBEN
		46	Terlaksananya Study banding		-	-	-	-	-	-	1 paket	150	-	-	1 paket	150	DISTAMBEN
		47	Program sosialisasi UU No. 43 Tahun 2--7 tentang Perpustakaan	-	-	-	1 paket	400	-	-	-	-	-	-	1 paket	400	KPAD
		48	Terselenggaranya Diklat dan Ujian Perpres No 54 Tahun 2-1-	-	-	-	1 paket	400	-	-	1 paket	500	-	-	2 paket	900	BAPPEDA
		49	Terlaksananya Diklat tentang pengelolaan air minum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 orang	500	2 orang	500	DINAS PU
		50	Adanya tenaga pelatih teknis pemeliharaan dan perbaikan peralatan kebinamargaan.	-	Tenaga pelatih	-	2 tenaga pelatih	50	2 tenaga pelatih	50	-	-	-	-	4 orang	100	DINAS PU
		51	Adanya diklat teknis ke PU-an	-	-	-	4 Diklat, @ 2 orang peserta	1.000	4 Diklat, @ 2 orang peserta	1.000	4 Diklat, @ 2 orang peserta	1.000	4 Diklat, @ 2 orang peserta	1.000	8 orang	4.000	DINAS PU
		52	Adanya diklat manajerial bagi PNS PU	-	-	-	2 Diklat, @ 2 orang	200	2 Diklat, @ 2 orang	200	2 Diklat, @ 2 orang	200	2 Diklat, @ 2 orang	200	8 orang	800	DINAS PU
		53	Adanya aparatur dinas PU yang memiliki sertifikasi	-	-	-	4 orang	100	4 orang	100	4 orang	100	4 orang	100	16 orang	400	DINAS PU
03.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Adanya rencana pembinaan karir PNS	-	-	-	1 paket	400	-	-	1 paket	400	-	-	2 paket	800	BKD
		2	Terselenggaranya seleksi penerimaan calon PNS	-	1 paket	750	-	-	1 paket	750	-	-	-	-	2 paket	1.500	BKD

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		3	Adanya Rencana Kebutuhan dan Pengembangan Pegawai	-	-	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	4 paket	2.000	BKD
		4	Terlaksananya Seleksi administrasi pemberkasan pengusulan NIP CPNS	-	1 paket	300	-	-	-	-	1 paket	300	-	-	2 paket	600	BKD
		5	Adanya database sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	5 paket	1.500	BKD
		6	Adanya Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	4 paket	800	BKD
		7	Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	4 paket	800	BKD
		8	Adanya Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	-	-	-	2 paket	350	2 paket	350	2 paket	350	2 paket	350	8 paket	1.400	BKD
		9	Adanya Pemberian tanda jasa PNS Pensiunan	-	1 paket	200	-	-	1 paket	200	-	-	1 paket	200	3 paket	600	BKD
		10	Terlaksananya Monitoring kepegawaian	-	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	5 paket	1.250	BKD
		11	Terlaksananya Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	-	-	-	1 paket	200	-	-	1 paket	200	-	-	2 paket	400	BKD
		12	adanya Pembangunan web portal kepegawaian	-	-	-	1 paket	500	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	BKD
		13	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	-	1 paket	350	-	-	-	-	-	-		-	1 paket	350	Bagian Hukum-SETDA

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
04.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1	Terselenggaranya pembahasan rancangan peraturan daerah	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	5 paket	1.500	SETWAN
		2	Terselenggaranya Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	-	3 paket	300	3 paket	330	3 paket	363	3 paket	399	3 paket	439	15 Paket	1.831	SETWAN
		3	Terselenggaranya Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	-	10 paket	750	10 paket	825	10 paket	908	10 paket	998	10 paket	1.098	50 paket	4.579	SETWAN
		4	Terselenggaranya Rapat-rapat paripurna	-	5 paket	1.000	5 paket	1.100	5 paket	1.210	5 paket	1.331	5 paket	1.464	25 paket	6.105	SETWAN
		5	Terselenggaranya Kegiatan Reses		2 paket	350	2 paket	385	2 paket	424	2 paket	466	2 paket	512	10 paket	2.137	SETWAN
		6	Terselenggaranya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	-	3 paket	300	3 paket	330	3 paket	363	3 paket	399	3 paket	439	15 Paket	1.831	SETWAN
		7	Terselenggaranya Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	-	1 paket	300	1 paket	330	1 paket	363	1 paket	399	1 paket	439	5 paket	1.831	SETWAN
		8	Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	2 paket	1.000	-	-	-	-	2 paket	1.000	-	-	4 paket	2.000	SETWAN
		9	Terlaksananya Studi Banding	-	1 paket	500	-	-	-	-	1 paket	500	-	-	2 paket	1.000	SETWAN
		10	Terlaksananya Sosialisasi perturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	1 paket	500	-	-	1 paket	500	2 paket	1.000	Bagian Hukum-SETDA
05.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1	Terlaksananya Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah	-	1 paket	850	1 paket	935	1 paket	1.029	1 paket	1.131	1 paket	1.244	5 paket	5.189	Bagian Umum-SETDA
		2	Terlaksananya Kunjungan kerja/ inspeksi wakil kepala daerah	-	1 paket	450	1 paket	495	1 paket	545	1 paket	599	1 paket	659	5 paket	2.748	Bagian Umum-SETDA

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		3	Terlaksananya Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	-	1 paket	500	1 paket	550	1 paket	605	1 paket	666	1 paket	732	5 paket	3.053	Bagian Umum-SETDA
		4	Terlaksananya Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	-	1 paket	500	1 paket	550	1 paket	605	1 paket	666	1 paket	732	5 paket	3.053	Bagian Umum-SETDA
		5	Terlaksananya Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	-	1 paket	1.000	1 paket	1.050	1 paket	1.103	1 paket	1.158	1 paket	1.216	5 paket	5.527	Bagian Keuangan-SETDA
		6	Terlaksananya Rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah	-	1 paket	3.000	1 paket	3.150	1 paket	3.308	1 paket	3.473	1 paket	3.647	5 paket	16.578	Bagian Keuangan-SETDA
		7	Terlaksananya Bantuan Kepala /Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat	-	1 paket	6.000	1 paket	6.300	1 paket	6.615	1 paket	6.946	1 paket	7.293	1 paket	33.154	Bagian Keuangan-SETDA
		8	Tersedianya bantuan penyelenggaraan Pilkada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	13.000	1 paket	13.000	Bagian Pemerintahan-SETDA
06.	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	-	1 paket	1.000	1 paket	1.050	1 paket	1.103	1 paket	1.158	1 paket	1.216	5 paket	5.527	BPKAD
		2	Terlaksananya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	-	-	-	1 paket	800	1 paket	800	1 paket	800	1 paket	800	4 paket	3.200	BPKAD
		3	Adanya penilaian Aset Daerah	-	1 paket	500	-	-	1 paket	500	-	-	1 paket	500	3 paket	1.500	BPKAD
		4	Adanya registrasi dan penomoran Barang Milik Daerah	-	-	-	1 paket	1.500	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.500	BPKAD

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		5	Adanya penyusunan RKA dan DPA	-	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	5 paket	5.000	BPKAD
		6	Adanya Penyusunan Laporan Keuangan	-	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	5 paket	5.000	BPKAD
		7	Terpeliharanya Jaringan SIMDA	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	5 paket	2.500	BPKAD
		8	Terpeliharanya pemeliharaan Aplikasi Kas Daerah	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	5 paket	2.500	BPKAD
		9	Terlaksananya workshop Pengelolaan Keuangan Daerah	-	1 paket	500	-	-	1 paket	500	-	-	1 paket	500	3 paket	1.500	BPKAD
		10	Terlaksananya workshop Pengelolaan barang milik daerah	-	1 paket	500	1 paket	500	-	-	1 paket	500	-	-	3 paket	1.500	BPKAD
		11	Adanya Penyusunan SOP Pengelolaan Barang milik Daerah	-	-	-	1 paket	500	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	BPKAD
		12	Adanya Penyusunan dan sosialisasi Standart operating prosedur keuangan daerah	-	1 paket	800	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	800	BPKAD
		13	Adanya Monitoring dan evaluasi aplikasi simda oleh tim pusat	-	1 paket	1.500	1 paket	750	1 paket	750	1 paket	750	1 paket	750	5 paket	4.500	BPKAD
		14	Adanya penyusunan laporan semesteran	-	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	5 paket	5.000	BPKAD
		15	Adanya Penyusunan Laporan dana transfer	-	-	-	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	4 paket	1.000	BPKAD
		16	Adanya konsultasi Keuangan Daerah	-	-	-	1 paket	750	1 paket	750	1 paket	750	1 paket	750	4 paket	3.000	BPKAD
		17	Adanya Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan daerah	-	-	-	1 Paket	30	1 Paket	30	1 Paket	30	1 Paket	30	4 Paket	120	DISPENDA
		18	Adanya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah	-	-	-	1 paket	350	1 paket	350	1 paket	350	1 paket	350	4 paket	1.400	DISPENDA

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		19	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah.	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	4 paket	800	DISPENDA
		20	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	4 paket	800	DISPENDA
		21	Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	4 paket	800	DISPENDA
07.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	1	Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring sisa uang UP, GU dan TU	-	1 paket	1.000	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	5 paket	3.000	BPKAD
		2	Terlaksananya Pendampingan Pengelolaan Keuangan Tingkat SKPD	-	1 paket	1.000	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	5 paket	3.000	BPKAD
		3	Terlaksananya Konsultasi Keuangan Daerah Tingkat Pusat dan Provinsi	-	1 paket	750	1 paket	750	1 paket	750	1 paket	750	1 paket	750	5 paket	3.750	BPKAD
		4	Terlaksananya Bimbingan Tekhnis Keuangan Daerah	-	1 paket	400	1 paket	500	-	-	1 paket	500	-	-	3 paket	1.400	BPKAD
		5	Adanya Data PBB-P2 yang mutakhir	-	-	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	3 paket	900	DISPENDA
		6	Adanya validasi data BPHTB	-	-	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	3 paket	900	DISPENDA
08.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD		37 paket	1.850	37 paket	1.850	37 paket	1.850	37 paket	1.850	37 paket	1.850	37 paket	9.250	Masing-Masing SKPD
		2	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) SKPD	-	37 paket	1.850	37 paket	1.850	37 paket	1.850	37 paket	1.850	37 paket	1.850	37 paket	9.250	Masing-Masing SKPD

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		3	Adanya Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	4 paket	2.500	Bagian Pemerintahan-SETDA
		4	Adanya LKPJ dan LPJ Kepala Daerah	-	-	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	4 paket	2.000	Bagian Pemerintahan-SETDA
		5	adanya Data Base Pendapatan Daerah	-	-	-	1 paket	200	-	-	-	-	-	-	1 paket	200	DISPENDA
09.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1	Adanya penyusunan sistem dan prosedur pengeloaan keuangan anggaran daerah desa	-	1 paket	500	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	BPKAD
10.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	Terlaksananya pengawasan internal secara berkala (Reguler), Khusus, dan Evaluasi Proyek	-	1 paket	400	1 paket	400	1 paket	400	1 paket	400	1 paket	400	5 paket	2.000	INSPEKTORAT
		2	adanya Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	-	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	5 paket	1.250	INSPEKTORAT
		3	Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	-	1 paket	240	1 paket	240	1 paket	240	1 paket	240	1 paket	240	5 paket	1.200	INSPEKTORAT
		4	Adanya konsultasi Pemeriksaan ke Provinsi dan ke Pusat	-	1 paket	300	1 paket	382	1 paket	382	1 paket	382	1 paket	382	5 paket	1.828	INSPEKTORAT
		5	Terlaksananya Rapat koordinasi nasional Pusat dan regional	-	1 paket	73	1 paket	160	1 paket	160	1 paket	160	1 paket	160	5 paket	713	INSPEKTORAT
		6	Adanya Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin (SITU)	-	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	5 paket	750	Bagian Penyusunan Program-Setda
		7	Terlaksananya Inspeksi Mendadak terhadap jam kerja	-	-	-	24 paket	36	24 paket	36	24 paket	36	24 paket	36	96 paket	144	INSPEKTORAT

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
11.	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1	Terlaksananya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	-	3 paket	252	3 paket	250	3 paket	250	3 paket	250	3 paket	250	15 paket	1.252	NSPEKTORAT
		2	Terlaksananya Pelatihan teknis fungsional pengawasan	-	3 paket	243	2 paket	150	2 paket	150	2 paket	150	2 paket	150	11 paket	843	NSPEKTORAT
		3	Terlaksananya In house training bagi Staf PNS Inspektorat	-	1 paket	20	-	-	1 paket	20	-	-	-	-	2 paket	40	INSPEKTORAT
		4	Terlaksananya Diklat tentang Manajemen Kepegawaian Daerah	-	-	-	1 Paket	75	1 Paket	75	1 Paket	75	1 Paket	75	4 Paket	300	INSPEKTORAT
		5	Terlaksananya Diklat Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah	-	-	-	1 Paket	120	1 Paket	120	1 Paket	120	1 Paket	120	4 Paket	480	NSPEKTORAT
12.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1	Terfasilitasinya Perubahan Perda dan Peraturan Bupati	-	1 paket	200	-	-	-	-	1 paket	300	-	-	2 paket	500	Bagian Ortala-SETDA
		2	Tertatanya Himpunan PERDA	-	1 paket	100	-	-	-	-	-	-	1 paket	100	2 paket	200	Bagian Hukum-SETDA
		3	Terfasilitasinya Penyusunan peraturan Daerah	-	1 paket	450	1 paket	450	1 paket	450	1 paket	450	1 paket	450	5 paket	2.250	Bagian Hukum-SETDA
		4	Adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	4 paket	800	Bagian Hukum-SETDA
		5	Fasilitasi penyusunan peraturan kampung	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	-	-	-	-	2 paket	600	Bagian Hukum-SETDA
		6	Adanya sosialisasi peraturan kampung	-	-	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	-	-	2 paket	600	Bagian Hukum-SETDA
13.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	1	Terlaksananya fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah	-	-	-	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	4 paket	6.000	Bagian Pemerintahan-SETDA

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		2	Terlaksananya Penataan batas wilayah administrasi kampung dan distrik	-	-	-	1 paket	700	-	-	-	-	-	-	1 paket	700	Bagian Pemerintahan-SETDA
		3	Terlaksananya Penataan batas wilayah administrasi dengan daerah lain	-	-	-	1 paket	2.000	-	-	-	-	-	-	1 paket	2.000	Bagian Pemerintahan-SETDA
		4	Terlaksananya Penataan administrasi kampung dan distrik	-	-	-	1 paket	700	-	-	-	-	-	-	1 paket	700	Bagian Pemerintahan-SETDA
14.	Program Peningkatan Sarana-prasarana	1	Meningkatnya sarana-prasarana pada Bagian Hukum	-	1 paket	100	1 paket	250	1 paket	263	1 paket	276	1 paket	289	5 paket	1.178	Bagian Hukum-Setda
		2	Meningkatnya sarana-prasarana pada Bagian Perlengkapan	-	1 paket	580	1 paket	2.000	1 paket	2.000	1 paket	2.000	1 paket	2.000	5 paket	8.580	Bagian Perlengkapan-SETDA
		3	Meningkatnya sarana-prasarana pada Bagian Ortala	-	1 paket	200	1 paket	250	1 paket	263	1 paket	276	1 paket	289	4 paket	1.278	Bagian Ortala-SETDA
		4	Meningkatnya sarana-prasarana pada Bagian Humas	-	-	-	1 paket	200	1 paket	210	1 paket	221	1 paket	232	4 paket	862	Bagian Humas-SETDA
		5	Meningkatnya sarana-prasarana pada Bagian Keuangan	-	-	-	1 paket	200	1 paket	210	1 paket	221	1 paket	232	4 paket	862	Bagian Keuangan-SETDA
		6	Meningkatnya sarana-prasarana pada Bagian Penyusunan Program	-	1 paket	300	1 paket	400	1 paket	420	1 paket	441	1 paket	463	5 paket	2.024	Bagian Penyusunan Program-SETDA
		7	Meningkatnya sarana-prasarana pada Bagian Pemerintahan	-	1 paket	450	1 paket	500	1 paket	525	1 paket	551	1 paket	579	5 paket	2.605	Bagian Pemerintahan-SETDA
		8	Meningkatnya sarana-prasarana pada Bagian Umum	-	1 paket	455	1 paket	478	1 paket	502	1 paket	527	1 paket	553	5 paket	2.514	Bagian Umum-SETDA
				JUMLAH		54.990	-	76.265	-	69.934	-	76.687	-	88.256	Jumlah	367.182	

8.1.21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 8.21. Indikasi Rencana Program Prioritas *Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian* Kabubapten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1	Adanya Data Base Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Belum ada	1 dokumen	250	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	250	BPMK
		2	Terselenggaranya Lomba pemberdayaan masyarakat antar kampung	-	1 paket	200	-	-	-	-	-	-	1 paket	300	2 paket	500	BPMK
		3	Jumlah Aparatur Kampung yang mengikuti pelatihan peningkatan Kapasitas	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	4 paket	800	BPMK
02.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	1	Jumlah kampung yang memperoleh program Respek	97 kampung	124 kampung	18.600	124 kampung	18.600	124 kampung	18.600	124 kampung	18.600	124 kampung	18.600	124 kampung	93.000	BPMK
		2	Jumlah kampung yang mendapatkan dana pendamping Respek	97 kampung	124 kampung	930	124 kampung	930	124 kampung	930	124 kampung	930	124 kampung	930	124 kampung	4.650	BPMK
		3	adanya Dokumen Monitoring program pemberdayaan	Belum ada dokumen	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300	5 dokumen	1.500	BPMK
		4	Jumlah peserta pelatihan ekonomi produktif pembuatan dendeng Ikan & Kerupuk Ikan Singkong	elompok usaha bersama (KUB)	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	5 paket	750	BPMK
		5	Jumlah peserta pelatihan Budidaya Teripang	Kelompok Masyarakat	-	-	5 Kelompok	150	5 Kelompok	150	5 Kelompok	150	5 Kelompok	150	20 kelompok	600	BPMK
				JUMLAH		20.430	-	20.730	-	20.330	-	20.330	-	20.630	Jumlah	102.450	

8.1.22. Sosial

Tabel 8.22. Indikasi Rencana Program Prioritas Sosial Kabubapten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	ndikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Adanya dokumen penelitian untuk melakukan pemetaan masalah dan pengembangan data base PMKS di Raja Ampat.	-	-	-	1 paket	200	-	-	-	-	-	-	1 paket	200	DINKESSOS
		2	Terselenggara workshop untuk merumuskan dan mengintegrasikan kebijakan dan program pemberdayaan PMKS di Raja Ampat	-	-	-	1 paket	200	-	-	-	-	-	-	1 paket	200	DINKESSOS
		3	Jumlah peserta pelatihan untuk pelatih (ToT) Pemberdayaan Pekerja Sosial	-	-	-	1 paket	180	-	-	-	-	-	-	1 paket	180	DINKESSOS
		4	Jumlah pengelola LK3 yang terlatih untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan konseling dan mengadvokasi keluarga yang memiliki masalah sosial psikologis	-	-	-	-	-	1 paket	150	-	-	-	-	1 paket	150	DINKESSOS
		5	Tersedianya bantuan biaya hidup bagi anak panti asuhan				1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	4 paket	400	DINKESSOS
		6	jumlah peserta penyuluhan terkait materi UU No.23 Tahun 2004 di tingkat distrik	-	-	-	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	-	-	3 paket	300	DINKESSOS

NO	PROGRAM	No	ndikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
02.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	jumlah peserta pelatihan Pekerja Sosial untuk melakukan pemberdayaan PMKS di Raja Ampat.	-	-	-	-	-	1 paket	300	-	-	-	-	1 paket	300	DINKESSOS
		2	Jumlah rapat koordinasi triwulan dengan instansi dan lembaga0lembaga sosial yang menjadi mitra Dinas Kessos	-	-	-	1 paket	60	1 paket	60	1 paket	60	1 paket	60	4 paket	240	DINKESSOS
		3	Jumlah penerima bantuan hari besar keagamaan	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	5 paket	1.000	DINKESSOS
		4	Jumlah tokoh agama yang mendapat bantuan	-	-	-	2 paket	500	2 paket	500	2 paket	500	2 paket	500	4 paket	2.000	DINKESSOS
		5	Bantuan kegiatan keagamaan	-	-	-	2 paket	600	2 paket	800	2 paket	800	2 paket	1.000	8 paket	3.200	DINKESSOS
03.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1	jumlah warga miskin yang mendapat bantuan renovasi rumah	-	40 unit	4.800	-	-	40 unit	5.280	-	-	40 unit	5.800	120 unit	15.880	DINKESSOS
		2	jumlaah peserta pelatihan pengelolaan usaha bagi keluarga atau kelompok masyarakat miskin	-	-	-	-	-	1 paket	80	1 paket	90	-	-	2 paket	170	DINKESSOS
		3	jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapat bantuan modal	-	-	-	-	-	30 kelompok	300	30 kelompok	300	30 kelompok	300	90 kelompok	900	DINKESSOS
		4	Jumlah KUBE yang mendapatkan pendampingan	-	-	-	-	-	30 paket	150	30 paket	150	30 paket	150	90 paket	450	DINKESSOS
		5	Jumlah difabel yang mendapatkan santunan biaya hidup dan biaya pengobatan	-	1 paket	400	1paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	5 paket	2.400	DINKESSOS
		6	Jumlah peserta pelatihan keterampilan dan bimbingan sosial bagi difabel	-	-	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	-	-	2 paket	600	DINKESSOS

NO	PROGRAM	No	ndikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		7	Jumlah lansia yang mendapatkan santunan biaya hidup dan biaya pengobatan	-	-	-	-	-	100 paket	400	100 paket	400	100 paket	400	300 paket	1.200	DINKESSOS
		8	Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan sosial bagi warga lansia	-	-	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	-	-	2 paket	600	DINKESSOS
		9	Jumlah SSB untuk di kawasan permukiman	-	-	-	-	-	4 paket	40	-	-	-	-	4 paket	40	DINKESSOS
		10	Jumlah peserta pelatihan/ penyuluhan kewirausahaan dan pengelolaan koperasi bagi KAT	-	-	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	-	-	2 paket	400	DINKESSOS
		11	Jumlah lembaga semacam koperasi yang aktif di wilayah permukiman KAT	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	100	1 paket	100	2 paket	200	DINKESSOS
		12	Jumlah koperasi khususnya untuk penyediaan barang-barang konsumsi yang mendapat bantuan modal	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	150	1 paket	150	2 paket	300	DINKESSOS
04.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1	Jumlah sarana-prasarana ibadah yang direnovasi	-	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	5 paket	7.500	DINKESSOS
		2	Tersedianya gedung kantor Dinas Kesejahteraan Sosial	-	-	-	1 paket	1.000	-	-	-	-	-	-	2 paket	1.000	DINKESSOS
		3	Terbangunnya gedung kantor penanganan bencana	-	-	-	-	-	1 unit	15.000	-	-	-	-	1 unit	15.000	BPBD
		4	Jumlah unit alat transportasi laut untuk menunjang pelayanan kesejahteraan sosial	-	-	-	1 unit	500	1 unit	500	-	-	-	-	2 unit	1.000	DINKESSOS
		5	Jumlah distrik yang memiliki sarana komunikasi SSB	-	-	-	12 unit	120	12 unit	120	-	-	-	-	24 unit	240	DINKESSOS
				JUMLAH		6.900	-	5.760	-	26.880	-	5.750	-	10.760	Jumlah	56.050	

8.1.23. Budaya

Tabel 8.23. Indikasi Rencana Program Prioritas Budaya Kabubapten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1	Tersedianya dokumen Sejarah dan Kepurbakalaan Raja Ampat	Belum ada dokumen	1 Paket	500	-	-	-	-	-	-	1 Paket	500	2 paket	1.000	DISBUDPAR
		2	Tersedianya Dokumen Sejarah Suku Asli Raja Ampat	Belum ada dokumen	-	-	1 Paket	1.000	-	-	-	-	1 Paket	1.000	2 paket	2.000	DISBUDPAR
		3	Tersedianya Dokumen Situs Sejarah Bawah Air	Belum ada dokumen	1 Paket	300	-	-	-	-	1 Paket	300	-	-	2 paket	600	DISBUDPAR
		4	Tersedianya Dokumen Inventarisasi Aspek0Aspek Seni dan Budaya	Belum ada dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Paket	200	1 Paket	200	2 paket	400	DISBUDPAR
02.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1	Terlaksananya festival Seni dan Budaya Raja Ampat	1 kali	1 paket	2.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	5.000	5 paket	16.000	DISBUDPAR
		2	Partisipasi dalam festival budaya Papua	-	1 paket	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	200	DISBUDPAR
		3	Terlaksananya rehabilitasi Situs Sejarah dan Budaya	-	1 paket	200	3 Paket	750	3 Paket	750	3 Paket	750	3 Paket	750	13 paket	3.200	DISBUDPAR
		4	Terlaksananya Lomba 1000 Kata Bahasa Asli Suku Raja Ampat	-	-	-	1 kali	150	1 kali	150	1 kali	150	1 kali	150	4 kali	600	DISBUDPAR
		5	Terlaksananya Lomba Sastra Suku Asli Raja Ampat	-	-	-	1 kali	100	1 kali	100	1 kali	100	1 kali	100	4 kali	400	DISBUDPAR
		6	Terkelolanya Situs Sejarah dan Kepurbakalaan Raja Ampat	-	-	-	1 Paket	150	1 Paket	150	1 Paket	150	1 Paket	150	4 paket	600	DISBUDPAR

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		7	Tersusunya Muatan Lokal Pendidikan Sejarah dan Budaya Raja Ampat	-	-	-	1 Paket	200	1 Paket	200	1 Paket	200	1 Paket	200	4 paket	800	DISBUDPAR
		8	Terlaksananya Lomba Karya Tulis Sejarah Raja Ampat	-	-	-	1 kali	100	1 kali	100	1 kali	100	1 kali	100	4 kali	400	DISBUDPAR
		9	Terbinanya Kelompok Seni dan Tari Masyarakat Kampung Wisata	Belum ada	1 paket	100	1 Paket	200	1 Paket	200	1 Paket	200	1 Paket	200	5 paket	900	DISBUDPAR
				JUMLAH		3.300	-	5.650	-	4.650	-	5.150	-	8.350	Jumlah	27.100	

8.1.24. Statistik

Tabel 8.24. Indikasi Rencana Program Prioritas Statisti Kabubapten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program Statistik	1	Tersedianya data dan statistik daerah (Data base)	1 Dokumen	1 Dokumen	500	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	600	3 Dokumen	1.100	BAPPEDA
		2	Tersedianya dokumen PDRB	5 Dokumen	1 Dokumen	300	1 Dokumen	400	1 Dokumen	500	1 Dokumen	600	1 Dokumen	700	10 Dokumen	2.500	BAPPEDA
		3	Tersedianya dokumen Raja Ampat Dalam Angka (RADA)	5 Dokumen	1 Dokumen	300	1 Dokumen	400	1 Dokumen	500	1 Dokumen	600	1 Dokumen	700	10 Dokumen	2.500	BAPPEDA
		4	Tersedianya dokumen IPM	5 Dokumen	-	-	1 Dokumen	400	1 Dokumen	500	1 Dokumen	500	1 Dokumen	600	10 Dokumen	2.000	BAPPEDA
				JUMLAH		1.100	-	1.200	-	1.500	-	1.700	-	2.600	Jumlah	8.100	

8.1.25. Kearsipan dan Perpustakaan

Tabel 8.25. Indikasi Rencana Program Prioritas Kearsipan dan Perpustakaan Kabubapten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program pening-katan sarana dan prasarana aparatur	1	Tersedianya Perlengkapan Peralatan Dokumentasi KPAD	-	1 paket	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	100	KPAD
		2	Tersedianya Perlengkapan Peralatan Dokumentasi Motor Pintar KPAD	-	1 paket	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	200	KPAD
		3	Terbangunnya gedung perpustakaan	Terbangunya gedung perpustakaan	1 unit	800	1 unit	800	1 unit	800	1 unit	800	1 unit	800	5 unit	4.000	KPAD
		4	Tersedianya meubelair yang memadai	Tersedianya meubelair berupa mejabaca, lemari katalog, lemari buku,rak buku	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	5 paket	1.000	KPAD
		5	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Meubelair	-	1 paket	400	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	400	KPAD
		6	Jumlah meibelair Taman Baca Alif Korere yang direhabilitasi	-	1 paket	400	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	400	KPAD
02.	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	1	Jumlah penambahan buku baru perpustakaan	-	1 paket	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	200	KPAD
		2	Jumlah kegiatan sosialisasi UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	-	-	-	1 paket	400	-	-	-	-	-	-	1 paket	400	KPAD

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		3	Jumlah buku koleksi pustaka tahap I (buku pelajar dan umum)	Tersedianya koleksi pustaka tahapI (buku pelajardan umum)	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	250	1 paket	300	1 paket	300	5 paket	1.350	KPAD
		4	Jumlah buku koleksi pustaka tahap II (koleksi baru)	Tersedianya koleksi pustaka tahapII (koleksi terbitan baru)	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	5 paket	2.500	KPAD
				JUMLAH		3.050	-	2.150	-	1.750	-	1.800	-	1.800	Jumlah	10.550	

8.2. Urusan Pilihan

8.2.1. Kelautan dan Prikanan

Tabel 8.27. Indikasi Rencana Program Prioritas Kelautan dan Perikanan Kabubapten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	1	Adanya data Base Perikanan dan Kelautan	-	1 paket	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	200	DKP
		2	Terkendalinya penangkapan dan pengembangan budi daya ikan	-	1 paket	7.594	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	7.594	DKP
		3	tersedianya Lokasi Pengembangan Budidaya Air Tawar dan Laut	-	-	-	1 Ha	50	1 Ha	50	-	-	1 Ha	50	3 Ha	150	DKP
		4	tersedianya Pabrik Es	-	-	-	1 Unit	550	1 Unit	600	1 Unit	700	1 Unit	750	4 unit	2.600	DKP
		5	Tersedianya Freezer	-	-	-	6 Unit	55	7 Unit	60	8 Unit	65	9 Unit	70	30 unit	250	DKP
		6	Tersedianya Peralatan Pasca Panen	-	-	-	1 Paket	400	1 Paket	450	1 Paket	500	1 Paket	500	4 paket	1.850	DKP
		7	Tersedianya Bangsal Pengolahan	-	-	-	1 Unit	200	1 Unit	225	1 Unit	230	-	-	3 unit	655	DKP
		8	Tersedianya alat & sarana pengolahan ikan	-	-	-	1 Paket	25	-	-	-	-	-	-	1 Paket	25	DKP
		9	Tersedianya solar cell (Penerangan energi surya)	-	-	-	90 Unit	1.890	-	-	-	-	-	-	90 Unit	1.890	DKP
		10	Terbangunnya Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN)	-	-	-	1 Unit	500	1 Unit	600	1 Unit	700	1 Unit	800	4 unit	2.600	DKP
		11	Terbangunnya Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	-	-	-	1 Unit	500	-	-	-	-	1 Unit	2.000	2 unit	2.500	DKP

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		12	Terselenggaranya studi banding Staf DKP	-	-	-	1 paket	150	-	-	-	-	-	-	1 paket	150	DKP
		13	Terselenggaranya studi banding oleh masyarakat	-	-	-	-	-	1 paket	100	-	-	-	-	1 paket	100	DKP
		14	Terselenggaranya Pelatihan/ Pendampingan Budidaya Air Tawar dan Laut	-	-	-	1 paket	20	1 paket	20	1 paket	20	1 paket	20	4 paket	80	DKP
		15	Terselenggaranya Pelatihan Wirausaha dibidang budidaya	-	-	-	1 paket	25	1 paket	25	1 paket	25	1 paket	25	4 paket	100	DKP
		16	Tersedianya lahan pengembangan budidaya air tawar	-	1 paket	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	100	DKP
		17	Terselenggaranya penyuluhan & pelatihan teknis budidaya yang ramah lingkungan	-	-	-	1 Paket	30	1 Paket	30	1 Paket	30	-	-	3 paket	90	DKP
		18	Tersedianya sarana budidaya Ikan Kerapu dengan KJA	-	-	-	15 Unit	630	20 Unit	840	30 Unit	1.260	35 Unit	1.470	100 unit	4.200	DKP
		19	Tersedianya fasilitas Hatchery Ikan Kerapu	-	-	-	1 Unit	1.500	1 Unit	1.500	1 Unit	1.500	-	-	3 unit	4.500	DKP
02.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	1	Terbangunnya Pos Pengawasan	-	-	-	1 Unit	100	1 Unit	100	-	-	-	-	2 unit	200	DKP
		2	Tersedianya alat komunikasi pengawasan	-	-	-	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	50	4 paket	200	DKP
		3	Tersedianya motor tempel 40 PK untuk kelompok pengawas	-	-	-	1 Unit	36	1 Unit	36	-	-	-	-	2 Unit	72	DKP
		4	Tersedianya biaya operasional pengawasan bagi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	-	-	-	1 paket	15	1 paket	15	1 paket	15	1 paket	15	3 paket	60	DKP

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		5	Tersedianya Lahan pengembangan budidaya Laut (Marine Culture)	-	-	-	1 Ha	20	1 Ha	20	1 Ha	20	1 Ha	20	4 Ha	80	DKP
		6	Tersedianya data inventaris & Publikasi Pulau-Pulau Kecil di Kawasan KKLD	-	-	-	2 paket	100	2 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	6 paket	400	DKP
		7	Tersedianya SOP Perizinan di bidang usaha penangkapan dan budidaya laut	-	-	-	1 Paket	20	1 Paket	10	1 Paket	8	1 Paket	5	4 paket	43	DKP
		8	Survei Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kawasan KKLD	-	-	-	3 paket	200	3 paket	200	3 paket	250	3 paket	250	12 paket	900	DKP
		9	Pengembangan Budidaya Rumput Laut	-	-	-	260 Unit	1.950	270 Unit	2.025	270 Unit	2.025	280 Unit	2.100	1.080 unit	8.100	DKP
		10	Pengembangan Budidaya teripang	-	-	-	15 Paket	413	20 Paket	550	25 Paket	688	30 Paket	825	70 paket	2.475	DKP
		11	Pengembangan budidaya lobster	-	-	-	8 Paket	280	10 Paket	350	12 Paket	420	14 Paket	490	34 paket	1.540	DKP
		12	Workshop/Lokakarya untuk bermitra dengan pihak	-	-	-	1 kali	20	-	-	-	-	1 Kali	20	2 kali	40	DKP
03.	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	1	Sosialisasi UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau0Pulau Kecil	-	-	-	1 Paket	25	-	-	-	-	-	-	1 Paket	25	DKP
		2	Sosialisasi UU No.45 Tahun 2009 Perikanan	-	-	-	1 Paket	25	-	-	-	-	-	-	1 Paket	25	DKP
		3	Sosialisasi PP terkait dengan pengelolaan wilayah laut dan darat	-	-	-	-	-	1 Paket	50	1 Paket	50	-	-	2 Paket	100	DKP
		4	Workshop Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	50	1 Paket	50	2 Paket	100	DKP
		5	Workshop Pemahaman Konsep Kabupaten Bahari	-	-	-	1 Paket	100	1 Paket	100	-	-	-	-	2 Paket	200	DKP

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		6	Sosilaisasi Peraturan0Peraturan di Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)	-	-	-	2 paket	100	1 paket	50	1 paket	75	1 paket	100	5 paket	325	DKP
04.	Program pengembangan perikanan tangkap	1	Tersedianya Katinting 5 PK	-	-	-	160 Unit	1.680	190 Unit	1.995	220 Unit	2.310	250 Unit	2.625	630 unit	8.610	DKP
		2	Tersedianya Motor tempel 15 PK	-	-	-	60 Unit	1.560	70 Unit	1.820	80 Unit	2.080	100 Unit	2.600	310 unit	8.060	DKP
		3	Tersedianya Kapal Penampung Hasil Laut	-	-	-	1 Unit	150	1 Unit	200	1 Unit	300	1 Unit	500	4 unit	1.150	DKP
		4	Tersedianya Rumpon	-	-	-	5 Unit	100	5 Unit	100	5 Unit	100	5 Unit	100	20 unit	400	DKP
		5	Tersedianya Cool Box	-	-	-	120 Unit	317	130 Unit	343	140 Unit	370	150 Unit	396	540 unit	1.426	DKP
		6	Tersedianya Sero	-	-	-	10 Unit	586	10 Unit	586	10 Unit	586	10 Unit	586	40 unit	2.343	DKP
		7	Tersedianya Peralatan pancing	-	-	-	260 Paket	156	270 Paket	162	280 Paket	168	300 Paket	180	1.110	666	DKP
		8	Penyuluhan Teknis Penangkapan yang ramah lingkungan	-	-	-	1 Paket	30	1 Paket	30	1 Paket	30	1 Paket	30	4 paket	120	DKP
			JUMLAH		7.894	-	14.557	-	13.392	-	14.723	-	16.727	Jumlah	67.294		

8.2.2. Pertanian

Tabel 8.28. Indikasi Rencana Program Prioritas Pertanian Kabubapten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Perluasan Areal Tanam	1	Terlaksananya Penambahan Areal Palawija & Hortikultura	-	-	-	3 Ha	1.500	5 Ha	2.500	5 Ha	2.500	5 Ha	2.500	18 Ha	9.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
		2	Pengembangan kebun percontohan holtikultura	-	3 Ha	150	6 Ha	300	-	-	-	-	6 Ha	330	15 ha	780	Dinas Pertanian dan Peternakan
		3	Terlaksananya Percetakan Sawah		-	-	15 ha	1.000	15 ha	1.000	10 ha	700	10 ha	750	50 ha	3.450	Dinas Pertanian dan Peternakan
02.	Program peningkatan produksi pertanian dan peternakan	1	Terlaksanakannya Pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi sawah		-	-	5 Ha	300	5 Ha	300	5 Ha	300	5 Ha	300	20 ha	1.200	Dinas Pertanian dan Peternakan
		2	Terlaksanakannya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tan.Pangan dan hortikultura		-	-	1 paket	300	1 paket	350	1 paket	400	1 paket	450	4 paket	1.500	Dinas Pertanian dan Peternakan
		3	Pengadaan bibit padi palawija umbi-umbian dan kacang-kacangan		1 paket	100	1 paket	200	1 paket	220	1 paket	242	1 paket	266	5 paket	1.028	Dinas Pertanian dan Peternakan
		4	Pembuatan rumah kompos		3 unit	150	-	-	3 unit	150	-	-	-	-	6 unit	300	Dinas Pertanian dan Peternakan
		5	Tersedianya Pupuk dan obat2an serta peralatan pertanian		1 paket	150	1 paket	165	1 paket	182	1 paket	200	1 paket	220	5 paket	916	Dinas Pertanian dan Peternakan

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
03.	Peningkatan produktivitas perkebunan	1	Tersedianya Obat-obatan dan pupuk tanaman perkebunan		-	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300		1.200	Dinas Perkebunan
		2	Terlaksananya perluasan areal tanaman pinang		10 ha	100	10 ha	100	10 ha	100	10 ha	100	10 ha	100	50 ha	500	Dinas Perkebunan
		3	Terlaksananya perluasan areal tanaman kelapa		10 ha	200	10 ha	200	10 ha	200	10 ha	200	10 ha	200	50 ha	1.000	Dinas Perkebunan
		4	Terlaksananya perluasan areal tanaman kakao		10 ha	200	10 ha	200	10 ha	200	10 ha	200	10 ha	200	50 ha	1.000	Dinas Perkebunan
		5	Terlaksananya perluasan areal tanaman sagu		-	-	10 ha	200	10 ha	200	10 ha	200	10 ha	200	40 ha	800	Dinas Perkebunan
		6	Terlaksananya peremajaan tanaman kelapa		-	-	10 ha	200	10 ha	200	10 ha	200	10 ha	200	40 ha	800	Dinas Perkebunan
		7	Terlaksananya penyediaan areal tanaman kelapa sawit		-	-	100 ha	400	100 ha	400	100 ha	400	100 ha	400	400ha	1.600	Dinas Perkebunan
		8	Terlaksananya pengembangan kopi		10 ha	200	10 ha	200	10 ha	200	10 ha	500	10 ha	200	50 ha	1.300	Dinas Perkebunan
		9	Terlaksananya pelatihan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman				5 orang	75	-	-	-	-	5 orang	75	10 orang	150	Dinas Perkebunan
		10	Terselenggaranya pengendalian organisme penggaggu tanaman				1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	4 paket	1.200	Dinas Perkebunan
04.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1	Terlaksananya Pelatihan Manajerial Poktan & Gapoktan		-	-	20 Kelpk	200	25 Kelpk	200	25 Kelpk	200	25 Kelpk	300	95 kelompok	900	Dinas Pertanian dan Peternakan
		2	Terlaksanakannya Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku agribisnis		-	-	1 paket	75	1 paket	100	1 paket	125	1 paket	150	4 paket	450	Dinas Pertanian dan Peternakan

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		3	Pelatihan pembuatan pupuk organik		1 paket	150	-	-	-	-	1 paket	200	-	-	2 paket	350	Dinas Pertanian dan Peternakan
		4	Meningkatnya Sumber Daya Manusia dalam Bidang Mutu Bibit Ternak		-	-	1 paket	100	-	-	1 paket	150	-	-	2 paket	250	Dinas Pertanian dan Peternakan
		5	Terlaksanakannya Pekan Daerah Kontak Tani & Nelayan (PEDA) II		-	-	-	-	-	-	1 paket	400	-	-	1 paket	400	Dinas Pertanian dan Peternakan
		6	Terlaksanakannya Pekan Nasional Kontak Tani & Nelayan (PENAS)		1 paket	250	1 paket	275	1 paket	303	1 paket	333	1 paket	366	5 paket	1.526	Dinas Pertanian dan Peternakan
		7	Meningkatnya Sumberdaya Masyarakat Petani dan Peternak		-	-	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	-	-	3 paket	300	Dinas Pertanian dan Peternakan
		8	Terlaksanakannya Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan		-	-	1 paket	3.000	-	-	-	-	-	-	1 paket	3.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
		9	Terlaksanakannya Pelatihan Penangkaran Benih		-	-	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	4 paket	400	Dinas Pertanian dan Peternakan
		10	Terlaksanakannya Pelatihan Mekanisasi ALSINTAN		-	-	1 paket	50	-	-	1 paket	50	-	-	2 paket	100	Dinas Pertanian dan Peternakan
		11	Terlaksanakannya Pelatihan pembuatan pupuk bokasi		-	-	25 org	100	25 org	125	25 org	150	-	-	75 orang	375	Dinas Pertanian dan Peternakan
		12	Terlaksananya magang petani kelapa		-	-	-	-	10 orang	200	10 orang	200	-	-	30 orang	400	Dinas Perkebunan
		13	Tersedianya magang petani kakao		-	-	10 orang	150	-	-	10 orang	150	-	-	20 orang	300	Dinas Perkebunan

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		14	Terlaksananya magang petani kopi		-	-	10 orang	150	-	-	10 orang	150	-	-	20 orang	300	Dinas Perkebunan
05.	Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	1	Terlaksanakannya Pembukaan lahan Kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT)		-	-	10 Ha	250	15 Ha	350	15 Ha	350	15 Ha	350	55 ha	1.300	Dinas Pertanian dan Peternakan
		2	Pelayanan kesehatan hewan dan penanggulangan gangguan penyakit menular		1 paket	250	1 paket	275	1 paket	303	1 paket	333	1 paket	366	5 paket	1.526	Dinas Pertanian dan Peternakan
		3	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Kesehatan Hewan dan Peternak		-	-	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	1 paket	150	4 paket	600	Dinas Pertanian dan Peternakan
06.	Program Pengembangan Agribisnis	1	Pengembangan agribisnis pertenakan		-	-	1 paket	500	-	-	1 paket	500	-	-	2 paket	1.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
		2	Pengembangan jaringan pemasaran		-	-	-	-	1 paket	200	-	-	1 paket	200	2 paket	400	Dinas Pertanian dan Peternakan
		3	Kelembagaan dan pemasaran hasil produksi perkebunan		-	-	2 klta	40	2 klta	40	2 klta	40	2 klta	40	10 klta	160	Dinas Perkebunan
		4	Terlaksananya Promosi hasil perkebunan unggulan daerah		-	-	-	-	1 paket	250	-	-	-	-	1 paket	250	Dinas Perkebunan
		5	Terlaksananya pekan nasional kontak tani dan nelayan andalan		-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	450	1 paket	450	Dinas Perkebunan
		6	Terlaksananya kegiatan tataniaga hasil perkebunan		-	-	1 paket	200	-	-	1 paket	200	-	-	2 Paket	400	Dinas Perkebunan
		7	Terbangunnya pusat pembbitan dan pelatihan agribisnis perkebunan				1 paket	2.500	-	-	-	-	-	-	1 paket	2.500	Dinas Perkebunan

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		8	Studi banding manajemen pengelolaan sistem perkebunan terpadu		-	-	-	-	-	-	1 paket	500	-	-	1 paket	500	Dinas Perkebunan
07.	Peningkatan sarana dan prasarana	1	Pembangunan sarana-prasarana pertanian		1 paket	3.538	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	5 paket	7.538	Dinas Pertanian dan Peternakan
		2	Pembangunan sarana-prasarana pekebunan		1 paket	1.000	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	500	5 paket	3.000	Dinas Perkebunan
		3	Terlaksanakannya Pembanguna Rumah Potong Hewan (RPH)		1 paket	200	1 paket	250	1 paket	300	-	-	-	-	3 paket	750	Dinas Pertanian dan Peternakan
		4	Pos kesehatan hewan		1 paket	359	-	-	-	-	-	-	1 paket	400	2 paket	759	Dinas Pertanian dan Peternakan
		5	Terlaksanakannya Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP)		-	-	-	-	1 unit	850	-	-	1 unit	1.000	2 unit	1.850	Dinas Pertanian dan Peternakan
		6	Tersedianya Bibit ternak unggul dan obat-obatan		-	-	1 paket	250	1 paket	350	1 paket	400	1 paket	450	4 paket	1.450	Dinas Pertanian dan Peternakan
		7	Terlaksanakannya Pembangunan lantai jemur		-	-	2 unit	150	2 unit	150	3 unit	200	-	-	7 unit	500	Dinas Pertanian dan Peternakan
		8	Tersedianya alat perontok, penggiling dan pengering padi		-	-	1 paket	200	1 paket	250	1 paket	300	-	-	3 paket	750	Dinas Pertanian dan Peternakan
		9	Terlaksanakannya Pembangunan laboratorium & pengembangan kultur jaringan		-	-	1 unit	1.000	-	-	-	-	-	-	1 unit	1.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
		10	Tersedianya kantor Dinas Perkebunan		-	-	1 unit	2.000	-	-	-	-	-	-	1 unit	2.000	Dinas Perkebunan

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		11	Tersedianya lab HPT		-	-	1 unit	1.000	-	-	-	-	-	-	1 unit	1.000	Dinas Perkebunan
		12	Terlaksananya pembangunan pusat pengolahan hasil kelapa (VCO)		-	-	1 unit	750	-	-	-	-	-	-	1 unit	750	Dinas Perkebunan
		13	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna perkebunan		5 paket	500	5 paket	500	5 paket	500	5 paket	500	5 paket	500	25 paket	2.500	Dinas Perkebunan
09.	Program penataan pengelolaan hasil perkebunan		Tersusunnya rancangan perda retribusi hasil perkebunan		-	-	-	-	1 paket	150	-	-	-	-	1 perda	150	Dinas Perkebunan
			Terselenggarakannya sosialisasi perda retribusi hasil perkebunan		-	-	-	-	-	-	1 paket	300	-	-	1 paket	300	Dinas Perkebunan
			Tersedianya data base perkebunan		1 dokumen	1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	1.300	Dinas Perkebunan
				JUMLAH		**8.797**	-	**21.755**	-	**13.272**	-	**14.322**	-	**13.313**	**Jumlah**	**71.459**	

8.2.3. Kehutanan

Tabel 8.29. Indikasi Rencana Program Prioritas Kehutanan Kabubapten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program Peningkatan dan Efektifitas Pemanfaatan Hutan Produksi	1	Tercapaianya Pengelolaan Hutan Dan Sosialisai Multi Fungsi Hutan.		1 kali	50	-	-	1 kali	75	-	-	1 kali	100	3 kali	225	DISHUT
		2	Terlaksanakannya Sosialisasi Pemanfaatan hasil hutan non kayu		-	-	1 paket	150	-	-	1 paket	200	-	-	2 unit	350	DISHUT
		3	Meningkatnya Pengelolaan Hutan.		-	-	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	4 paket	400	DISHUT
		4	Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam		1 obyek	200	-	-	1 obyek	200	-	-	-	-	2 obyek	400	DISHUT
		5	Terlaksananya Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan		-	-	3 klpk	200	3 klpk	200	3 klpk	200	3 klpk	200	12 klpk	800	DISHUT
		6	adanya model pengembangan ekowisata di hutan lindung dan konservasi		1 dok	255	-	-	-	-	-	-	-	-	1dok	255	DISHUT
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1	Tersedianya speedboat		-	-	1 unit	750	-	-	-	-	-	-	1 unit	750	DISHUT
		2	Tersedianya kendaraan roda 2		-	-	2 unit	60	2 unit	63	2 unit	66	-	-	6 unit	189	DISHUT
		3	Tersedianya Kendaraan Roda 4		-	-	1 unit	450	-	-	-	-	-	-	1 unit	450	DISHUT
03.	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	1	Terselenggaranya rekrutment tenaga Polhut		30 orang	350	-	-	30 orang	350	-	-	-	-	60 orang	700	DISHUT
		2	Tersusunnya Master Plan Reboisasi dan inventarisasi Rehabilitasi Lahan kritis		-	-	1 paket	450	-	-	-	-	-	-	1 paket	450	DISHUT

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		3	Terlaksanakannya Patroli pengamanan		1 paket	100	1 kali	110	1 kali	121	1 kali	133	1 kali	146	5 kali	611	DISHUT
		4	Terlaksananya Sosialisasi Manfaat dan Kegunaan Hutan		1 kali	50	1 kali	55	1 kali	61	1 kali	67	1 kali	73	5 kali	305	DISHUT
		5	tersedianya data jenis dan populasi satwa endemik		1 kali	150	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	150	DISHUT
		6	Meningkatnya Tertib peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan		-	-	1 paket	20	1 paket	20	1 paket	20	1 paket	20	4 paket	80	DISHUT
		7	Tersusunnya PERDA pengelolaan hasil hutan		1 dokumen	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	30	DISHUT
		8	Terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi		1 paket	200	-	-	1 paket	250	-	-	-	-	2 paket	450	DISHUT
		9	Pelestarian hutan lindung		1 paket	1.386	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	5 paket	2.186	DISHUT
		10	Kajian teknis perubahan fungsi kawasan hutan lindung		1 paket	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	300	DISHUT
		11	Inventarisasi sumber daya hutan		1 paket	250	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	250	DISHUT
04.	Program Reboisasi dan Rehabilitasi Kawasan Hutan /Hutan	1	Terlaksananya Reboisasi/Rehabilitasi lahan Kritis pada kawasan hutan dan Luar Kawasan Hutan		-	-	272,6 Ha	5.000	-	-	272,6 Ha	5.000	-	-	545,2 Ha	10.000	DISHUT
		2	Tersedianya Hutan Tanaman Rakyat		-	-	50 Ha	500	50 Ha	500	-	-	-	-	100 Ha	1.000	DISHUT
		3	Tersedianya Green house (persemaian)		1 unit	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	200	DISHUT
05.	Program Pengembangan Kelembagaan,SDM san IPTEK kehutanan	1	Meningkatnya Profesionalisme SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan		4 kali	120	4 kali	120	4 kali	120	4 kali	120	4 kali	120	20 kali	600	DISHUT
				JUMLAH		3.641	-	8.165	-	2.260	-	6.106	-	960	Jumlah	21.131	

8.2.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Tabel 8.30. Indikasi Rencana Program Prioritas Energi dan Daya Mineral Kabubapten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	1	Tersedianya pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)		-	-	5 unit	12.500	5 unit	12.500	5 unit	12.500	5 unit	12.500	20 unit	50.000	DISTAMBEN
		2	Penambahan panjang jaringan listrik yang tersedia		7 km	5.000	7 km	5.500	7 km	6.050	7 km	6.655	7 km	7.321	35 km	30.526	DISTAMBEN
		3	Tersedianya Mesin PLTD	5 unit	1 unit	2.500	5 unit	13.750	5 unit	15.125	5 unit	16.638	5 unit	18.301	30 unit	66.314	DISTAMBEN
		4	Tersedianya anggaran operasional PLTD	-	1 paket	2.000	1 paket	6.000	1 paket	6.600	1 paket	7.260	1 paket	7.986	5 paket	29.846	DISTAMBEN
		5	Terpeliharanya Mesin PLTD	-	1 paket	1.500	1 paket	1.650	1 paket	1.815	1 paket	1.997	1 paket	2.196	5 paket	9.158	DISTAMBEN
		6	Tersedianya tangki penyimpanan BBM bahan minyak	-	1 paket	1.400	1 paket	1.540	1 paket	1.694	1 paket	1.863	1 paket	2.050	5 paket	8.547	DISTAMBEN
		7	Terpeliharanya Jaringan Listrik		1 paket	100	1 Paket	120	1 Paket	130	1 Paket	150	1 Paket	200	5 paket	700	ISTAMBEN
		8	Jumlah perbaikan instalasi listrik di dinas otonom		1 paket	300	-	-	1 paket	300	-	-	1 paket	300	3 paket	900	ISTAMBEN
		9	Tersedianya perangkat Kwh elektronik Digital Prabayar		-	-	650 Buah	1.300	300 Buah	600	-	-	150 Buah	300	1.200 buah	2.200	DISTAMBEN
		10	Pengadaan peralatan listrik		1 paket	300	1 paket	1.000	1 paket	1.100	1 paket	1.210	1 paket	1.331	1.200 buah	4.941	DISTAMBEN
		11	Tersedianya PLTS (Surya)		-	-	100 unit	1.000	100 unit	1.100	100 unit	1.210	100 unit	1.331	400 unit	4.641	DISTAMBEN
		12	Tersedianya PLTMH (mikro hidro)		-	-	-	-	2 Unit	1.000	-	-	2 Unit	1.000	4 unit	2.000	DISTAMBEN

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		13	Jumlah aktivitas penyuluhan masyarakat tentang perawatan PLTS		-	-	1 Paket	100	1 Paket	100	1 Paket	100	1 Paket	100	4 paket	400	DISTAMBEN
02.	Program pembinaan dan pengawasan Bidang Pertambangan	1	Jumlah aktivitas monitoring dan Evaluasi kegiatan pertambangan		-	-	1 Paket	100	1 Paket	110	1 Paket	121	1 Paket	133	4 paket	464	DISTAMBEN
		2	Tersedianya dokumen laporan hasil survey Pemetaan Potensi bahan galian Tambang golongan C		-	-	-	-	1 Paket	100	-	-	-	-	1 paket	100	DISTAMBEN
		3	Tersedianya dokumen laporan hasil survey pemetaan Wilayah Geologi dan usaha Pertambangan		-	-	-	-	1 Paket	1.000	-	-	-	-	1 paket	1.000	DISTAMBEN
		4	Tersedianya rancangan revisi perda perizinan pertambangan		-	-	-	-	-	-	1 Paket	100	-	-	1 paket	100	DISTAMBEN
		5	Tersedianya SOP pelayanan PLTD		-	-	-	-	1 paket	50	-	-	-	-	1 paket	50	DISTAMBEN
04.	Program Peningkatan sarana dan prasarana	1	Terbangunnya kantor dinas pertambangan dan energi		-	-	-	-	1 unit	3.000	-	-	-	-	1 unit	3.000	DISTAMBEN
		2	Tersedianya speed boat		-	-	-	-	-	-	1 unit	1.500	-	-	1 unit	1.500	DISTAMBEN
		3	Tersedianya alat-alat elektronik dan olah data		-	-	1 paket	100	-	-	-	-	1 paket	100	2 paket	200	DISTAMBEN
		4	Tersedianya gedung laboratorium		-	-	-	-	1 paket	100	-	-	-	-	1 paket	100	DISTAMBEN
		5	Tersedianya lahan bagi areal PLTD waisai		-	-	1 paket	1.000	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.000	DISTAMBEN
05.	Monitoring Evaluasi dan pengawasan BBM bersubsidi	1	cakupan wilayah monitoring ke distrik				1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	4 paket	800	DISTAMBEN

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
06.	Penguatan Kapasitas Aparatur	1	Adanya pelatihan pembangkit listrik tenaga Sampah (PLTsa)		-	-	-	-	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	3 paket	300	DISTAMBEN
		2	Adanya pelatihan teknologi biogas ramah lingkungan		-	-	-	-	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	3 paket	300	DISTAMBEN
07.	Program Penyediaan alat-alat Pertambangan dan alat-alat Laboratorium	1	Tersedianya Jaw crusher laboratory		-	-	1 paket	200	-	-	-	-	-	-	1 paket	200	DISTAMBEN
		2	Jaw crusher		-	-	-	-	1 paket	150	-	-	-	-	1 paket	150	DISTAMBEN
		3	Tersedianya Palu geologi		-	-	1 paket	25	-	-	-	-	-	-	1 paket	25	DISTAMBEN
		4	Tersedianya Laup magnifiers (10x,14x,26x)		-	-	1 paket	80	-	-	-	-	-	-	1 paket	80	DISTAMBEN
		5	Tersedianya Loup magnifirs,4x,10x)		-	-	1 paket	80	-	-	-	-	-	-	1 paket	80	DISTAMBEN
		6	Tersedianya Vibration meter seismic accelerometer		-	-	-	-	1 paket	30	-	-	-	-	1 paket	30	DISTAMBEN
		7	Tersedianya Theodilit seokkia DT 210/DT 510/DT 610		-	-	-	-	1 paket	125	-	-	-	-	1 paket	125	DISTAMBEN
		8	Tersedianya GPS		-	-	2 unit	22	-	-	-	-	-	-	2 unit	22	DISTAMBEN
		9	Tersedianya Kompas Brunton		-	-	3 unit	500	-	-	-	-	-	-	3 unit	500	DISTAMBEN
		10	Tersedianya Barometer		-	-	2 unit	100	-	-	-	-	-	-	2 unit	100	DISTAMBEN
				JUMLAH		13.100	-	46.867	-	53.179	-	51.703	-	55.549	Jumlah		

8.2.5. Pariwisata

Tabel 8.31. Indikasi Rencana Program Prioritas Pariwisata Kabubapten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	Terselenggaranya Expo Wisata Luar Negeri	-	1 paket	300	2 Paket	1.000	2 Paket	1.000	2 Paket	1.000	2 Paket	1.000	9 paket	4.300	DISBUDPAR
		2	Terselenggaranya Expo Wisata dalam Negeri	-	5 paket	500	7 Paket	1.000	7 Paket	1.000	7 Paket	1.000	7 Paket	1.000	32 paket	4.500	DISBUDPAR
		3	Adanya Materi Promosi Wisata	-	1 paket	300	1 Paket	300	1 Paket	300	1 Paket	300	1 Paket	300	5 paket	1.500	DISBUDPAR
		4	Terlaksananya Promosi Wisata dan Budaya di Media	-	8 kali	1.000	8 kali	1.000	8 kali	1.000	8 kali	1.000	8 kali	1.000	40 paket	5.000	DISBUDPAR
		5	Terselenggaranya Lomba Foto Bawah Laut	-	-	-	1 kali	300	1 kali	300	1 kali	300	1 kali	300	4 kali	1.200	DISBUDPAR
		6	Dukungan sail Indonesia	-	1 paket	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	300	DISBUDPAR
		7	Direct promotion	-	1 paket	500	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	DISBUDPAR
		8	Adanya Icon Wisata Raja Ampat	-	-	-	1 Paket	500	-	-	-	-	-	-	1 Paket	500	DISBUDPAR
		9	Adanya Film Raja Ampat	-	-	-	1 kali	3.000	-	-	-	-	1 kali	5.000	2 paket	8.000	DISBUDPAR
		10	Terlaksananya Iklan TV Raja Ampat	-	1 kali	300	1 kali	500	1 kali	500	1 kali	500	1 kali	500	5 paket	2.300	DISBUDPAR
		11	Dukungan Pembuatan Film Koh Lantah	-	1 kali	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	100	DISBUDPAR
		12	Terelaksananya Promosi Wisata dan Budaya di Internet	Sudah tersedia jaringan internet	-	-	1 Kali	100	1 Kali	100	1 Kali	100	1 Kali	100	4 Kali	400	DISBUDPAR
		13	Adanya biaya operasional Kantor Pusat Informasi Raja Ampat	-	1 paket	500	1 Paket	700	1 Paket	700	1 Paket	700	1 Paket	700	5 paket	3.300	DISBUDPAR
		14	Adanya Pin Masuk Kawasan Wisata	-	600 pin	150	5.000 Pin	200	10.000 Pin	250	10.000 Pin	250	10.000 Pin	300	35.600 pin wisata	1.150	DISBUDPAR

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		15	Terbangunya Sistem Informasi Pariwisata	-	1 paket	100	-	-	-	-	-	-	1 Paket	500	2 paket	600	DISBUDPAR
		16	Adanya langganan Jasa Layanan Internet	Jaringan sudah tersedia	-	-	1 Paket	200	1 Paket	200	1 Paket	200	1 Paket	200	4 paket	800	DISBUDPAR
02.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1	Pengembangan Cottage	-	1 paket	2.000	1 Paket	2.000	1 Paket	2.000	1 Paket	2.000	1 Paket	2.000	5 paket	10.000	DISBUDPAR
		2	Terbangunya System Air Bersih (lanjutan)	-	1 paket	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	100	DISBUDPAR
		3	Berkembangnya Kampung Wisata	5 kampung	5 kampung	1.000	5 kampung	1.000	5 kampung	1.000	5 kampung	1.000	5 kampung	1.000	30 kampung	5.000	DISBUDPAR
		4	Terbangunya Home Stay di Kampung Wisata	50 home stay	-	-	2 Paket	900	2 Paket	900	2 Paket	900	2 Paket	900	....Home stay	3.600	DISBUDPAR
		5	Tersusunya Profil Objek Wisata	-	1 paket	100	-	-	-	-	1 Paket	200	-	-	2 paket	300	DISBUDPAR
		6	Adanya dokumen perencanaan GEOPARK	-	1 paket	250	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	250	DISBUDPAR
		7	Terlaksananya Studi Banding Kawasan Wisata Geopark	-	1 paket	300	-	-	-	-	1 Paket	500	-	-	2 paket	800	DISBUDPAR
		8	Adanya rancangan Peraturan Daerah Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Belum ada	-	-	1 paket	200	-	-	-	-	-	-	1 paket	200	DISBUDPAR
		9	Adanya Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata	Belum ada	-	-	1 dokumen	850	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	850	DISBUDPAR
		10	Terbangunnya Pengembangan Wisma Wisata	-	1 paket	500	1 Paket	1.000	1 Paket	1.000	-	-	-	-	3 paket	2.500	DISBUDPAR
		11	Terbangunya Resort Wisata	-	-	-	1 Paket	5.000	1 Paket	5.000	1 Paket	5.000	1 Paket	5.000	4 paket	20.000	DISBUDPAR
		12	Terbangunya Gapura Wisata	Belum ada	-	-	1 Paket	1.000	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.000	DISBUDPAR
		13	Terbangunya Museum Raja Ampat	Belum ada	-	-	-	-	1 Paket	1.500	-	-	-	-	1 paket	1.500	DISBUDPAR
		14	Adanya Kendaraan Operasional Wisata	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	450	-	-	1 paket	450	DISBUDPAR
		15	Terbangunya Dive Center	Belum ada	-	-	1 Paket	750	-	-	1 paket	750	-	-	2 Diving Center	1.500	DISBUDPAR

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		16	Adanya diving boat	-	1 paket	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	200	DISBUDPAR
		17	Terbangunya Mooring Buoy	-	-	-	1 paket	400	-	-	1 paket	400	-	-	2 paket	800	DISBUDPAR
		18	Terbangunya Restoran Wisata	-	-	-	-	-	1 Paket	750	-	-	-	-	1 paket	750	DISBUDPAR
		19	Terbangunya Fasilitas Outbond	-	-	-	-	-	1 Paket	500	1 Paket	500	-	-	1 paket	1.000	DISBUDPAR
		20	Terbangunya Monumen Injil Masuk Raja Ampat	-	-	-	1 Paket	3.000	-	-	-	-	-	-	1 paket	3.000	DISBUDPAR
		21	Adanya Speedboat Sport Fishing	Belum ada	-	-	-	-	1 Paket	1.200	-	-	-	-	1 paket	1.200	DISBUDPAR
		22	Berkembangya Objek Wisata Saonek Monde	-	-	-	1 Paket	1.000	1 Paket	1.000	1 Paket	1.000	1 Paket	1.000	4 paket	4.000	DISBUDPAR
		23	Terkelolanya Objek Wisata Pantai Waisai	-	-	-	1 Paket	500	1 Paket	500	1 Paket	500	1 Paket	500	4 paket	2.000	DISBUDPAR
		24	Berkembangnya Objek Wisata Kepulauan Wayag	Belum optimal	-	-	-	-	2 Paket	3.000	-	-	-	-	2 paket	3.000	DISBUDPAR
		25	Berkembangnya Objek Wisata Air Terjun Wailebet	Belum optimal	-	-	1 Paket	500	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	DISBUDPAR
		26	Berkrmbangnya Objek Wisata Saporkren	Belum Optimal	-	-	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	4 paket	4.000	DISBUDPAR
		27	Adanya Perahu Catamaran	-	-	-	1 Unit	500	-	-	1 Unit	500	-	-	2 unit	1.000	DISBUDPAR
		28	Terbangunya Kayaking Tourpath Kabui	Belum ada	-	-	1 Paket	500	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	DISBUDPAR
		29	Berkembangnya Destinasi Wisata Misool Selatan	Belum optimal	-	-	1 Paket	1.000	1 Paket	1.000	1 Paket	1.000	1 Paket	3.000	4 paket	6.000	DISBUDPAR
		30	Terbangunya Trekking Wisata Hutan	Belum ada	-	-	1 Paket	500	1 Paket	500	1 Paket	500	1 Paket	500	4 paket	2.000	DISBUDPAR
03.	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1	Terselenggaranya Pelatihan Teknis Kepariwisataan	-	2 paket	250	3 Paket	300	3 Paket	300	3 Paket	300	3 Paket	300	14 paket	1.450	DISBUDPAR
		2	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Objek dan Jasa Wisata	-	-	-	1 Paket	50	1 Paket	50	1 Paket	50	1 Paket	50	4 dokumen	200	DISBUDPAR
		3	Pelatihan Bahasa Inggris bagi Aparatur	30% PNS	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	1 paket	1.500	100% PNS	7.500	DISBUDPAR

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		4	Terselenggaranya Koordinasi Pengembangan Segitiga Wilayah Pariwisata	1 kali	-	-	2 kali	100	2 kali	100	2 kali	100	2 kali	100	9 kali	400	DISBUDPAR
		5	Terselenggaranya Temu Usaha Kepariwisataan	Belum ada	-	-	1 kali	500	-	-	1 kali	500	-	-	2 kali	1.000	DISBUDPAR
		6	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata	1 kali	-	-	5 Kelompok	300	5 Kelompok	300	5 Kelompok	300	5 Kelompok	300	20 kelompok	1.200	DISBUDPAR
		7	Dokumen Pembentukan Kelompok Pemandu Wisata	Belum ada	-	-	3 kelompok	100	3 Kelompok	100	-	-	-	-	6 kelompok	200	DISBUDPAR
		8	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Operator Peralatan Pariwisata	Belum ada	-	-	5 Orang	150	-	-	5 Orang	150	-	-	10 orang terlatih	300	DISBUDPAR
		9	Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Usaha Pariwisata	Belum ada	-	-	10 Orang	300	10 Orang	300	-	-	-	-	20 orang terlatih	600	DISBUDPAR
		10	Terbentuknya Polisi Wisata	Belum ada	-	-	20 Orang	200	-	-	-	-	-	-	20 orang polisi wisata	200	DISBUDPAR
		11	Terselenggaranya pelatihan Pembuatan Cinderamata	-	-	-	5 Orang	250	5 Orang	250	5 Orang	250	5 Orang	250	20 orang terlatih	1.000	DISBUDPAR
		12	Terselenggara0nya Pelatihan Pemandu Wisata	Pemandu Wisata	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	5 paket	1.500	DISBUDPAR
		13	Terlaksananya Magang Pemuda0Pemudi Kampung Wisata	-	1 paket	200	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	5 paket	1.400	DISBUDPAR
		14	Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Museum	Belum ada	-	-	-	-	-	-	1 paket	100	1 paket	100	2 paket	200	DISBUDPAR
				JUMLAH		10.750	-	34.750	-	29.700	-	25.400	-	29.000	Jumlah	129.600	

8.2.6. Industri

Tabel 8.32. Indikasi Rencana Program Prioritas Industri Kabubapten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	1	Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem inovasi teknologi industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	DINAS PERINDAGKOP
		2	Terlaksananya kegiatan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi dan standard mutu Produksi	-	-	-	1 paket	300	-	-	1 paket	300	-	-	2 paket	600	DINAS PERINDAGKOP
		3	Terlaksananya bimbingan teknis tentang standard air mineral dalam kemasan dan air isi ulang	-	-	-	-	-	1 paket	300			-	-	1 paket	300	DINAS PERINDAGKOP
		4	Terlaksananya bimtek Sistem komputerisasi pelayanan satu pintu secara Nasional	-	-	-	-	-	1 paket	400	-	-	1 paket	400	1 paket	800	DINAS PERINDAGKOP
02.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1	Terlaksananya kegiatan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	-	-	-	1 paket	400	-	-	-	-	-	-	1 paket	400	DINAS PERINDAGKOP
		2	Terselenggaranya fasilitasi pendaftaran dan periijinan usaha industri kecil dan menengah	1 paket	1 paket	150	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	950	DINAS PERINDAGKOP

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		3	Terlaksananya kegiatan pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah	-	-	-	1 paket	300	-	-	-	-	1 paket	300	2 paket	600	DINAS PERINDAGKOP
03.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1	Terlaksananya kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri	-	-	-	-	-	1 paket	300	-	-	1 paket	400	1 paket	700	DINAS PERINDAGKOP
		2	Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pelatihan teknologi industri	-	-	-	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	1 paket	1.000	4 paket	4.000	DINAS PERINDAGKOP
		3	Tersedianya Peralatan Pembuatan Paving Block & Bata Merah bagi IKM	-	1 paket	250	1 paket	400	1 paket	500	-	-	-	-	3 paket	1.150	DINAS PERINDAGKOP
		4	Tersedianya alat pengering Ikan tenaga surya untuk pembuatan ikan asin	-	-	-	-	-	1 paket	500	1 paket	500	1 paket	1.000	3 paket	2.000	DINAS PERINDAGKOP
		5	Tersedianya Alat Pembuatan Terasi Udang	-	-	-	1 paket	500	1 paket	1.000	1 paket	1.000	-	-	3 paket	2.500	DINAS PERINDAGKOP
		6	Tersedianya Peralatan Industri Kerajinan dan anyam0anyaman	-	-	-	1 paket	500	-	-	1 paket	500	1 paket	500	3 paket	1.500	DINAS PERINDAGKOP
		7	Terbangunnya Gedung Pelatihan Industri Kecil dan industri menengah	-	-	-	-	-	1 paket	3.500	-	-	-	-	1 paket	3.500	DINAS PERINDAGKOP
04.	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	1	Tersedianya akses transportasi menuju sentra-sentra industri potensial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	500	1 paket	500	DINAS PERINDAGKOP
		2	Tersedianya sarana informasi industri yang dapat diakses masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	300	-	-	1 paket	300	DINAS PERINDAGKOP

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		3	Jumlah subsidi Transportasi dalam pendistribusian BBM	1 paket	1 paket	2.500	1 paket	3.000	1 paket	3.500	1 paket	4.000	1 paket	5.000	6 paket	18.000	DINAS PERINDAGKOP
		4	Tersedianya pangkalan BBM	-	1 paket	1.000	1 paket	1.000	-	-	1 paket	1.000	1 paket	1.000	4 paket	4.000	DINAS PERINDAGKOP
		5	Tersedianya tangki BBM	-	-	-	1 paket	1.000	-	-	1 paket	1.000	-	-	2 paket	2.000	DINAS PERINDAGKOP
		6	Jumlah Mobil Tangki BBM	-	-	-	-	-	1 paket	1.000	-	-	1 paket	1.200	2 paket	2.200	DINAS PERINDAGKOP
		7	Tersedianya data monitoring dan Pendataan IKM	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	300	4 paket	1.200	DINAS PERINDAGKOP
				JUMLAH		3.900	-	8.900	-	12.500	-	10.100	-	12.100	Jumlah	47.500	

8.2.7. Perdagangan

Tabel 8.33. Indikasi Rencana Program Prioritas Perdagangan Kabubapten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	1	Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem inovasi teknologi industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	300	1 paket	300	DINAS PERINDAGKOP
		2	Terlaksananya kegiatan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi dan standard mutu Produksi	-	-	-	1 paket	300	-	-	1 paket	300	-	-	2 paket	600	DINAS PERINDAGKOP
		3	Terlaksananya bimbingan teknis tentang standard air mineral dalam kemasan dan air isi ulang	-	-	-	-	-	1 paket	300			-	-	1 paket	300	DINAS PERINDAGKOP
		4	Terlaksananya bimtek Sistem komputerisasi pelayanan satu pintu secara Nasional	-	-	-	-	-	1 paket	400	-	-	1 paket	400	1 paket	800	DINAS PERINDAGKOP
02.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1	Terlaksananya kegiatan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	-	-	-	1 paket	400	-	-	-	-	-	-	1 paket	400	DINAS PERINDAGKOP
		2	Terselenggaranya fasilitasi pendaftaran dan periijinan usaha industri kecil dan menengah	1 paket	1 paket	150	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	950	DINAS PERINDAGKOP

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
		2	Subsidsi pengangkutan bantuan modal usaha (Pengaadaan Sembako)	1 paket	-	-	1 paket	300	1 paket	300	1 paket	400	1 paket	400	5 paket	1.400	DINAS PERINDAGKOP
		3	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	-	-	-	1 paket	200	1 paket	200	1 paket	300	1 paket	300	4 paket	1.000	DINAS PERINDAGKOP
				JUMLAH		2.261	-	3.900	-	3.400	-	4.700	-	5.900	Jumlah	20.161	

8.2.8. Transmigrasi

Tabel 8.34. Indikasi Rencana Program Prioritas Transmigrasi Kabubapten Raja Ampat

NO	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2011-2015		SKPD-Penanggung Jawab
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
01.	Program pengembangan wilayah transmigrasi	1	Adanya Fasilitas Pertanian & Perikanan Kepada transmigrasi lokal	Belum pernah ada	-	-	1 paket	350	1 paket	350	1 paket	350	1 paket	350	4 paket	1.400	DISNAKER-TRANS
		2	Terbangunya fasilitas sarana air bersih	Belum adanya sarana fasilitas air bersih	-	-	1 paket	875	1 paket	875	1 paket	875	1 paket	875	4 paket	3.500	DISNAKER-TRANS
		3	Adanya lahan untuk transmigrasi lokal	-	-	-	2 hektar	2.500	2 hektar	2.500	2 hektar	2.500	2 hektar	2.500	8 hektar	10.000	DISNAKER-TRANS
		4	Terdistribusikannya Jadup masyarakat transmigrasi	-	-	-	30 orang	150	30 orang	150	30 orang	150	30 orang	150	120 orang	600	DISNAKER-TRANS
		5	Terbangunya pemukiman transmigrasi	100 rumah	25 rumah	1.875	100 rumah	7.500	100 rumah	7.500	100 rumah	7.500	100 rumah	7.500	425 rumah	31.875	DISNAKER-TRANS
				JUMLAH		1.875	-	11.375	-	11.375	-	11.375	-	11.375	Jumlah	47.375	

BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indicator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu:

a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1. Fokus: Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2. Fokus: Kesejahteraan Masyarakat
3. Fokus: Seni Budaya dan Olahraga.

b. Aspek Pelayanan Umum
1. Fokus: Pelayanan Urusan Wajib
2. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

c. Aspek Daya Saing Daerah
1. Fokus Pada Kemampuan Ekonomi
2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
3. Fokus Iklim Berinvestasi
4. Fokus Sumberdaya Manusia Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9.1. Penetapan Indikator Tenaga Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Pertumbuhan PDRB	3,59 %	3,86 %	4,21 %	4,76 %	5,38 %	5,89 %	5,89 %
1.2	Laju inflasi di Raja Ampat (sementara masih mengaku pada data inflasi kota sorong)	8,13 %	8,11 %	8,09 %	8,07 %	8,04 %	8,01 %	8,01 %
1.3	PDRB per kapita	518,81	517,14	508,69	514,58	516	504,76	504,76
1.4	Pemerataan Pendapatan (Indeks Gini)	0.38	0.38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35
1.5	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,21 %	0,18 %	0,15 %	0,12 %	0,10 %	0,5 %	0,5 %
1.6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	76,38 %	58,90 %	46,35 %	32,50 %	18,80 %	5,75 %	5,75 %
1.7	Angka kriminalitas yang tertangani	95%	96%	97,5 %	98%	98,5 %	98,7 %	98,7 %
Fokus : Kesejahteraan Masyarakat								
1	Pendidikan							
1.1	Angka melek huruf	86,6 %	88%	90%	91%	92,8 %	94,5 %	94,5 %
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	7,26	7,5	7,8	8,3	8,6	9,0	9,0

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.	Angka partisipasi kasar	88,8 %	91%	92%	93%	94%	95%	95%
1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan	66,26 %	67%	69%	70%	72%	75%	75%
1.5.	Angka Partisipasi Murni	58,20 %	59,8 %	62,3 %	65,6 %	69,5 %	73,2 %	73,2 %
1.6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI / Paket A	98,20 %	98,5 %	99%	99,5 %	100%	100%	100%
1.7.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI / Paket B	49,86 %	52,5 %	55,5 %	60%	65%	70%	70%
1.8.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA / SMK / MA/Paket C	26,55 %	28,5 %	32,5 %	37,5 %	43,5 %	50%	50%
2	Kesehatan							
2.1.	Angka kelangsungsungan hidup bayi	90%	93%	94,5 %	96%	97,5 %	99%	99%
2.2.	Angka usia harapan hidup	55	56	57	58	59	60	60
2.3.	Persentase balita gizi buruk	9,09 %	7,10 %	5,25 %	3,80 %	2,10 %	0%	0%
3	Pertanahan							
3.1.	Persentase penduduk yang memilki lahan	3,31 %	4,96 %	6,62 %	8,28 %	9,93 %	11,59 %	11,59 %
4	Ketenagakerjaan							
4.1.	Rasio penduduk yang bekerja	0,62 %	0,74 %	0,78 %	0,82 %	0,86 %	0,88 %	0,88 %
Fokus : Seni Budaya dan Olahraga								
1	kebudayan							
1.1.	Jumlah grup kesenian	7	8	9	10	11	12	57
1.2.	Jumlah gedung	….	1	1	1	1	1	5
2	Pemuda dan Olahraga							

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.	Jumlah klub olahraga	15	5	2	2	2	2	28
2.2.	Jumlah gedung olahraga	1	….	1	1	1	1	5
ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus : Pelayanan Urusan Wajib								
1	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar :							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	94,34 %	95%	96%	97%	98%	99,5 %	99,5 %
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	0,016 %	0,016 %	0,017 %	0,017 %	0,018 %	0,018 %	0,018 %
1.1.3	Rasio guru terhadap murid	0,040 %	0,043 %	0,046 %	0,049 %	0,052 %	0,055 %	0,055 %
1.2.	Pendidikan menengah							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	78,5 %	79,5	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	0,011 %	0,011 %	0,012 %	0,013 %	0,013 %	0,013 %	0,013 %
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	0,092 %	0,098 %	0,10 %	0,10 %	0,11 %	0,11 %	0,11%
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	10,90 %	10,25 %	9,80 %	9,50 %	9,20 %	9,00 %	9,00 %
1.2.5.	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	86,64 %	88%	90%	91%	92,8 %	94,5 %	94,5 %
1.3.	Fasilitas pendidikan							
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	90%	92%	95%	96%	97%	98%	98%

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	90%	92%	95%	96%	97%	98%	98%
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :							
1.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6,4 %	6,5 %	6,6 %	6,7 %	6,8 %	7,0 %	7,0 %
1.5.	Angka Putus Sekolah :							
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI	5,66 %	5%	4%	3%	2%	0,5 %	0,5 %
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs	4,83 %	4%	3%	2%	0,8 %	0,5 %	0,5 %
1.5.3	Angka Putus Sekolah SMA / SMK / MA	38,24 %	38%	37%	36%	35%	33%	33%
1.6.	Angka Kelulusan :							
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD / MI	97,53 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP / MTs	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA / SMK / MA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD / MI ke SMP / MTs	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.5.	Angka melanjutkan (AM) dari SMP / MTs ke SMA / SMK / MA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV	39,6 %	45%	55%	60%	65%	75%	75%
2	Kesehatan							
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	17,81	20	22	23	24	25	25
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik , pustu per satuan penduduk	1,74	1,86	1,9	2,1 %	2,2	2,3	2,3
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,005	0,005	0,007	0,009	0,011	0,014	0,014

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,1	0,1
2.5.	Rasio tenaga medis per satuan	0,74	0,86	0,97	1,09	1,21	1,33	1,33
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	1%	1,5 %	2%	3%	3,5 %	4%	4%
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	65%	70%	75%	80%	90%	100%	100%
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	14,4 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	51%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita Penyakit DBD	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien penyakit DBD	80%	85%	90%	95%	98%	100%	100%
2.13.	Cakupan kunjungan bayi	60%	75%	90%	95%	100%	100%	100%
2.14.	Cakupan puskesmas	79%	87,5 %	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.	Cakupan pembantu puskesmas	25%	29%	37,09 %	45,16 %	53,22 %	61,29 %	61,29 %
3	Pekerjaan Umum							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	188,9	209,9	246,9	289,9	332,9	383,9	383,9
3.2.	Rasio jaringan irigasi	675,5	1.500	1.000	600	600	500	4.875,5
3.3.	Rasoi tempat ibadah per satuan penduduk	3,34	3,34	3,35	3,40	3,45	3,52	3,52
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	67,5 %	72,5 %	78,5 %	85,5 %	95,5 %	98%	98%
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	11,76 %	11,76	12,3	12,5	12,7	13,1	13,1

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	2,5
3.7.	Rasio rumah layak huni	65	72	79	85	93	98	98
3.8.	Rasio permukiman layak huni	91,7	92	93	94	95	96	96
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4	13	10	15	20	25	30	113 Km
3.10.	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui Roda 4)	75	15	25	30	35	40	220 Km
3.11.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	13	10	15	20	25	30	113 Km
3.12.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	3,1	5	10	15	25	35	93,1 Km
3.13.	Sempadan jalan yang dipakai pedagan kaki lima atau bangunan rumah liar	….	….	….	….	….	….	….
3.14.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	….	….	….	….	….	….	….
3.15.	Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	354,5	….	1.000	600	600	500	3.054,5
3.16.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungaai rawan longsor lingkup kewenangan kota	500	….	100	100	100	200	500
3.17.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	354,5	….	1.000	600	600	500	3.054,5
3.18.	Lingkungan pemukiman	36	41	48	55	62	79	79
4	Perumahan							
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	55,75 %	67,50 %	80,25 %	88,75 %	92,50 %	100%	100%
4.2.	Rumah tangga pengguna listrik	82,17 %	82,67 %	83,25 %	84,50 %	90,00 %	100%	100%
4.3.	Rumah tangga ber-sanitasi	84,70 %	87,00 %	89,00 %	90.00%	95.00%	100%	100%

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.	Lingkungan pemukiman kumuh	20%	10%	5%	….	….	….	….
4.5.	Rumah layak huni	670	770	870	970	1.070	1.170	1.170
5	Penataan Ruang							
5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGT	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9
5.2.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	….	….	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukanya	….	….	….	….	….	….	….
6	Perencanaan Pembangunan							
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dng PERDA	….	1	….	….	….	….	1
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dng PERDA/PERKADA	1	1	….	….	….	….	2
6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dng PERKADA	1	1	1	1	1	1	6
6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
7	Perhubungan							
7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	….	36.818	21.504	21.504	21.504	21.504	122.834
7.2.	Rasio ijin trayek	….	0,00014	0,00019	0,0002	0,00022	0,00025	0,00025
7.3.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	….	….	….	31	38	48	48
7.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Utara/Terminal Bis	10	1	1	1	1	1	15
7.5.	Angkatan darat	0,0048	0,0051	0,0053	0,0055	0,0057	0,0059	0,0059
7.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	….	….	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	….	….	….	3	3	3	3
7.8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	….	….	….	370.00	370.00	370.00	370.00
7.9.	Pemasangan Rambu-rambu	70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
8	Linggkungan Hidup							
8.1.	Persentase penanganan sampah	40%	50%	75%	80%	90%	100%	100%
8.2.	Persentase Penduduk berakses air minum	65%	70%	80%	90%	95%	100%	100%
8.3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata	60%	65%	75%	80%	90%	100%	100%
8.4.	Pencemaran status mutu air	30%	25%	20%	10%	5%	….	….
8.5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
8.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	75%	90%	95%	100%	100%	100%	100%
8.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	30%	40%	50%	60%	80%	100%	100%
8.8.	Penegakan hukum lingkungan	90%	90%	95%	99%	99%	100%	100%
9	Pertanahan							
9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	….	….	1,49	1,83	2,16	2,49	2,49
9.2.	Penyelesaian kasus tanah negara	….	….	….	….	….	….	….
9.3.	Penyelesaian izin lokasi	….	….	….	….	….	….	….
10	Kependudukan dan catatan sipil							
10.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,76	0,80	0,82	0,85	0,88	0,90	0,90
10.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	70%	73%	75%	78%	80%	84%	84%

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.3.	Rasio pasangan berakte nikah	75%	76%	77%	78%	79%	80%	80%
10.4.	Kepemilikan KTP	44,7%	48%	55%	60%	65%	80%	80%
10.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	5203	100	125	150	175	200	5953
10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	….	….	ada	ada	ada	ada	ada
10.7.	Penetapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20,63 %	22,75 %	23,80%	25,90%	28,35 %	30,15 %	30,15 %
11.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swata	33,33 %	33,88%	34,00%	34,30%	34,50%	35,00%	35,00%
11.3.	Rasio KDRT	0,0001 %	….	….	….	….	…	….
11.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	….	….	….	….	….	….	….
11.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	30,27 %	30,80 %	31,50 %	32,00 %	32,50 %	33,00 %	33,00 %
11.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	….	….	….	….	….	….
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,34	0,37	0,40	0,44	0,48	0,52	0,52
12.2.	Rasio akseptor KB	94%	95%	96%	97%	98%	99%	99%
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	94%	95%	96%	97%	98%	99%	99%
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	49,27 %	43,20 %	38,11 %	37,35 %	33,26 %	29,74 %	29,74 %
13	Sosial							
13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	2	….	….	1	1	1	5

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	90%	95%	98%	100%	100%	100%	100%
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	90%	95%	98%	100%	100%	100%	100%
14	Ketenagakerjaan							
14.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	65%	70%	75%	80%	85%	95%	95%
14.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	51,4 %	27,7 %	21,6 %	15,7 %	7,6 %	5,0 %	5,0 %
14.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	65%	70%	75%	80%	85%	95%	95%
14.4.	Pencari kerja yang ditempatkan	9,68 %	18,50 %	32%	39%	45,70 %	55,65 %	55,65 %
14.5.	Tingkat penganguran terbuka	35%	30%	25%	20%	10%	5%	5%
14.6.	Keselamatan dan perlindungan	85,7 %	88,8 %	91,8 %	94,7 %	97,4	98,5 %	98,5 %
14.7.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	….	….	….	….	….	….	….
15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
15.1.	Persentase koperasi aktif	90%	94%	95%	96%	98%	99%	99%
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	40	58	65	75	90	100	428
15.3.	Jumlah BPR/LKM	….	….	….	1	….	1	2
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil	98%	99%	99%	99%	100%	100%	100%
16	Penanaman modal							
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	….	….	1	3	4	4	12
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PPMDN/PMA)	….	….	3 M	10 M	15 M	15 M	43 M
16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	….	….	150	166,6	187,7	200	200

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	….	….	50%	65%	75%	85%	85%
17	Kebudayaan							
17.1.	Penyelenggara festival seni dan budaya	1	1	2	2	2	2	10
17.2.	Sarana penyelenggara seni dan budaya	1	1	1	1	1	1	6
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	90 %	93%	95 %	98 %	99 %	99 %	99 %
18	Kepemudaan dan Olahraga							
	Jumlah organisasi pemuda	2	4	1	1	1	1	10
	Jumlah organisasi olahraga	19	….	1	1	1	1	23
	Jumlah kegiatan kepemudaan	1	9	3	3	3	3	22
	Jumlah kegiatan olahraga	1	3	5	5	5	5	24
	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0,02	0,02	0,04	0,07	0,09	0,09	0,11
	Lapangan olahraga	3,45	3,52	3,64	3,76	3,88	3,99	3,99
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	….	….	1	1	1	1	4
	Kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	1	1	1	1	6
25	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
25	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	14,11	29,17	30,34	31,52	32,59	33,87	33,87

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk	124,68	127,03	131,73	138,79	145,85	155,26	155,26
	Rasio Pos SisKamling per jumlah desa/kelurahan	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	0,32
	Pertumbuhan ekonomi	**3,59 %**	3,86 %	4,21 %	4,76 %	5,38 %	5,89 %	5,89 %
	Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan	23,62 %	20%	17%	14%	11%	8%	8%
	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	….	….	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Penegakan PERDA	80%	87,5 %	88,8 %	90%	91,6 %	94,5 %	94,5 %
	Cakupan patroli petugas Satpol PP	730	730	730	730	730	730	730
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	80%	87,5 %	88,8 %	90%	91,6 %	94,5 %	94,5 %
	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	1,24 %	1,27	1,31 %	1,38 %	1,45 %	1,55 %	1,55 %
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	….	….	….	0,002 %	….	….	0,002 %
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	….	….	….	100%	….	….	100%
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	61,8 %	64,5 %	72,5 %	80,6 %	88,7 %	96,7 %	96,7 %
	Sistem Informasi Manajemen Pemda	….	….	1	1	1	1	4
	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	….	….	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21	Ketahanan Pangan							
	Regulasi ketahanan pangan	….	….	….	….	Ada	Ada	Ada
	Ketersediaan pangan utama	70,5 %	75,8 %	80,9 %	84,5 %	89,5 %	94,5 %	94,5 %

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rasio ketersediaan daya listrik	31,01 %	40%	50%	60%	75%	90%	90%
	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	26%	35%	45%	60%	75%	90%	90%
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	17,2 %	19%	22%	25%	28%	33%	33%
Fokus Iklim Berinvestasi								
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
	Angka kriminalitas	0,19 %	0,17 %	0,16 %	0,14 %	0,12 %	0,09 %	0,09 %
	Jumlah demo	2	1	1				4
	Lama proses perijinan	5	5	5	4	3	3	3
	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	8	9	10	10	11	12	12
	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	3	4	3	2	3	4	19
	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	1,16 %	1,16 %	1,16 %	3,22 %	3,22 %	3,22 %	3,22 %
Fokus Sumberdaya Manusia								
1	Ketenagakerjaan							
	Rasio lulusan SI/S2/S3	0,64 %	0,68 %	0,77 %	0,84 %	0,94 %	1,05 %	1,05 %
	Rasio ketergantungan	61,70 %	59,86 %	55,70 %	52,09 %	48,91 %	44,81 %	44,81 %

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bendahara/ terminal per tahun							
2	Penataan Ruang							
	Ketaatan terhadap RTRW		95%	99%	100%	100%	100%	100%
	Luas wilayah produktif	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%
	Luas wilayah industri	14,13 %	14,13 %	14,13 %	14,13 %	14,13 %	14,13 %	14,13 %
	Luas wilayah kebanjiran	22,79 %	22,79 %	22,79 %	22,79 %	22,79 %	22,79 %	22,79 %
	Luas wilayah kekeringan	35,55 %	35,55 %	35,55 %	35,55 %	35,55 %	35,55 %	35,55 %
	Luas wilayah perkotaan	10,23 %	10,23 %	10,23 %	10,23 %	10,23 %	10,23 %	10,23 %
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persediaan							
	Jenis dan jumlah bank dan cabang	2		1	1	1	1	6
	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	1		1	1	1	1	5
	Jenis,kelas,dan jumlah penginapan / hotel	10%	20,5 %	32%	44,5 %	57,5 %	71%	71%
4	Lingkungan Hidup							
	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	55%	60%	70%	75%	85%	95%	95%
	Komunikasi dan Informatika							

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	100	98	98	96	95	95
7.3	Pertumbuhan Industri	15%	20%	25%	25%	30%	35%
7.4	Cakupan bina kelompok pengrajin	16%	13,33 %	14,28 %	15%	15,55 %	16%
	Ketransmigrasi						
	Transmigrasi swakarsa						
	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB						
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
Fokus Pada Kemampuan Ekonomi							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persediaan						
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	1.734,08	1.775,81	1.787,35	1.829,54	1.876,40	1.933,33
	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	41,02 %	41,39 %	41,80 %	42,23 %	42,58 %	42,81 %
	Produktivitas total daerah	22.053,63	21.428,57	21.272,73	21.478,26	21500	21.20
2	Pertanian						
	Nilai tukar petani	92,35%	93,75%	95,55%	97,15%	98,60%	100,60%
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur							
1	Perhubungan						
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,13	0,114	0,15	0,16	0,17	0,18

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kerusakan Kawasan Hutan	….	….	….	….	….	….	….
	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
3.	Energi dan SDM							
3.1	Pertambangan tanpa ijin	….	….	….	….	….	….	….
3.2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	51,89	51,89	51,92	51,92	51,92	51,92	51,92
4	Pariwisata							
4.1	Kunjungan wisata	4.507	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	39.507
4.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	….	….	….	0,1	0,1	0,1	0,1
5	Kelautan dan Perikanan							
	Produksi Perikanan	222.354	244.589	269.047	295.951	325.546	358.100	358.100 Kg
	Konsumsi ikan	186.068	204.674	224.141	247.655	272.420	299.662	299.662 Kg
	Cakupan bina kelompok nelayan	62	68	74	81	89	97	97
	Produksi Perikanan Kelompok nelayan	185.175	203.692	224.061	246.467	271.113	298.224	298.224
6	Perdagangan							
6.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	2,61	2,65	2,70	2,75	2,78	2,80	2,80
6.2	Ekspor Bersih Perdaganan	….	….	….	10	15	20	45 Ton
6.3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	….	….	20	30	35	50	135
7	Perindustrian							
7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	0,24	0,24	0,25	0,25	0,27	0,28	0,28

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah surat kabar nasional/lokal	7	….	1	1	1	1	11
	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	1	….	1	1	1	1	5
	Web site milik pemerintah daerah	….	….	1	….	….	….	1
	Pameran/expo	1	1	1	1	1	1	6
26	Perpustakan							
	Jumlah perpustakaan	5	….	4	5	5	5	24
	Jumlah pengujung perpustakaan per tahun	0,19	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,93	0,94	0,96	0,97	0,98	0,99	0,99
Fokus Pelayanan Urusan Pilihan								
1.	Pertanian							
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	3,4	3,7	4	4,25	4,5	4,7	4,7 Ton
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	33,19 %	33,24 %	33,24 %	33,28 %	33,32 %	33,35 %	33,35 %
	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	2,71 %	2,75 %	2,75	2,75 %	2,75 %	2,75 %	2,75 %
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	1,20%	1,25 %	1,25 %	1,35 %	1,40 %	1,45 %	1,45 %
	Kontibusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	….	….	….	0,05%	0,03%	0,01%	0,01%
	Cakupan bina kelompok petani	138	30	40	60	80	100	448
2.	Kehutanan							
	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	20 Ha	48 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,7	0,7	0,8	0,9	0,10	0,10	0,10
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	0,99	0,99
	Jumlah LSM	3	3	4	5	6	7	7
	LPM Berprestasi	70 %	70%	75 %	85 %	90 %	95 %	95 %
	PKK aktif	95%	98 %	99 %	100 %	100 %	100 %	100%
	Posyandu aktif	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	80%	84%	88%	94%	98%	99%	99%
	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	60%	65%	70%	75%	80 %	90%	90%
23	Statistik							
	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
25	Kearsipan							
	Pengelolaan arsip secara baku	....	....	80%	85%	93%	99%	99%
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	....	....	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
25	Komunikasi dan Informasi							
	Jumlah jaringan komunikasi	0,5	0,5	0,75	0,75	1	1	1
	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,007 %	0,009 %	0,014 %	0,021 %	0,025 %	0,035 %	0,035 %

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Raja Ampat 2011 -2015 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 -2030. RPJMD adalah penjabaran dari RPJPD yang memuat visi dan misi Bupati Tahun 2011 - 2015. Oleh karena itu diperlukan pedoman transisi dan kaidah dalam pelaksanaan RPJMD ini.

10.1. Pedoman Transisi

Untuk tetap melanjutkan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat tahun 2015 dengan RPJMD untuk masa berikutnya (Tahun 2016-2021), maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015 selain menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 -2015 | 337 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015 penting untuk memasukkan agenda penyusunan RPJMD 2016-2021 sebagai salah satu prioritas. Selain itu juga, Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2015 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2016, maka RPJMD Kabupaten Raja Ampat 2011 - 2015 dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya pada program-program pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan serta kemaslahatan masyarakat sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD untuk masa berikutnya.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 -2015 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan dan perencanaan penganggaran. RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 -2015 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Raja Ampat untuk tahun 2011 , tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui BAPPEDA Kabupaten Raja Ampat berkewajiban untuk mensosialisasikan dokumen RPJMD Kabupaten Raja Ampat kepada seluruh aktor pembangunan dan pemangku kepentingan daerah sehingga terbangun kesepahaman mengenai sasaran-sasaran pembangunan yang ingin dicapai dan juga arah kebijakan untuk mencapainya.
b. Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk mendorong dan mengarahkan semua sumberdaya yang ada untuk mencapai visi dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan yang terdapat pada RPJMD 2011 -2015.
c. Semua SKPD Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Raja Ampat, termasuk pelaku usaha, diwajibkan untuk mendukung dan melaksanakan arah kebijakan dan program-program yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2011 -2015 secara konsisten dan penuh komitmen sehingga dapat berkontribusi bagi pencapaian visi jangka menengah Kabupaten Raja Ampat.
d. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat berkewajiban mengkoordinasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Raja Ampat 2011 -2015.
e. Semua SKPD di Kabupaten Raja Ampat berkewajiban untuk menyusun rencana strategis berjangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 -2015.
f. SKPD melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Renstra SKPD. Dalam menyusun Renstra SKPD wajib berpedoman pada Dokumen RPJM Daerah karena merupakan satu kesatuan dokumen Perencanaan Pembangunan yang tidak dapat terpisahkan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 -2015
g. SKPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD.
h. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Raja Ampat 2011 -2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Raja Ampat berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Raja Ampat 2011 -2015 ke dalam Rencana Strategis SKPD Kabupaten Raja Ampat.

i. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan capaian RPJMD 2011 -2015 dilakukan oleh Bappeda pada setiap tahunnya untuk memastikan adanya konsistensi dalam pelaksanaan dan untuk mengetahui capaiancapaian yang telah dihasilkan.

j. Apabila melalui pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, penyimpangan, atau terdapat perubahan kondisi tertentu yang perlu diperhatikan maka Kepala Bappeda Raja Ampat berkewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan atau penyesuaian baik terhadap dokumen RPJMD ataupun pelaksanaannya.

BUPATI RAJA AMPAT
CAP/TTD
MARCUS WANMA